



1. BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai entitas pelaporan berkewajiban pula untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 Pasal 191 ayat (2) yang mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Selanjutnya pasal 194 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



Setiap entitas pelaporan termasuk Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diamanahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2022 sehingga akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan sebagai pihak yang memberikan amanah maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan termasuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergeneration Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Dari sini dapat diketahui apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung pengeluaran tersebut (dengan melihat informasi yang berkenaan dengan kewajiban/hutang daerah).

Kemudian pada Paragraf 26 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
- n. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
- o. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- p. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.



- q. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Capaian Kinerja Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Capaian Kinerja Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.2 Persentase Penduduk Miskin
 - 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.5 PDRB perkapita
 - 2.1.6 Laju Inflasi
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 2.2.1.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah
 - 2.2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah
 - 2.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
 - 2.2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
 - 3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah
 - 3.2.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah dan Solusinya
 - 3.2.3 Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah dan Solusinya
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi
 - 4.3 Kebijakan Pengukuran
 - 4.3.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.3.2 Investasi Jangka Pendek
 - 4.3.3 Piutang
 - 4.3.4 Beban Dibayar Dimuka
 - 4.3.5 Persediaan



- 4.3.6 Aset Untuk Dikonsolidasikan
 - 4.3.7 Investasi Jangka Panjang
 - 4.3.8 Aset Tetap
 - 4.3.9 Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)
 - 4.3.10 Penyusutan
 - 4.3.11 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 4.3.12 Dana Cadangan
 - 4.3.13 Aset Lainnya
 - 4.3.14 Amortisasi Aset Lainnya
 - 4.3.15 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 4.3.16 Utang Bunga (Accrued Interest)
 - 4.3.17 Utang Jangka Pendek Lainnya
 - 4.3.18 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - 4.3.19 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - 4.3.20 Pendapatan Diterima Dimuka
 - 4.3.21 Utang Beban
 - 4.3.22 Utang Jangka Pendek Lainnya
 - 4.3.23 Utang Dalam Negeri
 - 4.3.24 Ekuitas
 - 4.3.25 Pendapatan – LRA
 - 4.3.26 Belanja
 - 4.3.27 Transfer
 - 4.3.28 Pembiayaan
 - 4.3.29 Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 4.3.30 Pendapatan–LO
 - 4.3.31 Beban
 - 4.4 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi
 - 4.4.1 Koreksi Kesalahan
 - 4.4.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/ Penjelasan Laporan SAL
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Neraca / Penjelasan Pos-pos Neraca Perubahan SAL



- 5.3.1. Aset
- 5.3.2. Kewajiban
- 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional / Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan-LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas / Penjelasan Pos – Pos Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Saldo Awal
 - 5.6.2. Surplus / Defisit LO
 - 5.6.3. Koreksi Kesalahan
- Bab VI Penggunaan BTT untuk Penanganan Covid-19
- Bab VII Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 7.1. Umum
 - 7.2. Kondisi Geografis
 - 7.3. Gambaran Umum Demografis
 - 7.4. Dokumen Perencanaan
- Bab VIII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dan juga merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Capaian Indikator makro Kabupaten Pemalang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)	Perubahan (Persen poin)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,56	67,19	0,93	-
2	Persentase penduduk Miskin (%)	16,56	15,06	-	-9,96
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,71	6,43	-	-4,35
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	5,08	-	15,75
5	PDRB ADHB per Kapita per tahun (Juta Rupiah)	18,49	19,96	7,36	-
6	Laju Inflasi (%)	1,53	6,31	-	75,75

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

IPM Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 adalah 63,7, tahun 2016 sebesar 63,7, tahun 2017 sebesar 65,04,



tahun 2018 sebesar 65,67, tahun 2019 sebesar 66,32. Namun pada tahun 2020 IPM Kabupaten Pemalang tidak bergeser sedikitpun dan tetap berada di angka 66,32, salah satu penyebabnya adalah adanya wabah pandemic *Covid-19* tetapi pada Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,56 dan 67,19.

Pembangunan Manusia di Kabupaten Pemalang terus mengalami kemajuan walaupun belum signifikan, terlebih jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2022 ini Kabupaten Pemalang menduduki peringkat ke dua terndah setelah Kabupaten Brebes. Hal ini menjadi pekerjaan rumah lintas sektoral, khususnya dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan peningkatan tingkat pengeluaran per kapita.

Salah satu faktor pengungkit HLS adalah ketersediaan perguruan tinggi, yang pada akhirnya berpengaruh pada data jumlah penduduk yang memiliki tingkat Pendidikan di atas SMU. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan IPM Kabupaten Pemalang.

Faktor lain yang berpengaruh adalah tingkat pengeluaran per kapita. Tingkat perekonomian yang relatif rendah, perilaku dan budaya konsumsi masyarakat Pemalang juga menjadi aspek yang turut menyumbang masih rendahnya IPM di Kabupaten Pemalang.

Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan beberapa langkah yang dijalankan masing-masing perangkat daerah sebagaimana berikut:

Dinas Kesehatan

1. Penanggulangan kasus *Covid-19* secara terpadu dan meningkatkan cakupan vaksinasi *booster Covid-19*
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
3. Menurunkan kasus kematian ibu dan bayi serta kasus balita stunting.
4. Percepatan peningkatan keluarga sehat melalui Program PIS-PK.
5. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
6. Penguatan pelaksanaan inovasi yang sudah berjalan serta dan replikasi inovasi bidang kesehatan yang dinilai efektif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan kesetaraan, baik Paket A, B maupun C.
2. Melakukan pendataan anak tidak sekolah pada 25 desa di 5 kecamatan, dan hingga saat ini telah berhasil mengembalikan 211 Anak untuk kembali bersekolah melalui PKBM.
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholder yang terkait pendidikan.
4. Mengikut sertakan desa, tokoh masyarakat dan agama dalam upaya pemberian pemahaman pada masyarakat bahwa pendidikan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan kemampuan baca tulis dan hitung, namun juga sebagai jembatan untuk peningkatan kualitas hidup.

Adapun kendala yang dialami sehingga target IPM pada Tahun 2022 belum tercapai adalah karena masih adanya program yang belum dilaksanakan secara maksimal yang meliputi:

1. Mengembalikan anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah untuk kembali bersekolah;
2. Memperluas cakupan layanan Puskesmas;
3. Meningkatkan peran SMP/MTs dan SMA/SMK/MA swasta untuk ikut serta menampung lulusan SD dan SMP yang akan melanjutkan sekolahnya sebagai upaya untuk meningkatkan rasio jumlah sekolah dan jumlah lulusan. Upaya tersebut untuk meningkatkan indikator komposit RLS.

2.1.2. Persentase Penduduk Miskin

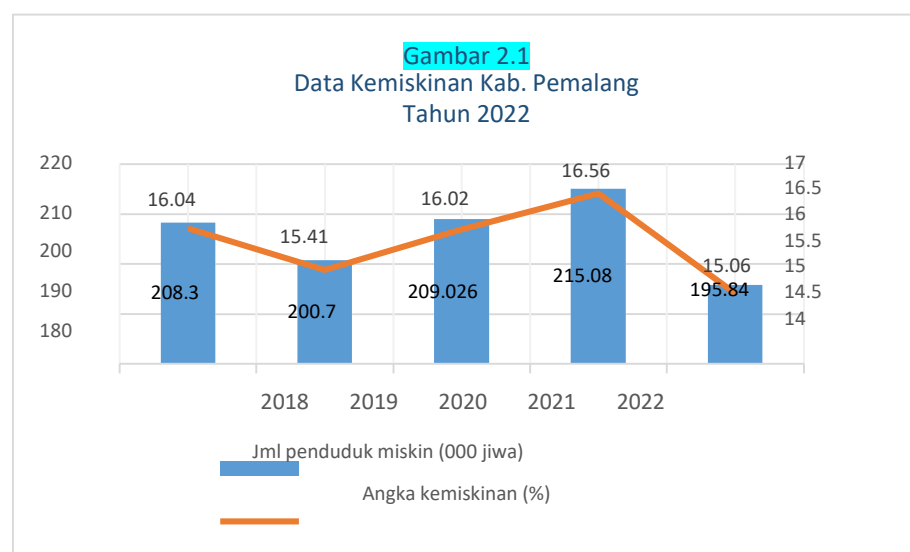
Penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang sebelum masa pandemi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, persentase penduduk miskin pada Tahun 2015 sebesar 18,44%, tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 18,30%, Tahun 2017 turun lagi menjadi 17,34%, Tahun 2018 turun menjadi 16,04%, dan Tahun 2019 turun lagi menjadi



15,41%. Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan menjadi 16,02% dan pada Tahun 2021 juga masih mengalami kenaikan menjadi 16,56% Terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin ini salah satu penyebabnya adalah adanya wabah pandemi *Covid-19*. Tetapi pada Tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 15,06% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 195.840 jiwa artinya hingga akhir Tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang berkurang sebanyak 19.240 jiwa dari tahun sebelumnya sebanyak 215.080 jiwa.

Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, garis kemiskinan penduduk Kabupaten Pemalang menunjukkan perubahan positif, dimana di Tahun 2022 nilai pengeluaran kebutuhan minimum mencapai Rp429.549,00 rupiah/kapita/bulan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata kemampuan konsumsi penduduk.

Pasca Pandemi *Covid-19* tampak adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh penurunan kemiskinan, baik dari sisi jumlah, garis kemiskinan, maupun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang naik peringkat ke-5 dari bawah, naik 1 peringkat dibandingkan di tahun 2021 yang menduduki peringkat 32. Meski demikian, Kabupaten Pemalang masih memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, karena Kabupaten Pemalang termasuk dalam 5 kabupaten dengan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Tengah.





Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022 telah melakukan beberapa langkah penanganan kemiskinan, antara lain:

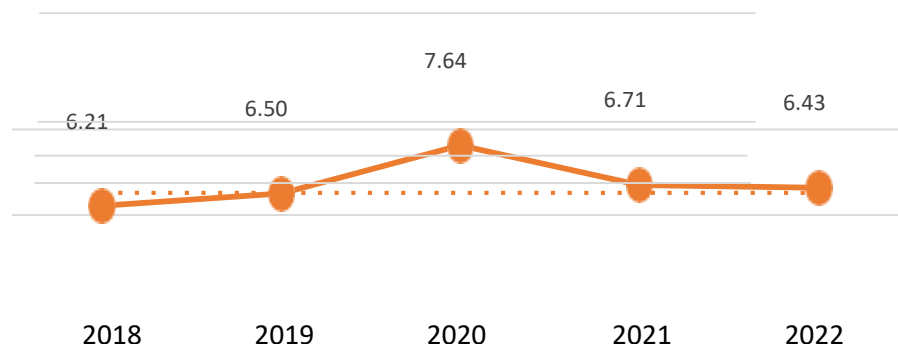
1. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu Jawa Tengah di 223 Desa/Kelurahan dengan melibatkan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
2. Menerapkan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa/Kelurahan Dampingan menuju Desa/ Kelurahan Aman dan Sejahtera.
3. Menetapkan Desa Asemdayong Kecamatan Taman Sebagai Desa Penanganan Kemiskinan Tuntas.
4. Upaya penuntasan Anak tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah melalui program "Njuh Sekolah Maning".
5. Penanganan Stunting melalui Aksi Konvergensi Stunting dengan beberapa inovasi, diantaranya “Gemari Ceting Kayu” (Gerakan Makan Ikan Cegah Stunting Kakang Mbakyu), “Klantung” (Kelompok Laki-laki Anti Stunting), serta “Gelang Anting” (Gerakan Penanggulangan Stunting).
6. Menggiatkan Kembali Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJS LP).
7. Mengajukan permohonan Data BNBA Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai data yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
8. Strategi peningkatan pendapatan yang dilakukan melalui pemberdayaan sosial dengan kebijakan pengembangan potensi desa, pemberdayaan UMKM, pembinaan wirausaha muda, berbagai pelatihan dan kemudahan investasi.
9. Strategi pengurangan kantong kemiskinan dilakukan dengan penyediaan *universal access*, penanganan kawasan kumuh dan peningkatan konektivitas antar wilayah serta program BSPS, Kotaku, Pamsimas, dan pelibatan CSR.
10. Melakukan intervensi penanganan pelayanan dasar melalui kolaborasi program - program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.



2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Persentase TPT di Kabupaten Pemalang bergerak fluktuatif. Dari data yang diperoleh pada Tahun 2015 berada pada angka 7,13%, pada Tahun 2016 menurun menjadi 6,53%, Tahun 2017 turun lagi menjadi 5,59%, namun pada tahun-tahun berikutnya bergerak naik yaitu Tahun 2018 menjadi 6,02%, Tahun 2019 menjadi 6,5% dan Tahun 2020 menjadi 7,64%. Kenaikan ini dipicu antara lain banyaknya SMK yang tidak menyediakan jurusan sesuai kebutuhan di pasar kerja akan tetapi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 6,71 dan 6,43.

Gambar 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kab. Pemalang Tahun 2018-2022



Pada Tahun 2022, jumlah pengangguran di Kabupaten Pemalang adalah sebesar **45.587 orang**, bertambah 11.199 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Tahun 2021 pun meningkat menjadi **687.625 orang** dari 645.103 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,08%. TPT **6,63%** jika disandingkan dengan target Tahun 2022, maka capaian kinerjanya adalah sebesar **109,80%**, dan bahkan telah melampaui target akhir RPJMD sebesar **1,78%**.



Di sisi lain, peningkatan jumlah angkatan kerja juga harus disikapi dengan strategi yang tepat. Lebih lanjut, penurunan angka pengangguran ini ternyata juga tidak dibarengi dengan peningkatan indikator-indikator kesejahteraan lainnya, seperti misalnya tingkat pengeluaran per kapita. Di Tahun 2022, pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Pemalang tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya, dapat diasumsikan bahwa terjadi penurunan pendapatan pada masyarakat yang bekerja.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka antara lain:

1. Perusahaan di Kabupaten Pemalang sudah mulai pulih kembali sehingga perusahaan-perusahaan mulai beroperasi dan mulai membuka lowongan kerja kembali.
2. Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) makin berkurang.

Adapun langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menurunkan tingkat pengangguran antara lain:

1. Memperluas Kesempatan Kerja melalui pemberian Pelatihan Berbasis Kewirausahaan, pelatihan berbasis kompetensi;
2. Memperluas pemerataan Kesempatan Kerja dengan mengoptimalkan Informasi Bursa Kerja;
3. Melaksanakan *Job Canvassing*;
4. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
5. Melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang untuk membuka lowongan kerja.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan



ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang mengalami pertumbuhan, dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebesar 5,58%, sedangkan Tahun 2016 melambat menjadi 5,43%, Tahun 2017 naik menjadi 5,61% Tahun 2018 naik menjadi 5,69% dan menjadi 5,8% pada Tahun 2019. Namun pada Tahun 2020 dikarenakan adanya *pandemic Covid-19* pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang terkena dampak dan mengalami kontraksi sebesar 0,61%. Ditahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang Kembali pulih dan meningkat menjadi 4,19% dan 5,08%.

2.1.5. PDRB perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Pendapatan perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB yang dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pemalang atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada



Tahun 2015 PDRB perkapita tercatat sebesar 14,46 Juta Rupiah per tahun, secara nominal nilai terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2017 mencapai 19,65 juta rupiah per tahun. Namun di Tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita menjadi 17,60 juta per tahun hal ini merupakan dampak perekonomian yang melemah akibat adanya pandemi *Covid-19* yang melanda hampir diseluruh belahan dunia. Sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 ini perekonomian mulai pulih Kembali dan PDRB per kapita tercatat naik menjadi 18,49 juta rupiah dan 19,96 juta rupiah per tahun.

2.1.6. Laju Inflasi

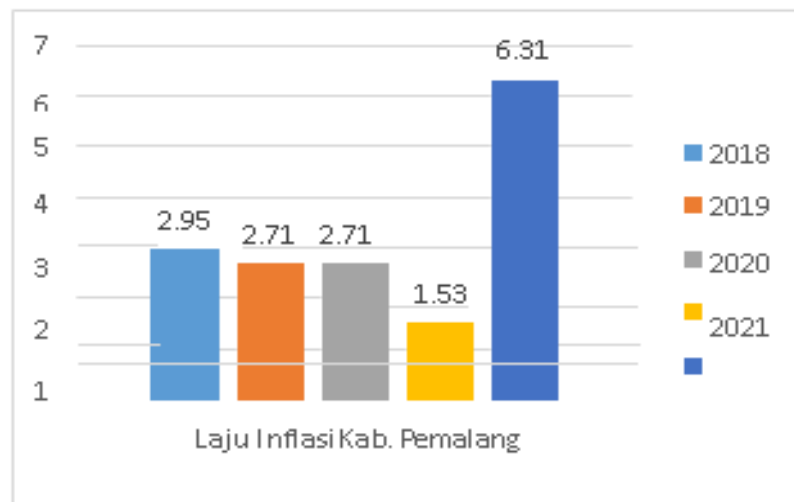
Salah satu indikator ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan harga barang dan jasa secara umum adalah tingkat inflasi. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus.

Sejak Tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang mengindik kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran Survey Biaya Hidup (SBH) pada 6 kota di Jawa Tengah. Laju inflasi di Tahun 2022 mencapai **6,31%**, jauh di atas target sebesar 2,36%, sehingga capaian kinerja tahun ini mencapai minus **(67,37)%**.

Penyebab utama inflasi adalah kenaikan harga beras, telur ayam ras, emas perhiasan, minyak goreng, dan daging ayam ras. Adapun penahan utama inflasi adalah penurunan harga angkutan udara, bayam, jeruk, kangkung, dan kacang panjang.

Laju inflasi tahun ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya yang berada di posisi rerata 2,75%. Kondisi ini tentunya mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pemalang.

Gambar 2.3
Laju Inflasi
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 -2022



Beberapa langkah dan strategi telah dilakukan guna menekan laju inflasi yang terus meningkat, baik pada level kebijakan, level teknis, hingga langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, yang meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan operasi pasar khususnya pada tiga komoditas (beras, gula, dan minyak goreng) guna monitoring stabilitas harga bahan pokok;
2. Meluncurkan program penanganan dampak inflasi dengan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial (Perlinsos) untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2022 sebesar 2% (Rp5.755.975.000,00) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dengan rincian:
 - Bansos kepada nelayan: Rp1,8 miliar
 - Bansos kepada PKL dan UMKM: Rp1 miliar
 - Padat karya: Rp1,65 miliar
 - Bansos OJOL, Organda, Ojek Pangkalan dan Bansos Lainnya: Rp1,3 miliar
3. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah secara rutin di titik daerah rawan kemiskinan.
4. Himbauan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang untuk membatasi diri pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif. Sedangkan untuk ketergantungan terhadap kebutuhan pokok sebetulnya ada solusi alternatif adalah barang substitusi (barang pengganti lain).



5. Himbauan untuk menanam sayur pada masing-masing rumah guna menjamin ketersediaan bahan pangan serta membangun ketahanan pangan rumah tangga. Harapannya, dengan pemenuhan bahan pangan sayur pada level rumah tangga, maka potensi inflasi yang disebabkan oleh kelangkaan bahan pokok dapat diminimalisir.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.2.1.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan dan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh penerimaan daerah dalam APBD termasuk di dalamnya pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya, maka arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan, adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran basis data, strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutakhiran basis data obyek maupun wajib pajak.
2. Penataan regulasi, strategi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi



perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak dan retribusi, serta untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola, strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan pengelolaan PAD.
4. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi, strategi ini ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung dalam peningkatan PAD. Selain penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Nomor 910/3248 dan Nomor 170/2597 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:
 - i. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Nomor Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Nomor Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

- ii. Penetapan target pajak daerah harus berdasarkan data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- iii. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi informasi.
- iv. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.



- v. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- vi. Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program JKN.
- vii. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan sebagian untuk penyediaan penerangan jalan.
- viii. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ix. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi Tahun 2022, tingkat inflasi Tahun 2022, dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- xi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang



bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- xii. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- xiii. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- xiv. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi secara bertahap.
- xv. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan



retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- xvi. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - xvii. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi: (a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung; (b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; (c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan (d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
 - xviii. Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional dengan berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :



- i. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- ii. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- iii. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- iv. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, dan/atau
- v. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran lain-lain PAD yang sah:

Penganggaran lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:



a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(1) Dana Perimbangan, yang terdiri atas rincian objek:

(a) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

i. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak, meliputi: DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, serta DBH Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) meliputi: DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi.

ii. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Transfer Khusus, terdiri atas:

i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan

ii. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(2) Dana Insentif Daerah (DID)

(3) Dana Desa

Terkait dengan Transfer Pemerintah Pusat, dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, telah dianggarkan dengan menyesuaikan pagu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun



2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

b) Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil bersumber dari bagi hasil pajak provinsi yang dianggarkan berdasarkan penetapan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, serta kurang bayar tahun anggaran 2021 yang akan disalurkan pada tahun anggaran 2022 berdasarkan pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan berdasarkan penetapan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

2.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan



Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang 2022 sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022. Hasil dari penetapan besaran alokasi belanja daerah selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA- Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 selain diprioritaskan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*, juga diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, terutama ditekankan untuk pemenuhan anggaran kegiatan dengan tahun jamak, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan.
- 2) Belanja Daerah diupayakan untuk mendukung tema dan prioritas Pembangunan Nasional (mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial), Provinsi Jawa Tengah (meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM) dan prioritas pembangunan daerah melalui RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- 3) Pemulihan ekonomi melalui dukungan pada pemberian



pinjaman nol persen bagi Usaha Kecil Mikro.

- 4) Pencapaian Visi Misi dan Program Prioritas Daerah Desa Wisata (DEWI), Desa Sinergi (DESI), Desa Digital (DEDI) dan Kota Industri (KOIN).
- 5) Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- 6) Penyediaan anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain peningkatan kualitas SDM di bidang perekonomian potensial di Kabupaten Pemalang.
- 7) Pembangunan yang mendukung pencapaian IPM dengan memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur.
- 8) Pendanaan pelaksanaan urusan wajib yang memiliki standar pelayanan minimal untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam hal kebijakan alokasi belanja wajib, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan berikut ini:

- 1) Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari APBD.
- 2) Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan paling sedikit 10% dari APBD.
- 3) Alokasi Anggaran belanja infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum, paling sedikit 25%.
- 4) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak.
- 5) Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10%.
- 6) Alokasi Anggaran Belanja Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar 37,5% dari bagian pajak rokok yang diterima pemerintah daerah.
- 7) Alokasi Anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa



terendah yang diterima desa atau dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, meliputi :

1. Belanja Pegawai

- i. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- iii. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan



kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- v. Penganggaran tambahan penghasilan kepada PNS sesuai kemampuan keuangan daerah dan telah memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- vi. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu



unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- vii. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. Belanja barang dan jasa dilaksanakan dalam rangka program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati Pemalang, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2021;



- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaranprogram, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam angka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2022;
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerah denganmanfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerah dengan skema ganda.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:



- (1) Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak anggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada perangkat daerah masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Penggunaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.



Terkait kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dapat dilakukan di luar wilayah provinsi/kabupaten Pemalang. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19*, maka penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya masih dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi. Apabila penyelenggaraan tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* (dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi), maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Covid-19*.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- j) Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar



negeri, dilakukan secara selektif dan frekuentatif dengan jumlah hari dan orang dibatasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Lebih lanjut, perjalanan dinas ini memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain (sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang dijabarkan dalam RKPD), dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dianggarkan karena tidak memiliki hutang.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Kabupaten Pemalang karena pada Tahun 2022 tidak ada kebijakan pemberian subsidi.



5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pemalang. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan



Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp320.302.500,00;
 2. Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp176.341.500,00;
 3. Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp119.035.500,00;
 4. Belanja Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp118.639.500,00;
 5. Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar Rp92.838.000,00;
 6. Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp80.989.500,00;
 7. Belanja Hibah kepada Partai Nasional Demokrat sebesar Rp25.768.500,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial
- Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang tahun 2022 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat secara selektif dan sifatnya tidak secara terus menerus. Belanja bantuan sosial ini bertujuan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu



bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) penggunaan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut sebesar harga beli atau bangun dari aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pemalang memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan



peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a) Belanja modal tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan seluruh bangunan dan gedung yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai



dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan



secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan, antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pengeluaran daerah lainnya. Pengeluaran-pengeluaran ini apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau masyarakat. Pengeluaran-pengeluaran ini juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022. Pengeluaran daerah lainnya digunakan



untuk mendanai:

- a) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) keperluan mendesak; dan/atau
- c) pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

(1) Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang kepada pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang pada



Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Pemalang pada akhir Tahun Anggaran 2021, kelebihan pelampauannya disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Pemalang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan kebijakan bantuan keuangan pada Pemerintah Desa berupa:

- a). Bantuan Keuangan Dana Desa;
- b). Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa;
- c). Bantuan Keuangan Khusus Desa.



2.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan perhitungan estimasi sebesar Rp59.198.545.000,00 pada Perubahan APBD meningkat menjadi sebesar Rp197.195.413.000,00 atau bertambah sebesar Rp137.996.868.000,00 (233%). Angka definitif SiLPA ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Pemalang Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, yang semula pada penetapan APBD dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 maka pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp30.600.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk Pembentukan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Penyertaan modal sebesar Rp10.600.000.000,00 yang peruntukannya menambah dan memperkuat struktur permodalan pada PDAM Tirta Mulia sebesar Rp2.000.000.000,00, PDAU sebesar Rp6.000.000.000,00, PT.Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00, PT LKM BKD sebesar Rp300.000.000,00 dan penyertaan modal kepada PD BPR BKK Taman sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan jumlah penerimaan pembiayaan Rp197.195.413.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30.600.000.000,00 di atas, maka pembiayaan netonya adalah sebesar Rp166.595.413.000,00 atau bertambah sebesar Rp127.396.868.000,00 (325%) dibandingkan pembiayaan neto dalam APBD tahun anggaran 2022 sebelum perubahan APBD sebesar Rp39.198.545.000,00. Pembiayaan neto sebesar



Rp166.595.413.000,00 tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagai akibat selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, terdapat rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.”*** Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan visi Kabupaten Pemalang tersebut, mengandung penjelasan sebagai berikut:

- 1. Adil;** merupakan keadaan/ kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia, sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup. Politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- 2. Makmur;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya;
- 3. Agamis;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.
- 4. Ngangeni;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang aman, tenteram dan damai. Didukung modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung, sehingga siapapun merasa betah saat berada di Pemalang dan kangen ingin ke Pemalang saat berada di luar wilayah Pemalang.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Untuk mencapai visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun Kedua dari implementasi RPJMD 2021-2026. Secara umum pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan	2.523.490.951.000,00	2.493.418.191.423,00	98,81%
Belanja	2.690.086.364.000,00	2.504.262.139.265,00	93,09%
Surplus/(Defisit)	(166.595.413.000,00)	(10.843.947.842,00)	6,51%
Penerimaan Pembiayaan	197.195.413.000,00	197.195.413.709,00	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan	30.600.000.000,00	30.600.000.000,00	100,00%
Pembiayaan Netto	166.595.413.000,00	166.595.413.709,00	100,00%
SILPA	-	155.751.465.867,00	

3.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Daerah	2.605.029.836.438,00	2.523.490.951.000,00	2.493.418.191.423,00	98,81



URAIAN	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah	365.393.902.790,00	345.755.988.000,00	349.130.621.188,00	100,98
Pajak Daerah	88.731.761.139,00	93.141.882.000,00	99.603.957.485,00	106,94
Retribusi Daerah	28.569.342.183,00	38.901.000.000,00	32.332.497.074,00	83,11
Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.500.844.418,00	23.007.649.000,00	23.007.651.678,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	225.591.955.050,00	190.705.457.000,00	194.186.514.951,00	101,80
Pendapatan Transfer	2.076.664.463.648,00	2.177.734.963.000,00	2.144.287.570.235,00	98,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.905.397.611.251,00	1.966.068.078.000,00	1.941.516.979.538,00	98,75
- Dana Bagi Hasil	44.727.180.937,00	36.964.706.000,00	38.943.187.382,00	105,35
- Dana Alokasi Umum	1.107.792.827.000,00	1.103.875.239.000,00	1.103.835.467.035,00	99,99
- Dana Alokasi Khusus	397.091.657.314,00	500.140.179.000,00	473.871.917.221,00	94,75
- Dana Insentif Daerah	27.895.120.000,00	4.656.546.000,00	4.656.546.000,00	100,00
- Dana Desa	327.890.826.000,00	320.431.408.000,00	320.209.861.900,00	99,93
Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.266.852.397,00	211.666.885.000,00	202.770.590.697,00	95,80
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	170.393.852.397,00	197.881.885.000,00	190.281.923.697,00	96,16
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	873.000.000,00	13.785.000.000,00	12.488.667.000,00	90,60
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	162.971.470.000,00	0,00	0,00	
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	156.971.470.000,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5
Peraturan Perundang-Undangan				

Sumber :BPKAD Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2022 (sebelum diaudit BPK RI)

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.493.418.191.423,00 atau 98,81% dari target sebesar Rp2.523.490.951.000,00 dan turun 4,48 % jika dibandingkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.605.029.836.438,00. Angka realisasi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa secara umum target kinerja pendapatan belum tercapai. Adapun kinerja untuk setiap jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar 100,96% dari target dan turun 4,47% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021. Realisasi masing-masing komponen PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pemalang
TahunAnggaran 2022

JENIS PAJAK	REALISASI 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
1 Pajak Hotel	517.637.200,00	600.000.000,00	516.615.000,00	86,10
2 Pajak Restoran	1.216.489.204,00	1.383.715.000,00	1.577.773.586,00	114,02
3 Pajak Hiburan	131.434.227,00	300.000.000,00	222.023.650,00	74,01
4 Pajak Reklame	1.489.385.737,00	1.642.946.000,00	1.573.230.063,00	95,76
5 Pajak Penerangan Jalan	36.818.544.040,00	44.500.000.000,00	44.907.667.464,00	100,92
6 Pajak Parkir	63.388.526,00	61.640.000,00	83.994.915,00	136,27
7 Pajak Air Tanah	307.800.502,00	421.381.000,00	431.634.405,00	102,43
8 Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	12.200.000,00	10.100.000,00	82,79



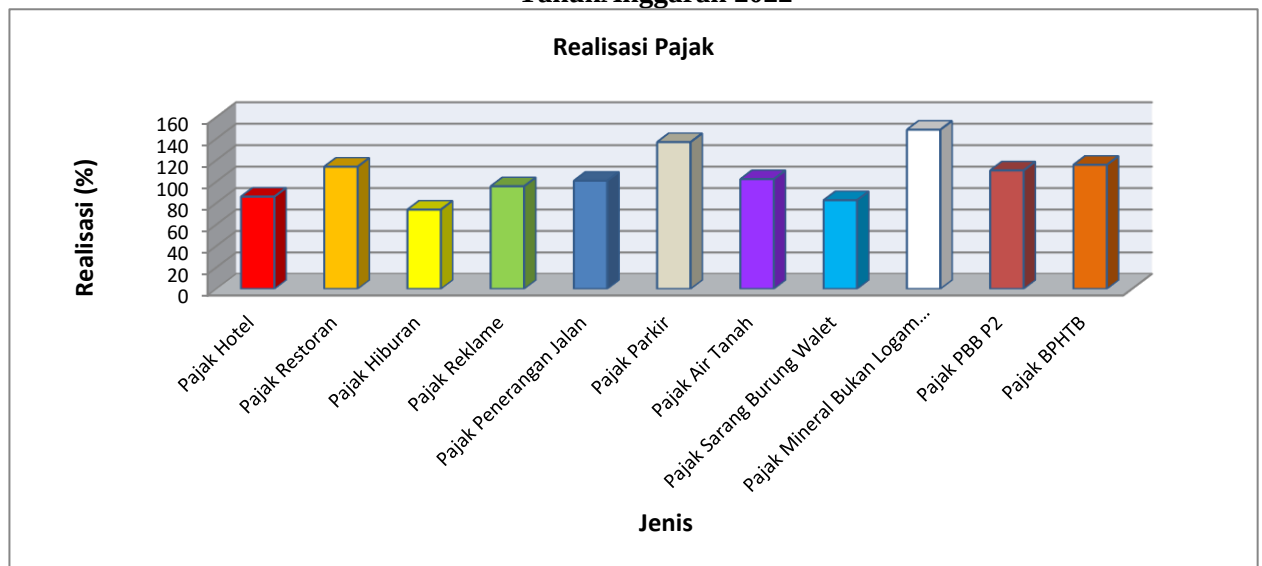
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	815.231.698,00	720.000.000,00	1.069.134.950,00	148,49
10	Pajak PBB P2	21.327.825.300,00	22.000.000.000,00	24.319.625.004,00	110,54
11	Pajak BPHTB	26.034.024.705,00	21.500.000.000,00	24.892.158.448,00	115,78
Total		88.731.761.139,00	93.141.882.000,00	99.603.957.485,00	106,94

Sumber : BAPENDA Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2022

Gambar 3.1
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022



Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022 Rp99.603.957.485,00 atau 106,94% dari target Rp93.141.882.000,00. Realisasi tersebut meningkat 12,25% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 Rp88.731.761.139,00. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengelola 11 jenis pajak daerah, dari jumlah tersebut 7 jenis pajak dapat memenuhi dan over target. Adapun realisasi pajak daerah yang pencapaiannya memenuhi over target yaitu :

1. Pajak Restoran
2. Pajak Penerangan Jalan
3. Pajak Parkir



4. Pajak Air Tanah
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak BPHTB-Pemindahan Hak
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP 2)

Sedangkan 4 jenis pajak tidak dapat memenuhi target realisasi yang pencapaiannya dibawah target, yaitu:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel pencapaian realisasinya sebesar 86,10 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya potensi yang tersedia karena sebagian usaha hotel tidak operasional di Tahun 2022 dan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzetnya

2. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan mencapai 74,01 %. Hal ini disebabkan karena berkurangnya omzet tempat-tempat hiburan di wilayah Kabupaten Pemalang yang disebabkan oleh minimnya kunjungan sehingga beberapa objek pajak hiburan tutup serta kurangnya kesadaran pengusaha hiburan untuk melaporkan omzet sebagai dasar perhitungan pajak

3. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame mencapai 95,76 %. Hal ini disebabkan karena Potensi reklame yang terpasang belum sepenuhnya dipungut pajak karena belum dilakukan pendataan serta adanya ketentuan tentang zona putih (kawasan dilarang dipasang reklame) di Jl. Jend Sudirman Pemalang dan Jl. A Yani Pemalang tidak dipungut pajaknya, Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame

4. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet mencapai 82,79%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan omzet pengusaha burung walet yang disebabkan antara lain menurunnya populasi burung walet di wilayah Kabupaten Pemalang



b. Retribusi Daerah

Tabel 3.4
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

JENIS RETRIBUSI		REALISAI 2021(Rp)	TARGET 2022(Rp)	REALISASI 2022(Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.740.184.437,00	18.085.000.000,00	14.016.285.418,00	77,50
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	813.539.800,00	380.588.000,00	406.555.000,00	106,82
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9.400.000,00	7.000.000,00	5.800.000,00	82,86
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	466.642.000,00	517.412.000,00	540.965.000,00	104,55
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	658.070.000,00	714.000.000,00	625.015.000,00	87,54
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	37.110.000,00	40.000.000,00	37.170.000,00	92,93
7	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	82.328.500,00	85.000.000,00	106.577.500,00	125,39
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	361.972.500,00	468.700.000,00	502.065.500,00	107,12
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.476.718.264,00	11.959.000.000,00	9.448.917.969,00	79,01
10	Retribusi Tempat Pelelangan	2.733.375.682,00	3.500.000.000,00	3.536.288.045,00	101,04
11	Retribusi Terminal	260.173.000,00	300.000.000,00	305.714.000,00	101,90
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	58.768.000,00	70.000.000,00	57.904.000,00	82,72



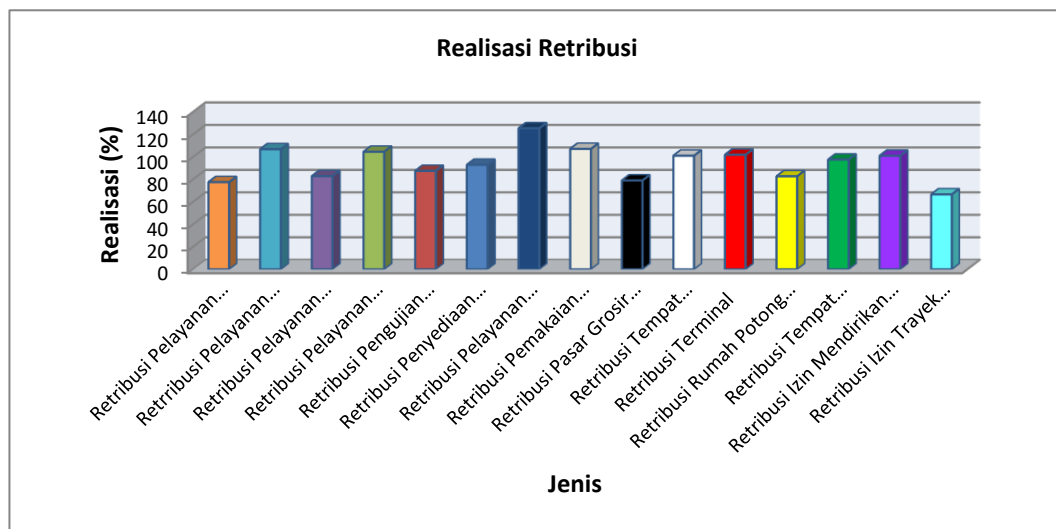
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

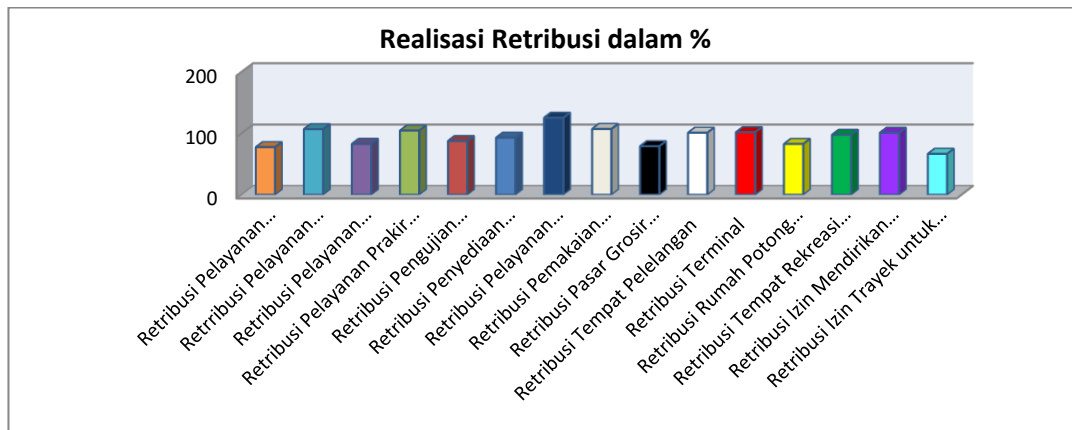
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

JENIS RETRIBUSI		REALISAI 2021(Rp)	TARGET 2022(Rp)	REALISASI 2022(Rp)	%
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	812.055.000,00	1.556.300.000,00	1.519.075.000,00	97,61
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.040.702.000,00	1.200.000.000,00	1.212.174.142,00	101,01
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Lain-lain	18.303.000,00	18.000.000,00	11.990.500,00	66,61
Total		28.569.342.183,00	38.901.000.000,00	32.332.497.074,00	83,11

Sumber : BAPENDA Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2022

Gambar 3.2
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022





Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 mencapai 83,11% dari target. Realisasi tersebut naik 13,17% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pemalang mengelola 15 jenis retribusi. Dari jumlah tersebut, 7 jenis retribusi dapat memenuhi dan over target, yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5. Retribusi Tempat Pelelangan
6. Retribusi Terminal
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sedangkan 8 jenis retribusi tidak dapat memenuhi target realisasi yang pencapaiannya dibawah target yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 77,50% dari target. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelayanan Puskesmas melaporkan realisasi penerimaan bersumber dari pelayanan BPJS. Sehingga penerimaan mandiri sebagai sumber penerimaan retribusi kesehatan banyak berkurang.
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pencapaian realisasinya mencapai 82,86% dari target. Hal ini disebabkan adanya retribusi pemakaman dan pengabuan mayat bersumber dari pelayanan



pemakaman dan pengabuan mayat yang tidak dapat diperkirakan potensinya.

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 87,54% dari target. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan ketentuan standar kelulusan uji kir dinaikkan sehingga banyak yang tidak lulus dan enggan kembali melakukan uji kir.
 4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mencapai 92,93% dari target. Hal ini disebabkan banyak tersedia pelayanan oleh pihak swasta yang relatif lebih praktis dan banyak.
 5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mencapai 79,01% dari target. Hal ini terjadi karena sebagian pedagang masih membayar retribusi dibawah tarif yang diatur dalam Perda. Selain itu belum semua petak toko membayar retribusi (baru kios yang dipungut).
 6. Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai 82,72% dari target. Hal ini disebabkan tidak adanya pemasok ternak hidup yang mau bekerjasama dengan pengusaha pemotongan (jagal) di Kabupaten Pemalang. Banyak daging asal luar Kabupaten Pemalang masuk ke pasar Pemalang, sehingga pemotongan di Rumah Potong Hewan Kabupaten Pemalang sedikit. Pemotongan ternak kecil Kambing/Domba banyak yang dilakukan proses pemotongan sendiri daripada dibawa ke Rumah Potong Hewan. Pengaruh *Covid-19* yang masih terasa menyebabkan beberapa Jagal bangkrut dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba.
 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga mencapai 97,61% dari target. Hal ini disebabkan adanya pengaruh cuaca ekstrim pada saat liburan dan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Pemalang hampir monoton sehingga daya tarik kurang.
 8. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Lain-lain mencapai 66,61% dari target. Hal ini disebabkan tidak ada potensi akibat dari banyak kendaraan angkutan umum beralih fungsi.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil atas penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten



Pemalang pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan ini mencapai 100,00% dari target dan meningkat 2,25% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 mencapai 101,80% dari target. Lain-lain pendapatan ini bersumber dari pendapatan BLUD yang merupakan hasil peningkatan kualitas pelayanan di RSUD.

3.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar 98,46% dari target namun meningkat 3,26% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021. Rincian realisasi Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat dan Transfer Antar Daerah Tahun
Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.905.397.611.251,00	1.966.068.078.000,00	1.941.516.979.538,00	98,75
	Dana Bagi Hasil	44.727.180.937,00	36.964.706.000,00	38.943.187.382,00	105,35
	Dana Alokasi Umum	1.107.792.827.000,00	1.103.875.239.000,00	1.103.835.467.035,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	397.091.657.314,00	500.140.179.000,00	473.871.917.221,00	94,75
	Dana Insentif Daerah	27.895.120.000,00	4.656.546.000,00	4.656.546.000,00	100,00
	Dana Desa	327.890.826.000,00	320.431.408.000,00	320.209.861.900,00	99,93



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.266.852.397,00	211.666.885.000,00	202.770.590.697,00	95,80
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	170.393.852.397,00	197.881.885.000,00	190.281.923.697,00	96,16
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	873.000.0008,00	13.785.000.000,00	12.488.667.000,00	90,60
Jumlah (1+2)		2.076.664.463.648,00	2.177.734.963.000	2.144.287.570.235,00	98,46

Sumber : BAPENDA Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2022

Gambar 3.3
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022





3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3.1.2. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan daerah meliputi;

1) Alokasi anggaran untuk pendidikan

Mandatory spending alokasi anggaran Pendidikan, sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar minimal 20% dari APBD. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan sebesar 35,90% dari APBD. Anggaran belanja Pendidikan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp965.742.799.000,00 dengan total belanja daerah TA 2022 sebesar Rp2.690.086.364.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.6

Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Kabupaten Pemalang

Tahun Anggaran 2022

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :	965.521.303.000	909.472.987.802
	1) Belanja Operasi	922.835.092.531	868.255.198.581
	a) Belanja Pegawai	722.566.184.000	678.971.098.797
	b) Belanja barang dan jasa	192.423.155.910	181.805.753.179
	c) Belanja Hibah	5.470.952.621	5.114.231.605
	d) Belanja bantuan sosial	2.374.800.000	2.364.115.000
	2) Belanja Modal	42.686.210.469	41.217.789.221
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	221.496.000	221.242.600
	1) Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	221.496.000	221.242.600
	a) Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kab/kota	163.247.000	163.121.350
	b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	14.500.000	14.399.000



	c) Pengembangan literasi berbasis kewenangan daerah kab/kota	43.749.000	43.722.250
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	965.742.799.000	909.694.230.402
3.	Total Belanja Daerah	2.690.086.364.000	2.504.262.139.265
4.	Rasio anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	35,90%	

Untuk realisasi belanja Pendidikan Kabupaten Pemalang TA 2022 sebesar Rp909.694.230.402,00 atau 94,20% dari anggaran Pendidikan sebesar Rp965.742.799.000,00 serta 36,32% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp2.504.262.139.265,00.

2) Alokasi anggaran untuk Kesehatan

Mandatory spending untuk anggaran Kesehatan, sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar minimal **10% dari APBD diluar gaji**. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan belanja Kesehatan sebesar Rp535.061.619.700,00 atau sebesar **27,01%** dari total anggaran belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.980.278.543.500,00.

Tabel 3.7

Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan	512.897.077.000	436.220.457.797
		1) Belanja Operasi	469.352.568.578	399.451.263.973
		a. Belanja Pegawai	228.253.346.530	191.039.217.717
		b. Belanja barang dan jasa	240.007.572.048	207.322.704.256
		c. Belanja Hibah	1.091.650.000	1.089.342.000
		d. Belanja bantuan sosial		
		2) Belanja Modal	43.544.508.422	36.769.193.824



	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :	22.164.542.700	20.550.022.625
	1)	Dinas Sosial, PP, KB, PP, dan PA	14.038.297.700	12.565.223.450
	a)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	105.200.000	105.200.000
	b)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan	284.400.000	295.840.000
	c)	Pengendalian Pendistribuan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.890.000	30.890.000
	d)	Peningkatan Kesetaraan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	362.920.000	362.920.000
	e)	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15.780.000	15.780.000
	f)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	48.800.000	48.800.000



			Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
		g)	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	13.091.925.700	11.607.411.450
		h)	Peningkatan Kesetaraan KB Pria	91.610.000	91.610.000
		i)	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5.000.000	5.000.000
		j)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.772.000	1.772.000
		2)	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	8.126.245.000	7.984.799.175
		a)	Pembanguna /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	4.355.044.000	4.348.261.680
		b)	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	660.000.000	650.979.000
		c)	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	3.111.201.000	2.985.558.495
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)			535.061.619.700	456.770.480.422
3.	Total Belanja Daerah			2.690.086.364.000	2.504.262.139.265
4.	Gaji ASN			709.807.820.500	672.929.313.139
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)			1.980.278.543.500	1.831.332.826.126
6.	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%			27,01%	

Realisasi anggaran belanja Kesehatan sebesar Rp456.770.480,00 atau 24,94% dari realisasi belanja daerah diluar gaji sebesar Rp1.831.332.826.126,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Mandatory spending untuk ADD adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan ADD sebesar Rp320.431.408.000,00 atau 28,09% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK Fisik dan Non Fisik.

Tabel 3.8

Perhitungan Alokasi Fungsi Dana Desa Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Dana Desa	320.431.408.000	320.209.861.900
2	Dana Perimbangan	1.640.980.124.000	1.616.650.571.638
3	Dana Alokasi Khusus	500.140.179.000	473.871.917.221
4	Dana Perimbangan – DAK (2-3)	1.140.839.945.000	1.142.778.654.417
5	Rasio anggaran Dana Desa (1:4) x 100%	28,09%	28,02%

Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp320.209.861.900,00 atau 99,93% dari total Anggaran Dana Desa sebesar Rp320.431.408.000,00 dan 28,02% dari realisasi total Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp1.142.778.654.417,00.

4) Alokasi Anggaran untuk Perlindungan Sosial

Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Kabupaten Pemalang menganggarkan belanja wajib perlindungan social yang antara lain digunakan untuk:

- Pemberian bantuan sosial kepada ojek, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta nelayan.
- Penciptaan lapangan kerja.
- Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum.



Mandatory spending untuk perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi TA 2022.



Tabel 3.9

Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial
Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian 3)	Jenis Akun 4)	Anggaran			Realisasi			
			Sumber Pendanaan		Jumlah 7)	Sumber Pendanaan		Jumlah 11)	% 12)
			DAU 5)	DBH 6)		DAU 9)	DBH 10)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(h)	(i)	(j)=(h)+(i)	(k)=(j)/(f)
I	BANTUAN SOSIAL								
	a. Bantuan Sosial untuk Ojol, Organda dan Ojek Pangkalan	Bantuan Sosial dan BTT	1.000.000.000		1.000.000.000	613.200.000		613.200.000	61,32%
	b. Bantuan Sosial untuk Nelayan	Bantuan Sosial	1.800.000.000		1.800.000.000	1.791.000.000		1.791.000.000	99,50%
	c. Bantuan Sosial untuk PKL dan UMKM	Bantuan Sosial	1.000.000.000		1.000.000.000	999.000.000		999.000.000	99,90%
	d. Bantuan Sosial lainnya	Bantuan Sosial	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000	100,00%



	Subtotal BANTUAN SOSIAL		4.100.000.000		4.100.000.000	3.703.200.000		3.703.200.000	90,32%
II	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA								
	a. Padat Karya	Barang dan Jasa	1.438.965.000	217.010.000	1.655.975.000	1.429.216.600	217.010.000	1.646.226.600	99,41%
	Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA		1.438.965.000	217.010.000	1.655.975.000	1.429.216.600	217.010.000	1.646.226.600	99,41%
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022			5.538.965.000	217.010.000	5.755.975.000	5.132.416.600	217.010.000	5.349.426.600	92,94%

**3.1.3. Belanja**

Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.504.262.139.265,00 atau 93,09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.690.086.364.000,00.

Tabel 3.10 menjelaskan rincian realisasi belanja Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 2022.

Tabel 3.10
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	REALISASI 2021 (Rp)	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022(Rp)	%
1	2		3	4	5
5	BELANJA	2.524.565.945.884,00	2.690.086.364.000,00	2.504.262.139.265,00	93,09
5.1	Belanja Operasi	1.836.746.106.662,00	2.044.130.153.745,00	1.881.204.645.821,00	92,03
5.1.1	Belanja Pegawai	1.093.751.149.412,00	1.240.277.204.030,00	1.141.227.695.540,00	92,01
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	661.149.902.867,00	751.464.985.044,00	691.869.170.581,00	92,07
5.1.4	Belanja Hibah	76.596.757.383,00	40.511.864.671,00	38.625.255.700,00	95,34
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.248.297.000,00	11.876.100.000,00	9.482.524.000,00	79,85
5.2	Belanja Modal	180.049.321.707,00	169.445.872.255,00	150.611.740.899,00	88,88
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	3.137.284.400,00	2.204.454.900,00	70,27
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.839.003.719,00	66.677.478.029,00	58.592.301.185,00	87,87
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.414.838.586,00	13.472.215.536,00	11.451.201.077,00	85,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.290.559.472,00	69.010.042.290,00	58.641.737.125,00	84,98
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.504.919.930,00	13.234.436.000,00	17.292.770.608,00	130,66
5.3	Belanja Tidak Terduga	9.821.362.300,00	6.576.329.000,00	2.733.289.650,00	41,56
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.821.362.300,00	6.576.329.000,00	2.733.289.650,00	41,56
5.4	Belanja Transfer	497.941.994.495,00	469.934.009.000,00	469.712.462.895,00	99,95
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.661.890.495,00	12.502.558.995,00	12.502.558.995,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	486.280.104.000,00	457.431.450.000,00	457.209.903.900,00	99,95

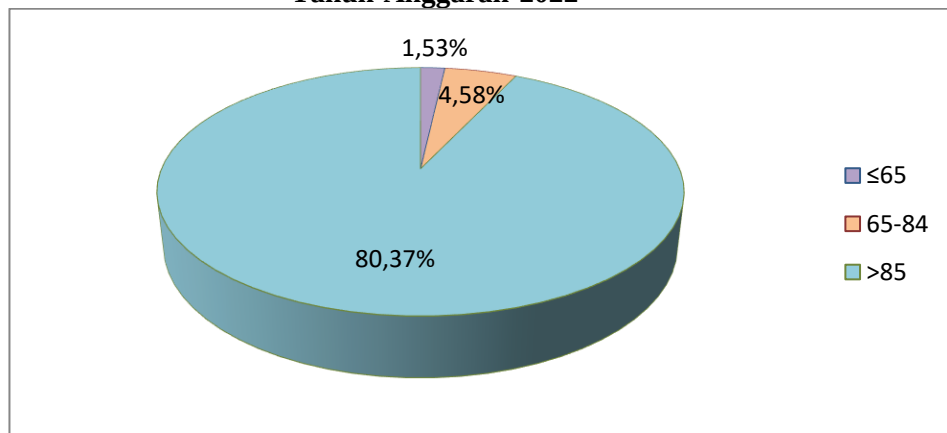
Sumber : BPKAD Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2022



Realisasi belanja tersebut diatas digunakan untuk membiayai 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 9 (sembilan) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3 (tiga) urusan pilihan, 2 (dua) urusan pemerintahan fungsi pendukung, 3 (tiga) urusan pemerintahan fungsi penunjang, 1(satu) urusan pemerintahan fungsi pengawasan, 1(satu) urusan pemerintahan fungsi kewilayahan dan 1(satu) urusan pemerintahan fungsi umum.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan 249 Program, 701 Kegiatan dan 2.598 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai gambaran kinerja penyerapan/realisasi anggaran kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, disajikan rekapitulasi realisasi kegiatan yang dikelompokkan dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat penyerapannya sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.6 berikut:

Gambar 3.4
Tingkat Penyerapan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022



Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Dari Gambar 3.6 di atas, pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 40 sub kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran 65% ke bawah, 119 sub kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran antara 66% sampai dengan 84% dan 2.088 sub kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran 85% ke atas. Sedangkan sub kegiatan yang terkena *refocusing* (anggaran Rp0) sejumlah 351 sub kegiatan. Adapun rekapitulasi tersebut disajikan pada Tabel 3.6 Perangkat Daerah sebagai berikut:



Tabel 3.11
Rekapitulasi Jumlah dan Persentase Realisasi
Kegiatan per Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH			%REALISASI SUB KEGIATAN			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	0	≤65	65-84	>85
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	18	66	2	2	1	61
2	Dinas Kesehatan	5	22	126	7	7	32	80
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7	21	68	19	5	3	41
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	23	80	35	0	1	44
5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	40	136	37	0	2	97
6	Dinas Pertanian	10	30	64	0	1	1	62
7	Dinas Perikanan	5	20	55	11	0	0	44
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	12	68	9	1	0	58
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perindustrian, Perdagangan	16	27	61	7	1	1	52
10	Dinas Tenaga Kerja	6	18	53	19	0	0	34
11	Dinas Lingkungan Hidup	10	20	47	6	1	6	34
12	Dinas Kependudukan	5	15	49	4	0	1	44



NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH			%REALISASI SUB KEGIATAN			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	0	≤65	65-84	>85
	dan Pencatatan Sipil							
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	43	7	0	1	35
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7	18	48	0	1	1	46
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5	14	47	10	0	2	35
16	Dinas Perhubungan	3	18	57	5	0	1	51
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	12	51	1	0	0	50
18	Satuan Polisi Pamong Praja	3	13	53	11	0	0	42
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	18	77	7	8	14	48
20	Inspektorat	3	11	43	1	1	1	40
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	16	53	1	4	5	43
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	85	34	1	1	49
23	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah	2	9	44	3	0	3	38
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	14	54	7	1	0	46
25	Badan Kepegawaian Daerah	2	12	81	44	2	8	27
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	27	0	0	4	23



NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH			%REALISASI SUB KEGIATAN			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	0	≤65	65-84	>85
27	Kecamatan Moga	6	15	50	4	0	1	45
28	Kecamatan Pulosari	6	13	49	7	0	0	42
29	Kecamatan Belik	6	17	53	0	0	3	50
30	Kecamatan Watukumpul	6	15	51	6	0	0	45
31	Kecamatan Bodeh	6	16	48	6	0	1	41
32	Kecamatan Bantarbolang	6	17	64	5	0	1	58
33	Kecamatan Randudongkal	6	13	43	6	0	0	37
34	Kecamatan Pemalang	6	17	151	10	0	8	133
35	Kecamatan Taman	6	17	88	3	0	2	83
36	Kecamatan Petarukan	6	15	56	2	0	0	54
37	Kecamatan Ampelgading	6	14	52	3	0	0	49
38	Kecamatan Comal	6	18	65	2	0	0	63
39	Kecamatan Ulujami	6	17	63	5	0	0	58
40	Kecamatan Warungpring	6	17	61	4	1	0	56
41	Bagian Umum	1	10	36	0	1	9	26
42	Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	3	0	0	0	3
43	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	2	6	0	0	5	1
44	Bagian Hukum	1	1	3	0	0	0	3
45	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	3	0	2	0	1
46	Bagian Organisasi	1	1	5	0	0	0	5
47	Bagian Tata Pemerintahan	1	2	6	1	0	0	5
48	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	3	0	0	0	3



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH			%REALISASI SUB KEGIATAN			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	0	≤65	65-84	>85
49	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	3	0	0	0	3
	Total	249	701	2598	351	40	119	2088

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2022

3.1.4. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan utama belanja daerah pada tahun anggaran 2022 yaitu:

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bersumber (DBHCHT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dibelanjakan karena tidak disertai pedoman teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- Pemerintah daerah perlu menerapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah.

2. Solusi

- Penyaluran BLT dari DBHCHT direncanakan pada tahun berikutnya dan untuk lebih menguatkan regulasi pedoman penyaluran BLT dari DBHCHT maka Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pemalang sebagai sekretariat DBHCHT segera menyiapkan regulasi di daerah terkait penyaluran BLT sambil menunggu petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan melakukan rekonsiliasi penghitungan sisa DBHCHT;
- Langkah percepatan yang dapat dilakukan dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dan anggaran belanja yang dilaksanakan secara terencana, konsisten dan terukur dalam merealisasikan anggaran. Upaya yang bisa dilakukan dengan menetapkan target per triwulan guna menghitung capaian penerapan anggaran dan setiap perangkat daerah mengambil langkah kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran belanja, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



3.1.5. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

3.1.5.1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan perhitungan estimasi sebesar Rp59.198.545.000,00 pada Perubahan APBD meningkat menjadi sebesar Rp197.195.413.000,00 atau bertambah sebesar Rp137.996.868.000,00 (233%). Angka definitif SiLPA ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Pemalang Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, yang semula pada penetapan APBD dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 maka pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp30.600.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk Pembentukan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Penyertaan modal sebesar Rp10.600.000.000,00 yang peruntukannya menambah dan memperkuat struktur permodalan pada PDAM Tirta Mulia sebesar Rp2.000.000.000,00, PT Aneka Usaha sebesar Rp6.000.000.000,00, PT.Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00, PT.LKM BKD sebesar Rp300.000.000,00 dan penyertaan modal kepada PD.BPR BKK Taman sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan jumlah penerimaan pembiayaan Rp197.195.413.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30.600.000.000,00 di atas, maka pembiayaan netonya adalah sebesar Rp166.595.413.000,00 atau bertambah sebesar Rp127.396.868.000,00 (325%) dibandingkan pembiayaan neto dalam APBD tahun anggaran 2022 sebelum perubahan APBD sebesar Rp39.198.545.000,00. Pembiayaan neto sebesar Rp166.595.413.000,00 tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagai akibat selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.

**3.1.5.2. Realisasi Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1	PENERIMAAN	197.195.143.000,00	197.195.413.709,00	100
6.1.1	SiLPA	197.195.413.000,00	197.195.413.709,00	100
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
6.2	PENGELUARAN	30.600.000.000,00	30.600.000.000,00	100
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100
	PEMBIAYAAN NETTO	166.595.413.000,00	166.595.413.709,00	100
6.3	SiLPA Tahun Berkenaan	0,00	155.751.465.867,00	

Sumber :BPKAD Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2022

Realisasi pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dengan anggaran sebesar Rp197.195.413.709,00, dan pengeluaran daerah dengan anggaran sebesar Rp30.600.000.000,00, keduanya tercapai 100% sehingga pembiayaan nettoanya sebesar Rp166.595.413.709,00. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp155.751.465.867,00.

3.1.5.3. Permasalahan dan Solusi**1. Permasalahan**

Permasalahan utama pembiayaan, yaitu sulit melakukan proyeksi terhadap anggaran sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berdasarkan kapasitas riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan karena:

- 1) Harus melakukan penghitungan perkiraan pelampauan atau tidak terpenuhinya target penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli



daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah,

- 2) Harus melakukan perkiraan tentang besaran sisa belanja sebagai akibat penghematan/efisiensi belanja atau akibat- akibat lainnya.

2. Solusi

Setelah SiLPA tahun 2021 diketahui yang didasarkan pada LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021, maka diperlukan pencermatan terhadap:

- 1) SiLPA yang bersifat mengikat/terarah dan harus dianggarkan kembali sesuai peruntukkan semula; dan
- 2) SiLPA yang diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berjalan, khususnya terhadap SiLPA yang bersumber dana dari dana transfer dari Pusat dan Provinsi.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat Daerah beralamat di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang. Entitas pelaporan ini terdiri dari 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 41 entitas akuntansi yaitu:

Kode SKPD	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1.01.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.1	Dinas Kesehatan
1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.1	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06.1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.01.1	Dinas Tenaga Kerja
2.05.1	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.09.1	Dinas Perhubungan
2.10.1	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2.11.1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.01.1	Dinas Perikanan
3.02.1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.03.1	Dinas Pertanian
4.02.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.03.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04.7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.04.8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.05.10	Badan Kepegawaian Daerah
4.06.1	Inspektorat
4.07.1	Sekretariat DPRD
4.08.1	Sekretariat Daerah
4.09.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.10.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.11.1	Kecamatan Moga
4.11.2	Kecamatan Pulosari



Kode SKPD	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
4.11.3	Kecamatan Belik
4.11.4	Kecamatan Watukumpul
4.11.5	Kecamatan Bodeh
4.11.6	Kecamatan Bantarbolang
4.11.7	Kecamatan Randudongkal
4.11.8	Kecamatan Pemalang
4.11.9	Kecamatan Taman
4.11.10	Kecamatan Petarukan
4.11.11	Kecamatan Ampelgading
4.11.12	Kecamatan Comal
4.11.13	Kecamatan Ulujami
4.11.14	Kecamatan Warungpring

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3 KEBIJAKAN PENGUKURAN

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas sendiri terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversi dulu menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Sedangkan Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Adapun investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.



4.3.3 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut :

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;



- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Berdasarkan kualitasnya piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: Kualitas Piutang Lancar; Kualitas Piutang Kurang Lancar; Kualitas Piutang Diragukan; dan Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau



- d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun s.d 2 tahun;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak yang bukan disebut objek Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal **Surat Tagihan** Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang



Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.3.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode Akuntansi.

4.3.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar :

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4.3.6 Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama



dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4.3.7 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu :

- 1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- 3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.



- 6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, *pertama*, Metode Biaya, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. **Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%.** Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Kedua, Metode Ekuitas. Metode ini merupakan suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Ketiga, Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan



periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

4.3.8 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap



didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
1.	Tanah	1. Harga pembelian/ Pembebasan Tanah; 2. Biaya Pembebasan/Ganti Rugi; 3. Biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (Biaya pembuatan sertifikat, Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai Tanah); 4. Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, dan Pengurukan/ Penimbunan; 5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2.	Peralatan dan Mesin a. Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai	1. Harga Pembelian Peralatan & Mesin (PPN & PPh); 2. Ongkos Angkut; 3. Biaya Asuransi Pengiriman; 4. Biaya Instalasi/Pemasangan; 5. Biaya Selama Masa Uji Coba.



No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
	b. Pembuatan Peralatan dan Mesin	- Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan): - Pengeluaran sebesar nilai kontrak; - Biaya Perencanaan dan Pengawasan; - Biaya Perizinan; - Jasa Konsultan; - Yang dilaksanakan secara swakelola: - Biaya Bahan Baku; - Upah Tenaga Kerja; - Sewa Peralatan; - Biaya Perencanaan dan Pengawasan; - Jasa Konsultan; - Biaya Perizinan.
3.	Gedung dan Bangunan	- Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) - Pengeluaran sebesar nilai kontrak; - Biaya Perencanaan dan Pengawasan; - Biaya Perizinan; - Jasa Konsultan; - Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama; - Yang dilaksanakan secara swakelola - Biaya Bahan Baku; - Upah Tenaga Kerja; - Sewa Peralatan; - Biaya Perencanaan dan Pengawasan; - Biaya Perizinan; - Biaya Konsultan; - Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama;
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	- Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketiga kan) - Pengeluaran sebesar nilai kontrak;



No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
		b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Biaya Konsultan; g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.
5.	Aset Tetap Lainnya	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ke tiga kan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan dan c. Biaya perizinan; 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Jasa Konsultan.
6.	Hibah dari pihak ketiga	1. Nilai wajar pada saat perolehan;

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang



biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.9 Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah estetis/ keindahan / nyaman, dan/atau
 - e) bertambah kapasitas produksi.
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut :

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI (Rp)
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	400.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	10.000.000,00
	- Irigasi	5.000.000,00
	- Jaringan	400.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

**4.3.10 Penyusutan**

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Komputer Unit	4
1	3	2	17	Peralatan Komputer	4
1	3	2	18	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	19	Alat Studio	5
1	3	2	20	Alat Komunikasi	5
1	3	2	21	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	22	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	23	Alat Kedokteran	5
1	3	2	24	Alat Kesehatan	5
1	3	2	25	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	27	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	28	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	29	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	30	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (Badan Tenaga Atom Nasional/ BATAM)	10
1	3	2	31	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	32	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	33	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	34	Senjata Api	10
1	3	2	35	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	36	Senjata Sinar	5
1	3	2	37	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	38	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	39	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	40	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	41	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	42	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	43	Peralatan Sumur	10
1	3	2	44	Peralatan Produksi	10
1	3	2	45	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	46	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	47	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	48	Alat Deteksi	5
1	3	2	49	Alat Pelindung	5
1	3	2	50	Alat SAR	2
1	3	2	51	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	52	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	53	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	54	Peralatan Olahraga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	3	12	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Instalasi Lain	5
1	3	4	21	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	22	Jaringan Listrik	40
1	3	4	23	Jaringan Telepon	20
1	3	4	24	Jaringan Gas	30

Penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah maka penghitungan penyusutan aset pada tahun 2021 dilakukan secara bulanan dengan mengacu pada tanggal perolehan. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tak berwujud.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca



berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.11 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

4.3.12 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat



digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4.3.13 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud; dan
- 5) Aset Lain-lain.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

4.3.14 Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi berlaku untuk semua jenis Aset Lainnya, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Adapun Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Semenatra itu Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

4.3.15 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.



Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4.3.16 Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4.3.17 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan. Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4.3.18 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kewajiban ini



tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD. Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

4.3.19 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4.3.20 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4.3.21 Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban diakui pada saat, *pertama*, beban secara peraturan perundang-



undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. *Kedua*, terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. Ketiga, barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

4.3.22 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

4.3.23 Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah :

- 1) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- 2) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
- 3) Utang Dalam Negeri – obligasi;
- 4) Utang pemerintah pusat;
- 5) Utang pemerintah provinsi; dan
- 6) Utang pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

4.3.24 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang)



oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.3.25 Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, dan ;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap



pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.3.26 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.27 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



4.3.28 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.29 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.



4.3.30 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.31 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;



- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi

4.5.1 Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Jika dikelompokkan menurut periodenya, kesalahan yang tidak berulang dapat dikelompokkan menjadi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan pada periode sebelumnya.
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan,



baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- 1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- 2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- 3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

4.5.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.



Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan perubahan kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, kebijakan akuntansi yang mengalami berubah adalah kebijakan tentang akuntansi beban yaitu definisi beban, pengakuan beban, pengukuran beban, dan penyajian dan pengungkapan beban.

Di dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa ***Beban Penyusutan dan amortisasi diakui pada saat akhir bulan berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada aplikasi sistem barang milik daerah,*** sehingga perlu jurnal penyesuaian terhadap nilai beban penyusutan saldo awal laporan keuangan tahun 2016 karena adanya perbedaan saat pengakuan beban penyusutan dan amortisasi yang semula diakui saat akhir tahun/periode akuntansi menjadi akhir bulan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2022 serta realisasi TA 2021, sebagai berikut :

Pendapatan Daerah - LRA		2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	345.755.988.000,00	349.130.621.188,00	365.393.902.790,00
2	Pendapatan Transfer - LRA	2.177.734.963.000,00	2.144.287.570.235,00	2.076.664.463.648,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah - LRA	-	-	162.971.470.000,00
Jumlah		2.523.490.951.000,00	2.493.418.191.423,00	2.605.029.836.438,00

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp2.493.418.191.423,00 atau 98,81% dari anggarannya sebesar Rp2.523.490.951.000,00 dan 95,72% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.605.029.836.438,00.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Daerah-LRA, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah - LRA	93.141.882.000,00	99.603.957.485,00	88.731.761.139,00
2	Retribusi Daerah - LRA	38.901.000.000,00	32.332.497.074,00	28.569.342.183,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	23.007.649.000,00	23.007.651.678,00	22.500.844.418,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LRA	190.705.457.000,00	194.186.514.951,00	225.591.955.050,00
Jumlah		345.755.988.000,00	349.130.621.188,00	365.393.902.790,00

Realisasi PAD - LRA TA 2022 sebesar Rp349.130.621.188,00 atau 100,98% dari anggarannya sebesar Rp345.755.988.000,00 dan 95,55% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp365.393.902.790,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi masing-masing jenis PAD–LRA TA 2022 dan 2021 tersaji sebagai berikut :

5.1.1.1.1 Pajak Daerah–LRA

Pajak Daerah berdasar Pasal 1 ayat 1 PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dengan realisasi selama TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Pajak Daerah		2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hotel	600,000,000.00	516,615,000.00	517,637,200.00
2	Restoran	1,383,715,000.00	1,577,773,586.00	1,216,489,204.00
3	Hiburan	300,000,000.00	222,023,650.00	131,434,227.00
4	Reklame	1,642,946,000.00	1,573,230,063.00	1,489,385,737.00
5	Penerangan Jalan	44,500,000,000.00	44,907,667,464.00	36,818,544,040.00
6	Mineral Bukan Logam & Batuan (Pasir & Kerikil)	720,000,000.00	1,069,134,950.00	815,231,698.00
7	Parkir	61,640,000.00	83,994,915.00	63,388,526.00
8	Air Bawah Tanah	421,381,000.00	431,634,405.00	307,800,502.00
9	Sarang Burung Walet	12,200,000.00	10,100,000.00	10,000,000.00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	21,500,000,000.00	24,892,158,448.00	26,034,024,705.00
11)	Bumi & Bangunan	22,000,000,000.00	24,319,625,004.00	21,327,825,300.00
Jumlah		93,141,882,000.00	99,603,957,485.00	88,731,761,139.00

Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp 99.603.957.485,00 atau 106,94% dari anggarannya sebesar Rp93.141.882.000,00 dan 112,25% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp88.731.761.139,00.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengelola 11 jenis pajak daerah, dari jumlah tersebut 7 jenis pajak dapat memenuhi dan over target.

Adapun realisasi pajak daerah yang pencapaiannya memenuhi over target yaitu :

1. Pajak Restoran
2. Pajak Penerangan Jalan
3. Pajak Parkir
4. Pajak Air Tanah
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak BPHTB-Pemindahan Hak
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP 2)

Sedangkan 4 jenis pajak tidak dapat memenuhi target realisasi yang pencapaiannya dibawah target, yaitu:



1. Pajak Hotel

Pajak Hotel pencapaian realisasinya sebesar 86,10 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya potensi yang tersedia karena sebagian usaha hotel tidak operasional di Tahun 2022 dan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzetnya

2. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan mencapai 74,01 %. Hal ini disebabkan karena berkurangnya omzet tempat-tempat hiburan di wilayah Kabupaten Pemalang yang disebabkan oleh minimnya kunjungan sehingga beberapa objek pajak hiburan tutup serta kurangnya kesadaran pengusaha hiburan untuk melaporkan omzet sebagai dasar perhitungan pajak

3. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame mencapai 95,76 %. Hal ini disebabkan karena Potensi reklame yang terpasang belum sepenuhnya dipungut pajak karena belum dilakukan pendataan serta adanya ketentuan tentang zona putih (kawasan dilarang dipasang reklame) di Jl. Jend Sudirman Pemalang dan Jl. A Yani Pemalang tidak dipungut pajaknya, Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame

4. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet mencapai 82,79%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan omzet pengusaha burung wallet yang disebabkan antara lain menurunnya populasi burung walet di wilayah Kabupaten Pemalang

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah–LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah-LRA merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 sebesar Rp32.332.497.074,00 atau 83,11% dari anggarannya sebesar Rp38.901.000.000,00 dan 136,13 % dari realisasi TA 2021 sebesar Rp28.569.342.183,00.

Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh 10 (sepuluh) SKPD yaitu:



No	SKPD	Jenis Retribusi Daerah
1	Dinkes	- Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	DPU TR	- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3	Disparpora	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	Diskoperindag	- Retribusi Pengujian Alat-alat - Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
5	Dishub	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Terminal - Retribusi Izin Trayek
6	Dinas Komunikas dan Informatika	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
8	Dinas Pertanian	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Rumah Potong Hewan
9	Dinas Perikanan	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Tambak Dinas dan Hasil BBI) - Retribusi Tempat Pelelangan
10	Dinas Lingkungan Hidup	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pemakaian Laboratorium - Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus

Realisasi Retribusi Daerah selama TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah		2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan	18.085.000.000,00	14.016.285.418,00	77,50	12.740.184.437,00
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	380.588.000,00	406.555.000,00	106,82	813.539.800,00
3	Pemakaman & Pengabuan Mayat	7.000.000,00	5.800.000,00	82,86	9.400.000,00
4	Parkir Tepi Jalan Umum	517.412.000,00	540.965.000,00	104,55	466.642.000,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	714.000.000,00	625.015.000,00	87,54	658.070.000,00
6	Penyediaan/Penyedotan Kakus	40.000.000,00	37.170.000,00	92,93	37.110.000,00
7	JU Pemakaian Kekayaan Daerah	468.700.000,00	502.065.500,00	107,12	361.972.500,00
8	JU Pasar Grosir/Pertokoan	11.959.000.000,00	9.448.917.969,00	79,01	7.476.718.264,00
9	JU Tempat Pelelangan	3.500.000.000,00	3.536.288.045,00	101,04	2.733.375.682,00
10	JU Terminal	300.000.000,00	305.714.000,00	101,90	260.173.000,00
11	JU Rumah Potong Hewan	70.000.000,00	57.904.000,00	82,72	58.768.000,00
12	JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.556.300.000,00	1.519.075.000,00	97,61	812.055.000,00
13	IMB	1.200.000.000,00	1.212.174.142,00	101,01	2.040.702.000,00
14	Izin Trayek	18.000.000,00	11.990.500,00	66,61	18.303.000,00
15	Pelayanan Tera/Tera Ulang	85.000.000,00	106.577.500,00	125,39	82.328.500,00
Jumlah		38.901.000.000,00	32.332.497.074,00	83,11	28.569.342.183,00



Pendapatan Retribusi Daerah	2022			2021	Kenaikan/Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Retribusi Jasa Umum :					
1 Pelayanan Kesehatan	18.085.000.000,00	14.016.285.418,00	77,50	12.740.184.437,00	-1.276.100.981,00
2 Pelayanan Persampahan/	380.588.000,00	406.555.000,00	106,82	813.539.800,00	406.984.800,00
3 Pemakaman & Pengabuan	7.000.000,00	5.800.000,00	82,86	9.400.000,00	
4 Parkir Tepi Jalan Umum	517.412.000,00	540.965.000,00	104,55	466.642.000,00	-74.323.000,00
5 Pengujian Kendaraan Bermotor	714.000.000,00	625.015.000,00	87,54	658.070.000,00	33.055.000,00
6 Pelayanan Tera/Tera Ulang	85.000.000,00	106.577.500,00	125,39	82.328.500,00	-24.249.000,00
7 Penyediaan/Penyedotan Kakus	40.000.000,00	37.170.000,00	92,93	37.110.000,00	
Retribusi Jasa Usaha :					
1 JU Pemakaian Kekayaan	468.700.000,00	502.065.500,00	107,12	361.972.500,00	-140.093.000,00
2 JU Pasar Grosir/Pertokoan	11.959.000.000,00	9.448.917.969,00	79,01	7.476.718.264,00	-1.972.199.705,00
3 JU Tempat Pelelangan	3.500.000.000,00	3.536.288.045,00	101,04	2.733.375.682,00	-802.912.363,00
4 JU Terminal	300.000.000,00	305.714.000,00	101,90	260.173.000,00	-45.541.000,00
5 JU Rumah Potong Hewan	70.000.000,00	57.904.000,00	82,72	58.768.000,00	
6 JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.556.300.000,00	1.519.075.000,00	97,61	812.055.000,00	-707.020.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu:					
1 IMB	1.200.000.000,00	1.212.174.142,00	101,01	2.040.702.000,00	828.527.858,00
2 Ijin Trayek	18.000.000,00	11.990.500,00	66,61	18.303.000,00	6.312.500,00
Jumlah	38.901.000.000,00	32.332.497.074,00	83,11	28.569.342.183,00	

Adapun realisasi pendapatan retribusi yang pencapaiannya dibawah target adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga realisasinya sebesar Rp1.519.075.000,00 atau 97,61% dari anggarannya sebesar Rp1.556.300.000,00. Hal ini dikarenakan liburan natal dan tahun baru cuaca yang tidak mendukung sehingga pengunjung berkurang.
2. Retribusi Rumah Potong Hewan di Dinas Pertanian realisasinya sebesar Rp57.904.000,00 atau 82,72% dari anggarannya sebesar Rp70.000.000,00 tidak tercapai realisasinya, Hal ini disebabkan karena adanya tidak adanya pemasok ternak hidup yang mau bekerjasama dengan pengusaha pemotongan (Jagal) di Kabupaten Pemalang sehingga banyak daging asal luar Kabupaten Pemalang masuk ke pasar Pemalang dan pengaruh Covid-19 yang masih terasa menyebabkan beberapa jagal bangkrut serta wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sehingga pemotongan di Rumah Potong Hewan sedikit.
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan realisasinya sebesar Rp14.016.285.418,00 atau 77,50% dari anggarannya sebesar Rp18.085.000.000,00 tidak tercapai realisasinya. Hal ini disebabkan karena adanya program pemerintah untuk penyaluran atau pembuatan KIS untuk orang miskin jadi pasien banyak yang menggunakan kartu BPJS miskin (KIA PBI).
4. Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan pada Diskop UKM realisasinya sebesar Rp9.448.917.969,00 atau 79,01% dari anggarannya sebesar Rp11.959.000.000,00 tidak tercapai realisasinya. Hal ini dikarenakan sebagian pedagang masih membayar retribusi dibawah tarif yang diatur dalam Perda. Selain itu belum semua petak toko membayar retribusi (baru kios yang dipungut).



5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan realisasinya sebesar Rp625.015.000,00 atau 87,54% dari anggarannya sebesar Rp714.000.000,00 tidak tercapai realisasinya. Hal ini disebabkan karena banyak pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan dan belum efektifnya pelaksanaan pengawasan/operasi di lapangan serta belum ada sanksi bagi yang tidak melakukan uji.
6. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di DPU dan TR realisasinya sebesar Rp5.800.000,00 atau 82,86% dari anggarannya sebesar Rp7.000.000,00 tidak tercapai realisasinya. Hal ini disebabkan DPU hanya menerima dari koordinator masyarakat yang melakukan kremasi dari angka kematian, jadi tergantung banyak/sedikitnya dari jumlah kematian yang dilakukan kremasi.
7. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada Dinas Perhubungan realisasinya sebesar Rp11.990.500,00 atau 66,61% dari anggarannya sebesar Rp18.000.000,00. Hal ini disebabkan belum efektifnya pelaksanaan pengawasan di lapangan, banyak kendaraan tidak diperpanjang ijin karena beberapa faktor diantaranya pendapatan kian menurun tersaingi oleh Ojek online dan banyak kendaraan umum yang berubah wujud menjadi odong-odong ilegal.
8. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada Dinas Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp37.170.000,00 atau 92,93% dari anggarannya sebesar Rp40.000.000,00 hal ini dikarenakan tergantung banyak/sedikitnya permintaan penyedotan kakus.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Laba yang dibagihasilkan merupakan perolehan laba tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp 23.007.651.678,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp23.007.649.000,00 dan 102,25% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp22.500.844.418,00.

Adapun realisasinya pada TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan		2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagian Laba PD Air Minum (PDAM)	2.820.088.000,00	2.820.088.578,00	3.733.032.070,00
2	Bagian Laba pada Lembaga Keuangan	20.187.561.000,00	20.187.563.100,00	18.767.812.348,00
	a) Bagian Laba PD Bank Pemalang	329.228.000,00	329.228.616,00	
	b) Bagian Laba BPD Jateng	19.041.222.000,00	19.041.222.876,00	
	c) BPR-BKK Taman	716.699.000,00	716.699.296,00	
	d) Perseroda LKM BKD	100.412.000,00	100.412.312,00	
Jumlah		23.007.649.000,00	23.007.651.678,00	22.500.844.418,00

**5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah–LRA**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - LRA merupakan PAD yang bersumber dari selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan realisasi selama TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

	Lain-lain PAD Yang Sah	2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	1.700.000.000,00	1.227.653.584,00	72,21	2.950.306.546,00
2	Penerimaan bunga deposito	4.000.000.000,00	6.306.849.270,00	157,67	900.958.897,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	0,00		0,00
4	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00		234.367.423,00
5	Pendapatan dari pengembalian	0,00	0,00		187.455.186,00
6	Pendapatan Denda Reklame	0,00	35.900.950,00		7.428.119,00
7	Pendapatan Denda PBB	313.000.000,00	36.851.768,00	11,77	157.119.411,00
8	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	2.790.062,00		2.571.066,00
9	Pendapatan Denda Pajak Restoren	0,00	8.800.583,00		2.437.890,00
10	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	1.975.391,00		392.433,00
11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	1.478.691,00		76.330,00
12	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	5.719.930,00		0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	1.847.012,00		204.872,00
14	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Geologi	0,00	0,00		483.024,00
15	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	85.500.000,00	190.499.999,00	222,81	209.623.541,00
16	Pendapatan dan Pengembalian	550.000.000,00	174.650.594,00	31,75	0,00
17	Lain-lain PAD yang sah Lainnya	0,00	527.666.495,00		0,00
18	Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	150.598.704.000,00	152.946.083.571,00	101,56	145.811.207.027,00
19	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Pendapatan)	4.207.000.000,00	4.704.359.766,00	111,82	4.359.495.735,00
20	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.871.253.000,00	27.866.410.036,00	96,52	56.882.998.604,00
21	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	280.000.000,00	0,00	0,00	286.063.500,00
22	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	142.937.249,00	142,94	750.559.998,00
23	Hasil Penjualan Aset tetap lainnya	0,00	4.040.000,00		7.600.000,00
24	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00		2.208.000,00
25	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00		12.838.397.448,00
	Jumlah	190.705.457.000,00	194.186.514.951,00	949,06	225.591.955.050,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp194.186.514.951,00 atau 101,83% dari anggarannya sebesar Rp190.705.457.000,00 dan 91% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp225.591.955.050,00.

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Kesehatan berupa pengelolaan dana kapitasi berdasarkan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi, dilaksanakan oleh unit Puskesmas yang berkedudukan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Dana kapitasi tersebut langsung ditransfer ke bendahara FKTP dan dapat langsung dibelanjakan oleh FKTP diluar mekanisme SP2D.

Adapun untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP realisasinya sebesar Rp27.866.410.036,00 dari anggarannya sebesar Rp28.871.253.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari 25 puskesmas yaitu :



No	Puskemas	Realisasi (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN Puskemas Banyumudal	0
2	Dana Kapitasi JKN Puskemas Warungpring	1.170.272.463
3	Dana Kapitasi JKN Puskemas Pulosari	1.573.063.736
4	Dana Kapitasi JKN Puskemas Belik	0
5	Dana Kapitasi JKN Puskemas Watukumpul	1.531.404.938
6	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebandaran	1.461.070.087
7	Dana Kapitasi JKN Puskemas Bantarbolang	0
8	Dana Kapitasi JKN Puskemas Randudongkal	2.143.721.538
9	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kalimas	1.487.253.463
10	Dana Kapitasi JKN Puskemas Paduraksa	1.502.814.618
11	Dana Kapitasi JKN Puskemas Mulyoharjo	2.341.769.662
12	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebondalem	1.158.953.262
13	Dana Kapitasi JKN Puskemas Banjardawa	1.903.495.643
14	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kabunan	72.181.123
15	Dana Kapitasi JKN Puskemas Jebed	632.028.516
16	Dana Kapitasi JKN Puskemas Petarukan	2.856.509.384
17	Dana Kapitasi JKN Puskemas Klareyan	0
18	Dana Kapitasi JKN Puskemas Losari	1.582.799.938
19	Dana Kapitasi JKN Puskemas Purwoharjo	274.204.347
20	Dana Kapitasi JKN Puskemas Sarwodadi	678.091.545
21	Dana Kapitasi JKN Puskemas Rowosari	1.007.891.698
22	Dana Kapitasi JKN Puskemas Mojo	270.848.732
23	Dana Kapitasi JKN Puskemas Cikadu	1.420.116.500
24	Dana Kapitasi JKN Puskemas Jatirojom	1.352.819.646
25	Dana Kapitasi JKN Puskemas Karangasem	1.445.099.197
Jumlah		27.866.410.036,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp2.144.287.570.235,00 atau 98,46% dari anggarannya sebesar Rp2.177.734.963.000,00 dan 103,26% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.076.664.463.648,00.

Pendapatan Transfer - LRA		2022		Prosentase	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.640.980.124.000,00	1.616.650.571.638,00	98,52	1.549.611.665.251,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	325.087.954.000,00	324.866.407.900,00	99,93	355.785.946.000,00
4	Transfer Pemerintahan Provinsi	211.666.885.000,00	202.770.590.697,00	95,80	171.266.852.397,00
Jumlah		2.177.734.963.000,00	2.144.287.570.235,00	98,46	2.076.664.463.648,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	32.878.251.000,00	34.494.325.916,00	104,92	40.467.024.318,00
2	Bagi Hasil SDA - LRA	4.086.455.000,00	4.448.861.466,00	108,87	4.260.156.619,00
4	Dana Alokasi Umum - LRA	1.103.875.239.000,00	1.103.835.467.035,00	100,00	1.107.792.827.000,00
5	Dana Alokasi Khusus - LRA	500.140.179.000,00	473.871.917.221,00	94,75	397.091.657.314,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.640.980.124.000,00	1.616.650.571.638,00	98,52	1.549.611.665.251,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp1.616.650.571.638,00 atau 98,52% dari anggaran Rp1.640.980.124.000,00 dan 104,33% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.549.611.665.251,00. Adapun penjelasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak–LRA

Bagi Hasil Pajak TA 2022 realisasi sebesar Rp34.494.325.916,00 atau 104,92% dari anggarannya sebesar Rp32.878.251.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari PBB	9.789.872.000,00	11.137.937.292,00	113,77	15.151.556.568,00
2	Bagi Hasil dari PPh Ps.25 dan Ps.29 WP orang pribadi dalam negeri	14.301.429.000,00	13.909.838.204,00	97,26	1.653.210.968,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	8.786.950.000,00	9.446.550.420,00	107,51	8.352.131.167,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan [PPh] Pasal 21				15.310.125.615,00
Jumlah		32.878.251.000,00	34.494.325.916,00	104,92	40.467.024.318,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam–LRA

Bagi Hasil SDA TA 2022 realisasi sebesar Rp4.448.861.466,00 atau 108,87% dari anggarannya sebesar Rp4.086.455.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil SDA - LRA		2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	1.814.532.000,00	1.814.532.515,00	100,00	2.399.334.884,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.784.838.000,00	1.958.311.000,00	109,72	1.674.500.150,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	292.629.000,00	68.880.379,00	23,54	12.048.900,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	394.616.382,00		60.022.500,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	193.540.000,00	207.356.609,00	107,14	106.986.859,00
6	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara	916.000,00	5.164.581,00	563,82	7.263.326,00
Jumlah		4.086.455.000,00	4.448.861.466,00	108,87	4.260.156.619,00

5.1.1.2.1.3 DanaAlokasi Umum (DAU)–LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 realisasi Rp1.103.835.467.035,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.103.875.239.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.2.1.4 DanaAlokasi Khusus (DAK)–LRA

Dana AlokasiKhusus (DAK) TA 2022 realisasi sebesar Rp473.871.917.221,00 atau 94,75% dari anggaran Rp500.140.179.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Fisik realisasinya sebesar Rp54.181.680.787,00 dari anggaran sebesar Rp58.976.395.000,00.
- DAK Non Fisik realisasinya sebesar Rp419.690.236.434,00 dari anggaran sebesar Rp441.163.784.000,00.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dana Alokasi Khusus	500.140.179.000,00	473.871.917.221,00	94,75
A	DAK Fisik	58.976.395.000,00	54.181.680.787,00	91,87
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	1.003.854.000,00	1.001.415.431,00	99,76
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SD	2.803.577.000,00	2.794.960.438,00	99,69
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SMP	3.284.747.000,00	2.874.998.006,00	87,53
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SKB	0,00	0,00	-
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	-
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	4.737.399.000,00	4.212.080.100,00	88,91
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	-
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pelayanan Kefarmasian	5.879.176.000,00	5.797.304.799,00	98,61
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI-AKB	0,00	0,00	-
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	-
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler KB	1.914.662.000,00	1.630.471.864,00	85,16
12	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	-
13	DAK Fisik Penugasan Pertanian	5.411.253.000,00	5.233.128.300,00	96,71
14	DAK Fisik Penugasan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	-
15	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.426.928.000,00	17.840.922.575,00	87,34
16	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.888.272.000,00	3.555.555.555,00	91,44
17	DAK Fisik Penugasan Air Minum	2.083.103.000,00	2.081.887.000,00	99,94
18	DAK Fisik Penugasan Sanitasi	5.291.385.000,00	5.291.385.000,00	100,00
19	DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	2.252.039.000,00	1.867.571.719,00	82,93
B	DAK Non Fisik	441.163.784.000,00	419.690.236.434,00	95,13
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	209.141.802.000,00	198.590.296.871,00	94,95
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan	4.026.000.000,00	2.214.300.000,00	55,00
3	Penyelenggaraan PAUD	20.808.000.000,00	18.411.965.000,00	88,49
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	3.171.000.000,00	3.112.500.000,00	98,16
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - BOK	2.453.910.000,00	2.786.946.955,00	113,57
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00
7	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas	13.026.483.000,00	13.607.313.000,00	104,46
8	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan	506.990.000,00	0,00	0,00
9	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Bantuan	10.809.431.000,00	10.809.431.400,00	100,00
10	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	-
11	- DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	193.196.000,00	193.196.203,00	100,00
12	- DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan	0,00	0,00	-
13	- DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan	409.396.000,00	409.396.900,00	100,00
14	- DAK Non Fisik BOS Reguler	175.809.900.000,00	169.154.090.105,00	96,21
15	- DAK Non Fisik PK2UM	400.800.000,00	400.800.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA berupa Dana Penyesuaian terdiri dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah, dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	320.431.408.000,00	320.209.861.900,00	99,93	327.890.826.000,00
2	Dana Insentif Daerah	4.656.546.000,00	4.656.546.000,00	100,00	27.895.120.000,00
Jumlah		325.087.954.000,00	324.866.407.900,00	99,93	355.785.946.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian TA 2022 sebesar Rp324.866.407.900,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp325.087.954,00 dan 91,31% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp355.785.946.000,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA berasal dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LRA

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp190.281.923.697,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp197.881.885.000,00 dan 111,67% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp170.393.852.397,00. Adapun rincian realisasi Bagi Hasil Pajak berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng No. 973/071.1/TH 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	46.944.610.000,00	44.222.527.023,00	94,20	43.143.715.156,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	32.022.467.000,00	25.065.197.945,00	78,27	27.338.485.533,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	45.813.134.000,00	45.421.002.446,00	99,14	38.611.868.655,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP)	127.854.000,00	128.100.019,00	100,19	127.307.759,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	72.973.820.000,00	75.445.096.264,00	103,39	61.172.475.294,00
Jumlah		197.881.885.000,00	190.281.923.697,00	96,16	170.393.852.397,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan–LRA

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp12.488.667.000,00 atau 90,60% dari anggaran sebesar Rp13.785.000.000,00. Bantuan keuangan dari Pemprov realisasinya % disebabkan paket pekerjaan peningkatan jalan Gejos – Tlagasana waktu pelaksanaan pekerjaannya tidak cukup sehingga gagal kontrak.



Bantuan Keuangan		2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan					
1	TMMD	685.000.000,00	685.000.000,00	100,00	753.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi Bid Pendidikan	350.000.000,00	349.667.000,00	99,90	120.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi (SPPD)				0,00
4	Bantuan Keuangan Provinsi Sapras	12.750.000.000,00	11.454.000.000,00	89,84	0,00
5	Bantuan Provinsi LPJU				0,00
Jumlah		13.785.000.000,00	12.488.667.000,00	90,60	873.000.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah–LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 tidak ada dan realisasi TA 2021 sebesar Rp162.971.470.000,00.

Lain-lain Pendapatan yang sah		2022		2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah :				
1	Pendapatan dari Pemerintah	0.00	0.00	6,000,000,000.00
2	Penerimaan Hibah Dana BOS	0.00	0.00	156,971,470,000.00
Jumlah		-	-	162,971,470,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2. BELANJA

Belanja dan Transfer Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.504.262.139.265,00 dari anggaran sebesar Rp2.690.086.364.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Daerah	2.220.152.355.000,00	2.034.549.676.370,00	91,64	2.026.616.790.669,00
2	Transfer Daerah	469.934.009.000,00	469.712.462.895,00	99,95	497.941.994.495,00
	Jumlah	2.690.086.364.000,00	2.504.262.139.265,00	93,09	2.524.558.785.164,00

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Pada TA 2022 dan 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang terdapat 41 OPD, dimana Kepala OPD berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021, sebagai berikut:

Belanja Daerah	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Operasi	2.044.130.153.745,00	1.881.204.645.821,00	92,03	1.836.746.106.662,00
2 Belanja Modal	169.445.872.255,00	150.611.740.899,00	88,88	180.049.321.707,00
3 Belanja Tidak Terduga	6.576.329.000,00	2.733.289.650,00	41,56	9.821.362.300,00
Jumlah	2.220.152.355.000,00	2.034.549.676.370,00	91,64	2.026.616.790.669,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp2.034.549.676.370,00 atau 91,64% dari anggaran sebesar Rp2.220.152.355.000,00 dan 100,39% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.026.616.790.669,00.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang bermanfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Belanja Operasi	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Pegawai	1.240.277.204.030,00	1.141.227.695.540,00	92,01	1.093.751.149.412,00
2 Belanja Barang	751.464.985.044,00	691.869.170.581,00	92,07	661.149.902.867,00
3 Hibah	40.511.864.671,00	38.625.255.700,00	95,34	76.596.757.383,00
4 Bantuan Sosial	11.876.100.000,00	9.482.524.000,00	79,85	5.248.297.000,00
Jumlah	2.044.130.153.745,00	1.881.204.645.821,00	92,03	1.836.746.106.662,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp1.881.204.645.821,00 atau 92,03% dari anggaran Rp2.044.130.153.745,00 dan 102,42% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.836.746.106.662,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp1.141.227.695.540,00 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp1.240.277.204.030,00 dan 104,34% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.093.751.149.412,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp1.141.227.695.540,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja pegawai OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Gaji dan Tunjangan ASN	709.807.820.500,00	672.929.313.139,00	94,80	660.053.374.046,00
2 Tambahan Penghasilan ASN	150.522.533.000,00	136.973.663.391,00	91,00	114.911.779.308,00
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	226.387.146.264,00	212.730.125.506,00	93,97	228.413.138.701,00
4 Gaji dan Tunjangan DPRD	27.669.276.000,00	27.655.728.096,00	99,95	29.385.635.686,00
5 Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.903.665.736,00	1.188.369.873,00	62,43	1.185.033.735,00
6 Penerimaan Lainnya a Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	848.000.000,00	752.800.000,00	88,77	891.208.895,00
7 Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	-	0,00
8 Belanja Pegawai BLUD	123.138.762.530,00	88.997.695.535,00	72,27	58.910.979.041,00
Jumlah	1.240.277.204.030,00	1.141.227.695.540,00	92,01	1.093.751.149.412,00

Rincian Belanja Pegawai dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	BELANJA PEGAWAI				JUMLAH
		SP2D		PENGESEHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	Dindikbud	677.185.871.599,00	1.785.227.198,00			678.971.098.797,00
2	Dinkes	101.710.570.166,00	330.952.016,00	66.710.767.847,00	22.286.927.688,00	191.039.217.717,00
3	DPU & PR	15.082.406.999,00	542.561.680,00			15.624.968.679,00
4	Disperkim	5.573.192.288,00	189.150.835,00			5.762.343.123,00
5	Satpol PP	7.509.903.450,00	268.207.918,00			7.778.111.368,00
6	BPPD	4.030.906.508,00	143.032.655,00			4.173.939.163,00
7	Dinsos-PPKBPPPA	4.346.018.772,00	176.793.427,00			4.522.812.199,00
8	Disnaker	4.913.386.929,00	174.945.987,00			5.088.332.916,00
9	DLH	13.509.332.743,00	351.252.417,00			13.860.585.160,00
10	Disdukcatpil	5.539.786.601,00	227.357.139,00			5.767.143.740,00
11	Dinpermasdes	4.551.702.606,00	200.921.928,00			4.752.624.534,00
12	Dishub	7.452.291.915,00	256.505.873,00			7.708.797.788,00
13	Diskominfo	4.789.455.149,00	190.418.385,00			4.979.873.534,00
14	Diskoperindag	18.495.040.812,00	543.569.597,00			19.038.610.409,00
15	DPMPTP	3.400.929.409,00	134.485.958,00			3.535.415.367,00
16	Dinpusarda	3.021.197.017,00	116.976.088,00			3.138.173.105,00
17	Disperik	4.260.297.489,00	171.410.286,00			4.431.707.775,00
18	Disparpora	6.629.365.169,00	270.444.606,00			6.899.809.775,00
19	Disperitan	14.240.821.184,00	540.420.423,00			14.781.241.607,00
20	Sekda	20.258.595.740,00	899.005.040,00			21.157.600.780,00
21	Setwan	32.553.729.293,00	148.177.682,00			32.701.906.975,00
22	Bappeda	5.453.080.919,00	264.046.531,00			5.717.127.450,00
23	BPKAD	5.578.689.591,00	261.568.096,00			5.840.257.687,00
24	Bapenda	11.120.827.312,00	249.591.049,00			11.370.418.361,00
25	BKD	6.596.834.446,00	267.514.236,00			6.864.348.682,00
26	Inspektorat	7.503.760.482,00	355.129.768,00			7.858.890.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	BELANJA PEGAWAI				JUMLAH
		SP2D		PENGESEHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
27	Kec. Moga	1.828.426.898,00	63.479.030,00			1.891.905.928,00
28	Kec. Pulosari	1.895.952.077,00	75.066.902,00			1.971.018.979,00
29	Kec. Belik	2.208.533.687,00	79.176.490,00			2.287.710.177,00
30	Kec. Watukumpul	1.844.529.439,00	66.955.216,00			1.911.484.655,00
31	Kec. Bodeh	2.142.570.581,00	89.174.826,00			2.231.745.407,00
32	Kec. Bantarbolang	1.966.745.347,00	71.976.582,00			2.038.721.929,00
33	Kec. Randudongkal	2.130.003.174,00	78.528.043,00			2.208.531.217,00
34	Kec. Pemalang	11.231.818.990,00	396.424.139,00			11.628.243.129,00
35	Kec. Taman	5.245.823.577,00	177.480.821,00			5.423.304.398,00
36	Kec. Petarukan	3.297.697.474,00	122.905.693,00			3.420.603.167,00
37	Kec. Ampelgading	2.087.894.766,00	93.987.931,00			2.181.882.697,00
38	Kec. Comal	3.313.958.084,00	123.707.203,00			3.437.665.287,00
39	Kec. Ulujami	2.166.944.539,00	93.929.074,00			2.260.873.613,00
40	Kec. Warungpring	1.919.402.099,00	78.161.164,00			1.997.563.263,00
41	Bakesbangpol	2.874.495.209,00	96.589.544,00			2.971.084.753,00
		1.041.462.790.529,00	10.767.209.476,00	66.710.767.847,00	22.286.927.688,00	1.141.227.695.540,00

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022 sebesar Rp1.141.227.695.540,00 terdiri dari :

- Melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp1.052.230.000.005,00 berupa :
 - Murni belanja untuk TA. 2022 sebesar Rp1.041.462.790.529,00;
 - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya sebesar Rp10.767.209.476,00 berupa pembayaran atas TPP Bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada Januari 2022, terdiri dari :
 - ✓ Iuran Asuransi Kesehatan untuk TPP sebesar Rp387.468.476,00; dan
 - ✓ TPP sebesar Rp10.379.741.000,00.
- Melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp88.997.695.535,00 yaitu Belanja Pegawai BLUD pada Dinkes berupa :
 - Murni belanja untuk TA. 2022 sebesar Rp66.710.767.847,00;
 - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya sebesar Rp22.286.927.688,00 berupa pembayaran atas Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022.

Kondisi kepegawaian dan anggota DPRD di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 terdiri dari 10.544 ASN terdiri dari : 8.835 PNS; 25 CPNS; 1.684 PPPK serta 50 Anggota DPRD.

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp691.869.170.581,00 atau 92,07% dari anggaran sebesar Rp751.464.985.044,00 dan 104,65% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp661.149.902.867,00. Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp691.869.170.581,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja barang seluruh OPD, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Belanja Barang	2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	94.934.452.256,00	85.397.582.663,00	89,95	94.035.228.749,00
2	Belanja Jasa	248.745.339.696,00	224.783.907.823,00	90,37	246.672.992.270,00
3	Belanja Pemeliharaan	87.917.051.369,00	85.250.661.376,00	96,97	96.486.814.671,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	55.218.285.983,00	50.096.035.233,00	90,72	37.327.067.819,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	43.778.956.770,00	40.477.165.558,00	92,46	18.078.153.900,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	146.531.768.000,00	138.764.428.566,00	94,70	127.694.546.618,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.339.130.970,00	67.099.389.362,00	-	40.855.098.840,00
	Jumlah	751.464.985.044,00	691.869.170.581,00	92,07	661.149.902.867,00

Rincian Belanja Barang dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	BELANJA BARANG				JUMLAH
		SP2D		PENGESAHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	Dindikbud	21.586.674.455,00	10.660.508,00	160.208.418.216,00		181.805.753.179,00
2	Dinkes	79.493.229.567,00	10.086.182.982,00	105.613.569.705,00	12.129.722.002,00	207.322.704.256,00
3	DPU & PR	76.995.645.963,00	14.599.675,00			77.010.245.638,00
4	Disperkim	22.317.884.436,00	1.262.117.225,00			23.580.001.661,00
5	Satpol PP	5.064.705.054,00	2.686.051,00			5.067.391.105,00
6	BPPBD	2.426.000.562,00	6.844.857,00			2.432.845.419,00
7	Dinsos-PPKBPPPA	20.738.719.050,00	16.186.242,00			20.754.905.292,00
8	Disnaker	3.464.806.991,00	11.581.338,00			3.476.388.329,00
9	DLH	11.982.249.677,00	10.553.097,00			11.992.802.774,00
10	Disdukcapil	5.068.110.906,00	17.075.322,00			5.085.186.228,00
11	Dinpermasdes	6.881.711.707,00	8.412.349,00			6.890.124.056,00
12	Dishub	6.508.149.986,00	17.372.038,00			6.525.522.024,00
13	Diskominfo	11.947.380.589,00	22.909.377,00			11.970.289.966,00
14	Diskoperindag	11.549.429.254,00	14.261.333,00			11.563.690.587,00
15	DPMPTP	2.695.646.139,00	8.342.448,00			2.703.988.587,00
16	Dinpusarda	6.832.603.645,00	7.930.834,00			6.840.534.479,00
17	Disperik	1.559.108.059,00	9.335.900,00			1.568.443.959,00
18	Disparpora	3.031.766.119,00	26.564.314,00			3.058.330.433,00
19	Dispartan	10.411.593.790,00	8.529.117,00			10.420.122.907,00
20	Setda	23.763.886.507,00	79.442.503,00			23.843.329.010,00
21	Setwan	22.895.250.609,00	23.173.450,00			22.918.424.059,00
22	Bappeda	5.612.012.272,00	15.303.232,00			5.627.315.504,00
23	BPKAD	7.437.333.780,00	20.096.332,00			7.457.430.112,00
24	Bapenda	3.515.007.762,00	9.981.628,00			3.524.989.390,00
25	BKD	5.734.475.708,00	16.176.522,00			5.750.652.230,00
26	Inspektorat	3.922.447.670,00	8.248.503,00			3.930.696.173,00
27	Kec. Moga	699.790.236,00	1.815.264,00			701.605.500,00
28	Kec. Pulosari	825.535.251,00	2.235.171,00			827.770.422,00
29	Kec. Belik	673.594.269,00	1.425.440,00			675.019.709,00
30	Kec. Watukumpul	694.750.689,00	1.480.040,00			696.230.729,00
31	Kec. Bodeh	816.206.358,00	2.363.642,00			818.570.000,00
32	Kec. Bantarbolang	720.749.652,00	1.951.113,00			722.700.765,00
33	Kec. Randudongkal	731.223.216,00	1.278.784,00			732.502.000,00
34	Kec. Pemalang	3.430.043.761,00	8.203.273,00			3.438.247.034,00
35	Kec. Taman	1.668.678.605,00	5.202.438,00			1.673.881.043,00
36	Kec. Petarukan	1.513.531.609,00	3.673.642,00			1.517.205.251,00
37	Kec. Ampelgading	886.525.100,00	1.390.500,00			887.915.600,00
38	Kec. Comal	1.175.721.066,00	2.487.155,00			1.178.208.221,00
39	Kec. Ulujami	822.026.148,00	3.284.031,00			825.310.179,00
40	Kec. Warungpring	793.264.856,00	785.144,00			794.050.000,00
41	Bakesbangpol	3.255.934.794,00	1.911.977,00			3.257.846.771,00
		402.143.405.867,00	11.774.054.791,00	265.821.987.921,00	12.129.722.002,00	691.869.170.581,00

Realisasi Belanja Barang TA. 2022 sebesar Rp691.869.170.581,00 terdiri dari :

- Melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp413.917.460.658,00 berupa :



- Murni belanja untuk TA. 2022 sebesar Rp402.143.405.867,00;
- Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Barang tahun sebelumnya sebesar Rp11.774.054.791,00 berupa pembayaran atas Jasa Kantor Bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada Januari 2022, terdiri dari :
 - ✓ Belanja Telepon sebesar Rp29.192.550,00;
 - ✓ Belanja Air sebesar Rp38.864.260,00;
 - ✓ Belanja Listrik sebesar Rp1.695.032.782,00;
 - ✓ Belanja Internet sebesar Rp59.816.334,00;
 - ✓ Belanja Surat Kabar sebesar Rp790.000,00; dan
 - ✓ Belanja Tenaga Kesehatan sebesar Rp9.950.358.975,00.
- Melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp277.951.709.923,00 berupa :
 - Murni belanja untuk TA. 2022 sebesar Rp265.821.947.921,00 terdiri dari :
 - ✓ Belanja Barang BLUD pada Dinkes (RSUD) sebesar Rp55.191.390.302,00;
 - ✓ Belanja Barang JKN pada Dinkes (Puskesmas) sebesar Rp50.422.179.403,00;
 - ✓ Belanja Barang BOS pada Dindikbud sebesar Rp138.764.428.566,00;
 - ✓ Belanja Barang BOP PAUD pada Dindikbud sebesar Rp18.334.380.650,00;
 - ✓ Belanja Barang BOP Pendidikan Kesetaraan pada Dindikbud sebesar Rp3.109.609.000,00;
 - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Barang tahun sebelumnya sebesar Rp12.129.722.002,00 berupa pembayaran atas Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022 terdiri dari :
 - ✓ Belanja Barang BLUD untuk utang obat-obatan sebesar Rp7.884.426.300,00;
 - ✓ Belanja Barang BLUD untuk utang bahan kimia sebesar Rp3.656.447.457,00;
 - ✓ Belanja Barang BLUD untuk utang telepon, air, listrik, dan internet sebesar Rp178.785.964,00;
 - ✓ Belanja Barang BLUD untuk utang pengelolaan limbah sebesar Rp38.579.807,00;
 - ✓ Belanja Barang BLUD untuk utang premi asuransi sebesar Rp149.759.532,00; dan
 - ✓ Belanja Barang JKN sebesar Rp221.722.942,00 untuk utang tenaga perawatan kesehatan pada puskesmas yaitu pada :
 - Puskesmas Banyumudal sebesar Rp34.754.080,00;
 - Puskesmas Warungpring sebesar Rp12.569.040,00;
 - Puskesmas Mulyoharjo sebesar Rp42.566.372,00;
 - Puskesmas Banjardawa sebesar Rp37.821.922,00;
 - Puskesmas Purwoharjo sebesar Rp47.258.266,00;
 - Puskesmas Cikadu sebesar Rp20.700.734,00; dan
 - Puskesmas Jatiroyom sebesar Rp26.052.528,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp38.625.255.700,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp40.511.864.671,00 dan 50,43% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp76.596.757.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.520.600.000,00	6.438.001.846,00	98,73	7.187.610.000,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.057.349.671,00	31.253.338.854,00	94,54	68.475.232.383,00
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00	933.915.000,00	100,00	933.915.000,00
Jumlah Belanja Hibah		40.511.864.671,00	38.625.255.700,00	95,34	76.596.757.383,00

Besaran Hibah dari masing-masing OPD pemberi hibah adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dindikbud	5.114.231.605,00
2	Dinkes	1.089.342.000,00
3	DPU	6.714.992.846,00
4	Dinsos KBPP	680.000.000,00
5	DLH	56.785.000,00
6	Dinpermasdes	30.000.000,00
7	Dishub	89.910.000,00
8	Diskominfo	50.000.000,00
9	Diskoperindag	577.500.000,00
10	Disperik	2.202.046.490,00
11	Disparpora	2.429.850.000,00
12	Dispertan	5.133.702.750,00
13	Setda	13.130.000.009,00
14	Bakesbangpol	1.326.895.000,00
Jumlah		38.625.255.700,00

Belanja Hibah sebesar Rp38.625.255.700,00 diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa terdapat pada beberapa OPD. Jenis Hibah yang diberikan serta OPD pemberi hibah terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	OPD Pemberi Hibah
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.438.001.846,00	
	Hibah Barang :	6.438.001.846,00	
	- Polres	3.596.531.088,00	DPU
	- Kodim	1.768.921.300,00	
	- Kejari	907.639.458,00	
	- Polres (e-TLE)	89.910.000,00	Dishub
	- Polres (Binlat Reputasi)	75.000.000,00	Disparpora



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Jumlah	OPD Pemberi Hibah
2	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.253.338.854,00	
	Hibah Uang :	23.339.500.009,00	
	- Dewan Pendidikan	100.000.000,00	Dindikbud
	- Lembaga Pendidikan	2.500.000.000,00	
	- :Lembaga Kebudayaan	175.000.000,00	
	- PMI	250.000.000,00	Dinkes
	- Kerang Taruna	500.000.000,00	Dinsos KBPP
	- Lembaga Sosial Kemasyarakatan (Panti Wreda & Panti Asuhan)	180.000.000,00	
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat (Komunitas Pemuda Sadar Digital)	50.000.000,00	Diskominfo
	- Dekopinda	100.000.000,00	Diskoperindag
	- Kelompok Kewirausahaan (KUB)	427.500.000,00	
	- Koperasi	50.000.000,00	
	- Nelayan	1.791.000.000,00	Disperik
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat	15.000.000,00	
	- Pokdarwis	50.000.000,00	Disparpora
	- Ormas	50.000.000,00	
	- KONI	1.650.000.000,00	
	- KNPI	150.000.000,00	
	- Pramuka	250.000.000,00	
	- Event Olahraga	155.000.000,00	
	- Kelompok Tani	1.473.000.000,00	Dispertan
	- BAZNAS	800.000.000,00	Setda
	- Ormas	2.481.000.000,00	
	- Keagamaan	5.845.000.009,00	
	- Lembaga Pendidikan	2.860.000.000,00	
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat	1.144.000.000,00	
	- Badan/Lembaga	293.000.000,00	Bakesbangpol
	Hibah Barang :	7.913.838.845,00	
	- Lembaga Pendidikan	2.339.231.605,00	Dindikbud
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat	839.342.000,00	Dinkes
	- Masjid Agung Pemalang & Makam mBah Nurul Kalam	441.901.000,00	DPU
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat (Timbangan, Gerobak Sampah)	56.785.000,00	DLH
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat	30.000.000,00	Dinpermasdes
	- Koperasi	87.819.000,00	Disperik
	- Lembaga Keswadayaan Masyarakat	308.227.490,00	
	- Event Olahraga	49.850.000,00	Disparpora
	- Kelompok Tani	3.660.702.750,00	Dispertan
	- Badan/Lembaga	99.980.000,00	Bakesbangpol
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00	
	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	320.302.500,00	Bakesbangpol
	- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	80.989.500,00	
	- Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	25.768.500,00	
	- Partai Golongan Karya (Golkar)	119.035.500,00	
	- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	176.341.500,00	
	- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	118.639.500,00	
	- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	92.838.000,00	
	Jumlah	38.625.255.700,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Dari realisasi Belanja Hibah sebesar Rp38.625.255.700,00 terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban sebesar Rp8.531.500.000,00 atas hibah yang diterima. Di antara sejumlah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.531.500.000,00 terdapat setoran/pengembalian hibah sebesar Rp1.305.000.000,00 yang diterima pemda pada tanggal 13 Februari 2023.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp9.482.524.000,00 atau 79,85% dari anggaran sebesar Rp11.876.100.000,00 dan 180,68% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.248.297.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, badan/lembaga yaitu :

Belanja Bantuan Sosial	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bantuan Sosial kepada Individu	11.286.300.000,00	9.152.795.000,00	81,10	2.236.370.000,00
2 Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	-	3.006.427.000,00
3 Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	589.800.000,00	329.729.000,00	55,91	5.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	11.876.100.000,00	9.482.524.000,00	79,85	5.248.297.000,00

Besaran Bantuan Sosial dari masing-masing OPD pemberi bantuan sosial adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dindikbud	2.364.115.000,00
2	Disperkim	235.000.000,00
3	Dinsos KBPP	5.884.409.000,00
4	Diskoperindag	999.000.000,00
Jumlah		9.482.524.000,00

Belanja Bantuan Sosial TA. 2022 sebesar Rp9.482.524.000,00 diberikan dalam bentuk uang dan barang terdapat pada beberapa OPD. Jenis Bantuan Sosial yang diberikan serta OPD pemberi bantuan sosial terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	OPD Pemberi Bansos
1	Bantuan Sosial kepada Individu	9.152.795.000,00	
	Bansos Uang :	6.008.650.000,00	
	- Individu	235.000.000,00	Disperkim
	- Pengobatan/Perawatan	50.000.000,00	Dinsos KBPP
	- Alat Bantu & Penyandang Disabilitas	864.000.000,00	
	- Orang Kehabisan Bekal dan Terlantar	363.550.000,00	
	- Kelompok Sosial Masyarakat	3.497.100.000,00	
	- UMKM	999.000.000,00	Diskoperindag



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Jumlah	OPD Pemberi Bansos
	Bansos Barang :	3.144.145.000,00	
	- Lembaga Pendidikan (SD & SMP)	2.364.115.000,00	Dindikbud
	- Alat Bantu & Penyandang Disabilitas	580.280.000,00	Dinsos KBPP
	- Orang Kehabisan Bekal dan Terlantar	199.750.000,00	
2	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	329.729.000,00	
	Bansos Barang :	329.729.000,00	
	- Alat Bantu & Penyandang Disabilitas	129.980.000,00	Dinsos KBPP
	- Orang Kehabisan Bekal dan Terlantar	199.749.000,00	
	Jumlah	9.482.524.000,00	

Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang relatif rendah ini disebabkan karena adanya realisasi Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya di bawah 80% terdapat pada :

OPD		2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Disperkim	1.315.000.000,00	235.000.000,00	17,87
2	Setda	260.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.575.000.000,00	235.000.000,00	14,92

- pada Disperkim capaian realisasi 17,87% dikarenakan pengadaan tanah gagal, sehingga bansos berupa rumah korban bencana tidak terealisasi;
- pada Setda capaian realisasi 0,00% dikarenakan kekeliruan entri tagihan bansos uang yang seharusnya masuk dalam sub kegiatan Kesejahteraan Sosial akan tetapi masuk dalam sub kegiatan di Bina Mental Spiritual

Dari realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.482.524.000,00 terdapat penyaluran bantuan sosial yang belum diterima oleh individu sebesar Rp456.000.000,00 yaitu dari Diskoperindag sebesar Rp433.800.000,00 dan Dinsos KBPP sebesar Rp22.200.000,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi TA 2022 dan 2021, sebagai berikut :

Belanja Modal		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	3.137.284.400,00	2.204.454.900,00	70,27	0,00
2	Peralatan dan Mesin	66.677.478.029,00	58.592.301.185,00	87,87	63.839.003.719,00
3	Gedung dan Bangunan	13.472.215.536,00	11.451.201.077,00	85,00	53.414.838.586,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.010.042.290,00	58.641.737.125,00	84,98	49.290.559.472,00
5	Aset Tetap Lainnya	13.234.436.000,00	17.292.770.608,00	130,66	13.115.960.930,00
6	Aset Lainnya	3.914.416.000,00	2.429.276.004,00	62,06	388.959.000,00
	Jumlah Belanja Modal	169.445.872.255,00	150.611.740.899,00	88,88	180.049.321.707,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp150.611.740.899,00 atau 88,88% dari anggaran sebesar Rp169.445.872.255,00 dan 83,65% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp180.049.321.707,00.

Terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran yaitu pada BM-Aset Tetap Lainnya realisasi sebesar Rp17.292.770.608,00 atau 130,66% dari anggaran sebesar Rp13.234.436.000,00 atau lebih sebesar Rp4.058.334.608,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dindikbud mengajukan permohonan pergeseran anggaran khusus Dana BOS (SD dan SMP) TA. 2022 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD tanggal 30 November 2022;
- Karena keterbatasan waktu yang ada, maka Peraturan Bupati perihal pergeseran anggaran tersebut tidak dapat diterbitkan;
- Sehubungan dengan kebutuhan mendesak akan buku ajar berdasarkan Kurikulum Merdeka, maka pengadaan buku tersebut tidak dapat dihindari, sehingga tetap dilakukan pengadaan buku.
- Berkenaan dengan hal tersebut maka kelebihan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ini dilakukan melalui pergeseran dari Belanja Barang dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

BOS SD

REKENING	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Belanja Barang BOS	98.052.523.896,00	96.464.260.665,00	(1.588.263.231,00)
BM-Peralatan dan Mesin	13.383.125.000,00	11.173.796.164,00	(2.209.328.836,00)
BM-Aset Tetap Lainnya	8.864.068.000,00	11.990.305.993,00	3.126.237.993,00
Jumlah	120.299.716.896,00	119.628.362.822,00	(671.354.074,00)

BOS SMP

REKENING	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Belanja Barang BOS	48.479.244.104,00	48.727.847.102,00	248.602.998,00
BM-Peralatan dan Mesin	3.401.435.000,00	2.711.255.770,00	(690.179.230,00)
BM-Aset Tetap Lainnya	4.122.228.000,00	5.235.158.306,00	1.112.930.306,00
Jumlah	56.002.907.104,00	56.674.261.178,00	671.354.074,00

Kemudian penjelasan lebih lanjut untuk setiap jenis belanja modal pada TA 2022 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi BM-Tanah TA 2022 sebesar Rp2.204.454.900,00 atau 70,27% dari anggaran sebesar Rp3.137.284.400,00 dan 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Realisasi BM-Tanah tersebut terdiri dari:

Belanja Modal Tanah		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	3.137.284.400,00	2.204.454.900,00	70,27	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah		3.137.284.400,00	2.204.454.900,00	70,27	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian BM-Tanah dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	REALISASI BELANJA MODAL TANAH				JUMLAH
		SP2D		PENGESAHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	Disperkim	0,00				0,00
2	BPKAD	2.204.454.900,00				2.204.454.900,00
		2.204.454.900,00	-	-	-	2.204.454.900,00

Realisasi BM-Tanah yang rendah ini disebabkan karena adanya realisasi BM-Tanah yang realisasinya di bawah 80% terdapat pada :

OPD		2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Disperkim	500.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		500.000.000,00	0,00	0,00

- pada Disperkim capaian realisasi 0,00% dikarenakan lokasi pilihan tanah yang ada tidak dapat dialihfungsikan dari lahan pertanian yaitu Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk dijadikan permukiman;

Realisasi BM-Tanah sebesar Rp2.204.454.900,00 digunakan untuk pengadaan tanah sebagai tukar menukar tanah kas desa Jraganan untuk pembangunan kantor Kecamatan Bodeh.

Dari realisasi BM-Tanah sebesar Rp2.204.454.900,00 terjadi penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.204.454.900,00, berarti adanya penambahan Aset Tetap Tanah seluruhnya dipengaruhi dari belanja modal.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi BM-Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp58.592.301.185,00 atau 87,87% dari anggaran sebesar Rp66.677.478.029,00 dan 91,78% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp63.839.003.719,00. Realisasi BM-Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Alat Besar	136.744.168,00	126.413.200,00	92,45	1.945.842.500,00
2	BM Alat Angkutan	2.867.949.092,00	2.171.708.699,00	75,72	6.278.286.212,00
3	BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	688.822.400,00	661.852.000,00	96,08	175.295.000,00
4	BM Alat Pertanian	849.159.000,00	526.835.000,00	62,04	2.347.291.054,00
5	BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.404.407.026,00	2.871.955.869,00	84,36	6.881.815.736,00
6	BM Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.021.866.560,00	1.957.162.025,00	96,80	897.802.864,00
7	BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	31.751.792.872,00	29.018.492.131,00	91,39	12.856.715.027,00
8	BM Alat Laboratorium	232.863.350,00	199.166.080,00	85,53	3.850.690.150,00
9	BM Komputer	24.448.995.053,00	20.790.557.181,00	85,04	9.053.680.182,00
10	BM Alat Eksplorasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	43.533.000,00
11	BM Alat Keselamatan Kerja	45.800.000,00	45.800.000,00	100,00	15.908.400,00
12	BM Alat Peraga	0,00	0,00	-	258.699.994,00
13	BM Rambu-rambu	200.000.000,00	199.060.000,00	99,53	534.045.000,00
14	BM Peralatan Olahraga	21.078.508,00	15.299.000,00	72,58	267.615.200,00
15	BM Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	-	16.703.005.803,00
16	BM Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	-	1.728.777.597,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		66.677.478.029,00	58.592.301.185,00	87,87	63.839.003.719,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pada Tahun 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Dindikbud dianggarkan pada Belanja Modal Komputer, sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada Dinkes (RSUD) dianggarkan pada Belanja Modal Alat Kedokteran.

Rincian BM-Peralatan dan Mesin dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				JUMLAH
		SP2D		PENGESEHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	Dindikbud	4.033.183.800,00		13.821.154.086,00		17.854.337.886,00
2	Dinkes	3.972.029.199,00		27.197.126.771,00		31.169.155.970,00
3	DPU & PR	629.412.507,00				629.412.507,00
4	Disperkim	43.800.000,00				43.800.000,00
5	Satpol PP	19.931.000,00				19.931.000,00
6	BPPBD	281.844.000,00				281.844.000,00
7	Dinsos-PPKBPPPA	692.986.478,00				692.986.478,00
8	Disnaker	13.318.800,00				13.318.800,00
9	DLH	122.526.000,00				122.526.000,00
10	Disdukcatpil	500.243.420,00				500.243.420,00
11	Dinpermasdes	10.000.000,00				10.000.000,00
12	Dishub	443.433.093,00				443.433.093,00
13	Diskominfo	464.647.000,00				464.647.000,00
14	Diskoperindag	577.264.500,00				577.264.500,00
15	DPMPTP	82.253.273,00				82.253.273,00
16	Dinpusarda					-
17	Disperik	63.350.000,00				63.350.000,00
18	Disparpora	126.899.324,00				126.899.324,00
19	Disperfan	490.479.000,00				490.479.000,00
20	Selda	2.657.816.939,00				2.657.816.939,00
21	Selwan	112.813.000,00				112.813.000,00
22	Bappeda	35.133.620,00				35.133.620,00
23	BPKAD	669.594.500,00				669.594.500,00
24	Bapenda	433.652.200,00				433.652.200,00
25	BKD	135.957.000,00				135.957.000,00
26	Inspektorat	177.897.620,00				177.897.620,00
27	Kec. Moga	66.026.000,00				66.026.000,00
28	Kec. Pulosari					-
29	Kec. Belik	55.717.721,00				55.717.721,00
30	Kec. Watukumpul	32.937.400,00				32.937.400,00
31	Kec. Bodeh	66.464.000,00				66.464.000,00
32	Kec. Bantarbolang	82.145.234,00				82.145.234,00
33	Kec. Randudongkal	66.309.500,00				66.309.500,00
34	Kec. Pemalang	72.276.800,00				72.276.800,00
35	Kec. Taman	60.415.000,00				60.415.000,00
36	Kec. Petarukan	65.900.000,00				65.900.000,00
37	Kec. Ampelgading	52.176.000,00				52.176.000,00
38	Kec. Comal	9.500.000,00				9.500.000,00
39	Kec. Ulujami	18.681.400,00				18.681.400,00
40	Kec. Warungpring	44.500.000,00				44.500.000,00
41	Bakesbangpol	90.505.000,00				90.505.000,00
		17.574.020.328,00	-	41.018.280.857,00	-	58.592.301.185,00

Realisasi BM-Peralatan dan Mesin TA. 2022 sebesar Rp58.592.301.185,00 terdiri dari :

- Melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp17.574.020.328,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022
- Melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp41.018.280.857,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp13.821.154.086,00 terdiri dari :
 - ✓ Belanja Modal dari Dana BOS sebesar Rp13.740.678.736,00 berupa Belanja Modal Komputer sebesar Rp13.740.678.736,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- ✓ Belanja Modal dari Dana BOP PAUD sebesar Rp77.584.350,00 berupa:
 - Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp38.623.350,00; dan
 - Belanja Modal Komputer sebesar Rp38.961.000,00;
- ✓ Belanja Modal dari Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp2.891.000,00 berupa:
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp261.000,00; dan
 - Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.680.000,00;
- Dinkes sebesar Rp27.197.126.771,00 terdiri dari :
 - ✓ Belanja Modal dari BLUD pada RSUD sebesar Rp24.809.801,714,00 berupa Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp24.809.801.714,00;
 - ✓ Belanja Modal dari Dana JKN pada Puskesmas sebesar Rp2.387.325.057,00 berupa :
 - Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp3.300.000,00;
 - Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp625.000,00;
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp466.399.171,00;
 - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp40.514.420,00;
 - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp706.564.967,00;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp45.655.880,00; dan
 - Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.124.265.619,00.

Realisasi BM-Peralatan dan Mesin yang relatif rendah ini disebabkan karena adanya realisasi BM-Peralatan dan Mesin yang realisasinya di bawah 80% terdapat pada :

OPD	2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Bappeda	100.300.000,00	35.133.620,00	35,03
Jumlah	100.300.000,00	35.133.620,00	35,03

- pada Bappeda capaian realisasi 35,03% dikarenakan spesifikasi barang harus TKDN minimal 25% dan harga tidak sesuai dengan SSH sehingga pengadaan komputer tidak dapat terlaksana sepenuhnya:

Dari realisasi BM-Peralatan dan Mesin sebesar Rp58.592.301.185,00 terjadi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.303.987.627,00, terdapat perbedaan sebesar Rp8.711.686.442,00 , hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp16.445.232.333,00 berupa Kapitalisasi dari Belanja Non Modal, Reklas dari sesama Aset Tetap dan Aset Lainnya, Mutasi Masuk antar OPD dan Penerimaan Hibah dari instansi lain, serta mutasi pengurangan sebesar Rp7.733.545.891,00 berupa Reklas sesama Aset Tetap, Dihilangkan ke pihak lain, tidak memenuhi syarat kapitalisasi, Mutasi Keluar antar OPD, Koreksi pencatatan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Aset Tetap, serta Reklas ke Aset Lainnya. Bertambahnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebagian besar dipengaruhi dari Penerimaan Hibah Barang yaitu sebesar Rp10.139.665.410,00 dari pemerintah pusat dan instansi perbankan.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi BM–Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp11.451.201.077,00 atau 85,00% dari anggaran sebesar Rp13.472.215.536,00 dan 21,44% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp53.414.838.586,00. Realisasi BM-Gedung dan Bangunan pada TA 2022 tersebut terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2022			2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 BM Bangunan Gedung	13.365.115.536,00	11.344.503.177,00	84,88	53.127.579.886,00
2 BM Monumen	0,00	0,00	-	187.649.700,00
3 BM Bangunan Menara	107.100.000,00	106.697.900,00	99,62	0,00
4 BM Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	-	99.609.000,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.472.215.536,00	11.451.201.077,00	85,00	53.414.838.586,00

Rincian BM-Gedung dan Bangunan dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN				JUMLAH
		SP2D		PENGESEHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	Dindikbud	6.280.924.827,00				6.280.924.827,00
2	Dinkes	2.928.887.350,00		389.442.500,00		3.318.329.850,00
3	DPU & PR	199.599.000,00				199.599.000,00
9	DLH	202.107.000,00				202.107.000,00
4	Dishub	127.495.000,00				127.495.000,00
5	Diskominfo	106.697.900,00				106.697.900,00
6	DPMPPTP	219.830.000,00				219.830.000,00
7	Disperik	78.438.500,00				78.438.500,00
8	Disperian	873.819.000,00				873.819.000,00
9	Kec. Petarukan	43.960.000,00				43.960.000,00
		11.061.758.577,00	-	389.442.500,00	-	11.451.201.077,00

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan TA. 2022 sebesar Rp11.451.201.077,00 terdiri dari :

- Melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp11.061.758.577,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022;
- Melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp389.442.500,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022 yaitu pada Dinkes berupa Belanja Modal Bangunan Gedung dari BLUD sebesar Rp389.442.500,00.

Capaian realisasi BM-Gedung dan Bangunan TA 2022 masih relatif rendah akan tetapi tidak ada capaian realisasi pada OPD yang dibawah 80%. Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk pelaksanaan yaitu pekerjaan Rehab Ruang Kelas dan Laboratorium IPA SPMN 2 Ulujami.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.451.201.077,00 diantaranya digunakan untuk pengadaan :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Bangunan Gedung sebesar Rp11.344.503.177,00 terdapat pada:
 - ✓ Dindikbud sebesar Rp6.280.924.827,00 berupa pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah;
 - ✓ Dinkes sebesar Rp3.318.329.850,00 berupa renovasi/penambahan ruang puskesmas;
 - ✓ Dispartan sebesar Rp873.819.000,00 berupa rehab gedung BPP;
 - ✓ DPMPTSP sebesar Rp219.830.000,00 berupa rehab gedung dan gerai pelayanan publik;
 - ✓ DLH sebesar Rp202.107.000,00 berupa pembangunan gedung laboratorium;
 - ✓ DPU sebesar Rp199.599.000,00 berupa penataan halaman stadion Mochtar;
 - ✓ Dishub sebesar Rp127.495.000,00 berupa pembangunan gedung pos jaga;
 - ✓ Disperik sebesar Rp78.438.500,00 berupa rehab pagar keliling kolam saluran pembuangan air;
 - ✓ Kec. Petarukan sebesar Rp43.960.000,00 berupa rehab gedung;
- Bangunan Menara sebesar Rp187.649.700,00 terdapat pada:
 - ✓ Diskominfo sebesar Rp106.697.900,00 berupa pembangunan tower;

Dari realisasi BM-Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.451.201.077,00 terjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.675.069.329,00, terdapat perbedaan sebesar Rp2.223.868.252,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp118.229.005.280,00 berupa Kapitalisasi dari Belanja Non Modal, Mutasi Masuk antar OPD, dan Penerimaan Hibah dari kelompok masyarakat, serta mutasi pengurangan sebesar Rp116.005.137.028,00 berupa tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan Mutasi Keluar antar OPD. Dengan demikian, sebagian besar penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dipengaruhi dari Penerimaan Hibah sebesar Rp2.100.687.750,00 berupa hibah bangunan los dari peguyuban pedagang pasar dan penyedia barang.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 sebesar Rp58.641.737.125,00 atau 84,98% dari anggaran sebesar Rp69.010.042.290,00 dan 118,97% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp49.290.559.472,00. Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2022 tersebut terdiri dari:

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Jalan dan Jembatan	66.014.597.150,00	58.641.737.125,00	88,83	42.541.625.094,00
2	BM Bangunan Air	2.995.445.140,00	0,00	0,00	4.106.773.478,00
3	BM Instalasi	0,00	0,00	-	2.407.430.900,00
4	BM Jaringan	0,00	0,00	-	234.730.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		69.010.042.290,00	58.641.737.125,00	84,98	49.290.559.472,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	REALISASI BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI				JUMLAH
		SP2D		PENGESEHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	DPU & PR	58.093.068.125,00				58.093.068.125,00
2	Dishub	149.149.000,00				149.149.000,00
3	Diskoperindag	399.520.000,00				399.520.000,00
		58.641.737.125,00	-	-	-	58.641.737.125,00

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA. 2022 sebesar Rp58.641.737.125,00 seluruhnya direalisasikan melalui RKUD dengan penerbitan SP2D.

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang relatif rendah ini disebabkan karena adanya realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang realisasinya di bawah 80% terdapat pada :

OPD		2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Diskoperindag	3.395.445.140,00	399.520.000,00	11,77
Jumlah		3.395.445.140,00	399.520.000,00	11,77

- pada Diskoperindag capaian realisasi 11,77% dikarenakan pekerjaan pembuatan Jaringan Irigasi Calon Lokasi Pasar Pagi Pemalang tidak dilaksanakan (0,00%) disebabkan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi (dianggarkan pada Anggaran Perubahan TA. 2022);

Selain itu terdapat pekerjaan rekonstruksi jalan Tasikrejo – Pamutih (Kec. Ulujami) pada DPU yang mengalami putus kontrak (progress pembayara 89,59%).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp58.641.737.125,00 digunakan untuk :

- Jalan dan Jembatan sebesar Rp58.641.737.125,00 terdapat pada:
 - ✓ DPU sebesar Rp58.093.068.125,00 berupa rekonstruksi jalan dan rehab jembatan;
 - ✓ Diskoperindag sebesar Rp399.520.000,00 berupa pengaspalan jalan pasar dan rigid jalan pasar sayur;
 - ✓ Dishub sebesar Rp149.149.000,00 berupa pembuatan lantai kerja beton Terminal Angkot Comal.

Dari realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp58.641.737.125,00 terjadi penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp58.155.875.125,00, terdapat perbedaan selisih kurang sebesar Rp485.862.000,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp91.813.000,00 berupa Kapitalisasi dari Belanja Non Modal serta mutasi pengurangan sebesar Rp577.675.000,00 berupa tidak memenuhi syarat kapitalisasi. Dengan demikian, sebagian besar berkurangnya Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dipengaruhi dari belanja modal yang tidak menjadi aset karena berupa pemeliharaan dan jasa konsultan.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp17.292.770.608,00 atau 130,66% dari anggaran sebesar Rp13.234.436.000,00 dan 131,85% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp13.115.960.930,00. Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2022 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Bahan Perpustakaan	13.224.436.000,00	17.287.770.608,00	130,73	146.521.500,00
2	BM Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	9.840.000,00
3	BM Tanaman	0,00	0,00	-	12.715.500,00
4	BM Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	-	12.946.883.930,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		13.234.436.000,00	17.292.770.608,00	130,66	13.115.960.930,00

Pada Tahun 2022 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Dindikbud dianggarkan pada Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Rincian BM-Aset Tetap Lainnya dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA				JUMLAH
		SP2D		PENGESEHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	Dindikbud	-		17.082.526.508,00		17.082.526.508,00
2	Dinkes	2.307.000,00				2.307.000,00
3	Diskominfo	9.536.000,00				9.536.000,00
9	DPMPTSP	3.250.000,00				3.250.000,00
4	Dinpusarda	140.860.000,00				140.860.000,00
5	Setda	11.959.500,00				11.959.500,00
6	Setwan	3.452.500,00				3.452.500,00
7	Inspektorat	38.879.100,00				38.879.100,00
		210.244.100,00	-	17.082.526.508,00	-	17.292.770.608,00

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA. 2022 sebesar Rp17.292.770.608,00 terdiri dari :

- Melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp12.244.100,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022;
- Melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp17.082.526.508,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022 yaitu pada Dindikbud berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan dari Dana BOS sebesar Rp17.082.526.508,00.

Capaian realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2022 130,66%, namun demikian masih terdapat capaian pada OPD yang dibawah 80%, yaitu pada :

OPD		2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Setda	15.000.000,00	11.959.500,00	79,73
2	Setwan	8.750.000,00	3.452.500,00	39,46
3	Inspektorat	65.000.000,00	38.879.100,00	59,81
Jumlah		88.750.000,00	54.291.100,00	61,17



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- pada Setda capaian realisasi 79,73% dikarenakan pengadaan buku sudah tercukupi;
- pada Setwan capaian realisasi 39,46% dikarenakan pengadaan Lukisan tidak terealisasi disebabkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan Lukisan;
- pada Inspektorat capaian realisasi 59,81% dikarenakan pengadaan alat audio visual sudah tercukupi (efisiensi);

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.292.770.608,00 diantaranya digunakan untuk pengadaan :

- Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp17.245.641.508,00 terdapat pada:
 - ✓ Dindikbud sebesar Rp17.082.526.508,00 berupa Buku Umum;
 - ✓ Dinpusarda sebesar Rp140.860.000,00 berupa : Buku Umum, Buku Filsafat, Buku Agama, Buku Ilmu Sosial, Buku Ilmu Bahasa, Buku Matematika dan Pengetahuan Alam, Buku Ilmu Pengetahuan Praktis, Buku Arsitektur, Kesenian, serta Buku Olahraga, Geografi, Biografi, dan Sejarah;
 - ✓ Diskominfo sebesar Rp9.536.000,00 berupa Buku Umum;
 - ✓ Setda sebesar Rp6.959.500,00 berupa Buku Umum;
 - ✓ Setwan sebesar Rp3.452.500,00 berupa Buku Umum; dan
 - ✓ Dinkes sebesar Rp2.307.000,00 berupa Buku Umum;
- Bahan Perpustakaan Terekam dalam Bentuk Mikro sebesar Rp42.129.100,00 terdapat pada:
 - ✓ Inspektorat sebesar Rp38.879.200,00 berupa Audio Video;
 - ✓ DPMPTSP sebesar Rp3.250.000,00 berupa Audio Video;
- Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp5.000.000,00 terdapat pada:
 - ✓ Setda sebesar Rp5.000.000,00 berupa Alat Musik.

Dari realisasi BM-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.292.770.608,00 terjadi penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.318.163.285,00, terdapat perbedaan selisih kurang sebesar Rp780.204.854,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi pengurangan sebesar Rp974.607.323,00 berupa reklas sesama aset, diserahkan ke pihak lain/hibah, dan tidak memenuhi syarat kapitalisasi. Sebagian besar berkurangnya Aset Tetap Lainnya dipengaruhi dari belanja modal Dana BOS berupa pengadaan buku yang diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp733.075.754,00.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp2.429.276.004,00 atau 62,06% dari anggaran sebesar Rp3.914.416.000,00 dan 624,56% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp388.959.000,00. Realisasi BM-Aset Lainnya TA 2022 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Lainnya		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Aset Tidak Berwujud	3.914.416.000,00	2.429.276.004,00	62,06	388.959.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya		3.914.416.000,00	2.429.276.004,00	62,06	388.959.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian BM-Aset Lainnya dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA				JUMLAH
		SP2D		PENGESAHAN SP2B (BLUD/JKN/BOS/BOP)		
		MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	MURNI BELANJA TA. 2022	PEMBAYARAN UTANG BELANJA TAHUN SEBELUMNYA	
1	Dinkes	-		2.279.401.004,00		2.279.401.004,00
2	Disdukcatpil	24.975.000,00				24.975.000,00
3	DPMPTSP	25.000.000,00				25.000.000,00
4	BKD	99.900.000,00				99.900.000,00
5	Inspektorat	-				-
		149.875.000,00	-	2.279.401.004,00	-	2.429.276.004,00

Realisasi BM-Aset Lainnya TA. 2022 sebesar Rp2.429.276.004,00 terdiri dari :

- Melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp149.875.000,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022;
- Melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp2.279.401.004,00 berupa murni belanja modal untuk TA. 2022 yaitu pada Dinkes berupa :
 - ✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dari BLUD sebesar Rp2.271.076.004,00 pada RSUD dr. M. Ashari; dan
 - ✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dari Dana JKN sebesar Rp8.325.000,00 pada Puskesmas Bantarbolang.

Capaian realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2022 sangat rendah, masih terdapat capaian pada OPD yang dibawah 80%, yaitu pada :

OPD		2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Dinkes	3.759.416.000,00	2.279.401.004,00	60,63
2	Inspektorat	5.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		3.764.416.000,00	2.279.401.004,00	60,55

- pada Dinkes capaian realisasi 60,63% dikarenakan terdapat pengadaan barang yang belum dapat dilaksanakan;
- pada Inspektorat capaian realisasi 0,00% dikarenakan penyedia tidak siap melanjutkan pekerjaan;

Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp2.429.276.004,00 diantaranya digunakan untuk pengadaan :

- Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.429.276.004,00 terdapat pada:
 - ✓ Dinkes sebesar Rp2.279.401.004,00 berupa Software dan Peralatan Kantor;
 - ✓ BKD sebesar Rp99.900.000,00 berupa Software;
 - ✓ DPMPTSP sebesar Rp25.000.000,00 berupa Mesin Antrian; dan
 - ✓ Disdukcatpil sebesar Rp24.975.000,00 berupa Software;

Dari realisasi BM-Aset Lainnya sebesar Rp2.429.276.004,00 berupa Aset Tidak Berwujud terjadi penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp170.107.500,00, terdapat perbedaan selisih kurang sebesar Rp2.259.168.504,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi pengurangan sebesar Rp2.259.168.504,00 berupa reklas



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Dengan demikian berkurangnya Aset Tidak Berwujud dipengaruhi dari belanja modal Aset Tidak Berwujud yang direklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam maupun bencana sosial dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp2.733.289.650,00 atau 41,56% dari anggaran sebesar Rp6.576.329.000,00 dan 27,83% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp9.821.362.300,00. Realisasi Belanja Tak Terduga turun sebesar Rp7.088.072.650,00 atau 72,17% dibanding tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 kegiatan monitoring dan pengendalian melalui PPKM sudah dikurangi karena kondisi sudah membaik (kasus *covid-19* sudah berkurang).

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.733.289.650,00 digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	1.847.989.650,00
2	Penanganan Bencana Alam	523.500.000,00
3	Lain-lain (pengembalian pajak daerah dan penanganan dampak inflasi daerah)	361.800.000,00
Jumlah		2.733.289.650,00

5.1.3. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp469.712.462.895,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp469.934.009.000,00 dan 94,33% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp497.941.994.495,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.502.559.000,00	12.502.558.995,00	100,00	11.661.890.495,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	457.431.450.000,00	457.209.903.900,00	99,95	486.280.104.000,00
Jumlah Transfer		469.934.009.000,00	469.712.462.895,00	99,95	497.941.994.495,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 sebesar Rp12.502.558.995,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp12.502.559.000,00 dan 107,21% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp11.661.890.495,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Transfer Bagi Hasil Pendapatan		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.150.486.000,00	9.150.485.995,00	100,00	8.258.226.196,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.352.073.000,00	3.352.073.000,00	100,00	3.403.664.299,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		12.502.559.000,00	12.502.558.995,00	100,00	11.661.890.495,00

5.1.3.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp9.150.485.995,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp9.150.486.000,00 dan 110,80% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp8.258.226.196,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil pajak daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.1.2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 sebesar Rp3.352.073.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.352.073.000,00 dan 99,48% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.403.664.299,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan bagi hasil retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp457.209.903.900,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp457.431.450.000,00 dan 94,02% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp486.280.104.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ini terdiri dari:

Transfer Bantuan Keuangan		2022			2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	457.431.450.000,00	457.209.903.900,00	99,95	486.280.104.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		457.431.450.000,00	457.209.903.900,00	99,95	486.280.104.000,00

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 sebesar Rp457.209.903.900,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp457.431.450.000,00 dan 94,02% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp486.280.104.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp457.209.903.900,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD	113.229.695.000,00
2	Bantuan Dana Desa dari APBN (DD APBN)	320.209.861.900,00
3	Bantuan Keuangan kepada desa (Khusus)	21.354.347.000,00
4	Bantuan Keuangan untuk Pilkades	894.000.000,00
5	Bantuan keuangan untuk TMMD	1.522.000.000,00
Jumlah		457.209.903.900,00

Bantuan Keuangan Dana Desa dari APBN (DD APBN) sebesar Rp320.209.861.900,00 direalisasikan melalui Pengesahan SP2B.

**5.1.4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2021, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.1
Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

PEMBIAYAAN	2022		2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	197.195.413.000,00	197.195.413.709,00	123.924.362.435,00
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.600.000.000,00	30.600.000.000,00	7.200.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		166.595.413.709,00	116.724.362.435,00
SILPA		155.751.465.867,00	197.195.413.907,00

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 sebesar Rp.197.195.413.709,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp197.195.413.000,00, dan realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 sebesar Rp30.600.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp30.600.000.000,00.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.2
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Penerimaan Pembiayaan	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Penggunaan SILPA	197.195.413.000,00	197.195.413.709,00	123.924.362.435,00
Jumlah	197.195.413.000,00	197.195.413.709,00	123.924.362.435,00

5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA

Realisasi Penggunaan SILPA TA 2022 sebesar Rp197.195.413.709,00. Realisasi ini termasuk didalamnya dropping/transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi yang diterima/masuk rekening kas umum daerah pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.3
Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Pengeluaran Pembiayaan	2022		2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
2 Penyertaan Modal Pemda	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	7.200.000.000,00
Jumlah	30.600.000.000,00	30.600.000.000,00	7.200.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah TA 2022 sebesar Rp10.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah daerah
Tahun Anggaran 2022

No	Penyertaan Modal/Investasi pemerintah Tahun Anggaran 2022	Jumlah
1	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022	2.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022	6.000.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022	300.000.000,00
4	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng Tahun Anggaran 2022	2.000.000.000,00
5	Penyertaan Modal pada PT. BPR BKK Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022	300.000.000,00
JUMLAH		10.600.000.000,00

5.1.4.2.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2022 dan 2021 terdapat SILPA yang alokasi pada tahun anggaran berikutnya sudah terikat/ditentukan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

Tabel 5.1.4.5
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Uraian	Jumlah
2	3
SILPA Tahun Anggaran 2022	155.751.465.867,00
A SILPA Terikat (<i>harus dianggarkan kembali</i>)	72.191.923.250,00
1) SILPA JKN di Puskesmas	10.000.000.000,00
2) SILPA BLUD RSUD	48.089.795.095,00
3) SILPA Dana Insentif Daerah (DID)	27.921.884,00
4) SILPA DAK Fisik	21.510.202,00
a) Pendidikan PAUD	2.163.500,00
b) Pendidikan SD	75.000,00
5) SILPA DAK non Fisik	11.130.117.421,00
a) Tunjangan Profesi Guru	1.463.210.618,00
b) Tamsil Guru non Sertifikasi	431.697.500,00
c) Tunjangan Khusus Guru	0,00
d) SILPA BOS SDN/SMPN	126.045.207,00
j) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)	105.175,00
7) SILPA DBHCHT	2.922.578.648,00
B SILPA Tidak Terikat	83.559.542.617,00



5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Ringkasan LPSAL Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.1
Ringkasan LPSAL 2022 dan 2021

NO	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan
1	Saldo Anggaran Lebil Awal	197.195.413.709,00	123.924.362.435,00	73.271.051.274,00
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	197.195.413.709,00	123.924.362.435,00	73.271.051.274,00
3	Sub Total (1+2)	-	-	-
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	155.751.465.867,00	197.195.413.709,00	(41.443.947.842,00)
5	Sub Total (3+4)	155.751.465.867,00	197.195.413.709,00	(41.443.947.842,00)
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	-
7	Lain - Lain	-	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	155.751.465.867,00	197.195.413.709,00	(41.443.947.842,00)



5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp197.195.413.709,00. Naik sebesar Rp73.271.051.274,00 atau 59,12% dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp123.924.362.435,00

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2022 penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp197.195.413.709,00.

5.2.3. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2022 sebesar Rp155.751.465.867,00 atau turun sebesar Rp41.443.947.842,00 atau 26,61 % dari SILPA Tahun 2021 sebesar Rp197.195.413.709,00.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 sebesar Rp155.751.465.867,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. SiLPA BLUD RSUD Rp48.088.445.094,00
2. SiLPA Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp10.455.603.944,00
3. SiLPA Dana BOS SDN/ SMPN Rp91.662.687,00
4. SiLPA Kas di BUD Rp97.058.219.896,00
5. Penambahan dana cadangan dari bunga dana cadangan Rp57.534.246,00



5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun Aset terdiri dari :

- 1) **Aset lancar** adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 2) **Aset non lancar** adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.3.1.1. Aset Lancar

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 dan tanggal 31 Desember 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD dr. M. Ashari dan Kapitasi JKN (FKTP) pada Dinas Kesehatan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bendahara pada SKPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, dengan rincian sebagai berikut :

Kas dan Setara Kas		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Prosentase %
1	Kas di Kas Daerah	97.058.219.896,00	82.259.085.914,00	117,99
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	5.091.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	100.130.000,00	0,00
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	48.088.445.094,00	78.709.766.638,00	61,10
5	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.455.603.944,00	35.628.746.310,00	29,35
6	Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah	91.662.687,00	492.723.847,00	18,60
7	Kas Lainnya	504.477.327,00	-	
Jumlah		156.198.408.948,00	197.195.543.709,00	79,21



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah (BUD/PPKD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito, dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah		2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Rekening Giro	97.058.219.896,00	82.259.085.914,00
Jumlah		97.058.219.896,00	82.259.085.914,00

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Rekening Giro		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bank Jateng A/C No. 1.025.00793.2	97.058.219.896,00	82.259.085.914,00
Jumlah		97.058.219.896,00	82.259.085.914,00

Rekening giro Bank Jateng Cabang Pemalang atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan Rekening Kas Umum Daerah, yang dimaksudkan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 tidak ada, sedangkan Saldo kas di bendahara penerimaan TA 2021 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.091.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tanggal 31 Desember 2021 yang diterima setelah ditutupnya rekening kas daerah dan sudah disetor pada 4 Januari 2022.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 tidak ada. Saldo kas di bendahara pengeluaran TA 2021 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp100.000.000,00 disetor pada tanggal 3 Januari 2022. Saldo kas di bendahara pengeluaran pada Kecamatan Taman TA 2021 sebesar Rp130.000,00 merupakan pajak PPh pasal 23 yang disetor pada tanggal 6 Januari 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang berada di SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

SKPD yang menerapkan PPK-BLUD memiliki fleksibilitas untuk dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterimanya tanpa terlebih dulu menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.088.445.094,00 dan 2021 sebesar Rp78.709.766.638,00.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Prosentase %
1	RSUD dr. M. Ashari	48.088.445.094,00	78.709.766.638,00	61,10
Jumlah		48.088.445.094,00	78.709.766.638,00	61,10

Adapun Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas pada pemegang kas per 31 Desember 2022 dan 2021. Kas dan setara kas RSUD pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Kas dan Setara Kas	2022	2021
	Rp	Rp
Kas (Uang Tunai) terdiri dari:		
Kas Di Bendahara Penerimaan	33.473.524,00	64.360.570,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	10.150.003,00
Jumlah kas (Uang Tunai)	33.473.524,00	74.510.573,00
Bank terdiri dari:		
BNI No. Rek. 522726959	11.376.031.834,00	24.551.014.063,00
Bank Jateng No. Rek. 1025003515	8.287.123.649,00	36.187.123.025,00
Bank Jateng No. Rek. 1025003523	23.195.179,00	136.973.912,00
BRI No. Rek. 6901002222307	2.000.002.006,00	6.631.883,00
BNI No. Rek. 361759160	26.368.618.902,00	17.753.513.182,00
Jumlah Kas di Bank	48.054.971.570,00	78.635.256.065,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	48.088.445.094,00	78.709.766.638,00

5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah saldo kas yang berada di 25 Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.455.603.944,00 dan Rp35.628.746.310,00 dengan rincian sebagai berikut :



Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2022	2021	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	%
1	Puskesmas Banyumudal	747.332.234,00	2.999.872.385,00	24,91
2	Puskesmas Warungpring	189.181.539,00	181.651.052,00	104,15
3	Puskesmas Pulosari	260.016.252,00	888.649.514,00	29,26
4	Puskesmas Belik	2.798.296.333,00	7.137.111.902,00	39,21
5	Puskesmas Watukumpul	90.450.650,00	80.512,00	112344,31
6	Puskesmas Kebandaran	125.307,00	137.996.513,00	0,09
7	Puskesmas Bantarbolang	1.979.636.460,00	5.147.712.877,00	38,46
8	Puskesmas Randudongkal	29.448.150,00	111.241.962,00	26,47
9	Puskesmas Kalimas	150.455.617,00	100.596.437,00	149,56
10	Puskesmas Paduraksa	24.137.398,00	781.876.782,00	3,09
11	Puskesmas Mulyoharjo	74.730.501,00	61.200.910,00	122,11
12	Puskesmas Kebondalem	336.970.938,00	1.333.095.438,00	25,28
13	Puskesmas Banjardawa	233.764.217,00	436.925.879,00	53,50
14	Puskesmas Kabunan	186.502.066,00	2.057.778.677,00	9,06
15	Puskesmas Jebed	253.546.969,00	1.612.045.584,00	15,73
16	Puskesmas Petarukan	188.347.843,00	200.460.416,00	93,96
17	Puskesmas Klareyan	1.683.729.740,00	4.684.788.759,00	35,94
18	Puskesmas Losari	162.571.175,00	1.781.634.662,00	9,12
19	Puskesmas Purwoharjo	561.034.724,00	2.395.121.119,00	23,42
20	Puskesmas Sarwodadi	81.252.517,00	681.328.830,00	11,93
21	Puskesmas Rowosari	165.757.094,00	667.540.802,00	24,83
22	Puskesmas Mojo	120.038.292,00	2.046.201.268,00	5,87
23	Puskesmas Cikadu	25.452.531,00	17.551.820,00	145,01
24	Puskesmas Jatroyom	112.779.597,00	45.800.807,00	246,24
25	Puskesmas Karangasem	45.800,00	120.481.403,00	0,04
Jumlah		10.455.603.944,00	35.628.746.310,00	29,35

5.3.1.1.6. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah saldo kas yang berada di bendahara pengelola Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp91.662.687,00 dan Rp492.723.847,00.

Adapun rincian saldo per Sekolah terdapat dalam Lampiran.

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		2022	2021	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	%
1	SD NEGERI (BOS)	51.541.433,00	299.716.743,00	17,20
2	SMP NEGERI (BOS)	40.121.254,00	193.007.104,00	20,79
Jumlah		91.662.687,00	492.723.847,00	18,60

**5.3.1.1.7 Kas Lainnya**

Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang penggunaannya sudah ditentukan sebesar Rp504.477.327.000,00. Saldo tersebut berasal dari :

1. Belanja bantuan Sosial pada Diskoperindag per 31 Desember 2022 penyalurannya belum 100 % dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Bank Jateng sebagai mitra dalam penyaluran bantuan sosial UMKM masih terdapat uang pada virtual accaount sebesar Rp433.800.000,00. Penyaluran untuk masing-masing UMKM sebesar Rp600.000,00.
2. Belanja bantuan Sosial pada Dinsos per 31 Desember 2022 penyalurannya belum 100%. Bank Jateng sebagai mitra dalam penyaluran bantuan sosial ojegmasih terdapat uang pada virtual accaount sebesar Rp22.200.000. Penyaluran untuk masing-masing ojeg sebesar Rp600.000,00.
3. Utang PFK terkait keterlambatan Penyetoran Pajak TA. 2022 dari Dana BOS sebesar Rp48.477.327,00.

Adapun rincian Utang PFK dana BOS adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
BOS SMP	2.404.893,00	Setoran dari SMP Veteran tanggal 1 November 2022
PAUD	32.165.000,00	Setoran BOP PAUD tanggal 30 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang belum diterima, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan	87.804.158.127,06	83.313.513.396,06	5,39
2	Piutang Lainnya	-	-	-
3	Penyisihan Piutang	(44.354.865.664,84)	(41.237.766.474,72)	7,56
Jumlah Piutang yang dapat direalisasikan		43.449.292.462,22	42.075.746.921,34	3,26

Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan ini sejak tahun 2015. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, semua piutang yang ada masuk dalam kategori Piutang Pendapatan.

5.3.1.1.8. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, dan Piutang Transfer Antar Daerah. Saldo Piutang Pendapatan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Piutang Pendapatan		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang Pajak	64.403.690.571,00	59.185.911.582,00	8,82
2	Piutang Retribusi	553.110.175,00	553.110.175,00	0,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.160.012.571,06	11.634.675.844,06	73,28
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	778.435.933,00	6.701.944.572,00	(88,38)
5	Piutang Transfer Antar Daerah	1.908.908.877,00	5.237.871.223,00	(63,56)
Jumlah		87.804.158.127,06	83.313.513.396,06	5,39

1. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	PBB	64.034.224.482,00	58.730.515.921,00	9,03
2	Reklame	348.135.570,00	435.530.947,00	(20,07)
3	Air Bawah Tanah	21.330.519,00	19.864.714,00	7,38
Jumlah		64.403.690.571,00	59.185.911.582,00	8,82



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.034.224.482,00 adalah piutang atas pengelolaan PBB yang sekarang dilimpahkan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2013. Saldo Piutang PBB bertambah sebesar Rp5.303.708.561,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp2.981.911.711,00 dan penambahan piutang baru sebesar Rp8.285.620.272,00. Rincian Piutang PBB sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang	Ketetapan	Mutasi		Saldo Akhir Piutang
			Penambahan	Pengurangan	
2012	13.989.537.952,00			62.490.453,00	13.927.047.499,00
2013	4.358.553.879,00			180.489.298,00	4.178.064.581,00
2014	3.887.954.074,00			158.607.687,00	3.729.346.387,00
2015	4.870.762.071,00			206.021.950,00	4.664.740.121,00
2016	4.317.290.052,00			164.952.885,00	4.152.337.167,00
2017	3.798.793.392,00			164.512.928,00	3.634.280.464,00
2018	5.023.774.774,00			223.446.862,00	4.800.327.912,00
2019	4.936.539.676,00			272.720.904,00	4.663.818.772,00
2020	6.393.055.588,00			434.504.203,00	5.958.551.385,00
2021	7.154.254.463,00			1.114.164.541,00	6.040.089.922,00
2022	-	29.623.333.565,00	8.285.620.272,00	21.337.713.293,00	8.285.620.272,00
Jumlah	58.730.515.921,00	29.623.333.565,00	8.285.620.272,00	24.319.625.004,00	64.034.224.482,00

- Pelimpahan PBB sebelum tahun 2013 sebesar Rp13.927.047.499,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp13.989.537.952,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp62.490.453,00
- Piutang tahun 2013 sebesar Rp4.178.064.581,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.358.553.879,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp180.489.298,00
- Piutang tahun 2014 sebesar Rp3.729.346.387,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.887.954.074,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp158.607.687,00
- Piutang tahun 2015 sebesar Rp4.664.740.121,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.870.762.071,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp206.021.950,00
- Piutang tahun 2016 sebesar Rp4.152.337.167,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.317.290.052,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp164.952.885,00
- Piutang tahun 2017 sebesar Rp3.634.280.464,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.798.793.392,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp164.512.928,00
- Piutang tahun 2018 sebesar Rp4.800.327.912,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.023.774.774,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp223.446.862,00
- Piutang tahun 2019 sebesar Rp4.663.818.772,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.936.539.676,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp272.720.904,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Piutang tahun 2020 sebesar Rp5.958.551.385,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp6.393.055.558,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp434.504.203,00
 - Piutang tahun 2021 sebesar Rp6.040.089.922,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp7.154.254.463,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.114.164.541,00
 - Penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp8.285.620.272,00 adalah ketetapan PBB tahun 2022 sebesar Rp29.623.333.565,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp21.337.713.293,00
- Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2022 sebesar Rp348.135.570,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Reklame yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum terealisasi atas Penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan. Saldo Piutang Pajak Reklame berkurang sebesar Rp87.395.377,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp121.633.978,00 berupa pelunasan piutang tahun lalu dan penambahan piutang baru sebesar Rp34.238.601,00. Rincian Piutang Pajak Reklame sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang	Ketetapan	Mutasi		Saldo Akhir Piutang
			Penambahan	Pengurangan	
2017	101.937.530,00			-	101.937.530,00
2018	115.368.887,00			2.524.500,00	112.844.387,00
2019	30.450.177,00			2.146.500,00	28.303.677,00
2020	69.799.404,00			26.561.622,00	43.237.782,00
2021	117.974.949,00			90.401.356,00	27.573.593,00
2022	-	1.485.834.686,00	34.238.601,00	1.451.596.085,00	34.238.601,00
Jumlah	435.530.947,00	1.485.834.686,00	34.238.601,00	1.573.230.063,00	348.135.570,00

- Piutang tahun 2017 sebesar Rp101.937.530,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp101.937.530,00
 - Piutang tahun 2018 sebesar Rp112.844.387,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp115.368.887,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp2.524.500,00
 - Piutang tahun 2019 sebesar Rp28.303.677,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp30.450.177,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp2.146.500,00
 - Piutang tahun 2020 sebesar Rp43.237.782,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp69.799.404,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp26.561.622,00
 - Piutang tahun 2021 sebesar Rp27.573.593,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp117.974.949,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp90.401.356,00
 - Penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp34.238.601,00 adalah ketetapan Pajak Reklame tahun 2022 sebesar Rp1.485.834.686,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.451.596.085,00
- Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2022 sebesar Rp21.330.519,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum terealisasi atas penetapan besaran pajak tahun 2021 yang harus dibayarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah bertambah sebesar Rp1.465.805,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp11.979.210,00 berupa pelunasan piutang tahun lalu dan penambahan piutang baru sebesar Rp13.445.015,00. Rincian Piutang Air Bawah Tanah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang	Ketetapan	Mutasi		Saldo Akhir Piutang
			Penambahan	Pengurangan	
2017	685.432,00			53.600,00	631.832,00
2018	7.253.672,00			-	7.253.672,00
2019	-			-	-
2020	60.440,00			60.440,00	-
2021	11.865.170,00			11.865.170,00	-
2022	-	433.100.210,00	13.445.015,00	419.655.195,00	13.445.015,00
Jumlah	19.864.714,00	433.100.210,00	13.445.015,00	431.634.405,00	21.330.519,00

- Piutang tahun 2017 sebesar Rp631.832,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp685.432,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp53.600,00
- Piutang tahun 2018 sebesar Rp7.253.672,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp7.253.672
- Piutang tahun 2020 sebesar Rp0,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp60.440,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp60.440,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp0,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp11.865.170,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp11.865.170
- Penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp13.445.015,00 adalah ketetapan Pajak Air Tanah tahun 2022 sebesar Rp433.100.210,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp419.655.195,00

2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, adapun piutang retribusi yang dimaksud adalah hak pendapatan atas pelayanan yang telah diberikan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dibayar oleh penerima pelayanan atau Wajib Retribusi bersangkutan. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp553.110.175,00 dan Rp553.110.175,00 dengan rincian:

Piutang Retribusi		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Izin Gangguan (DPMPTSP)	364.479.175,00	364.479.175,00	0,00
2	IMB (DPMPTSP)	187.686.000,00	187.686.000,00	0,00
3	Izin Perikanan (DPMPTSP)	520.000,00	520.000,00	0,00
4	Izin Usaha Pariwisata (DPMPTSP)	375.000,00	375.000,00	0,00
5	Izin Usaha Industri (DPMPTSP)	50.000,00	50.000,00	0,00
Jumlah		553.110.175,00	553.110.175,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Piutang Retribusi sebesar Rp553.110.175,00 sama dibanding saldo piutang tahun lalu karena tidak ada pelunasan piutang tahun sebelumnya dan penambahan piutang baru, adalah piutang yang terdapat pada DPMPTSP yang terdiri dari :

- Saldo Piutang Izin Gangguan TA 2022 sebesar Rp364.479.175,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang IMB TA 2022 sebesar Rp187.686.000,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang Izin Usaha Perikanan TA 2022 sebesar Rp520.000,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang Izin Usaha Pariwisata TA 2022 sebesar Rp375.000,00 sama dengan saldo tahun lalu; dan
- Saldo Piutang Izin Usaha Industri TA 2022 sebesar Rp50.000,00 sama dengan saldo tahun lalu.

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp20.160.012.571,06 dan Rp11.634.675.844,06 dengan rincian :

	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang BLUD	18.329.404.947,06	9.462.717.575,06	93,70
2	Piutang Pendapatan Sewa	231.200.000,00	325.450.000,00	(28,96)
3	Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	123.000.000,00	85.499.999,00	43,86
4	Piutang Denda	471.569.042,00	471.569.042,00	0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.122.790,00	1.122.790,00	0,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.002.700.000,00	1.002.700.000,00	0,00
7	Piutang Remunerasi TDF	1.015.792,00	0,00	100,00
8	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	285.616.438,00	(100,00)
	Jumlah	20.160.012.571,06	11.634.675.844,06	73,28

- Saldo Piutang BLUD pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.329.404.947,06 dan Rp9.462.717.575,06 adalah piutang yang dikelola oleh RSUD dr. M. Ashari merupakan piutang yang terdiri dari :
 - jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp18.328.620.699,06, terdiri dari :
 - ✓ pasien Umum sebesar Rp2.360.359.680,06;
 - ✓ pasien BPJS sebesar Rp15.851.309.585,00;
 - ✓ BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp34.211.279,00;
 - ✓ Jasa Raharja sebesar Rp35.467.183,00;
 - ✓ RSI Mardotillah sebesar Rp10.953.822,00;
 - ✓ RSI Al-Ikhlas sebesar Rp26.294.731,00;
 - ✓ RSUD Surodadi sebesar Rp3.644.700,00
 - ✓ PT. Inhealth sebesar Rp851.967,00
 - jasa sewa tempat/kios PKL di lokasi RSUD sebesar Rp6.312.000,00.



Saldo Piutang BLUD sebesar Rp18.329.404.947,06 bertambah sebesar Rp8.866.687.372,00 dibanding tahun lalu dengan rincian saldo piutang tahun lalu sebesar Rp9.462.717.575,06

dikurangi : pembayaran atas piutang sebesar Rp7.147.283.297,00

ditambah : penambahan piutang pada tahun 2022 sebesar Rp16.013.970.669,00.

Pengurangan dan penambahan Piutang BLUD selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kelompok Debitur		Berkurang	Bertambah
1	Pasien Umum	44.925.402,00	3.387.986,00
2	Pasien BPJS	15.851.309.585,00	7.082.240.673,00
3	BPJS Ketenagakerjaan	34.211.279,00	45.919.102,00
4	PT. Jasa Raharja	35.467.183,00	0,00
5	RSI Mardotillah	10.953.822,00	0,00
6	RSI Al Ikhlas	26.294.731,00	
7	RSUD Surodadi	3.644.700,00	
8	PT. Inhealth	851.967,00	6.267.536,00
9	Kios PKL	6.312.000,00	9.468.000,00
Jumlah		16.013.970.669,00	7.147.283.297,00

- Piutang Pendapatan Sewa

Saldo Piutang Pendapatan Sewa pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp231.200.000,00 dan Rp325.450.000,00, terdiri dari :

Piutang Pendapatan Sewa		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios	113.520.000,00	203.520.000,00	(44,22)
2	Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa	115.150.000,00	119.630.000,00	(3,74)
3	Piutang Pendapatan Sewa Kios di kawasan Rusunawa	2.530.000,00	2.300.000,00	10,00
Jumlah		231.200.000,00	325.450.000,00	(28,96)

Piutang Pendapatan Sewa adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh pihak ketiga yang sampai tanggal 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya, terdiri dari :

- Pada tahun 2022 dilakukan serah terima pengelolaan kios di Kawasan Stadion Mochtar dari Diskoperindag kepada Disparpora yaitu penyerahan Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan sebesar Rp203.520.000,00.

Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios sebesar Rp113.520.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu.

Saldo Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios sebesar Rp113.520.000,00 berkurang sebesar Rp90.000.000,00 dibanding saldo tahun lalu Rp203.520.000,00 karena adanya penambahan piutang sebesar Rp72.000.000,00 dan pembayaran atas piutang sebesar Rp162.000.000,00 pada Disparpora;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa pada Disperkim sebesar Rp115.150.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para penyewa rusunawa. Saldo Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa berkurang sebesar Rp4.480.000 terdiri dari pengurangan sebesar Rp88.535.000 karena pelunasan piutang dan penambahan sebesar Rp84.055.000,00 karena bertambahnya piutang;
- Piutang Pendapatan Sewa Kios di kawasan Rusunawa pada Disperkim sebesar Rp2.530.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada penyewa kios di kawasan rusunawa. Saldo Piutang Pendapatan Sewa Kios di kawasan Rusunawa bertambah sebesar Rp230.000,00 karena ada penambahan piutang.

- Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

Saldo Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp123.000.000,00 dan Rp85.499.999,00, terdiri dari :

Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	CV. Escrow Anyar	0,00	85.499.999,00	(100,00)
2	CV. Putra Amartya	123.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah		123.000.000,00	85.499.999,00	43,86

Piutang Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang karena adanya putus kontrak pekerjaan.

Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerja tahun lalu sebesar Rp85.499.999,00 berupa Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Ulujami sudah ada pelunasan. pada tanggal 14 Februari 2022 dari CV. Escrow Anyar. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2022 sebesar Rp123.000.000,00 berupa Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tasikrejo – Pamutih sudah diterima pembayaran pada tanggal 24 Januari 2023 dari CV. Putra Amartya.

- Piutang Denda

Saldo Piutang Denda pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp471.569.042,00 dan Rp471.569.042,00, terdiri dari :

Piutang Denda		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang Denda Pajak PBB-P2	455.729.042,00	455.729.042,00	0,00
2	Piutang Denda Pendapatan Sewa	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00
Jumlah		471.569.042,00	471.569.042,00	0,00

Piutang Denda adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas denda pendapatan yang sampai tanggal 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya, terdiri dari :

- Piutang Denda Pajak merupakan piutang denda atas pembayaran PBB-P2 tahun 2013 dan 2014 yang diperhitungkan per 31 Desember 2014, dan



tidak termasuk atas tambahan piutang denda atas PBB Tahun 2021.

Saldo Piutang Denda Pajak tahun 2022 sebesar Rp455.729.042,00 sama dengan saldo tahun lalu karena tidak ada pembayaran Denda PBB;

- Piutang Denda atas Pendapatan Sewa sebesar Rp15.840.000,00 dikenakan kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu yang sampai batas waktu ditentukan belum membayar sewa dikenakan denda 2%/bulan. Piutang Denda atas Pendapatan Sewa masih sama dibanding tahun lalu.

- Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.122.790,00 dan Rp1.122.790,00, terdiri dari :

Piutang Pendapatan dari Pengembalian		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Kelebihan Gaji Pegawai	1.122.790,00	1.122.790,00	0,00
Jumlah		1.122.790,00	1.122.790,00	0,00

Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai tahun 2022 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan piutang yang terjadi karena adanya kelebihan pemberian Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai, adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu.

- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.002.700.000,00 dan Rp1.002.700.000,00, terdiri dari :

Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Bantuan Modal Kerja Koperasi "Puskopyah"	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2	Bantuan Modal Kerja Pengembangan STA Gombang	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
3	Bantuan Modal Kerja Koperasi	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00
4	Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
5	Bantuan Modal Kerja LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00
Jumlah		1.002.700.000,00	1.002.700.000,00	0,00

- Saldo Piutang Koperasi BMT tahun 2022 sebesar Rp25.000.000,00 merupakan sejenis pinjaman bantuan modal yang direalisasikan pada TA. 2004 dalam pengelolaan Bappeda dan disalurkan kepada Puskopyah Kabupaten Pemalang;
- Saldo Piutang Pengembangan Agribisnis tahun 2022 sebesar Rp26.500.000,00 merupakan pinjaman untuk pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Gombang kepada petani dan pedagang yang berusaha di bidang hortikultura yang diterimakan kepada Asosiasi Petanidan Pedagang Hortikultura (APPH) Kawasan Agropolitan "Waliksarimadu" pada Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2009 tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

16 November 2009 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pengembangan Sub Terminal Agribisnis Gombang. Berdasarkan ketentuan maka APPH menyetor pengembalian dana satu tahun berikutnya sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 6% (4% disetorke Rekening Kas Umum Daerah + 2% biaya operasional APPH dan Tim Teknis).

- Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2022 sebesar Rp506.000.000,00 sama dengan saldo tahun lalu. Pemberian Bantuan Modal Koperasi ini dalam pengelolaan Diskoperindag dalam usaha menciptakan wirausahawan-wirausahawan di Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2006. Koperasi penerima pinjaman yang terpilih berdasarkan seleksi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir, membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan berkewajiban membayar angsuran pokok selama lima kali pembayaran dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran jasa sebesar 6% setahun dibayarkan per bulan.
 - Piutang Pembangunan Petak Toko tahun 2022 sebesar Rp15.200.000,00 merupakan hasil dari pengelolaan petak toko/ruko di tiap-tiap pasar yang dikelola Diskoperindag adalah saldo piutang tahun lalu.
 - Piutang LUEP tahun 2022 sebesar Rp430.000.000,00 adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu karena pada tahun 2021 tidak ada penerimaan kembali atas pemberian Pinjaman Modal LUEP kepada kelompok petani.
- Piutang Remunerasi dari TDF
- Berdasarkan surat dari Kemenkeu Nomor S-45/PK/PK.2/2023 tentang Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Pemerintah Kabupaten Pemalang memperoleh Remunerasi dari TDF sebesar Rp1.105.792,00 yang masih berada pada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan rekening Nomor 519000352980 nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab Pemalang, sehingga dicatat sebagai Piutang.
- Saldo Piutang Remunerasi dari TDF per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.015.792,00.

Piutang Bunga Remunerasi dari TDF		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Rek Lain BI TDF TKD Kab Pemalang	1.015.792,00	0,00	100,00
Jumlah		1.015.792,00	0,00	100,00

- Piutang Pendapatan Bunga
- Saldo Piutang Pendapatan Bunga Deposito pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp285.616.438,00, yaitu :

Piutang Pendapatan Bunga Deposito		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Bank Jateng	0,00	285.616.438,00	(100,00)
Jumlah		0,00	285.616.438,00	(100,00)



Piutang Pendapatan Bunga Deposito tahun 2022 sebesar Rp0,00 berkurang sebesar Rp285.616.438,00 karena adanya pembayaran atas bunga deposito pada Bank Jateng, pembayaran diterima pada tanggal 11 Mei 2022.

4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat berupa Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil. Saldo Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Piutang Pendapatan		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2021	386.844.752,00	6.701.944.572,00	(94,23)
2	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2022	391.591.181,00	0,00	100,00
Jumlah		778.435.933,00	6.701.944.572,00	(88,38)

Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil adalah sejumlah uang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri dari :

Jenis Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil		TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	%
1	DBH PBB	0,00	3.415.173.831,00	(100,00)
2	DBH PPh Ps. 21 dan PPh Ps. 25/29	778.435.933,00	2.554.004.635,00	(69,52)
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	233.316.161,00	(100,00)
4	DBH SDA Kehutanan	0,00	478.824.555,00	(100,00)
5	DBH Panas Bumi	0,00	16.716.989,00	(100,00)
6	DBH SDA Mineral dan Batubara	0,00	3.908.401,00	(100,00)
Jumlah		778.435.933,00	6.701.944.572,00	(88,38)

Berdasarkan PMK No. 129/PMK.07/2021 tanggal 19 September 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 jumlah Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp6.701.944.572,00 dilakukan koreksi sebesar Rp6.315.099.820,00 karena adanya penerimaan transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2021 yang belum dicatat sebagai pengurang piutang, sehingga saldo piutang transfer pemerintah pusat atas TA. 2021 menjadi Rp386.844.752,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Rekening Piutang Kurang Bayar	Piutang Kurang Bayar TA. 2021 berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021	Penerimaan Pendapatan atas Kurang Bayar TA. 2021 di tahun 2021	Saldo Piutang Kurang Bayar TA. 2021
1	Piutang DTU - DBH PBB	3.415.173.831,00	3.415.173.831,00	-
2	Piutang DTU - DBH PPh Ps. 21, Ps. 25 dan Ps. 29	2.554.004.635,00	2.167.159.883,00	386.844.752,00
3	Piutang DTU - DBH CHT	233.316.161,00	233.316.161,00	-
4	Piutang DTU - DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	16.716.989,00	16.716.989,00	-
5	Piutang DTU - DBH SDA Mineral dan Batubara	3.908.401,00	3.908.401,00	-
7	Piutang DTU - DBH SDA Kehutanan-PSDH	478.824.555,00	478.824.555,00	-
	Jumlah	6.701.944.572,00	6.315.099.820,00	386.844.752,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan PMK No. 127/PMK.07/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 jumlah Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp4.670.999.580,00. Selama tahun 2022 diperoleh penerimaan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp4.279.408.399,00 sebagai pengurang dari piutang tahun 2022, sehingga piutang transfer pemerintah pusat atas Kurang Bayar TA. 2022 sebesar Rp391.591.181,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Rekening Piutang Kurang Bayar	Piutang Kurang Bayar TA. 2022 berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.07/2022	Penerimaan Pendapatan atas Kurang Bayar TA. 2022 di tahun 2022	Saldo Piutang Kurang Bayar TA. 2022
1	Piutang DTU - DBH PBB	1.387.547.890,00	1.387.547.890,00	-
2	Piutang DTU - DBH PPh Ps. 21, Ps. 25 dan Ps. 29	1.824.223.385,00	1.432.632.204,00	391.591.181,00
3	Piutang DTU - DBH CHT	659.600.420,00	659.600.420,00	-
4	Piutang DTU - DBH SDA Minyak Bumi	49.718.379,00	49.718.379,00	-
5	Piutang DTU - DBH SDA Gas Bumi	191.192.382,00	191.192.382,00	-
6	Piutang DTU - DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	142.622.609,00	142.622.609,00	-
7	Piutang DTU - DBH SDA Kehutanan-PSDH	416.094.515,00	416.094.515,00	-
		4.670.999.580,00	4.279.408.399,00	391.591.181,00

5. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah berupa Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

	Piutang Transfer Antar Daerah	TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	%
1	Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi	1.908.908.877,00	5.237.871.223,00	(63,56)
	Jumlah	1.908.908.877,00	5.237.871.223,00	(63,56)

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi adalah sejumlah uang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Dana Bagi Hasil Pajak.

Saldo Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp1.908.908.877,00 berkurang sebesar Rp3.328.962.346,00 dikarenakan adanya pengurangan sebesar Rp5.237.871.223,00 berupa penerimaan atas Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2021 yang diterima pada tanggal 22 November 2022 dan penambahan sebesar Rp1.908.908.877,00 berupa Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2022 berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/020.62 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pemberitahuan Kurang/(Lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Jenis Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi		TA. 2022 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.193.925.214,00	1.228.179.490,00	(2,79)
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	705.531.818,00	850.792.344,00	(17,07)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	3.148.947.299,00	(100,00)
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	9.451.845,00	9.952.090,00	(5,03)
Jumlah		1.908.908.877,00	5.237.871.223,00	(63,56)

5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Dengan adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih maka dapat diketahui besarnya Nilai Piutang yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan menyiapkan perhitungan umur piutang (*aging schedule*) atas saldo piutang yang ada pada 31 Desember sesuai jenis piutang menjadi beberapa kategori kualitas piutang. Besarnya prosentase penyisihan piutang untuk masing-masing kualitas piutang adalah : Lancar (0,5%); Kurang Lancar (10%); Diragukan (50%); dan Macet (100%)

Sedangkan penetapan umur piutang berbeda untuk masing-masing jenis piutang, yaitu Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tak Tertagih		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang Pajak	39.866.843.544,72	36.513.438.906,87	9,18
2	Piutang Retribusi	469.258.575,00	428.950.920,00	9,40
3	Piutang Lain-lain	4.018.763.545,12	4.295.376.647,85	(6,44)
Jumlah		44.354.865.664,84	41.237.766.474,72	7,56

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp44.354.865.664,84 dan Rp41.237.766.474,72. Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertambah sebesar Rp3.117.099.190,12 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2022 adalah sebesar Rp3.117.099.190,12.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1. Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp39.866.843.544,72 dan Rp36.513.438.906,87 terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pajak		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang PBB	39.685.373.250,47	36.396.772.628,86	9,04
2	Piutang Pajak Reklame	177.144.401,17	112.637.097,96	57,27
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	4.325.893,08	4.029.180,06	7,36
Jumlah		39.866.843.544,72	36.513.438.906,87	9,18

Rincian Penyisihan Piutang Pajak tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Piutang Retribusi	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar < 1 th	Kurang Lancar 1 - 2 th	Diragukan 2 - 3 th	Macet > 3 th
PBB	64.034.224.482,00	14.325.710.194,00	5.958.551.385,00	9.464.146.684,00	34.285.816.219,00
Reklame	348.135.570,00	61.812.194,00	43.237.782,00	141.148.064,00	101.937.530,00
Air Tanah	21.330.519,00	13.445.015,00	-	7.253.672,00	631.832,00
Jumlah	64.403.690.571,00	14.400.967.403,00	6.001.789.167,00	9.612.548.420,00	34.388.385.581,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	39.866.843.544,72	72.004.837,02	600.178.916,70	4.806.274.210,00	34.388.385.581,00

Penjelasan :

- Piutang Pajak PBB adalah piutang tahun 1993 –2022, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Pajak Reklame adalah piutang tahun 2016 – 2022, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet;
- Piutang Pajak Air Bawah Tanah adalah piutang tahun 2017 - 2022, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet.

Penyisihan piutang pajak bertambah sebesar Rp3.353.404.637,84 dibanding saldo tahun lalu karena bertambahnya penyisihan piutang sebesar Rp4.245.035.049,38 karena bertambahnya piutang dan menurunnya kualitas piutang serta berkurangnya penyisihan piutang sebesar Rp891.630.411,54 karena adanya pembayaran atas piutang.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp469.258.575,00 dan Rp428.950.920,00 terdiri dari :

Penyisihan Piutang Retribusi		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Retribusi Gangguan (HO)	364.479.175,00	364.479.175,00	0,00
2	Retribusi IMB	103.834.400,00	63.526.745,00	63,45
3	Retr. Izin Usaha Perikanan	520.000,00	520.000,00	0,00
4	Retr. Izin Usaha Pariwisata	375.000,00	375.000,00	0,00
5	Retr. Izin Usaha Industri	50.000,00	50.000,00	0,00
Jumlah		469.258.575,00	428.950.920,00	9,40



Penyisihan Piutang Retribusi bertambah Rp40.307.655,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu karena bertambahnya penyisihan piutang sebesar Rp40.307.655,00 karena menurunnya kualitas piutang.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi untuk masing-masing obyek retribusi adalah :

Piutang Retribusi	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar < 1 th	Kurang Lancar 1 - 2 th	Diragukan 2 - 3 th	Macet > 3 th
HO	364.479.175,00	-	-	-	364.479.175,00
IMB	187.686.000,00	-	67.629.000,00	45.971.000,00	74.086.000,00
Perikanan	520.000,00	-	-	-	520.000,00
Pariwisata	375.000,00	-	-	-	375.000,00
Industri	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Jumlah	553.110.175,00	-	67.629.000,00	45.971.000,00	439.510.175,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	469.258.575,00	-	6.762.900,00	22.985.500,00	439.510.175,00

Penjelasan :

- Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO) adalah piutang tahun 2009 – 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang Retribusi IMB adalah piutang tahun 2016 – 2022, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah piutang tahun 2013 – 2016, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah piutang tahun 2009 – 2010, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Industri adalah piutang tahun 2009, sehingga masuk dalam kualitas Macet;

3. Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan piutang lain-lain dikenakan pada selain piutang pajak maupun piutang retribusi. Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.018.763.545,12 dan Rp4.293.948.565,66 terdiri dari:

Penyisihan Piutang Lain-lain		2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Piutang BLUD	2.473.030.288,12	2.613.999.583,66	(5,39)
2	Piutang Pendapatan Sewa	69.726.425,00	204.129.650,00	(65,84)
3	Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	615.000,00	427.500,00	43,86
4	Piutang Denda PBB	455.729.042,00	455.729.042,00	0,00
5	Piutang Denda atas Pendapatan Sewa	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00
6	Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai	1.122.790,00	1.122.790,00	0,00
7	Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
8	Piutang Bantuan Modal Agribisnis STA Gombang	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
9	Piutang Bantuan Modal Koperasi	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00
10	Piutang Pembangunan Pelak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
11	Piutang Bantuan Modal LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00
12	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	1.428.082,19	(100,00)
Jumlah		4.018.763.545,12	4.293.376.647,85	(6,44)



Penjelasan untuk masing-masing obyek Penyisihan Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang kepada pasien RSUD dr. M. Ashari baik pasien umum, pasien BPJS, maupun dari instansi tertentu. Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain (selain piutang pajak dan retribusi), sehingga perhitungan dapat disajikan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2007	74.355.678,77	-	-	-	74.355.678,77
2008	172.189.951,00	-	-	-	172.189.951,00
2009	365.265.293,46	-	-	-	365.265.293,46
2010	286.076.463,07	-	-	-	286.076.463,07
2011	241.411.164,80	-	-	-	241.411.164,80
2012	186.911.367,35	-	-	-	186.911.367,35
2013	164.971.736,61	-	-	-	164.971.736,61
2014	135.788.870,00	-	-	-	135.788.870,00
2015	193.460.862,00	-	-	-	193.460.862,00
2016	170.582.784,00	-	-	-	170.582.784,00
2017	91.992.609,00	-	-	-	91.992.609,00
2018	79.111.534,00	-	-	-	79.111.534,00
2019	47.159.080,00	-	-	-	47.159.080,00
2020	28.159.514,00	-	-	-	28.159.514,00
2021	77.997.370,00	-	-	-	77.997.370,00
2022	16.013.970.669,00	15.473.573.871,00	507.840.912,00	6.223.673,00	26.332.213,00
Jumlah	18.329.404.947,06	15.473.573.871,00	507.840.912,00	6.223.673,00	2.341.766.491,06
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	2.473.030.288,12	77.367.869,36	50.784.091,20	3.111.836,50	2.341.766.491,06

Piutang yang timbul pada tahun 2022 dibagi ke dalam beberapa kategori menurut bulan timbulnya piutang, sedangkan piutang tahun 2007 – 2021 masuk dalam kualitas Macet.

Saldo Penyisihan Piutang BLUD tahun 2022 sebesar Rp2.613.999.583,66 berkurang sebesar Rp140.969.295,54 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp2.613.999.583,66 terdiri dari penambahan sebesar Rp159.053.600,24 dikarenakan bertambahnya piutang dan menurunnya kualitas piutang untuk piutang tahun 2021 serta pengurangan sebesar Rp299.991.335,78 karena adanya pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

2) Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa

Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2018	35.520.000,00				35.520.000,00
2022	78.000.000,00	78.000.000,00			
2022	117.680.000,00	84.285.000,00			33.395.000,00
Jumlah	231.200.000,00	162.285.000,00	-	-	68.915.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	69.726.425,00	811.425,00	-	-	68.915.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa tahun 2022 sebesar Rp69.726.425,00 berkurang sebesar Rp134.403.225,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp204.129.650,00 karena adanya penambahan sebesar Rp33.596.775,00 berupa menurunnya kualitas Piutang Sewa Rusunawa dan Kios pada Disperkim sebesar Rp32.785.350,00 dari Lancar menjadi Macet, penambahan penyisihan piutang baru sebesar Rp421.425,00 pada Disperkim; dan penambahan penyisihan piutang atas piutang baru sebesar Rp390.000,00 pada Disparpora dan berkurang sebesar Rp168.000.000,00 karena adanya pembayaran piutang pada Disparpora;

3) Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut:

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
CV. Putra Amartya	123.000.000,00	123.000.000,00			
Jumlah	123.000.000,00	123.000.000,00	-	-	-
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	615.000,00	615.000,00	-	-	-

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2022 sebesar Rp615.000,00 bertambah sebesar Rp187.500,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp427.500,00 terdiri dari pengurangan sebesar Rp427.500,00 karena adanya pembayaran atas piutang dan penambahan sebesar Rp615.000,00 karena adanya piutang baru berupa pekerjaan putus kontrak yaitu Rekonstruksi Jalan Tasikrejo – Pamutih.

4) Penyisihan Piutang Denda Pajak

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
-	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00
Jumlah	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan saldo tahun 2013 dan 2014, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

Saldo Penyisihan Piutang Denda Pajak tahun 2022 sebesar Rp455.729.042,00 sama dibanding tahun lalu karena tidak ada penerimaan pendapatan Denda PBB-P2 atas piutang tersebut.



5) Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
-	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00
Jumlah	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa tahun 2022 sebesar Rp15.840.000,00 sama dengan saldo penyisihan piutang tahun lalu.

6) Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji

Nama Pegawai	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
PNS	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
Jumlah	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00

Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan saldo penyisihan piutang tahun lalu, timbul karena piutang kelebihan pemberian Tunjangan Gaji tahun 2007 – 2013 sehingga masuk dalam kategori Macet.

7) Penyisihan Piutang Koperasi BMT Puskopyah

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
Puskopyah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
Jumlah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00

Piutang kepada BMT Puskopyah adalah piutang sejak tahun 2004 yang sampai sekarang belum ada usaha pengembalian piutang, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

8) Penyisihan Piutang Permodalan Agribisnis – STA Gombang

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
APPH	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
Jumlah	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00

Piutang kepada APPH pada STA Gombang adalah piutang sejak tahun 2009, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.



9) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi

Jatuh Tempo	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2011	102.000.000,00	-	-	-	102.000.000,00
2012	108.000.000,00	-	-	-	108.000.000,00
2013	126.000.000,00	-	-	-	126.000.000,00
2014	170.000.000,00	-	-	-	170.000.000,00
Jumlah	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00

Piutang Bantuan Modal Koperasi diberikan dengan masa pengembalian dalam tiga tahun. Dari saldo piutang tersebut di atas, maka keseluruhan dari piutang masuk dalam kategori kualitas Macet.

Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2022 sebesar Rp506.000.000,00 sama dibanding saldo penyisihan piutang tahun lalu.

10) Penyisihan Piutang Pembangunan Petak Toko

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
-	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
Jumlah	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00

Penyisihan Piutang Petak Toko tahun 2022 sebesar Rp15.200.000,00 adalah piutang atas pembangunan Petak Toko yang timbul sejak tahun 2013, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

11) Penyisihan Piutang LUEP

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2022	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
PB Sari Bumi	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00
PB. Margo Mulyo	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
PB. Mekar Jaya	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00

Saldo Penyisihan Piutang LUEP tahun 2022 sebesar Rp430.000.000,00, tidak ada perubahan karena tidak ada pembayaran atas piutang.

12) Penyisihan Piutang Bunga

Saldo Penyisihan Piutang Bunga tahun 2022 sebesar Rp0,00 berkurang sebesar Rp1.428.082,19, karena adanya pembayaran atas piutang tersebut.

**5.3.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum dikonsumsi sehingga menyisakan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	Beban dibayar dimuka	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Asuransi Alat Berat (BPKAD)	0,00	18.556.237,10	(100,00)
2	Asuransi Kendaraan Roda Empat (BPKAD)	66.106.828,38	0,00	100,00
3	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter	47.546.854,30	0,00	100,00
	Jumlah	113.653.682,68	18.556.237,10	512,48

Rincian Beban Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BEBAN DIBAYAR DIMUKA	Saldo Per 31-Des-2021	Penyesuaian		Saldo Per 31-Des-2022	POKOK	JANGKA WAKTU	BEBAN-LO 2022	BEBAN DIBAYAR DIMUKA
			Debet	Kredit					
1	Asuransi Alat Berat - 2021	18.556.237,10		18.556.237,10	-	33.613.035,00	21 Jul '21 - 21 Jul '22	18.556.237,10	-
2	Asuransi Kend. Roda 4 - 2022		66.106.828,38		66.106.828,38	70.449.612,75	09 DES '22 - 09 DES '23	4.342.784,37	66.106.828,38
3	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter 2022 :				66.106.828,38				
	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter		38.055.945,21		104.162.773,59	159.660.000,00	28 MAR '22 - 28 MAR '23	121.604.054,79	38.055.945,21
	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter		9.490.909,09		113.653.682,68	18.000.000,00	14 OKT '22 - 28 MAR '23	8.509.090,91	9.490.909,09
	Jumlah	18.556.237,10	113.653.682,68	18.556.237,10	113.653.682,68			153.012.167,17	113.653.682,68

1. Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*)

Pada tahun 2022 tidak ada kontrak Asuransi Alat Berat, sehingga Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

2. Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat

Pembayaran premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat tahun 2022 kepada PT. Asuransi senilai Rp70.449.612,75 untuk 12 kendaraan dengan masa pertanggungan 9 Desember 2022 sampai dengan 9 Desember 2023. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2022 adalah 342,5 hari sebesar Rp60.106.828,38.

3. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter

Pembayaran premi Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter tahun 2022 kepada PT. Asuransi senilai Rp159.660.000,00 dengan masa pertanggungan 29 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2023. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2022 adalah 87 hari sebesar Rp38.055.945,21.

Pembayaran premi Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter tahun 2022 lainnya kepada PT. Asuransi senilai Rp18.000.000,00 untuk masa pertanggungan 14 Oktober 2022 sampai dengan 28 Maret 2022. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2022 adalah 87 hari sebesar Rp9.490.909,09.

Total Beban Dibayar Dimuka untuk Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter tahun 2022 adalah sebesar Rp47.546.854,30.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.1.11. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.1.11.1

Persediaan
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	PERSEDIAAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	BAHAN KIMIA	2.004.632.339,00	843.086.939,59
2	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	2.265.700,00	990.000,00
3	ISI TABUNG GAS	22.000,00	160.400,00
4	BAHAN LAINNYA	140.000,00	691.759.206,00
5	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	0,00	1.916.899.620,00
6	ALAT TULIS KANTOR	1.946.116.318,00	1.886.316.805,42
7	KERTAS DAN COVER	30.578.500,00	7.587.200,00
8	BAHAN CETAK	1.774.841.480,00	1.832.986.150,76
9	BENDA POS	780.000,00	620.000,00
10	BAHAN KOMPUTER	10.331.500,00	13.783.500,00
11	PERABOT KANTOR	285.089.250,00	290.360.330,00
12	ALAT LISTRIK	9.437.000,00	12.945.600,00
13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	384.200,00	286.900,00
14	OBAT	25.016.790.254,00	42.528.124.441,34
15	OBAT-OBATAN LAINNYA	4.704.118.160,00	904.520.293,60
16	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	11.558.866.064,44	28.899.288.629,44
17	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	34.105.000,00	34.105.000,00
18	NATURA	83.726.585,00	55.448.685,00
19	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	2.300.000,00	2.660.000,00
Jumlah		47.464.524.350,44	79.921.929.701,15

- Saldo Persediaan Bahan Kimia adalah pengadaan TA 2022 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp2.004.632.339,00 dan Rp843.086.939,59. Pengadaan Bahan Kimia tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.2

Persediaan Bahan Kimia
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	BAHAN KIMIA	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	96.713.204,00	109.850.815,00
2	DINAS KESEHATAN	1.861.834.735,00	682.024.224,59
3	DISPARPORA	46.084.400,00	51.154.900,00
4	KECAMATAN ULUJAMI	0,00	57.000,00
Jumlah		2.004.632.339,00	843.086.939,59

- Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.265.700,00 dan Rp990.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp22.000,00 dan Rp160.400,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
4. Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp140.000,00 dan Rp691.759.206,00 pada Kecamatan Pemalang.
5. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.916.899.620,00.
6. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) adalah pengadaan TA 2022 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp1.946.116.318,00 dan Rp1.886.316.805,42. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.3
Persediaan Alat Tulis Kantor
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	ALAT TULIS KANTOR	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DINDIKBUD	38.141.255,00	53.102.900,00
2	DINKES	1.319.500.230,00	1.301.911.749,42
3	DPU TR	14.823.600,00	29.835.700,00
4	DISPERKIM	1.976.800,00	1.059.000,00
5	SATPOL PP	820.000,00	901.500,00
6	BPBD	7.979.000,00	4.068.000,00
7	DINSOSKBPP	555.400,00	464.500,00
8	DISNAKER	1.132.500,00	1.003.500,00
9	DLH	4.445.200,00	2.165.300,00
10	DISDUKCATPIL	414.430.273,00	430.802.332,00
11	DINPERMASDES	188.500,00	186.904,00
12	DISHUB	201.500,00	305.000,00
13	DISKOMINFO	8.424.300,00	3.083.400,00
14	DISKOPERINDAG	2.975.000,00	3.504.500,00
15	DPMPTSP	517.600,00	669.450,00
16	DINPUSARDA	547.400,00	499.000,00
17	DISPERIK	7.607.300,00	983.000,00
18	DISPARPORA	7.059.010,00	10.496.150,00
19	DIPERTAN	3.414.550,00	6.194.050,00
20	BAPPEDA	987.500,00	1.300.550,00
21	BAPENDA	60.513.000,00	0,00
22	BPKAD	3.788.800,00	4.700.490,00
23	BKD	564.100,00	1.159.800,00
24	INSPEKTORAT	5.756.000,00	700.800,00
25	SETWAN	21.226.900,00	11.174.400,00
26	SETDA	6.508.300,00	5.702.530,00
27	KESBANGPOLINMAS	1.748.500,00	3.259.000,00
28	KEC. MOGA	752.000,00	660.000,00
29	KEC. PULOSARI	2.030.000,00	0,00
30	KEC. BELIK	50.000,00	249.500,00
31	KEC. WATUKUMPUL	1.500.000,00	623.000,00
32	KEC. BODEH	729.800,00	474.300,00
33	KEC. BANTARBOLANG	50.000,00	125.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	194.000,00	250.000,00
35	KEC. PEMALANG	1.157.000,00	2.243.600,00
36	KEC. TAMAN	200.000,00	0,00
37	KEC. PETARUKAN	443.000,00	437.400,00
38	KEC. AMPELGADING	420.000,00	614.800,00
39	KEC. COMAL	534.000,00	424.200,00
40	KEC. ULUJAMI	1.624.000,00	420.000,00
41	KEC. WARUNGPRING	600.000,00	561.500,00
	JUMLAH	1.946.116.318,00	1.886.316.805,42



7. Saldo Persediaan Kertas dan Cover adalah pengadaan TA 2022 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp30.578.500,00 dan Rp7.587.200,00. Pengadaan Kertas dan Cover tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.4
Persediaan Kertas dan Cover
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	KERTAS DAN COVER	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DPU TR	22.095.900,00	5.250.000,00
2	DISPERKIM	330.000,00	0,00
3	BPBD	1.594.500,00	0,00
4	DINSOSKBPP	203.000,00	243.000,00
6	DLH	1.356.800,00	0,00
7	DINPERMASDES	998.200,00	272.900,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	198.000,00	66.000,00
9	DMPTSP	196.500,00	203.000,00
10	BAPPEDA	139.000,00	461.500,00
11	KECAMATAN PULOSARI	787.000,00	470.000,00
12	KECAMATAN BELIK	470.000,00	194.400,00
13	KECAMATAN BANTARBOLANG	100.000,00	0,00
14	KECAMATAN PEMALANG	1.729.600,00	0,00
15	KECAMATAN AMPELGADING	0,00	194.400,00
16	KECAMATAN ULUJAMI	0,00	232.000,00
17	BAKESBANGPOL	380.000,00	0,00
Jumlah		30.578.500,00	7.587.200,00

8. Saldo Persediaan Bahan Cetak yang belum terpakai per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.774.841.480,00 dan Rp1.832.986.150,76 sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.1.11.5
Persediaan Bahan Cetak
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	BAHAN CETAK	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	815.466.290,00	1.058.713.360,76
2	DISPERKIM	4.800.000,00	170.000,00
3	DINSOSKBPP	0,00	19.600,00
4	DISDUKCATPIL	629.031.690,00	645.231.690,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	15.562.000,00	17.130.000,00
6	DINPERPUSARDA	264.500,00	0,00
7	DISPERIK	115.167.000,00	54.965.000,00
8	DISPARPORA	9.338.000,00	11.251.900,00
9	DINAS PERTANIAN	160.000,00	1.730.000,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	17.274.000,00	2.062.600,00
11	INSPEKTORAT	9.620.000,00	3.205.000,00
12	BAPPENDA	150.975.000,00	30.280.000,00
13	BPKAD	6.980.000,00	8.017.500,00
14	KECAMATAN PEMALANG	0,00	209.500,00
15	KECAMATAN PULOSARI	203.000,00	0,00
Jumlah		1.774.841.480,00	1.832.986.150,76



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

9. Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2022 sebesar Rp780.000,00 dan 2021 sebesar Rp620.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.6
Persediaan Benda Pos
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	BENDA POS	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	50.000,00	100.000,00
2	DLH	140.000,00	0,00
3	DISPARPORA	0,00	300.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	540.000,00	220.000,00
5	KECAMATAN PEMALANG	50.000,00	220.000,00
Jumlah		780.000,00	840.000,00

10. Saldo Persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.331.500,00 dan Rp13.783.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.7
Persediaan Bahan Komputer
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	BAHAN KOMPUTER	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DPU TR	10.131.500,00	13.235.000,00
2	DINPERMASDES	200.000,00	548.500,00
Jumlah		10.331.500,00	13.783.500,00

11. Saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp285.089.250,00 dan Rp290.360.330,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.8
Persediaan Perabot Kantor
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	PERABOT KANTOR	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	267.656.100,00	242.436.200,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	12.285.000,00
3	DINPUSARDA	312.000,00	193.000,00
4	DISPARPORA	1.400.850,00	2.534.000,00
5	BAPPEDA	0,00	949.030,00
6	SEKRATRIAT DPRD	15.720.300,00	10.344.400,00
7	KECAMATAN PEMALANG	0,00	21.376.900,00
8	KECAMATAN AMPELADING	0,00	241.800,00
Jumlah		285.089.250,00	290.360.330,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

12. Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.437.000,00 dan Rp12.945.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.9

Persediaan Alat Listrik
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	ALAT LISTRIK	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SEKRETARIAT DPRD	7.262.500,00	8.096.600,00
2	BAPPEDA	575.000,00	3.240.000,00
3	DLH	360.000,00	220.000,00
4	DISPARPORA	1.189.500,00	1.389.000,00
5	DPU TR	50.000,00	0,00
Jumlah		9.437.000,00	12.945.600,00

13. Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp384.200,00 dan Rp286.900,00 pada DPU TR sebesar Rp233.000,00 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebesar Rp151.200,00.

14. Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp25.016.790.254,00 dan Rp42.528.124.441,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.10

Persediaan Obat
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	OBAT	
		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	24.267.718.512,00	41.784.494.047,34
2	DINAS PERTANIAN	218.549.180,00	369.116.890,00
3	BKD	34.796,00	657.875,00
4	DINSOSKBPP	530.487.766,00	373.855.629,00
Jumlah		25.016.790.254,00	42.528.124.441,34

- Saldo Persediaan Obat di Dinas Kesehatan sebesar Rp24.267.718.512,00 berupa obat yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp10.536.753.725,00, RSUD DR. M. Ashari sebesar Rp5.561.960.027,00 dan Puskesmas di kabupaten Pemalang sebesar Rp8.169.004.760,00 ini merupakan obat yang masih tersedian untuk pasien ;
- Saldo Persediaan Obat di Dinas Pertanian sebesar Rp218.549.180,00 berupa obat-obatan yang terdapat di Dinas Pertanian berupa obat-obatan pertanian;
- Saldo Persediaan Obat di BKD sebesar Rp34.796,00 berupa obat-obatan yang terdapat di BKD berupa obat-obatan yang terdapat di Balai Kesehatan di Kabupaten;
- Saldo Persediaan Obat di Dinsos KBPP sebesar Rp530.487.766,00 berupa obat kontrasepsi dan alat kontrasepsi;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

15. Saldo Persediaan Obat-obatan Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.704.118.160,00 dan Rp904.520.293,60,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.703.868.010 dan Bappeda sebesar Rp250.000,00 berupa obat kebersihan.
16. Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp11.558.866.064,44 dan Rp28.899.288.629,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.11

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	
		2021 (Rp)	2021 (Rp)
1	DPU PR	9.536.572.654,00	25.937.502.621,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	176.297.410,44	176.297.410,44
3	DISPERKIM	1.845.996.000,00	1.845.996.000,00
4	DINAS KESEHATAN	0,00	939.492.598,00
Jumlah		11.558.866.064,44	28.899.288.629,44

- Saldo persediaan yang belum diserahkan ke pihak lain di DPU dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Saldo tahun 2022 sebesar Rp9.536.572.654,00 dan saldo tahun 2021 sebesar Rp25.937.502.621,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.11.12

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada DPU TR
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	PERSEDIAAN	2021	2022
1	Islamic Center (2015-2018)	2.867.359.543	2.867.359.543
	Islamic Center (2015)	1.724.053.000	1.724.053.000
	Islamic Center (Belanja Hibah 2016)	969.519.543	969.519.543
	Perencanaan finishing Islamic Center (Belanja Hibah 2017)	39.897.000	39.897.000
	Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	119.890.000	119.890.000
	Perencanaan Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	8.000.000	8.000.000
	Pengawasan Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	6.000.000	6.000.000
2	MCK WISMA PEMALANG (2018)	175.672.265	175.672.265
	Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	20.000.000	20.000.000
	Perencanaan Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja hibah 2018)	3.000.000	3.000.000
	Pengawasan Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	2.000.000	2.000.000
	Belanja Penunjang - Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	150.672.265	150.672.265
3	Perencanaan Gedung dan Sarana Prasarana di Polres Pemalang (2020)	79.100.000	0,00
4	Air Bersih 2021 (Hibah barang)	8.696.990.689	0,00
5	Air Limbah 2021 (Hibah barang)	6.855.420.124	0,00
6	Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Prasarana Pendukung Kompleks Polres Pemalang 2021	4.049.740.000	0,00
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung di Lingkungan POLRES Pemalang (Pagar Depan Kantor Polres Pemalang)	209.610.000	0,00
8	Rehabilitasi Pos Jaga dan Pagar Kompleks Rumah Dinas Pimpinan Polres Pemalang 2021	303.100.000	0,00
9	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Staf Komando Distrik Militer (KASDIM) 0711/Pemalang 2021	221.250.000	0,00
10	Pembangunan Gedung Aula Kodim Pemalang 2021	1.271.600.000	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	PERSEDIAAN	2021	2022
11	Rehabilitasi Rumah Dinas Komandan Distrik Militer (DANDIM) 0711/Pemalang 2021	221.520.000	0,00
12	Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Pemalang 2021	221.200.000	0,00
13	Rehabilitasi Rumah Dinas/ Mess Kejaksaan Negeri Pemalang 2021	212.650.000	0,00
14	Pengadaan Truk Polres Pemalang 2021	476.940.000	0,00
15	Pekerjaan Pembuatan Jalan Trap dan Talud Wisata Curug Bengkawah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang - Kelompok Sadar Wisata Mahardika Desa Sikasur 2021	75.350.000	0,00
16	Lanjutan Rehabilitasi Aula Kodim 0711 Pemalang (2022)	0,00	220.150.300
17	Rehabilitasi Gedung Makodim 0711 Pemalang (2022)	0,00	1.327.055.000
18	Rehabilitasi Ruang Persatuan Istri (Persit) Kodim 0711 Pemalang (2022)	0,00	221.716.000
19	Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang (2022)	0,00	221.536.038
20	Rehabilitasi Pagar dan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang (2022)	0,00	256.146.420
21	Penyediaan Mebeler/Furniture Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang (2022)	0,00	208.505.000
22	Pembangunan Rumah Dinas Kapolres dan Wakapolres Pemalang (2022)	0,00	2.938.715.000
23	Pembangunan Masjid Kompleks Mako Polres Pemalang (2022)	0,00	436.116.000
24	Rehabilitasi Pagar Kompleks Rumah Dinas Pimpinan Polres Pemalang dan TK	0,00	221.700.088
25	Pembuatan Atap Kanopi Masjid Agung Pemalang (2022)	0,00	109.734.000
26	Pembuatan Atap Kanopi Selasar Masjid Agung Pemalang (2022)	0,00	221.802.000
27	Pembuatan Cungkup dan Penerangan Makam Mbah Nurul Kalam (2022)	0,00	110.365.000
	Saldo Akhir	25.937.502.621	9.536.572.654

- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan ke pihak lain di DLH sebesar Rp176.297.410,44 berupa Taman Gandulan diperoleh pada tahun 2014 dari belanja hibah sebesar Rp154.875.000,00 dan koreksi inspektorat kurang catat gedung bangunan pihak ketiga sebesar Rp21.422.410,44.
 - Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum tahun 2022 di Disperkim sebesar Rp1.845.996.000,00 berupa pembangunan jaringan listrik dari belanja hibah tahun 2016 .
17. Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp34.105.000,00 dan Rp34.105.000,00 perolehan TA 2015 berupa barang pameran milik Diskoperindagkop.
 18. Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp83.726585,00 dan Rp55.448.685,00 ada pada RSUD dr. M. Ashari
 19. Saldo Persediaan Pakan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.300.000,00 dan Rp2.660.000,00 pada Dinas Perikanan.



5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.2.1
Investasi Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Investasi Jangka Panjang		2022 (Rp).	2021 (Rp).
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	246.258.098.992,63	250.164.286.530,75
JUMLAH		246.258.098.992,63	250.164.286.530,75

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi non permanen disajikan secara *Net Realizable Value (NRV)* sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang nomor 70 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi. Saldo investasi non permanen Kabupaten Pemalang Tahun 2022 masih sama dengan saldo tahun 2021 yaitu sebesar Rp0,00

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyertaan modal kepada beberapa Perusahaan Daerah sebesar Rp10.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.1.2.2
Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022

No	Perusahaan Daerah	Tambahan penyertaan Modal (Rp)
1	Bank Jateng	2.000.000.000,00
2	PDAM Tirta Mulia	2.000.000.000,00
3	PT Aneka Usaha	6.000.000.000,00
5	PT LKM BKD	300.000.000,00
6	PT BPR BKK Taman	300.000.000,00
	Jumlah	10.600.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp246.258.098.992,63 dan Rp250.164.286.530,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.3
Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Investasi Jangka Panjang Permanen		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	PT. Bank Jateng	87.284.000.000,00	85.284.000.000,00
2	Perusahaan Daerah	158.468.898.992,63	164.375.086.530,75
3	PT. PRPP Jawa Tengah	505.200.000,00	505.200.000,00
Jumlah		246.258.098.992,63	250.164.286.530,75

1) PT Bank Jateng

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan modal disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga total investasi permanen dengan metode *cost* di PT Bank Jateng tahun 2022 sebesar Rp87.284.000.000,00

Saldo investasi tersebut sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jateng.

2) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah

Investasi Permanen pada perusahaan daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan berdasarkan metode *equity* dan metode *cost* masing-masing sebesar Rp158.468.898.992,63 dan Rp164.375.086.530,75 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.1.2.4
Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Perusahaan Daerah	Metode Perhitungan	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1 PDAM Tirta Mulia	Equity	111.298.490.565,00	113.608.541.564,00
2 PT. BPR BKK Jateng	Cost	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00
3 PT. BPR BKK Taman	Equity	4.583.260.153,09	11.720.020.272,31
4 PT BPR Bank	Equity	11.127.483.666,81	13.901.123.433,79
5 PD Aneka Usaha	Equity	18.174.065.634,00	11.988.638.322,00
6 PT LKM BKD	Equity	3.485.598.973,73	3.356.762.938,65
Jumlah		158.468.898.992,63	164.375.086.530,75

Perusahaan-perusahaan Daerah yang komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang di atas 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pengelolaannya metode penilaian investasi permanen menggunakan metode *equity*. Perusahaan-perusahaan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

i. Investasi Permanen pada PDAM Tirta Mulia

Perhitungan Investasi pada PDAM Tirta Mulia didasarkan pada Laporan Keuangan PDAM Tirta Mulia TA 2022 (audited)

Dalam laporan keuangan PDAM disajikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp14.732.252.954,00. Angka sebesar Rp14.732.252.954,00 tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat (APBN) sehingga tidak diakui sebagai penambah ekuitas Pemkab Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.2.1.4
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Penyertaan 2004 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	2.137.482.517,00
Penyertaan 2005 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	433.796.000,00
Permukiman Jawa Tengah Penyertaan 2006 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Jawa Tengah	24.864.677,00
Penyertaan 2008 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum Rp1.513.332.760,00 dan Air Limbah Jawa Tengah	1.513.332.760,00
Penyerahan Operasional dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Departemen PU Tahun 2010	10.622.777.000,00

Kepala Divisi Accounting PDAM Tirta Mulia menjelaskan terkait dana sebesar Rp14.732.252.954,00 tersebut dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya dan belum dicatat asetnya.



Prosentase kepemilikan Pemerintah kabupaten Pemalang terhadap PDAM Tirta mulia sebesar 100 % sehingga Perhitungan investasi pada PDAM Tirta Mulia menggunakan metode *equity*.

Perhitungan Investasi pada PDAM Tirta Mulia didasarkan pada Laporan Keuangan PDAM Tirta Mulia Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai Laporan auditor independent nomor : 00066/2.1221/AU.2/04/1051-1/1/III/2023. Perhitungan jumlah ekuitas PDAM Tirta Mulia sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.5
Perhitungan Jumlah Ekuitas PDAM Tirta Mulia
Tahun Anggaran 2022

Saldo per 31 Desember 2021	113.608.541.564,00
Dikurangi :	
Penerimaan deviden 2021 pada tahun 2022	2.820.088.578,00
Koreksi kesalahan tahun 2021	7.533.409.182,00
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2022 (Audited) :	6.043.446.761,00
100% x Rp. 6.043.446.761,00	
Tambahan Penyertaan modal 2022	2.000.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	111.298.490.565,00

Dalam Laporan Keuangan, Neraca per 31 Desember 2022, penyertaan modal Pemkab Pemalang pada PDAM Tirta Mulia disajikan sebesar Rp111.298.490.565,00.

ii. Investasi Permanen pada PT BKK Jateng

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017, dan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ning Sarwiyati, S.H., notaris di Semarang nomor 25 tanggal 24 Juni 2019, PD BKK Pemalang pada tahun 2019 merger dengan PD BKK di wilayah Jawa Tengah (total sebanyak 29 PD BKK) menjadi PT BKK Jateng.

Dengan berubahnya PD BKK Pemalang menjadi PT BKK Jateng mengakibatkan berubahnya penilaian investasi permanen yang disesuaikan dengan kepemilikan dari metode *equity* menjadi metode *cost*. Hal ini karena nilai investasi pada PT BKK Jateng kurang dari 20%.

Perhitungan Investasi pada PT BKK Jateng didasarkan pada Laporan Keuangan PT BKK Jateng TA 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independent Nomor: 00059/2.0282/AU.2/07/0182-1/1/III/2023.



Berdasarkan laporan KAP tersebut komposisi saham Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PT BKK Jateng per 31 Desember 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp.9.800.000.000,00 akan tetapi persentase penyertaan modal mengalami penurunan sebesar 0,17 % dari 2,84 % menjadi 2,67%

iii. Investasi Permanen pada PT. BPR BKK Taman

PT BPR BKK Taman (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 1995 yang telah dirubah terakhir dengan Perda Nomor 20 Tahun 2002. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) PD BPR BKK Taman.

Perhitungan Investasi pada PT BPR BKK Taman didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR BKK Taman TA 2022 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Rahardja, MSi. CPA. dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor independent nomor : 00002/2.0920/AU.2/07/0611-1/1/II/2023. Perhitungan jumlah ekuitas PT BPR BKK Taman sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.6

Perhitungan jumlah Ekuitas PT BPR BKK Taman
Tahun Anggaran 2022

Saldo per 31 Desember 2021	11.720.020.272,31
Dikurangi :	
Penerimaan deviden 2021 pada tahun 2022	716.699.296,00
Koreksi kesalahan tahun 2021	7.671.975.161,00
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2022 (Audited) :	951.914.337,78
49% x Rp. 1.942.682.322,00	
Tambahan Penyertaan modal 2022	300.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	4.583.260.153,09

Prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PT BPR BKK Taman per 31 Desember 2022 adalah 49 % sedangkan sisanya sebesar 51 % dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan investasi permanen pada PT BPR BKK Taman menggunakan metode *equity*, sehingga nilai investasi permanen pemerintah kabupaten pemalang tahun 2022 sebesar Rp4.583.260.153,09

iv. Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : S-1846/MD/1985 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP 259/ KM /1996. Pada tahun 2019, PD BPR Bank Pemalang berubah bentuk badan usaha menjadi PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) sebagaimana Peraturan Daerah



Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang. Perhitungan Investasi pada PD BPR Bank Pemalang didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR Bank Pemalang TA 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor : 00115/2.1065/AU.2/07/0436-1/1/III/2023. Perhitungan jumlah ekuitas PT BPR Bank Pemalang sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.7
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT BPR Bank Pemalang
Tahun Anggaran 2022

Saldo per 31 Desember 2021	13.901.123.433,79
Dikurangi :	
Penerimaan deviden 2021 pada tahun 2022	329.228.616,00
Koreksi ekuitas Tahun sebelumnya	2.556.312.829,00
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2022 (Audited) :	111.901.678,02
99% x Rp. 113.031.998,00	
Tambahan Penyertaan modal 2022	-
Saldo per 31 Desember 2022	11.127.483.666,81

Sesuai dengan laporan tersebut prosentase Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 adalah 99 %, Perhitungan Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang menggunakan metode *equity*, sehingga investasi permanen pada PT BPR Bank Pemalang Tahun Anggaran 2022 adalah Rp11.127.483.666,81

v. Investasi Permanen pada PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang

PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroan), dibentuk untuk memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Tahun 2021 berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha. Perubahan Badan hukum ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

Perhitungan Investasi pada PT Aneka Usaha didasarkan pada Laporan Keuangan *Unaudited* PT Aneka Usaha TA 2022 karena sampai dengan tanggal pelaporan Laporan Keuangan PT Aneka Usaha belum selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Perhitungan jumlah ekuitas PT Aneka Usaha sebagai berikut:



Tabel 5.3.2.1.8
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT Aneka Usaha
Tahun Anggaran 2022

Modal Pemkab	Rp26.192.549.128,00.
Rugi Tahun Lalu	(Rp8.230.910.806,00)
Laba Tahun Berjalan	Rp 212.427.312,00
Nilai penyertaan modal berdasar metode ekuitas	Rp18.174.065.634,00

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 adalah 100%, Perhitungan Investasi Permanen pada PT. Aneka Usaha menggunakan metode *equity*, sehingga investasi permanen pada PT Aneka Usaha adalah sebesar Rp18.174.065.634,00

vi. Investasi Permanen pada PT LKM BKD

PT LKM BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang perusahaan perseroaan daerah lembaga keuangan mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang. PT LKM BKD dibentuk pada tanggal 2 Juni 2020 pembentukan BUMD baru tersebut berasal dari penggabungan 9 BKD di Kabupaten Pemalang yaitu:

1. BKD Kelurahan Mulyoharjo
2. BKD Kelurahan Pelutan
3. BKD Kelurahan Kebondalem
4. BKD Kelurahan Sugihwaras
5. BKD Kelurahan Bojongbata
6. BKD Kelurahan Wanarejan
7. BKD Kelurahan Beji
8. BKD Kelurahan Petarukan
9. BKD Kelurahan Purwoharjo.

Perhitungan Investasi pada PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perserorda) didasarkan pada Laporan Keuangan PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perserorda) TA 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor : 00064/2.1065/AU.3/09/0436-1/1/II/2023. Perhitungan jumlah ekuitas PT LKM BKD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.3.2.1.9
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT LKM BKD
Tahun Anggaran 2022

Saldo per 31 Desember 2021	3.356.762.938,65
Dikurangi :	
Penerimaan deviden 2021 pada tahun 2022	100.412.312,00
Koreksi saldo tahun 2021	281.101.796,00
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2022 (Audited) :	210.350.143,08
99% x Rp. 212.474.892,00	
Tambahan Penyertaan modal 2022	300.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	3.485.598.973,73

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 adalah 99% Perhitungan Investasi Permanen pada PT. LKM BKD menggunakan metode *equity*, sehingga investasi permanen pada PT LKM BKD adalah sebesar Rp3.485.598.973,73

3) **Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah**

Dasar hukum penyertaan modal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP). Penghitungan nilai investasi pada PT PRPP menggunakan metode *cost* karena modal yang disetor nilainya dibawah 20% dari modal keseluruhan. Total investasi pada PT PRPP tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 sebesar Rp505.200.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021, tersaji sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022	Saldo per 31 Desember 2021	Tambah/Kurang	%
1	Tanah	1.064.231.608.300,00	1.062.027.153.400,00	2.204.454.900,00	0,21
2	Peralatan Mesin	746.475.960.795,00	679.265.748.168,00	67.210.212.627,00	9,89
3	Gedung Bangunan	1.627.768.103.732,00	1.606.978.563.437,00	20.789.540.295,00	1,29
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.208.146.928.399,00	1.149.991.053.274,00	58.155.875.125,00	5,06
5	Aset Tetap Lainnya	166.621.328.480,00	150.303.165.195,00	16.318.163.285,00	10,86
6	Konstruksi Dlm Pengerjaan	72.620.681.481,00	80.014.480.447,00	(7.393.798.966,00)	(9,24)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.671.803.734.913,00)	(1.508.956.382.373,00)	(162.847.352.540,00)	10,79
Jumlah		3.214.060.876.274,00	3.219.623.781.548,00	(5.562.905.274,00)	(0,17)

Nilai bersih aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.214.060.876.274,00 terdiri Nilai Perolehan Aset sebesar Rp4.885.864.611.187,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.671.803.734.913,00. Terjadi Pengurangan Nilai Bersih Aset Tetap pada tahun 2022 sebesar Rp5.262.905.274,00 atau 0,17% dibandingkan tahun 2021 adalah berupa penambahan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp157.284.447.266,00 dan Rp162.847.352.540,00. Pengurangan Nilai Bersih Aset Tetap dikarenakan bertambahnya nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lebih besar dibandingkan bertambahnya nilai Aset Tetap.

Belanja Modal TA. 2022 sebesar Rp150.611.740.899,00 terdiri dari Belanja Modal untuk Aset Tetap sebesar Rp148.182.464.895,00 dan Belanja Modal untuk Aset Lainnya sebesar Rp2.429.276.004,00. Penambahan Aset Tetap diperoleh dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap TA. 2022 sebesar Rp148.182.464.895,00 dan penambahan sebesar Rp146.923.029.611,00 berupa kapitalisasi non belanja modal/reklas sesama Aset Tetap/Aset Lainnya, mutasi masuk antar OPD, koreksi pencatatan aset dan hibah, serta pengurangan sebesar Rp137.821.047.240,00 berupa reklas sesama Aset Tetap, hibah, tidak memenuhi kapitalisasi, mutasi keluar antar OPD, koreksi pencatatan aset, dan reklas menjadi Aset Lainnya/Persediaan.

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Saldo per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	1.062.027.153.400,00	7.246.962.932,00	5.042.508.032,00	1.064.231.608.300,00
2	Peralatan dan Mesin	679.265.748.168,00	75.037.533.518,00	7.827.320.891,00	746.475.960.795,00
3	Gedung dan Bangunan	1.606.978.563.437,00	136.794.677.323,00	116.005.137.028,00	1.627.768.103.732,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.149.991.053.274,00	58.733.550.125,00	577.675.000,00	1.208.146.928.399,00
5	Aset Tetap Lainnya	150.303.165.195,00	17.292.770.608,00	974.607.323,00	166.621.328.480,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	80.014.480.447,00	0,00	7.393.798.966,00	72.620.681.481,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.508.956.382.373,00)	(168.688.128.460,00)	(5.840.775.920,00)	(1.671.803.734.913,00)
		3.219.623.781.548,00	126.417.366.046,00	131.980.271.320,00	3.214.060.876.274,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi Penambahan sebesar Rp146.923.029.611,00 yang berasal dari selain belanja modal terdiri dari:

- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp10.297.572.170,00 terdiri dari:
 - Kapitalisasi dari Belanja Non Modal sebesar Rp745.748.800,00 berupa kapitalisasi dari Belanja Belanja Barang dan Jasa;
 - Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp7.292.654.866,00;
 - Reklas dari Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) sebesar Rp2.259.168.504,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp124.385.104.281,00;
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp12.240.353.160,00 terdiri dari:
 - Koreksi nilai aset atas kurang saji pada tahun sebelumnya sebesar Rp0,00;
 - Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp12.240.353.160,00.

Mutasi Pengurangan sebesar Rp137.821.047.240,00 terdiri dari:

- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp7.292.654.866,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp2.012.470.310,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp2.944.307.828,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp124.385.104.281,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp480.550.947,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp705.959.008,00.

Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan berupa Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp705.959.008,00 karena barang rusak/tidak digunakan/hilang dan akan dihibahkan.

Ringkasan penambahan Aset Tetap tahun 2022 :

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2021	124.385.104.281,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2021	124.385.104.281,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset Tetap/Aset Lainnya	10.297.572.170,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	12.240.353.160,00	
		22.537.925.330,00
Kurang :		
- Reklas sesama Aset Tetap	7.292.654.866,00	
- Diserahkan ke pihak lain/hibah	2.012.470.310,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	2.944.307.828,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	480.550.947,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan	705.959.008,00	
		13.435.942.959,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		9.101.982.371,00
Belanja Modal Aset Tetap		148.182.464.895,00
Penambahan Aset Tetap TA. 2022		157.284.447.266,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo konsolidasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	OPD	Aset Tetap						Jumlah
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	178.453.474.291,00	773.827.613.405,00	5.568.257.487,00	163.095.952.041,00	2.362.017.589,00	1.227.389.405.892,00
2	Dinkes	68.212.799.000,00	285.485.835.706,00	182.375.236.907,00	14.571.496.330,00	192.260.980,00	501.667.626,00	551.339.296.549,00
3	DPU TP	422.825.478.308,00	22.459.006.827,00	24.700.086.785,00	1.051.968.203.216,00	199.944.760,00	61.631.842.523,00	1.583.784.562.419,00
4	Disperkim	17.886.323.800,00	5.569.361.445,00	41.533.165.706,00	86.860.356.244,00	21.619.500,00	359.547.793,00	152.230.374.488,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	7.392.582.025,00	756.590.000,00	-	232.000.000,00	-	9.273.672.025,00
6	BPBD	5.002.510.000,00	6.738.657.748,00	1.564.867.000,00	-	3.969.300,00	-	13.310.004.048,00
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	11.434.523.624,00	3.062.656.000,00	72.806.000,00	7.715.000,00	101.042.000,00	16.019.362.674,00
8	Disnaker	3.570.800.000,00	5.777.548.101,00	8.862.437.232,00	197.657.800,00	8.647.500,00	42.548.000,00	18.459.638.633,00
9	DLH	7.245.185.000,00	19.373.004.238,00	5.078.321.896,00	6.601.048.425,00	11.416.000,00	-	38.308.975.559,00
10	Disdukcapil	1.963.000.000,00	11.216.715.299,00	2.050.879.586,00	319.977.750,00	37.765.915,00	-	15.588.338.550,00
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	4.307.351.480,00	1.734.444.646,00	52.189.000,00	-	-	6.900.385.126,00
12	Dishub	8.002.372.288,00	17.083.266.087,00	13.039.108.864,00	3.314.659.000,00	2.271.900,00	100.765.000,00	41.542.443.139,00
13	Diskominfo	-	15.100.607.380,00	4.666.188.569,00	119.459.000,00	9.536.000,00	-	19.895.790.949,00
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	9.095.126.979,00	236.090.456.907,00	2.104.507.329,00	17.952.200,00	1.383.825.800,00	313.791.819.415,00
15	DPMP TSP	1.143.000.000,00	3.870.937.712,00	2.048.630.333,00	122.907.650,00	37.565.000,00	-	7.223.040.695,00
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	4.909.347.843,00	989.806.000,00	33.896.290,00	1.328.413.540,00	95.865.000,00	9.167.828.673,00
17	Disperik	4.568.906.000,00	5.720.243.593,00	11.057.342.016,00	3.184.803.045,00	17.353.000,00	-	24.548.647.654,00
18	Disparpora	37.508.263.179,00	8.301.214.415,00	103.482.533.142,00	12.140.813.093,00	43.208.500,00	6.041.560.150,00	167.517.592.479,00
19	Dispartan	26.388.813.000,00	9.612.921.131,00	23.680.792.234,00	1.506.876.500,00	47.027.480,00	-	61.236.430.345,00
20	Setda	3.980.326.000,00	34.022.461.214,00	22.726.983.000,00	831.895.500,00	527.427.394,00	-	62.089.093.108,00
21	Setwan	10.075.008.032,00	16.013.990.864,00	116.214.408.423,00	294.856.125,00	403.618.170,00	-	143.001.881.614,00
22	Bappeda	3.606.389.499,00	5.502.414.967,00	2.039.784.000,00	101.320.700,00	94.630.900,00	-	11.344.540.066,00
23	BPKAD	75.133.353.700,00	20.730.711.581,00	8.486.203.510,00	240.405.000,00	73.182.900,00	-	104.663.856.691,00
24	Bapenda	1.575.000.000,00	6.243.074.575,00	1.214.103.500,00	74.168.100,00	1.734.500,00	-	9.108.080.675,00
25	BKD	-	5.692.156.012,00	988.798.431,00	208.412.000,00	40.330.000,00	-	6.929.696.443,00
26	Inspektorat	3.809.000.000,00	3.335.140.591,00	1.004.804.562,00	-	9.451.000,00	-	8.158.396.153,00
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	1.241.391.901,00	959.050.900,00	2.000.000,00	107.500,00	-	4.915.300.301,00
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	1.056.037.851,00	1.862.715.000,00	7.000.000,00	-	-	3.038.852.851,00
29	Kec. Belik	673.750.000,00	1.338.104.580,00	1.537.790.476,00	2.000.000,00	10.000,00	-	3.551.655.056,00
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	1.187.083.751,00	1.878.626.300,00	3.000.000,00	30.000,00	-	3.152.340.051,00
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	1.210.892.776,00	736.095.249,00	-	6.030.000,00	-	2.245.418.025,00
32	Kec. Bantarbolang	-	1.075.522.585,00	1.178.458.000,00	500.000,00	-	-	2.254.480.585,00
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	1.027.767.001,00	1.576.455.400,00	102.988.000,00	65.000,00	-	3.407.275.401,00
34	Kec. Pemalang	144.802.550.150,00	3.707.424.439,00	8.670.536.774,00	11.805.147.751,00	68.854.250,00	-	169.054.513.364,00
35	Kec. Taman	17.111.703.000,00	2.225.494.925,00	2.848.133.900,00	3.082.958.123,00	20.557.500,00	-	25.288.847.448,00
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	1.519.808.403,00	2.591.406.079,00	1.792.832.341,00	38.455.250,00	-	14.529.158.694,00
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	1.195.545.651,00	884.838.500,00	3.000.000,00	650.000,00	-	2.306.534.151,00
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	1.437.716.903,00	6.638.256.500,00	845.580.600,00	17.442.500,00	-	20.405.202.375,00
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	1.251.329.367,00	1.710.126.000,00	2.000.000,00	3.535.000,00	-	3.682.293.889,00
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	1.041.211.111,00	1.419.372.000,00	3.450.000,00	98.000,00	-	2.686.631.111,00
41	Bakesbangpol	-	2.518.953.823,00	-	3.500.000,00	500.000,00	-	2.522.953.823,00
	Jumlah	1.064.231.608.300,00	746.475.960.795,00	1.627.768.103.732,00	1.208.146.928.399,00	166.621.328.480,00	72.620.681.481,00	4.885.864.611.187,00

Seluruh saldo Aset Tetap masing-masing OPD per 31 Desember 2022 tersebut telah sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah(BMD) tahun 2022.

Adapun saldo masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Tanah pada TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.064.231.608.300,00 dan Rp1.062.027.153.400,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tetap Tanah		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	104.082.091.079,00	0,00	0,00
2	Dinkes	68.212.799.000,00	68.212.799.000,00	0,00	0,00
3	DPUTR	422.825.478.308,00	427.867.986.340,00	(5.042.508.032,00)	(1,18)
4	Disperkim	17.886.323.800,00	17.886.323.800,00	0,00	0,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	892.500.000,00	0,00	0,00
6	BPBD	5.002.510.000,00	5.002.510.000,00	0,00	0,00
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	1.340.620.050,00	0,00	0,00
8	Disnaker	3.570.800.000,00	3.570.800.000,00	0,00	0,00
9	DLH	7.245.185.000,00	7.245.185.000,00	0,00	0,00
10	Disdukcatpil	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	0,00	0,00
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	806.400.000,00	0,00	0,00
12	Dishub	8.002.372.288,00	8.002.372.288,00	0,00	0,00
13	Diskominfo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	65.099.950.200,00	0,00	0,00
15	DPMTSP	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	0,00	0,00
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	1.810.500.000,00	0,00	0,00
17	Disperik	4.568.906.000,00	4.568.906.000,00	0,00	0,00
18	Disparpora	37.508.263.179,00	37.508.263.179,00	0,00	0,00
19	Dispertan	26.388.813.000,00	26.388.813.000,00	0,00	0,00
20	Selda	3.980.326.000,00	3.980.326.000,00	0,00	0,00
21	Setwan	10.075.008.032,00	5.032.500.000,00	5.042.508.032,00	100,20
22	Bappeda	3.606.389.499,00	3.606.389.499,00	0,00	0,00
23	BPKAD	75.133.353.700,00	72.928.898.800,00	2.204.454.900,00	3,02
24	Bapenda	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00
25	BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	3.809.000.000,00	3.809.000.000,00	0,00	0,00
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	2.712.750.000,00	0,00	0,00
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	113.100.000,00	0,00	0,00
29	Kec. Belik	673.750.000,00	673.750.000,00	0,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	292.400.000,00	0,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Pemalang	144.802.550.150,00	144.802.550.150,00	0,00	0,00
35	Kec. Taman	17.111.703.000,00	17.111.703.000,00	0,00	0,00
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	8.586.656.621,00	0,00	0,00
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	11.466.205.872,00	0,00	0,00
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	715.303.522,00	-	0,00
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00	0,00
41	Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.064.231.608.300,00	1.062.027.153.400,00	2.204.454.900,00	0,21

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.204.454.900,00 atau 0,21%. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp2.204.454.900,00, tidak ada perbedaan antara besarnya realisasi Belanja Modal Tanah dengan penambahan Aset Tetap Tanah, sehingga tidak ada penambahan dan pengurangan aset selain dari belanja modal.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ringkasan penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2022 :

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	5.042.508.032,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	5.042.508.032,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	0,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Reklas sesama Aset Tetap	0,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi	0,00	
		0,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		0,00
Belanja Modal Tanah		2.204.454.900,00
Penambahan Aset Tetap TA. 2022		2.204.454.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah TA.2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI ASET TETAP - TANAH 2022													Saldo Per 31-Des-2022
			BM 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Ase/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+8-16
1	Dindikbud	104.082.091.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.082.091.079
2	Dinkes	68.212.799.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.212.799.000
3	DPUTR	427.867.986.340	-	-	-	-	-	-	-	-	5.042.508.032	-	-	-	5.042.508.032	422.825.478.308
4	Disperkim	17.886.323.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.886.323.800
5	Satpol PP	892.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892.500.000
6	BPBD	5.002.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.002.510.000
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340.620.050
8	Disnaker	3.570.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570.800.000
9	DLH	7.245.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.245.185.000
10	Disdukcatpil	1.963.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963.000.000
11	Dinpermasdes	806.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.400.000
12	Dishub	8.002.372.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.002.372.288
13	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Diskoperindag	65.099.950.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.099.950.200
15	DPMPPTSP	1.143.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.000.000
16	Dinpusarda	1.810.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.810.500.000
17	Disperik	4.568.906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.568.906.000
18	Disparpora	37.508.263.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.508.263.179
19	Disperten	26.388.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.388.813.000
20	Setda	3.980.326.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.980.326.000
21	Setwan	5.032.500.000	-	-	5.042.508.032	-	5.042.508.032	-	-	-	-	-	-	-	-	10.075.008.032
22	Bappeda	3.606.389.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.606.389.499
23	BPKAD	72.928.898.800	2.204.454.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.133.353.700
24	Bapenda	1.575.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000.000
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektora	3.809.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.809.000.000
27	Kec. Moga	2.712.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712.750.000
28	Kec. Pulosari	113.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.100.000
29	Kec. Belik	673.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.750.000
30	Kec. Watukumpul	83.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.600.000
31	Kec. Bodeh	292.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.400.000
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000
34	Kec. Pemalang	144.802.550.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.802.550.150
35	Kec. Taman	17.111.703.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.111.703.000
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.586.656.621
37	Kec. Ampelgading	222.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000
38	Kec. Comal	11.466.205.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.466.205.872
39	Kec. Ulujami	715.303.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.303.522
40	Kec. Warungpring	222.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.062.027.153.400	2.204.454.900	-	5.042.508.032	-	5.042.508.032	-	-	-	5.042.508.032	-	-	-	5.042.508.032	1.064.231.608.300



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp746.475.960.795,00 dan Rp679.265.748.168,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	178.453.474.291,00	157.391.352.142,00	21.062.122.149,00	13,38
2	Dinkes	285.485.835.706,00	248.916.517.112,00	36.569.318.594,00	14,69
3	DPUTR	22.459.006.827,00	22.113.180.320,00	345.826.507,00	1,56
4	Disperkim	5.569.361.445,00	5.525.561.445,00	43.800.000,00	0,79
5	Salpol PP	7.392.582.025,00	7.230.448.025,00	162.134.000,00	2,24
6	BPBD	6.738.657.748,00	6.456.813.748,00	281.844.000,00	4,37
7	Dinsos KBPP	11.434.523.624,00	11.007.549.146,00	426.974.478,00	3,88
8	Disnaker	5.777.548.101,00	5.761.757.750,00	15.790.351,00	0,27
9	DLH	19.373.004.238,00	19.166.528.238,00	206.476.000,00	1,08
10	Disdukcapil	11.216.715.299,00	10.716.471.879,00	500.243.420,00	4,67
11	Dinpermasdes	4.307.351.480,00	4.297.351.480,00	10.000.000,00	0,23
12	Dishub	17.083.266.087,00	16.608.891.994,00	474.374.093,00	2,86
13	Diskominfo	15.100.607.380,00	14.754.406.750,00	346.200.630,00	2,35
14	Diskoperindag	9.095.126.979,00	8.230.930.479,00	864.196.500,00	10,50
15	DPMPTSP	3.870.937.712,00	3.718.898.439,00	152.039.273,00	4,09
16	Dinpusarda	4.909.347.843,00	5.026.884.443,00	(117.536.600,00)	(2,34)
17	Disperik	5.720.243.593,00	5.510.085.901,00	210.157.692,00	3,81
18	Disparpora	8.301.214.415,00	8.148.815.091,00	152.399.324,00	1,87
19	Disperian	9.612.921.131,00	9.080.539.439,00	532.381.692,00	5,86
20	Selda	34.022.461.214,00	30.853.886.060,00	3.168.575.154,00	10,27
21	Setwan	16.013.990.864,00	15.608.531.864,00	405.459.000,00	2,60
22	Bappeda	5.502.414.967,00	5.478.781.347,00	23.633.620,00	0,43
23	BPKAD	20.730.711.581,00	20.515.273.332,00	215.438.249,00	1,05
24	Bapenda	6.243.074.575,00	5.811.386.175,00	431.688.400,00	7,43
25	BKD	5.692.156.012,00	5.671.649.012,00	20.507.000,00	0,36
26	Inspektorat	3.335.140.591,00	2.976.332.701,00	358.807.890,00	12,06
27	Kec. Moga	1.241.391.901,00	1.175.365.901,00	66.026.000,00	5,62
28	Kec. Pulosari	1.056.037.851,00	1.056.037.851,00	0,00	0,00
29	Kec. Belik	1.338.104.580,00	1.282.386.859,00	55.717.721,00	4,34
30	Kec. Watukumpul	1.187.083.751,00	1.154.146.351,00	32.937.400,00	2,85
31	Kec. Bodeh	1.210.892.776,00	1.144.428.776,00	66.464.000,00	5,81
32	Kec. Bantarbolang	1.075.522.585,00	946.573.351,00	128.949.234,00	13,62
33	Kec. Randudongkal	1.027.767.001,00	961.457.501,00	66.309.500,00	6,90
34	Kec. Pemalang	3.707.424.439,00	3.621.029.099,00	86.395.340,00	2,39
35	Kec. Taman	2.225.494.925,00	2.152.579.925,00	72.915.000,00	3,39
36	Kec. Petarukan	1.519.808.403,00	1.474.408.403,00	45.400.000,00	3,08
37	Kec. Ampelgading	1.195.545.651,00	1.143.369.651,00	52.176.000,00	4,56
38	Kec. Comal	1.437.716.903,00	1.428.216.903,00	9.500.000,00	0,67
39	Kec. Ulujami	1.251.329.367,00	1.232.647.967,00	18.681.400,00	1,52
40	Kec. Warungpring	1.041.211.111,00	996.711.111,00	44.500.000,00	4,46
41	Bakesbangpol	2.518.953.823,00	2.917.564.207,00	(398.610.384,00)	(13,66)
Jumlah		746.475.960.795,00	679.265.748.168,00	67.210.212.627,00	9,89

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.210.212.627,00 atau 9,89%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp58.592.301.185,00, terdapat perbedaan sebesar Rp8.617.911.442,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp16.445.232.333,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp7.827.320.891,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp16.445.232.333,00 antara lain terdiri dari :

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp2.715.349.204,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.590.217.719,00;
- Koreksi Pencatatan dan/atau Hibah sebesar Rp10.139.665.410,00 hibah dari instansi di luar Pemda, terdiri dari :
 - Dindikbud sebesar Rp6.175.230,00 dari pemerintah pusat berupa computer;
 - Dinkes sebesar Rp3.964.435.410,00 terdiri dari :
 - ❖ Hibah dari pemerintah pusat (Kemenkes) sebesar Rp3.075.935.410,00 berupa alat kedokteran dan alat Kesehatan;
 - ❖ Hibah dari instansi perbankan sebesar Rp888.500.000,00 berupa kendaraan operasional;

Penambahan karena Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp2.715.349.204,00 terdiri dari :

- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp277.996.800,00 yaitu pada :
 - Diskoperindag sebesar Rp254.412.000,00 yaitu reklas dari beban bahan komputer berupa mesin e-ticketing;
 - Inspektorat sebesar Rp23.584.800,00 yaitu reklas dari beban pemeliharaan berupa meja rapat;
- Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp178.183.900,00 terdiri dari:
Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp178.183.900,00, yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp136.054.800,00 berupa peralatan kantor;
 - DPMPSTP sebesar Rp3.250.000,00 berupa digital running text; dan
 - Inspektorat sebesar Rp38.879.100,00 berupa alat audio video;
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya (Aset Tidak Berwujud) sebesar Rp2.259.168.504,00, yaitu pada:
 - Dinkes sebesar Rp2.234.168.504,00 berupa alat kantor, alat kedokteran, dll;
 - DPMPSTP sebesar Rp25.000.000,00 yaitu mesin antrian;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp7.827.320.891,00 terdiri dari :

- Diserahkan kepada Pihak Lain/Hibah sebesar Rp1.279.394.556,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp1.250.638.496,00 berupa peralatan komputer pengadaan tahun 2022 dari Dana BOS yang dihibahkan ke sekolah swasta;
 - Dinsos KBPP sebesar Rp7.000.000,00 berupa rak besi yang diserahkan ke desa;
 - Dinpusarda sebesar Rp21.756.060,00 berupa meubelair;
- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp2.050.526.661,00 berupa peralatan kantor, meubelair, dan alat kesehatan yang nilai satuannya dibawah batas kapitalisasi. Dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi diantaranya sebesar Rp1.329.612.794,00 berasal dari Dana BOS dan sebesar Rp336.133.591,00 berasal dari BLUD;
- Mutasi keluar antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.590.217.719,00 berupa kendaraan dinas dan peralatan kerja;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Koreksi pencatatan Aset Tetap sebesar Rp480.550.947,00 berupa Peralatan Olahraga dengan nilai dibawah batas kapitalisasi yang sebelumnya masih tercatat dalam Aset Tetap yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp473.050.947,00;
 - Disparpora sebesar Rp5.000.000,00;
 - BKD sebesar Rp500.000,00; dan
 - Kec. Pemalang sebesar Rp2.000.000,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp426.631.008,00 adalah reklas menjadi Aset Lain-lain karena barang rusak berat, yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp292.793.349,00 berupa komputer dan printer, alat kedokteran, dan alat kebidanan;
 - Bapenda sebesar Rp11.874.500,00 berupa sepeda motor;
 - Setda sebesar Rp28.188.159,00 berupa personal komputer yang hilang; dan
 - Dinpusarda sebesar Rp93.775.000,00 berupa rak buku.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 :

Uraian	Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	3.590.217.719,00
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	3.590.217.719,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	2.715.349.204,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	10.139.665.410,00
	12.855.014.614,00
Kurang :	
- Reklas sesama Aset	0,00
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	1.279.394.556,00
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	2.050.526.661,00
- Koreksi pencatatan Aset	480.550.947,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	426.631.008,00
	4.237.103.172,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	8.617.911.442,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.592.301.185,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2022	67.210.212.627,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA.2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN 2022													Saldo Per 31-Des-2022
			BM 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	157.391.352.142	17.854.337.886	136.054.800	229.150.000	6.175.230.000	6.540.434.800	-	1.250.638.496	1.385.951.594	223.009.500	473.050.947	-	-	3.332.650.537	178.453.474.291
2	Dinkes	248.916.517.112	31.169.155.970	2.234.168.504	-	3.964.435.410	6.198.603.914	-	-	505.647.941	-	-	-	292.793.349	798.441.290	285.485.835.706
3	DPUTR	22.113.180.320	629.412.507	-	11.500.000	-	11.500.000	-	-	-	295.086.000	-	-	-	295.086.000	22.459.006.827
4	Disperkim	5.525.561.445	43.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.569.361.445
5	Satpol PP	7.230.448.025	19.931.000	-	145.209.000	-	145.209.000	-	-	3.006.000	-	-	-	-	3.006.000	7.392.582.025
6	BPPD	6.456.813.748	281.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.738.657.748
7	Dinsos KBPP	11.007.549.146	692.986.478	-	-	-	-	-	7.000.000	-	259.012.000	-	-	-	266.012.000	11.434.523.624
8	Disnaker	5.761.757.750	13.318.800	-	221.621.551	-	221.621.551	-	-	-	219.150.000	-	-	-	219.150.000	5.777.548.101
9	DLH	19.166.528.238	122.526.000	-	83.950.000	-	83.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19.373.004.238
10	Disdukcatpil	10.716.471.879	500.243.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.216.715.299
11	Dinpermasdes	4.297.351.480	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.307.351.480
12	Dishub	16.608.891.994	443.433.093	-	30.941.000	-	30.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	17.083.266.087
13	Diskominfo	14.754.406.750	464.647.000	-	291.522.287	-	291.522.287	-	-	-	409.968.657	-	-	-	409.968.657	15.100.607.380
14	Diskoperindag	8.230.930.479	577.264.500	254.412.000	43.000.000	-	297.412.000	-	-	10.480.000	-	-	-	-	10.480.000	9.095.126.979
15	DPMPSTSP	3.718.898.439	82.253.273	28.250.000	41.536.000	-	69.786.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.870.937.712
16	Dinpusarda	5.026.884.443	-	-	-	-	-	-	21.756.060	-	2.005.540	-	-	93.775.000	117.536.600	4.909.347.843
17	Disperik	5.510.085.901	63.350.000	-	186.807.692	-	186.807.692	-	-	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	5.720.243.593
18	Disparpora	8.148.815.091	126.899.324	-	115.500.000	-	115.500.000	-	-	-	85.000.000	5.000.000	-	-	90.000.000	8.301.214.415
19	Disperian	9.080.539.439	490.479.000	-	200.920.692	-	200.920.692	-	-	-	159.018.000	-	-	-	159.018.000	9.612.921.131
20	Setda	30.853.886.060	2.657.816.939	-	661.447.500	-	661.447.500	-	-	122.501.126	-	-	-	28.188.159	150.689.285	34.022.461.214
21	Setwan	15.608.531.864	112.813.000	-	295.086.000	-	295.086.000	-	-	2.440.000	-	-	-	-	2.440.000	16.013.990.864
22	Bappeda	5.478.781.347	35.133.620	-	-	-	-	-	-	-	11.500.000	-	-	-	11.500.000	5.502.414.967
23	BPKAD	20.515.273.332	669.594.500	-	522.434.800	-	522.434.800	-	-	-	976.591.051	-	-	-	976.591.051	20.730.711.581
24	Bapenda	5.811.386.175	433.652.200	-	24.200.000	-	24.200.000	-	-	-	14.289.300	-	-	11.874.500	26.163.800	6.243.074.575
25	BKD	5.671.649.012	135.957.000	-	-	-	-	-	-	-	114.950.000	500.000	-	-	115.450.000	5.692.156.012
26	Inspektora	2.976.332.701	177.897.620	62.463.900	409.968.657	-	472.432.557	-	-	-	291.522.287	-	-	-	291.522.287	3.335.140.591
27	Kec. Moga	1.175.365.901	66.026.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.241.391.901
28	Kec. Pulosari	1.056.037.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.037.851
29	Kec. Belik	1.282.386.859	55.717.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.338.104.580
30	Kec. Watukumpul	1.154.146.351	32.937.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.083.751
31	Kec. Bodeh	1.144.428.776	66.464.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210.892.776
32	Kec. Bantarbolang	946.573.351	82.145.234	-	46.804.000	-	46.804.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.075.522.585
33	Kec. Randudongkal	961.457.501	66.309.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.027.767.001
34	Kec. Pemalang	3.621.029.099	72.276.800	-	16.118.540	-	16.118.540	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	3.707.424.439
35	Kec. Taman	2.152.579.925	60.415.000	-	12.500.000	-	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225.494.925
36	Kec. Pelarukan	1.474.408.403	65.900.000	-	-	-	-	-	-	20.500.000	-	-	-	-	20.500.000	1.519.808.403
37	Kec. Ampelgading	1.143.369.651	52.176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195.545.651
38	Kec. Comal	1.428.216.903	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437.716.903
39	Kec. Ulujami	1.232.647.967	18.681.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.329.367
40	Kec. Warungpring	996.711.111	44.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041.211.111
41	Bakesbangpol	2.917.564.207	90.505.000	-	-	-	-	-	-	-	489.115.384	-	-	-	489.115.384	2.518.953.823
	JUMLAH	679.265.748.168	58.592.301.185	2.715.349.204	3.590.217.719	10.139.665.410	16.445.232.333	-	1.279.394.556	2.050.526.661	3.590.217.719	480.550.947	-	426.631.008	7.827.320.891	746.475.960.795



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.627.768.103.732,00 dan Rp1.606.978.563.437,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tetap Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	773.827.613.405,00	767.599.848.076,00	6.227.765.329,00	0,81
2	Dinkes	182.375.236.907,00	178.972.920.057,00	3.402.316.850,00	1,90
3	DPUTR	24.700.086.785,00	129.779.832.349,00	(105.079.745.564,00)	(80,97)
4	Disperkim	41.533.165.706,00	41.533.165.706,00	0,00	0,00
5	Satpol PP	756.590.000,00	756.590.000,00	0,00	0,00
6	BPBD	1.564.867.000,00	1.564.867.000,00	0,00	0,00
7	Dinsos KBPP	3.062.656.000,00	3.062.656.000,00	0,00	0,00
8	Disnaker	8.862.437.232,00	8.862.437.232,00	0,00	0,00
9	DLH	5.078.321.896,00	4.876.214.896,00	202.107.000,00	4,14
10	Disdukcatpil	2.050.879.586,00	2.050.879.586,00	0,00	0,00
11	Dinpermasdes	1.734.444.646,00	1.734.444.646,00	0,00	0,00
12	Dishub	13.039.108.864,00	12.911.613.864,00	127.495.000,00	0,99
13	Diskominfo	4.666.188.569,00	4.559.490.669,00	106.697.900,00	2,34
14	Diskoperindag	236.090.456.907,00	237.326.479.157,00	(1.236.022.250,00)	(0,52)
15	DPMPSTSP	2.048.630.333,00	1.828.800.333,00	219.830.000,00	12,02
16	Dinpusarda	989.806.000,00	989.806.000,00	0,00	0,00
17	Disperik	11.057.342.016,00	10.978.903.516,00	78.438.500,00	0,71
18	Disparpora	103.482.533.142,00	100.145.823.142,00	3.336.710.000,00	3,33
19	Disperian	23.880.792.234,00	22.806.973.234,00	873.819.000,00	3,83
20	Selda	22.726.983.000,00	22.726.983.000,00	0,00	0,00
21	Setwan	116.214.408.423,00	3.798.739.893,00	112.415.668.530,00	2.959,29
22	Bappeda	2.039.784.000,00	2.039.784.000,00	0,00	0,00
23	BPKAD	8.486.203.510,00	8.486.203.510,00	0,00	0,00
24	Bapenda	1.214.103.500,00	1.214.103.500,00	0,00	0,00
25	BKD	988.798.431,00	988.798.431,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	1.004.804.562,00	1.004.804.562,00	0,00	0,00
27	Kec. Moga	959.050.900,00	959.050.900,00	0,00	0,00
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000,00	1.862.715.000,00	0,00	0,00
29	Kec. Belik	1.537.790.476,00	1.537.790.476,00	0,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300,00	1.878.626.300,00	0,00	0,00
31	Kec. Bodeh	736.095.249,00	736.095.249,00	0,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000,00	1.178.458.000,00	0,00	0,00
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400,00	1.576.455.400,00	0,00	0,00
34	Kec. Pemalang	8.670.536.774,00	8.670.536.774,00	0,00	0,00
35	Kec. Taman	2.848.133.900,00	2.848.133.900,00	0,00	0,00
36	Kec. Petarukan	2.591.406.079,00	2.476.946.079,00	114.460.000,00	4,62
37	Kec. Ampelgading	884.838.500,00	884.838.500,00	0,00	0,00
38	Kec. Comal	6.638.256.500,00	6.638.256.500,00	0,00	0,00
39	Kec. Ulujami	1.710.126.000,00	1.710.126.000,00	0,00	0,00
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000,00	1.419.372.000,00	0,00	0,00
41	Bakesbangpol	-	-	0,00	0,00
Jumlah		1.627.768.103.732,00	1.606.978.563.437,00	20.789.540.295,00	1,29

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.789.540.295,00 atau 1,29%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022 sebesar Rp11.451.201.077,00, terdapat perbedaan sebesar Rp9.338.339.218,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp125.343.476.246,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp116.005.137.028,00.



Mutasi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp125.343.476.246,00 antara lain terdiri dari:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp7.490.409.966,00 berupa Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Belanja Hibah serta Reklas sesama Aset Tetap;
- Mutasi Masuk Antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp115.752.378.530,00 yaitu :
 - Setwan sebesar Rp112.415.668.530,00 berupa Gedung DPRD yang berasal dari DPU; dan
 - Disparora sebesar Rp3.336.710.000,00 berupa bangunan kios di komplek Stadion Mochtar yang berasal dari Diskoperindag;
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah sebesar Rp2.100.687.750,00 berupa bangunan di pasar sebesar Rp2.100.687.750,00 yang merupakan hibah dari Paguyuban Pedagang Pasar Ulujami sebesar Rp146.711.250,00 dan hibah dari PT. Multi Mitra pada Pasar Randudongkal sebesar Rp1.953.976.500,00.

Penambahan dari Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp7.490.409.966,00 terdiri dari:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal sebesar Rp375.939.000,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp83.987.000,00 berupa bangunan pos jaga yang berasal dari belanja pemeliharaan gedung;
 - Kec. Petarukan sebesar Rp70.500.000,00 berupa bangunan pameran UMKM yang berasal dari belanja pemeliharaan gedung; dan
 - DPU sebesar Rp221.452.000,00 berupa kapitalisasi bangunan Gudang di Kantor Kejari dari belanja hibah karena bangunan gedung milik pemda.
- Reklas sesama Aset Tetap sebesar Rp7.114.470.966,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPU berupa Gedung Kantor Terpadu Kecamatan Bodeh;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp116.005.137.028,00 antara lain terdiri dari:

- Nilai aset yang tidak memenuhi kapitalisasi/masuk ke *extracomptable* sebesar Rp252.758.498,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp53.159.498,00 berupa pemeliharaan halaman sekolah;
 - DPU sebesar Rp199.599.000,00 berupa pemeliharaan Stadion Mochtar;
- Mutasi keluar antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp115.752.378.530,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ringkasan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	115.752.378.530,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	115.752.378.530,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	7.490.409.966,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	2.100.687.750,00	
		9.591.097.716,00
Kurang :		
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	252.758.498,00	
- Reklas ke Aset Lainnya	0,00	
		252.758.498,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		9.338.339.218,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		11.451.201.077,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2022		20.789.540.295,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA.2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN 2022													Saldo Per 31-Des-2022
			BM 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	767.599.848.076	6.280.924.827	-	-	-	-	-	-	53.159.498	-	-	-	-	53.159.498	773.827.613.405
2	Dinkes	178.972.920.057	3.318.329.850	83.987.000	-	-	83.987.000	-	-	-	-	-	-	-	182.375.236.907	-
3	DPUTR	129.779.832.349	199.599.000	7.335.922.966	-	-	7.335.922.966	-	-	199.599.000	112.415.668.530	-	-	-	112.615.267.530	24.700.086.785
4	Disperkim	41.533.165.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.533.165.706
5	Satpol PP	756.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.590.000
6	BPBD	1.564.867.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564.867.000
7	Dinsos KBPP	3.062.656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.062.656.000
8	Disnaker	8.862.437.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.862.437.232
9	DLH	4.876.214.896	202.107.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.078.321.896
10	Disdukcapil	2.050.879.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050.879.586
11	Dinpermasdes	1.734.444.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.444.646
12	Dishub	12.911.613.864	127.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.039.108.864
13	Diskominfo	4.559.490.669	106.697.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.666.188.569
14	Diskoperindag	237.326.479.157	-	-	-	2.100.687.750	2.100.687.750	-	-	-	3.336.710.000	-	-	-	3.336.710.000	236.090.456.907
15	DPMPPTSP	1.828.800.333	219.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.048.630.333
16	Dinpusarda	989.806.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989.806.000
17	Disperik	10.978.903.516	78.438.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.057.342.016
18	Disparpora	100.145.823.142	-	-	3.336.710.000	-	3.336.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	103.482.533.142
19	Disperlan	22.806.973.234	873.819.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.680.792.234
20	Selda	22.726.983.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.726.983.000
21	Setwan	3.798.739.893	-	-	112.415.668.530	-	112.415.668.530	-	-	-	-	-	-	-	-	116.214.408.423
22	Bappeda	2.039.784.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.039.784.000
23	BPKAD	8.486.203.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.486.203.510
24	Bapenda	1.214.103.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.103.500
25	BKD	988.798.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988.798.431
26	Inspektora	1.004.804.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.004.804.562
27	Kec. Moga	959.050.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.050.900
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.862.715.000
29	Kec. Belik	1.537.790.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.790.476
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878.626.300
31	Kec. Bodeh	736.095.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736.095.249
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178.458.000
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.576.455.400
34	Kec. Pemalang	8.670.536.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.670.536.774
35	Kec. Taman	2.848.133.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.848.133.900
36	Kec. Pelarukan	2.476.946.079	43.960.000	70.500.000	-	-	70.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.591.406.079
37	Kec. Ampelgading	884.838.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.838.500
38	Kec. Comal	6.638.256.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.638.256.500
39	Kec. Ulujami	1.710.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.710.126.000
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.419.372.000
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.606.978.563.437	11.451.201.077	7.490.409.966	115.752.378.530	2.100.687.750	125.343.476.246	-	-	252.758.498	115.752.378.530	-	-	-	116.005.137.028	1.627.768.103.732



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.208.146.928.399,00 dan Rp1.149.991.053.274,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	5.568.257.487,00	5.568.257.487,00	0,00	0,00
2	Dinkes	14.571.496.330,00	14.571.496.330,00	0,00	0,00
3	DPUTR	1.051.968.203.216,00	994.053.290.091,00	57.914.913.125,00	5,83
4	Disperkim	86.860.356.244,00	86.860.356.244,00	0,00	0,00
5	Salpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinsos KBPP	72.806.000,00	72.806.000,00	0,00	0,00
8	Disnaker	197.657.800,00	197.657.800,00	0,00	0,00
9	DLH	6.601.048.425,00	6.601.048.425,00	0,00	0,00
10	Disdukcapil	319.977.750,00	319.977.750,00	0,00	0,00
11	Dinpermasdes	52.189.000,00	52.189.000,00	0,00	0,00
12	Dishub	3.314.659.000,00	3.165.510.000,00	149.149.000,00	4,71
13	Diskominfo	119.459.000,00	119.459.000,00	0,00	0,00
14	Diskoperindag	2.104.507.329,00	2.104.507.329,00	0,00	0,00
15	DPMPSTSP	122.907.650,00	31.094.650,00	91.813.000,00	295,27
16	Dinpusarda	33.896.290,00	33.896.290,00	0,00	0,00
17	Disperik	3.184.803.045,00	3.184.803.045,00	0,00	0,00
18	Disparpora	12.140.813.093,00	12.140.813.093,00	0,00	0,00
19	Disperian	1.506.876.500,00	1.506.876.500,00	0,00	0,00
20	Selda	831.895.500,00	831.895.500,00	0,00	0,00
21	Setwan	294.856.125,00	294.856.125,00	0,00	0,00
22	Bappeda	101.320.700,00	101.320.700,00	0,00	0,00
23	BPKAD	240.405.000,00	240.405.000,00	0,00	0,00
24	Bapenda	74.168.100,00	74.168.100,00	0,00	0,00
25	BKD	208.412.000,00	208.412.000,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Moga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
28	Kec. Pulosari	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
29	Kec. Belik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
31	Kec. Bodeh	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
33	Kec. Randudongkal	102.988.000,00	102.988.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Pemalang	11.805.147.751,00	11.805.147.751,00	0,00	0,00
35	Kec. Taman	3.082.958.123,00	3.082.958.123,00	0,00	0,00
36	Kec. Petarukan	1.792.832.341,00	1.792.832.341,00	0,00	0,00
37	Kec. Ampelgading	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Comal	845.580.600,00	845.580.600,00	0,00	0,00
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
40	Kec. Warungpring	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
41	Bakesbangpol	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.208.146.928.399,00	1.149.991.053.274,00	58.155.875.125,00	5,06

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp58.155.875.125,00 atau 5,06%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 sebesar Rp58.641.737.125,00, terdapat perbedaan sebesar Rp485.862.000,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp91.813.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp577.675.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp91.813.000,00 antara lain terdiri dari :

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp91.813.000,00 terdiri dari :

Kapitalisasi Non Belanja Modal sebesar Rp91.813.000,00 yaitu pada :

- DPMPTSP sebesar Rp91.813.000,00 berupa belanja jasa tambah daya listrik yang dikapitalisasi menambah nilai jaringan listrik;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp577.675.000,00 antara lain terdiri dari :

- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke *extracomptable* sebesar Rp577.675.000,00 yaitu pada :

- DPU sebesar Rp178.155.000,00 berupa konsultan perencanaan pembangunan jembatan;
- Diskoperindag sebesar Rp399.520.000,00 berupa pemeliharaan jalan di kompleks pasar.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2022:

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	0,00
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	0,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	91.813.000,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00
	91.813.000,00
Kurang :	
- Reklas Aset	0,00
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	577.675.000,00
- Koreksi Pencatatan Aset	0,00
- Penghapusan	0,00
- Reklas ke Aset Lainnya	0,00
	577.675.000,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	(485.862.000,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.641.737.125,00
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2022	58.155.875.125,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2022													Saldo Per 31-Des-2022
			BM 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Asef/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4-8-16
1	Dindikbud	5.568.257.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.568.257.487
2	Dinkes	14.571.496.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.571.496.330
3	DPUTR	994.053.290.091	58.093.068.125	-	-	-	-	-	-	178.155.000	-	-	-	-	178.155.000	1.051.968.203.216
4	Disperkim	86.860.356.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.860.356.244
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	72.806.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.806.000
8	Disnaker	197.657.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.657.800
9	DLH	6.601.048.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.601.048.425
10	Disdukcatpil	319.977.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.977.750
11	Dinpermasdes	52.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.189.000
12	Dishub	3.165.510.000	149.149.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314.659.000
13	Diskominfo	119.459.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.459.000
14	Diskoperindag	2.104.507.329	399.520.000	-	-	-	-	-	-	399.520.000	-	-	-	-	399.520.000	2.104.507.329
15	DPMPPTSP	31.094.650	-	91.813.000	-	-	91.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	122.907.650
16	Dinpusarda	33.896.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.896.290
17	Disperik	3.184.803.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.184.803.045
18	Disparpora	12.140.813.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.140.813.093
19	Disperlan	1.506.876.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506.876.500
20	Selda	831.895.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831.895.500
21	Setwan	294.856.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.856.125
22	Bappeda	101.320.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.320.700
23	BPKAD	240.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.405.000
24	Bapenda	74.168.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.168.100
25	BKD	208.412.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.412.000
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
28	Kec. Pulosari	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
29	Kec. Belik	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
30	Kec. Watukumpul	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
33	Kec. Randudongkal	102.988.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.988.000
34	Kec. Pemalang	11.805.147.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.805.147.751
35	Kec. Taman	3.082.958.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.082.958.123
36	Kec. Petanukan	1.792.832.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792.832.341
37	Kec. Ampelgading	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
38	Kec. Comal	845.580.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.580.600
39	Kec. Ulujami	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
40	Kec. Warungpring	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000
41	Bakesbangpol	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
	JUMLAH	1.149.991.053.274	58.641.737.125	91.813.000	-	-	91.813.000	-	-	577.675.000	-	-	-	-	577.675.000	1.208.146.928.399



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp166.621.328.480,00 dan Rp150.303.165.195,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	163.095.952.041,00	146.940.903.756,00	16.155.048.285,00	10,99
2	Dinkes	192.260.980,00	189.953.980,00	2.307.000,00	1,21
3	DPUTR	199.944.760,00	199.944.760,00	0,00	0,00
4	Disperkim	21.619.500,00	21.619.500,00	0,00	0,00
5	Satpol PP	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00
6	BPBD	3.969.300,00	3.969.300,00	0,00	0,00
7	Dinsos KBPP	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00
8	Disnaker	8.647.500,00	8.647.500,00	0,00	0,00
9	DLH	11.416.000,00	11.416.000,00	0,00	0,00
10	Disdukcapil	37.765.915,00	37.765.915,00	0,00	0,00
11	Dinpermasdes	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dishub	2.271.900,00	2.271.900,00	0,00	0,00
13	Diskominfo	9.536.000,00	0,00	9.536.000,00	0,00
14	Diskoperindag	17.952.200,00	17.952.200,00	0,00	0,00
15	DPMPTSP	37.565.000,00	37.565.000,00	0,00	0,00
16	Dinpusarda	1.328.413.540,00	1.187.553.540,00	140.860.000,00	11,86
17	Disperik	17.353.000,00	17.353.000,00	0,00	0,00
18	Disparpora	43.208.500,00	43.208.500,00	0,00	0,00
19	Dispertan	47.027.480,00	47.027.480,00	0,00	0,00
20	Setda	527.427.394,00	520.467.894,00	6.959.500,00	1,34
21	Setwan	403.618.170,00	400.165.670,00	3.452.500,00	0,86
22	Bappeda	94.630.900,00	94.630.900,00	0,00	0,00
23	BPKAD	73.182.900,00	73.182.900,00	0,00	0,00
24	Bapenda	1.734.500,00	1.734.500,00	0,00	0,00
25	BKD	40.330.000,00	40.330.000,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	9.451.000,00	9.451.000,00	0,00	0,00
27	Kec. Moga	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
28	Kec. Pulosari	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Belik	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30	Kec. Watukumpul	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31	Kec. Bodeh	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Randudongkal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Pemalang	68.854.250,00	68.854.250,00	0,00	0,00
35	Kec. Taman	20.557.500,00	20.557.500,00	0,00	0,00
36	Kec. Petarukan	38.455.250,00	38.455.250,00	0,00	0,00
37	Kec. Ampelgading	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Comal	17.442.500,00	17.442.500,00	0,00	0,00
39	Kec. Ulujami	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	0,00
40	Kec. Warungpring	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
41	Bakesbangpol	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Jumlah		166.621.328.480,00	150.303.165.195,00	16.318.163.285,00	10,86

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.318.163.285,00 atau 10,86%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp17.292.770.608,00, terdapat perbedaan sebesar Rp974.607.323,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp0,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp974.607.323,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp974.607.323,00 antara lain terdiri dari:

- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp178.183.900,00 terdiri dari:
Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp178.183.900,00 yaitu pada:
 - Dindikbud sebesar Rp136.054.800,00 berupa peralatan kantor;
 - DPMPTSP sebesar Rp3.250.000,00 berupa *digital running text*; dan
 - Inspektorat sebesar Rp38.879.100,00 berupa alat audio video;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp733.075.754,00 yaitu pada Dindikbud berupa hibah buku dari Dana BOS kepada sekolah swasta;
- Tidak memenuhi Kapitalisasi/ke *extracomptable* sebesar Rp63.347.669,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp58.347.669,00 berupa LKS, surat kabar, dll dari Dana BOS;
 - Setda sebesar Rp5.000.000,00 berupa alat musik tradisional.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2022:

Uraian	Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	0,00
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	0,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	0,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00
	0,00
Kurang :	
- Reklas Aset	178.183.900,00
- Diserahkan ke pihak lain/hibah	733.075.754,00
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	63.347.669,00
- Reklas ke Aset Lainnya	0,00
	974.607.323,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	(974.607.323,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.292.770.608,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya TA. 2022	16.318.163.285,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya TA2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI ASET TETAP - LAINNYA 2022													Saldo Per 31-Des-2022	
			BM 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN									
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Asef/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16	
1	Dindikbud	146.940.903.756	17.082.526.508	-	-	-	-	136.054.800	733.075.754	58.347.669	-	-	-	-	927.478.223	163.095.952.041	
2	Dinkes	189.953.980	2.307.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.260.980	
3	DPUTR	199.944.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.944.760	
4	Disperkim	21.619.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.619.500	
5	Salpol PP	232.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.000.000	
6	BPPD	3.969.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.969.300	
7	Dinsos KBPP	7.715.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.715.000	
8	Disnaker	8.647.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.647.500	
9	DLH	11.416.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.416.000	
10	Disdukcatpil	37.765.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.765.915	
11	Dnpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dishub	2.271.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271.900	
13	Diskominfo	-	9.536.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.536.000	
14	Diskoperindag	17.952.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.952.200	
15	DPMPPTSP	37.565.000	3.250.000	-	-	-	-	3.250.000	-	-	-	-	-	-	3.250.000	37.565.000	
16	Dinpusarda	1.187.553.540	140.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.328.413.540	
17	Disperik	17.353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.353.000	
18	Disparpora	43.208.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.208.500	
19	Dispertran	47.027.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.027.480	
20	Setda	520.467.894	11.959.500	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	527.427.394	
21	Setwan	400.165.670	3.452.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.618.170	
22	Bappeda	94.630.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.630.900	
23	BPKAD	73.182.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.182.900	
24	Bapenda	1.734.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.500	
25	BKD	40.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.330.000	
26	Inspektora	9.451.000	38.879.100	-	-	-	-	38.879.100	-	-	-	-	-	-	38.879.100	9.451.000	
27	Kec. Moga	107.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500	
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Kec. Belik	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	
30	Kec. Watukumpul	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
31	Kec. Bodeh	6.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.030.000	
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Kec. Randudongkal	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	
34	Kec. Pemalang	68.854.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.854.250	
35	Kec. Taman	20.557.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.557.500	
36	Kec. Petarukan	38.455.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.455.250	
37	Kec. Ampelgading	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	
38	Kec. Comal	17.442.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.442.500	
39	Kec. Ulujami	3.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.535.000	
40	Kec. Warungpring	98.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.000	
41	Bakesbangpol	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
	JUMLAH	150.303.165.195	17.292.770.608	-	-	-	-	178.183.900	733.075.754	63.347.669	-	-	-	-	974.607.323	166.621.328.480	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp72.620.681.481,00 dan Rp80.014.480.447,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	2.362.017.589,00	2.362.017.589,00	0,00	0,00
2	Dinkes	501.667.626,00	501.667.626,00	0,00	0,00
3	DPU TR	61.631.842.523,00	69.025.641.489,00	(7.393.798.966,00)	(10,71)
4	Disperkim	359.547.793,00	359.547.793,00	0,00	0,00
5	Dinsos KBPP	101.042.000,00	101.042.000,00	0,00	0,00
6	Disnaker	42.548.000,00	42.548.000,00	0,00	0,00
7	Dishub	100.765.000,00	100.765.000,00	0,00	0,00
8	Diskoperindag	1.383.825.800,00	1.383.825.800,00	0,00	0,00
9	Dinpusarda	95.865.000,00	95.865.000,00	0,00	0,00
10	Disparpora	6.041.560.150,00	6.041.560.150,00	0,00	0,00
Jumlah		72.620.681.481,00	80.014.480.447,00	(7.393.798.966,00)	(9,24)

Pada tahun 2022 terdapat pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.393.798.966,00 atau 9,24%.

Mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 sebesar Rp7.393.798.966,00 terdiri dari:

- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp7.114.470.966,00 yaitu:
Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.114.470.966,00 yaitu pada:
 - DPU sebesar Rp7.114.470.966,00 berupa gedung Kantor Kecamatan Terpadu Bodeh;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp279.328.000,00 yaitu pada:
 - DPU sebesar Rp279.328.000,00 berupa DED yang sudah tidak digunakan.

Ringkasan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 :

Uraian	Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	0,00
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	0,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	0,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00
	0,00
Kurang :	
- Reklas ke sesama Aset Tetap	7.114.470.966,00
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan	279.328.000,00
	7.393.798.966,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	(7.393.798.966,00)
Belanja Modal KDP	0,00
Pengurangan KDP TA. 2022	(7.393.798.966,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan TA2022 dari seluruh OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN 2022													Saldo Per 31-Des-2022
			BM 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	2.362.017.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.362.017.589
2	Dinkes	501.667.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501.667.626
3	DPUTR	69.025.641.489	-	-	-	-	-	7.114.470.966	-	-	-	-	-	279.328.000	7.393.798.966	61.631.842.523
4	Disperkim	359.547.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.547.793
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	101.042.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.042.000
8	Disnaker	42.548.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.548.000
9	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Disdukcapil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dishub	100.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.765.000
13	Diskominb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Diskoperindag	1.383.825.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.825.800
15	DPMPSTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinpusarda	95.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.865.000
17	Disperik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Disparpora	6.041.560.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.041.560.150
19	Disperlan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Selda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Selda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bapenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kec. Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kec. Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kec. Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kec. Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kec. Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kec. Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kec. Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kec. Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kec. Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	80.014.480.447	-	-	-	-	-	7.114.470.966	-	-	-	-	-	279.328.000	7.393.798.966	72.620.681.481



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Daftar Pekerjaan yang masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SKPD	PEKERJAAN	NILAI	TAHUN PEROLEHAN
1	DINDIKBUD		2.362.017.589	
		Bangunan SMPN 4 Randudongkal	75.191.876	2012
		Bangunan SDN 3 Gunungjaya	30.829.000	2012
		Bangunan SDN 2 Bodas	40.256.000	2012
		Bangunan SMPN Satu Atap Tlagasana	63.814.000	2012
		Perencanaan APBD II PAUD Desa Tumbal	9.000.000	2013
		Perencanaan APBD II PAUD	9.000.000	2013
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 4 Ampelgading	54.000.000	2013
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 2 Warungpring	54.000.000	2013
		Rehabilitasi ruang kelas DAK 2013 dan APBD II SDN 1 Surajaya	81.672.400	2013
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	14.997.400	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	9.999.000	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	9.999.000	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	4.999.500	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	4.999.500	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000	2014
		Dindik 2017 (URUGAN) Rencana dibangun Gedung Kesenian Taman Budaya	1.112.243.000	2017
		Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Ulujami	506.366.350	2021
		Bangunan Taman Bacaan Masyarakat di SKB Comal	274.150.563	2021
2	DINKES		501.667.626	
		KDP pengurusan tanah untuk rumah sakit comal DED + Progres penyelesaian fisik 8,437 % dari nilai kontrak	435.967.626	2017
		Perencanaan pembangunan gedung logistik dan alkes	53.760.000	2019
		Bangunan Rumah Sakit (rumah genset)	11.940.000	2020
3	DPU TR		61.631.842.523	
		DED Bangunan Gedung BKD Kabupaten Pemalang	49.560.000	2016
		DED Kantor Kelurahan Widuri	52.598.000	2016
		DED kantor kelurahan kebondalem	49.929.000	2016
		Perkerasan jalan ruko Stadion Mochtar	217.968.000	2016
		Lanjutan Penataan Kawasan Stadion Mochtar	976.091.000	2016
		Pembangunan gedung BKD Kabupaten Pemalang	1.649.918.912	2017
		Pembuatan masterplan lingkungan Kantor Bupati Pemalang	50.735.117	2017
		Penataan Kawasan Stadion Mochtar	587.816.855	2017
		Pembangunan Gedung BKD	5.389.518.457	2018
		Manajemen konstruksi/pengawasan penataan kawasan stadion	172.236.914	2018
		Perencanaan Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	74.745.000	2019
		Belanja penunjang Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	169.289.000	2019
		Perencanaan Pemb. Kantor Kelurahan Widuri	83.131.000	2019
		Perencanaan Pemb. Gedung Kantor Dinsos KBPP	76.816.000	2019
		Perencanaan Pemb. Kantor Kecamatan Ampelgading	81.805.000	2019
		Pemb. Gedung BKD	3.961.119.800	2019
		Perencanaan Pemb. Gedung Arsip Dinspusarda	82.350.000	2019
		Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	14.549.878.608	2019
		MK Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	447.477.250	2019
		Belanja penunjang Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	180.371.347	2019
		Perencanaan Pemb. Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Pemalang	81.085.000	2019
		Pemeliharaan Wisma Pemalang	76.210.000	2020
		Perencanaan Gedung Setda Kabupaten Pemalang	96.096.000	2020
		Review perencanaan Pembangunan Gedung BKD Pemalang	29.900.000	2020
		Pemb. Penataan Kawasan Stadion Mochtar	32.050.001.741	2020
		Pembangunan Gedung Arsip Disdukcapil	395.194.522	2020
4	DISPERKIM		359.547.793	
		DED RTH Pemb. trotoar dan boulevard Perintis Kemerdekaan	111.201.000	2019
		DED RTH Kecamatan Moga	63.072.000	2019
		DED RTH Terminal Pemalang	63.052.000	2019
		DED RTH Kec. Taman	59.069.000	2019
5	DINSOS KBPP		101.042.000	
		Design Engineering Detail	49.752.000	2016
		Detail Engineering Design (DED)	51.290.000	2017



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	PEKERJAAN	NILAI	TAHUN PEROLEHAN
6	DISNAKER		42.548.000	
		Perencanaan Pemb. Asrama BLK	42.548.000	2020
7	DISHUB		100.765.000	
		DED di Sub Terminal Angkutan	49.980.000	2016
		Perencanaan Rehabilitasi Sub Terminal Grosir Comal	50.785.000	2017
8	DISKOPERINDAG		1.383.825.800	
		DED Pasar Pemalang	299.117.400	2017
		Pembuatan DED Pasar Pagi Pemalang	50.455.000	2018
		Sertifikasi Tanah Ps. Bung Karno	30.000.000	2020
		Amdal Ps. Bung Karno	319.642.850	2020
		Andalalin Ps. Bung Karno	230.757.350	2020
		DED Ps. Bung Karno	133.715.350	2020
		Amdal Ps. Moga	320.137.850	2020
9	DINPUSARDA		95.865.000	
		DED Gedung Perpustakaan	95.865.000	2019
10	DISPARPORA		6.041.560.150	
		DED Gardu Pandang Gg Slamet Pulosari	49.940.000	2016
		DED Rumah Budaya	83.400.000	2016
		DED Susur kali comal	78.444.000	2016
		Pos Jaga Gunung Slamet	61.731.500	2017
		Peningkatan Jalan Road Race	67.601.000	2017
		Pos Jaga Gunung Slamet	354.750.000	2018
		Pos Jaga Gunung Slamet	34.590.000	2019
		Sport Center	49.885.000	2019
		Tempat Parkir Swimmingpool	31.973.771	2020
		Gardu Pandang Gn. Slamet	5.229.244.879	2020
		JUMLAH	72.620.681.481	

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.671.803.734.913,00 dan Rp1.508.956.382.373,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	546.018.513.313,00	480.034.028.470,00	65.984.484.843,00	13,75
2	Gedung dan Bangunan	460.485.521.108,00	432.376.200.280,00	28.109.320.828,00	6,50
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	665.299.700.492,00	596.546.153.623,00	68.753.546.869,00	11,53
	Jumlah	1.671.803.734.913,00	1.508.956.382.373,00	162.847.352.540,00	10,79

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp162.847.352.540,00 atau 10,79% dibanding tahun lalu. Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp165.855.704.601,00. Terdapat perbedaan antara Beban Penyusutan Aset Tetap dengan Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp3.008.352.061,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp2.832.423.859,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp5.840.775.920,00.

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.832.423.859,00, antara lain terdiri dari:

- Mutasi masuk Aset antar OPD sebesar Rp2.832.423.859,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.840.775.920,00 antara lain terdiri dari:

- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp21.756.060,00;
- Mutasi Aset antar OPD sebesar Rp2.832.423.859,00;
- Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.674.030.612,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp312.565.389,00, yaitu reklas ke aset lain-lain karena aset rusak berat dan akan dihapuskan/dihibahkan.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan tahun 2022:

Uraian	Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2022	2.832.423.859,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2022	2.832.423.859,00
	0,00
Tambah :	
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00
	0,00
Kurang :	
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	21.756.060,00
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	2.674.030.612,00
- Penghapusan	0,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	312.565.389,00
	3.008.352.061,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan	(3.008.352.061,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap	165.855.704.601,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2022	162.847.352.540,00

Jika dibandingkan antara perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp162.847.352.540,00 dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional sebesar Rp166.792.822.671,00 maka terdapat selisih sebesar Rp3.945.470.131,00. Selisih tersebut terjadi karena penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp2.832.423.859,00 terdiri dari mutasi aset antar OPD sebesar Rp2.832.423.859,00 dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp5.840.775.920,00 terdiri dari : diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp21.756.060,00, mutasi keluar antar OPD sebesar Rp2.832.423.859,00, koreksi atas pencatatan saldo akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sebesar Rp2.210.437.769,00; koreksi pencatatan atas Aset Tetap yang direklas ke Extracomptable sebesar Rp463.592.843,00, dan reklas ke Aset Lainnya karena aset rusak berat sebesar Rp312.565.389,00 sedangkan Rp937.118.070,00 merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Adapun saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dan 2021 yang merupakan saldo konsolidasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	427.817.799.195,00	396.875.148.758,00	30.942.650.437,00	7,80
2	Dinkes	247.305.816.439,00	219.410.350.428,00	27.895.466.011,00	12,71
3	DPUTR	650.120.937.579,00	587.741.901.077,00	62.379.036.502,00	10,61
4	Disperkim	22.473.864.499,00	17.476.465.281,00	4.997.399.218,00	28,60
5	Satpol PP	5.734.291.337,00	5.015.799.941,00	718.491.396,00	14,32
6	BPBD	4.601.283.075,00	3.862.204.401,00	739.078.674,00	19,14
7	Dinsos KBPP	8.979.640.027,00	8.125.716.007,00	853.924.020,00	10,51
8	Disnaker	6.619.621.490,00	5.966.981.815,00	652.639.675,00	10,94
9	DLH	18.618.973.950,00	16.324.855.818,00	2.294.118.132,00	14,05
10	Disdukcatpil	9.920.791.830,00	8.872.282.805,00	1.048.509.025,00	11,82
11	Dinpermasdes	4.136.278.825,00	3.720.142.644,00	416.136.181,00	11,19
12	Dishub	21.279.510.425,00	19.831.065.866,00	1.448.444.559,00	7,30
13	Diskominfo	12.774.621.594,00	11.164.821.001,00	1.609.800.593,00	14,42
14	Diskoperindag	46.765.509.826,00	41.751.854.554,00	5.013.655.272,00	12,01
15	DPMPTSP	3.484.123.234,00	3.109.731.351,00	374.391.883,00	12,04
16	Dinpusarda	4.231.047.321,00	3.753.637.121,00	477.410.200,00	12,72
17	Disperik	8.289.795.017,00	7.502.406.508,00	787.388.509,00	10,50
18	Disparpora	28.491.557.393,00	24.563.405.205,00	3.928.152.188,00	15,99
19	Disptan	12.906.851.403,00	11.755.312.135,00	1.151.539.268,00	9,80
20	Selda	34.413.155.889,00	31.043.849.306,00	3.369.306.583,00	10,85
21	Setwan	18.052.045.902,00	13.875.118.597,00	4.176.927.305,00	30,10
22	Bappeda	5.414.400.086,00	4.971.422.432,00	442.977.654,00	8,91
23	BPKAD	5.663.150.719,00	20.931.992.066,00	(15.268.841.347,00)	(72,94)
24	Bapenda	22.537.959.860,00	5.237.195.497,00	17.300.764.363,00	330,34
25	BKD	5.017.883.675,00	4.593.762.635,00	424.121.040,00	9,23
26	Inspektorat	2.877.625.576,00	2.460.956.577,00	416.668.999,00	16,93
27	Kec. Moga	1.219.124.505,00	1.074.334.820,00	144.789.685,00	13,48
28	Kec. Pulosari	1.422.926.313,00	1.297.828.244,00	125.098.069,00	9,64
29	Kec. Belik	1.513.146.028,00	1.347.925.909,00	165.220.119,00	12,26
30	Kec. Watukumpul	1.590.780.573,00	1.427.847.856,00	162.932.717,00	11,41
31	Kec. Bodeh	1.366.708.600,00	1.219.548.237,00	147.160.363,00	12,07
32	Kec. Bantarbolang	1.309.058.736,00	1.163.344.599,00	145.714.137,00	12,53
33	Kec. Randudongkal	1.232.087.367,00	1.101.200.018,00	130.887.349,00	11,89
34	Kec. Pemalang	8.457.901.514,00	6.892.593.427,00	1.565.308.087,00	22,71
35	Kec. Taman	3.191.624.103,00	2.616.102.043,00	575.522.060,00	22,00
36	Kec. Petarukan	2.293.149.175,00	1.928.427.572,00	364.721.603,00	18,91
37	Kec. Ampelgading	1.313.462.732,00	1.188.635.611,00	124.827.121,00	10,50
38	Kec. Comal	3.648.250.975,00	3.323.714.053,00	324.536.922,00	9,76
39	Kec. Ulujami	1.580.968.224,00	1.416.817.497,00	164.150.727,00	11,59
40	Kec. Warungpring	1.249.816.773,00	1.115.049.763,00	134.767.010,00	12,09
41	Bakesbangpol	1.886.193.129,00	1.904.632.898,00	(18.439.769,00)	(0,97)
Jumlah		1.671.803.734.913,00	1.508.956.382.373,00	162.847.352.540,00	10,79

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk masing-masing OPD dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp546.018.513.313,00 dan Rp480.034.028.470,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	118.780.768.784,00	100.252.916.292,00	18.527.852.492,00	18,48
2	Dinkes	203.691.712.035,00	179.510.750.360,00	24.180.961.675,00	13,47
3	DPUTR	19.309.161.457,00	18.332.099.963,00	977.061.494,00	5,33
4	Disperkim	3.759.495.418,00	3.233.916.854,00	525.578.564,00	16,25
5	Satpol PP	5.476.838.684,00	4.772.982.272,00	703.856.412,00	14,75
6	BPBD	3.768.942.805,00	3.056.393.611,00	712.549.194,00	23,31
7	Dinsos KBPP	8.385.756.784,00	7.594.947.702,00	790.809.082,00	10,41
8	Disnaker	4.969.225.233,00	4.473.921.467,00	495.303.766,00	11,07
9	DLH	13.228.940.994,00	11.458.548.283,00	1.770.392.711,00	15,45
10	Disdukcapil	9.275.182.847,00	8.274.068.440,00	1.001.114.407,00	12,10
11	Dinpermasdes	3.626.485.351,00	3.243.710.778,00	382.774.573,00	11,80
12	Dishub	14.150.517.822,00	12.978.830.238,00	1.171.687.584,00	9,03
13	Diskominfo	12.285.384.266,00	10.776.470.645,00	1.508.913.621,00	14,00
14	Diskoperindag	6.360.268.272,00	5.409.949.352,00	950.318.920,00	17,57
15	DPMPPTSP	3.226.443.418,00	2.889.605.207,00	336.838.211,00	11,66
16	Dinpusarda	3.673.861.285,00	3.217.206.782,00	456.654.503,00	14,19
17	Disperik	5.052.177.510,00	4.621.413.967,00	430.763.543,00	9,32
18	Disparpora	6.674.304.193,00	5.867.934.318,00	806.369.875,00	13,74
19	Dispertan	7.856.156.910,00	7.204.655.787,00	651.501.123,00	9,04
20	Setda	25.523.180.947,00	22.621.928.007,00	2.901.252.940,00	12,82
21	Setwan	13.152.972.539,00	11.490.783.730,00	1.662.188.809,00	14,47
22	Bappeda	4.854.426.142,00	4.452.631.645,00	401.794.497,00	9,02
23	BPKAD	17.821.290.714,00	16.372.680.326,00	1.448.610.388,00	8,85
24	Bapenda	5.256.009.095,00	4.854.331.077,00	401.678.018,00	8,27
25	BKD	4.609.326.703,00	4.209.266.779,00	400.059.924,00	9,50
26	Inspektorat	2.533.248.256,00	2.134.796.517,00	398.451.739,00	18,66
27	Kec. Moga	974.423.926,00	848.582.509,00	125.841.417,00	14,83
28	Kec. Pulosari	924.819.773,00	834.259.297,00	90.560.476,00	10,86
29	Kec. Belik	1.043.794.618,00	905.253.145,00	138.541.473,00	15,30
30	Kec. Watukumpul	929.362.475,00	802.276.508,00	127.085.967,00	15,84
31	Kec. Bodeh	950.672.664,00	817.696.157,00	132.976.507,00	16,26
32	Kec. Bantarbolang	882.560.439,00	757.250.474,00	125.309.965,00	16,55
33	Kec. Randudongkal	833.676.839,00	741.550.558,00	92.126.281,00	12,42
34	Kec. Pemalang	3.097.035.556,00	2.757.176.798,00	339.858.758,00	12,33
35	Kec. Taman	1.800.958.835,00	1.572.704.698,00	228.254.137,00	14,51
36	Kec. Petarukan	1.224.268.320,00	1.084.724.935,00	139.543.385,00	12,86
37	Kec. Ampelgading	1.000.842.809,00	889.872.908,00	110.969.901,00	12,47
38	Kec. Comal	1.295.225.241,00	1.179.303.613,00	115.921.628,00	9,83
39	Kec. Ulujami	1.033.876.435,00	901.519.521,00	132.356.914,00	14,68
40	Kec. Warungpring	841.788.027,00	733.477.456,00	108.310.571,00	14,77
41	Bakesbangpol	1.883.128.892,00	1.901.639.494,00	(18.510.602,00)	(0,97)
Jumlah		546.018.513.313,00	480.034.028.470,00	65.984.484.843,00	13,75

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.984.484.843,00 atau 13,75%. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebesar Rp66.874.446.753,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp889.961.910,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp1.877.621.112,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.767.583.022,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.877.621.112,00, antara lain terdiri dari:

- Mutasi masuk Aset antar OPD sebesar Rp1.877.621.112,00;

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.767.583.022,00 antara lain terdiri dari:

- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp21.756.060,00;
- Mutasi Aset antar OPD sebesar Rp1.877.621.112,00;
- Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sebesar Rp555.640.461,00 terdiri dari:
 - Koreksi atas Aset Tetap yang direklas ke Extracomptable sebesar Rp463.592.843,00; dan
 - Koreksi atas pencatatan saldo Akumulasi Penyusutan tahun sebelumnya sebesar Rp2.210.437.769,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp312.565.389,00, yaitu reklas ke asset lain-lain berupa aset rusak berat dan akan dihapuskan berupa sepeda motor, rak buku, komputer dan printer, serta alat kedokteran dan kesehatan.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022 :

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2022	1.877.621.112,00	
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2022	1.877.621.112,00	
		0,00
Tambah :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Diserahkan ke pihak lain/hibah	21.756.060,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	555.640.461,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	312.565.389,00	
		889.961.910,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		(889.961.910,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		66.874.446.753,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2022		65.984.484.843,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA.2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN 2022												Saldo Per 31-Des-2022
			Beban Penyusutan 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					Total Pengurangan		
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)		Reklas ke Aset Lainnya a/ Persediaan/ Piutang	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4-8-15
1	Dindikbud	100.252.916.292	19.115.625.335	-	90.876.785	-	90.876.785	-	-	132.743.750	545.905.878	-	-	678.649.628	118.780.768.784
2	Dinkes	179.510.750.360	24.367.199.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.237.417	186.237.417	203.691.712.035
3	DPUTR	18.332.099.963	970.479.595	-	11.500.000	-	11.500.000	-	-	4.918.101	-	-	-	4.918.101	19.309.161.457
4	Disperkim	3.233.916.854	525.578.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.759.495.418
5	Satpol PP	4.772.982.272	558.647.412	-	145.209.000	-	145.209.000	-	-	-	-	-	-	-	5.476.838.684
6	BPKD	3.056.393.611	712.549.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.768.942.805
7	Dinsos KBPP	7.594.947.702	1.039.189.844	-	-	-	-	-	-	248.380.762	-	-	-	248.380.762	8.385.756.784
8	Dianaker	4.473.921.467	433.709.552	-	142.470.999	-	142.470.999	-	-	80.876.785	-	-	-	80.876.785	4.969.225.233
9	DLH	11.458.548.283	1.686.442.711	-	83.950.000	-	83.950.000	-	-	-	-	-	-	-	13.228.940.994
10	Disdukcatpil	8.274.068.440	1.001.114.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.275.182.847
11	Dinpermasdes	3.243.710.778	382.774.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.626.485.351
12	Dishub	12.978.830.238	1.140.746.584	-	30.941.000	-	30.941.000	-	-	-	-	-	-	-	14.150.517.822
13	Diskominfo	10.776.470.645	1.585.708.068	-	176.995.674	-	176.995.674	-	-	253.790.121	-	-	-	253.790.121	12.285.384.266
14	Diskoperindag	5.409.949.352	907.318.920	-	43.000.000	-	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.360.268.272
15	DPMPTSP	2.889.605.207	316.564.687	-	20.273.524	-	20.273.524	-	-	-	-	-	-	-	3.226.443.418
16	Dipusarda	3.217.206.782	574.191.103	-	-	-	-	-	21.756.060	2.005.540	-	-	93.775.000	117.536.600	3.673.861.285
17	Disperik	4.621.413.967	421.837.718	-	48.925.825	-	48.925.825	-	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	5.052.177.510
18	Disparpora	5.867.934.318	780.869.875	-	115.500.000	-	115.500.000	-	-	85.000.000	5.000.000	-	-	90.000.000	6.674.304.193
19	Disperlan	7.204.655.787	747.480.298	-	63.038.825	-	63.038.825	-	-	159.018.000	-	-	-	159.018.000	7.856.156.910
20	Setda	22.621.928.007	2.806.981.412	-	114.950.000	-	114.950.000	-	-	-	-	-	20.678.472	20.678.472	25.523.180.947
21	Setwan	11.490.783.730	1.657.270.708	-	4.918.101	-	4.918.101	-	-	-	-	-	-	-	13.152.972.539
22	Bappeda	4.452.631.645	413.294.497	-	-	-	-	-	-	11.500.000	-	-	-	11.500.000	4.854.426.142
23	BPKAD	16.372.680.326	1.357.263.431	-	431.658.718	-	431.658.718	-	-	340.311.761	-	-	-	340.311.761	17.821.290.714
24	Bapenda	4.854.331.077	403.131.486	-	24.200.000	-	24.200.000	-	-	13.778.968	-	-	11.874.500	25.653.468	5.256.009.095
25	BKD	4.209.266.779	515.509.924	-	-	-	-	-	-	114.950.000	500.000	-	-	115.450.000	4.609.326.703
26	Inspektora	2.134.796.517	321.657.292	-	253.790.121	-	253.790.121	-	-	176.995.674	-	-	-	176.995.674	2.533.248.256
27	Kec. Moga	848.582.509	125.841.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.423.926
28	Kec. Pulosari	834.259.297	90.560.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.819.773
29	Kec. Belik	905.253.145	138.541.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.043.794.618
30	Kec. Watukumpul	802.276.508	127.085.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929.362.475
31	Kec. Bodeh	817.696.157	132.976.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.672.664
32	Kec. Bantarbolang	757.250.474	78.505.965	-	46.804.000	-	46.804.000	-	-	-	-	-	-	-	882.560.439
33	Kec. Randudongkal	741.550.558	92.126.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833.676.839
34	Kec. Pemalang	2.757.176.798	325.740.218	-	16.118.540	-	16.118.540	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	3.097.035.556
35	Kec. Taman	1.572.704.698	215.754.137	-	12.500.000	-	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.958.835
36	Kec. Petarukan	1.084.724.935	139.543.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.224.268.320
37	Kec. Ampelgading	889.872.908	110.969.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.842.809
38	Kec. Comal	1.179.303.613	118.069.545	-	-	-	-	-	-	-	2.147.917	-	-	2.147.917	1.295.225.241
39	Kec. Ulujami	901.519.521	132.356.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.033.876.435
40	Kec. Warungpring	733.477.456	108.310.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841.788.027
41	Bakesbangpol	1.901.639.494	194.927.714	-	-	-	-	-	-	213.351.650	86.666	-	-	213.438.316	1.883.128.892
	JUMLAH	480.034.028.470	66.874.446.753	-	1.877.621.112	-	1.877.621.112	-	21.756.060	1.877.621.112	555.640.461	-	312.565.389	2.767.583.022	546.018.513.313



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp460.485.521.108,00 dan Rp432.376.200.280,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	306.050.006.698,00	293.744.927.018,00	12.305.079.680,00	4,19
2	Dinkes	41.228.396.565,00	37.892.378.269,00	3.336.018.296,00	8,80
3	DPUTR	5.009.030.354,00	4.849.466.648,00	159.563.706,00	3,29
4	Disperkim	5.146.575.901,00	4.316.626.776,00	829.949.125,00	19,23
5	Satpol PP	257.452.653,00	242.817.669,00	14.634.984,00	6,03
6	BPBD	832.340.270,00	805.810.790,00	26.529.480,00	3,29
7	Dinsos KBPP	572.594.691,00	511.341.571,00	61.253.120,00	11,98
8	Disnaker	1.600.890.223,00	1.448.495.021,00	152.395.202,00	10,52
9	DLH	1.169.774.078,00	1.069.555.020,00	100.219.058,00	9,37
10	Disdukcatpil	507.716.681,00	471.111.303,00	36.605.378,00	7,77
11	Dinpermasdes	502.633.055,00	470.554.922,00	32.078.133,00	6,82
12	Dishub	4.214.428.028,00	3.955.768.345,00	258.659.683,00	6,54
13	Diskominfo	475.252.087,00	380.338.065,00	94.914.022,00	24,96
14	Diskoperindag	39.517.150.206,00	35.664.432.823,00	3.852.717.383,00	10,80
15	DPMPSTSP	251.157.010,00	214.619.801,00	36.537.209,00	17,02
16	Dinpusarda	547.181.889,00	527.385.769,00	19.796.120,00	3,75
17	Dispenik	2.209.201.881,00	1.990.511.065,00	218.690.816,00	10,99
18	Disparpora	15.882.516.217,00	13.592.543.952,00	2.289.972.265,00	16,85
19	Dispertan	4.705.232.104,00	4.254.305.963,00	450.926.141,00	10,60
20	Setda	8.768.176.493,00	8.327.259.613,00	440.916.880,00	5,29
21	Setwan	4.796.637.058,00	2.288.043.007,00	2.508.594.051,00	109,64
22	Bappeda	530.071.397,00	491.435.842,00	38.635.555,00	7,86
23	BPKAD	4.632.859.510,00	4.483.224.729,00	149.634.781,00	3,34
24	Bapenda	389.320.085,00	366.897.083,00	22.423.002,00	6,11
25	BKD	357.628.127,00	338.124.530,00	19.503.597,00	5,77
26	Inspektorat	344.377.320,00	326.160.060,00	18.217.260,00	5,59
27	Kec. Moga	243.507.871,00	224.622.103,00	18.885.768,00	8,41
28	Kec. Pulosari	494.528.426,00	460.178.334,00	34.350.092,00	7,46
29	Kec. Belik	468.158.702,00	441.542.556,00	26.616.146,00	6,03
30	Kec. Watukumpul	659.986.848,00	624.215.098,00	35.771.750,00	5,73
31	Kec. Bodeh	416.035.936,00	401.852.080,00	14.183.856,00	3,53
32	Kec. Bantarbolang	426.146.214,00	405.767.042,00	20.379.172,00	5,02
33	Kec. Randudongkal	364.483.178,00	335.795.910,00	28.687.268,00	8,54
34	Kec. Pemalang	2.381.272.518,00	2.216.998.061,00	164.274.457,00	7,41
35	Kec. Taman	541.333.720,00	496.709.742,00	44.623.978,00	8,98
36	Kec. Petarukan	598.466.669,00	549.263.585,00	49.203.084,00	8,96
37	Kec. Ampelgading	310.677.215,00	296.882.495,00	13.794.720,00	4,65
38	Kec. Comal	2.131.233.945,00	2.005.323.587,00	125.910.358,00	6,28
39	Kec. Ulujami	545.091.789,00	513.297.976,00	31.793.813,00	6,19
40	Kec. Warungpring	405.997.496,00	379.616.057,00	26.381.439,00	6,95
41	Bakesbangpol	-	-	0,00	0,00
Jumlah		460.485.521.108,00	432.376.200.280,00	28.109.320.828,00	6,50

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.109.320.828,00 atau 6,50%. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2022 adalah sebesar Rp30.227.710.979,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.118.390.151,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp954.802.747,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.073.192.898,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp954.802.747,00 terdiri dari:

- Mutasi Masuk Aset antar OPD sebesar Rp954.802.747,00;

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.073.192.898,00 terdiri dari:

- Mutasi Keluar Aset antar OPD sebesar Rp954.802.747,00;
- Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.118.390.151,00;

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2022:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	954.802.747,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	954.802.747,00	
		0,00
Tambah :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	2.118.390.151,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	0,00	
		2.118.390.151,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		(2.118.390.151,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		30.227.710.979,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2022		28.109.320.828,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN 2022												Saldo Per 31-Des-2022
			Beban Penyusutan 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15
1	Dindikbud	293.744.927.018	14.423.469.831	-	-	-	-	-	-	-	2.118.390.151	-	-	2.118.390.151	306.050.006.698
2	Dinkes	37.892.378.269	3.336.018.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.228.396.565
3	DPUTR	4.849.466.648	346.923.153	-	-	-	-	-	-	187.359.747	-	-	-	187.359.747	5.009.030.054
4	Disperkim	4.316.626.776	829.949.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.146.575.901
5	Satpol PP	242.817.669	14.634.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.452.653
6	BPPD	805.810.790	26.529.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.340.270
7	Dinsos KBPP	511.341.571	61.253.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572.594.691
8	Dsnaker	1.448.495.021	152.395.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.890.223
9	DLH	1.069.555.020	100.219.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.169.774.078
10	Disdukcatpil	471.111.303	36.605.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507.716.681
11	Dinpermasdes	470.554.922	32.078.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.633.055
12	Dishub	3.955.768.345	258.659.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.214.428.028
13	Diskominfo	380.338.065	94.914.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.252.087
14	Diskoperindag	35.664.432.823	4.620.160.683	-	-	-	-	-	-	767.443.300	-	-	-	767.443.300	39.517.150.206
15	DPMPSTP	214.619.801	36.537.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.157.010
16	Dinpusarda	527.385.769	19.796.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.181.889
17	Disperik	1.990.511.065	218.690.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.209.201.881
18	Disparpora	13.592.543.952	1.522.528.965	-	767.443.300	-	767.443.300	-	-	-	-	-	-	-	15.882.516.217
19	Dispartan	4.254.305.963	450.926.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.705.232.104
20	Selda	8.327.259.613	440.916.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.768.176.493
21	Setwan	2.288.043.007	2.321.234.604	-	187.359.747	-	187.359.747	-	-	-	-	-	-	-	4.796.637.358
22	Bappeda	491.435.842	38.635.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.071.397
23	BPKAD	4.483.224.729	149.634.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.632.859.510
24	Bapenda	366.897.083	22.423.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.320.085
25	BKD	338.124.530	19.503.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.628.127
26	Inspektora	326.160.060	18.217.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.377.320
27	Kec. Moga	224.622.103	18.885.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.507.871
28	Kec. Pulosari	460.178.334	34.350.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.528.426
29	Kec. Belik	441.542.556	26.616.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468.158.702
30	Kec. Watukumpul	624.215.098	35.771.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.986.848
31	Kec. Bodeh	401.852.080	14.183.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.035.936
32	Kec. Bantarbolang	405.767.042	20.379.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.146.214
33	Kec. Randudongkal	335.795.910	28.687.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.483.178
34	Kec. Pemalang	2.216.998.061	164.274.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.381.272.518
35	Kec. Taman	496.709.742	44.623.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.333.720
36	Kec. Petarukan	549.263.585	49.203.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598.466.669
37	Kec. Ampelgading	296.882.495	13.794.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.677.215
38	Kec. Comal	2.005.323.587	125.910.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.131.233.945
39	Kec. Ulujami	513.297.976	31.793.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545.091.789
40	Kec. Wanungpring	379.616.057	26.381.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.997.496
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	432.376.200.280	30.227.710.979	-	954.803.047	-	954.803.047	-	-	954.803.047	2.118.390.151	-	-	3.073.193.198	460.485.521.108



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp665.299.700.492,00 dan Rp596.546.153.623,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang	%
		2022	2021		
1	Dindikbud	2.987.023.713,00	2.877.305.448,00	109.718.265,00	3,81
2	Dinkes	2.385.707.839,00	2.007.221.799,00	378.486.040,00	18,86
3	DPUTR	625.802.745.768,00	564.560.334.466,00	61.242.411.302,00	10,85
4	Disperkim	13.567.793.180,00	9.925.921.651,00	3.641.871.529,00	36,69
5	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BPPD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinsos KBPP	21.288.552,00	19.426.734,00	1.861.818,00	9,58
8	Disnaker	49.506.034,00	44.565.327,00	4.940.707,00	11,09
9	DLH	4.220.258.878,00	3.796.752.515,00	423.506.363,00	11,15
10	Disdukcatpil	137.892.302,00	127.103.062,00	10.789.240,00	8,49
11	Dinpermasdes	7.160.419,00	5.876.944,00	1.283.475,00	21,84
12	Dishub	2.914.564.575,00	2.896.467.283,00	18.097.292,00	0,62
13	Diskominfo	13.985.241,00	8.012.291,00	5.972.950,00	74,55
14	Diskoperindag	888.091.348,00	677.472.379,00	210.618.969,00	31,09
15	DPMPPTSP	6.522.806,00	5.506.343,00	1.016.463,00	18,46
16	Dinpusarda	10.004.147,00	9.044.570,00	959.577,00	10,61
17	Disperik	1.028.415.626,00	890.481.476,00	137.934.150,00	15,49
18	Disparpora	5.934.736.983,00	5.102.926.935,00	831.810.048,00	16,30
19	Disperian	345.462.389,00	296.350.385,00	49.112.004,00	16,57
20	Setda	121.798.449,00	94.661.686,00	27.136.763,00	28,67
21	Setwan	102.436.305,00	96.291.860,00	6.144.445,00	6,38
22	Bappeda	29.902.547,00	27.354.945,00	2.547.602,00	9,31
23	BPKAD	83.809.636,00	76.087.011,00	7.722.625,00	10,15
24	Bapenda	17.821.539,00	15.967.337,00	1.854.202,00	11,61
25	BKD	50.928.845,00	46.371.326,00	4.557.519,00	9,83
26	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Moga	1.192.708,00	1.130.208,00	62.500,00	5,53
28	Kec. Pulosari	3.578.114,00	3.390.613,00	187.501,00	5,53
29	Kec. Belik	1.192.708,00	1.130.208,00	62.500,00	5,53
30	Kec. Watukumpul	1.431.250,00	1.356.250,00	75.000,00	5,53
31	Kec. Bodeh	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Bantarbolang	352.083,00	327.083,00	25.000,00	7,64
33	Kec. Randudongkal	33.927.350,00	23.853.550,00	10.073.800,00	42,23
34	Kec. Pemalang	2.979.593.440,00	1.918.418.568,00	1.061.174.872,00	55,32
35	Kec. Taman	849.331.548,00	546.687.603,00	302.643.945,00	55,36
36	Kec. Petarukan	470.414.186,00	294.439.052,00	175.975.134,00	59,77
37	Kec. Ampelgading	1.942.708,00	1.880.208,00	62.500,00	3,32
38	Kec. Comal	221.791.789,00	139.086.853,00	82.704.936,00	59,46
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
40	Kec. Warungpring	2.031.250,00	1.956.250,00	75.000,00	3,83
41	Bakesbangpol	3.064.237,00	2.993.404,00	70.833,00	2,37
Jumlah		665.299.700.492,00	596.546.153.623,00	68.753.546.869,00	11,53

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp68.753.546.869,00 atau 11,53%. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi tahun 2022 adalah sebesar Rp68.753.546.869,00 tidak terdapat perbedaan antara penambahan akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Penambahan akumulasi penyusutan seluruhnya dipengaruhi dari beban penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2022:

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2022	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2022	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	0,00	
		0,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		68.753.546.869,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2022		68.753.546.869,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA2022 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2021	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2022												Saldo Per 31-Des-2022
			Beban Penyusutan 2022	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ Piutang	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15
	Dindikbud	2.877.305.448	109.718.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.987.023.713
	Dinkes	2.007.221.799	378.486.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385.707.839
	DPUTR	564.560.334.466	61.242.411.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.802.745.768
	Disperkim	9.925.921.651	3.641.871.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567.793.180
	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dinsos KBPP	19.426.734	1.861.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.288.552
	Disnaker	44.565.327	4.940.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.506.034
	DLH	3.796.752.515	423.506.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.220.258.878
	Disdukcapil	127.103.062	10.789.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.892.302
	Dinpermasdes	5.876.944	1.283.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.160.419
	Dishub	2.896.467.283	18.097.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.914.564.575
	Diskominfo	8.012.291	5.972.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.985.241
	Diskoperindag	677.472.379	210.618.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.091.348
	DPMPSTP	5.506.343	1.016.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.522.806
	Dinpusarda	9.044.570	959.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.004.147
	Disperik	890.481.476	137.934.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.028.415.626
	Disparpora	5.102.926.935	831.810.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.934.736.983
	Dispartan	296.350.385	49.112.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.462.389
	Setda	94.661.686	27.136.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.798.449
	Setwan	96.291.860	6.144.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.436.305
	Bappeda	27.354.945	2.547.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.902.547
	BPKAD	76.087.011	7.722.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.809.636
	Bapenda	15.967.337	1.854.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.821.539
	BKD	46.371.326	4.557.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.928.845
	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kec. Moga	1.130.208	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192.708
	Kec. Pulosari	3.390.613	187.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.578.114
	Kec. Belik	1.130.208	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192.708
	Kec. Watukumpul	1.356.250	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.431.250
	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kec. Bantarbolang	327.083	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.083
	Kec. Randudongkal	23.853.550	10.073.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.927.350
	Kec. Pemalang	1.918.418.568	1.061.174.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.979.593.440
	Kec. Taman	546.687.603	302.643.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849.331.548
	Kec. Petarukan	294.439.052	175.975.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.414.186
	Kec. Ampelgading	1.880.208	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942.708
	Kec. Comal	139.086.853	82.704.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.791.789
	Kec. Ulujami	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
	Kec. Warungpring	1.956.250	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.031.250
	Bakesbangpol	2.993.404	70.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.064.237
	JUMLAH	596.546.153.623	68.753.546.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665.299.700.492



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3 Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada Tahun 2024. Dana Cadangan di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) mengamankan besarnya Dana Cadangan dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 dan ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan rincian anggaran yang disisihkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00. Saldo penambahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan bunga dana cadangan sebesar Rp57.534.246,00.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp104.484.492.421,50 dan Rp100.677.815.221,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.1
Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Aset Lainnya		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	581.690.500,00	584.380.500,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	1.027.533.238,00	1.794.543.808,00
4	Aset lain-lain	94.345.768.683,50	89.769.390.913,00
Jumlah		104.484.492.421,50	100.677.815.221,00

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp581.690.500,00 dan Rp584.380.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.2
Tagihan jangka Panjang
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Jenis Kerugian	Saldo 2021	Mutasi 2022		Saldo 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	227.220.000,00	0,00	0,00	227.220.000,00
2	TGR dari Pembayaran Premi Asuransi CAR Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	154.500.000,00	0,00	0,00	154.500.000,00
3	TGR dari Pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s.d. 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan	132.930.000,00	0,00	2.690.000,00	130.240.000,00
4	TGR atas hilangnya kendaraan bermotor roda empat Nopol G 8 D	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
5	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9795 AD pada UPPK Belik a.n. Achmad Bahudin.	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00
6	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9973 AD pada Kepala Desa Gintung Kec. Comal a.n. Rijono	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
7	TGR hilangnya 12 CPU pada Kepala SMPN 4 Banbarbolang a.n. Nasari, S.Pd	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00
8	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak An. Tarjuki kadus I desa Simpur Kecamatan Belik sebesar Rp.6.500.000,00 disebabkan karena hilangnya sepeda motor supra X Nopol G 9996 AD sebesar Rp.6.500.000 paling lambat selor 14 Maret 2020	5.958.000,00	0,00	0,00	5.958.000,00
10	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak An. Joko Sutopo sebesar Rp.7.500.000,00 disebabkan karena hilangnya berupa kendaraan roda dua dinas Nopol G 9612 BD sebesar Rp.7.500.000,00 paling lambat selor november 2021	3.562.500,00	0,00	0,00	3.562.500,00
Jumlah		584.380.500,00	0,00	2.690.000,00	581.690.500,00



- Pengurangan TGR atas Pos Sekretariat Daerah An. Sutarjo, BBA berkurang sebesar Rp2.690.000,00 berasal dari setoran tanggal 21 Desember 2022.

5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS). Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.3

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Nama Barang	No Sertifikat & Tanggal	Luas (m ²)	Saldo 2021	Saldo 2020
Tanah Sirandu Mall	Hak Pengelolaan No. 2 Tgl 10 Maret 2003	12.185	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Jumlah	-	-	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00

- Tanah Sirandu Mall dengan saldo tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp8.529.500.000,00 dan Rp8.529.500.000,00. Saldo tanah Sirandu Mall dengan luas 12.185 M² dengan No sertifikat hak pengelolaan No. 2 tanggal 10 maret 2003 harga perolehan diperoleh dari Tim Apraisal Institute for Public Service Development Studies Ipseds pada tahun 2008 sebesar Rp8.529.500.000,00.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta untuk kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pusat perdagangan, grosir dan rekreasi di kawasan bekas Terminal Sirandu. Kemitraan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/KBBP/III/2002 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak BagiTempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Perdagangan, Grosir dan Rekreasi Pemalang yang ditanda tangani hari Kamis tanggal 14 Maret 2002 oleh Bupati Pemalang Bapak H.M. Macroes, SH dengan Direktur Utama PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta, Bapak T. Susilo Handoko. Masa berlaku Surat perjanjian kerjasama adalah 30 tahun atau dari tahun 2002 s/d 2032. PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa menyertakan modalnya berupa modal kerja untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana senilai Rp14.524.250.500,00 berupa:
 1. Rumah dan toko (ruko) 2 (dua) lantai;
 2. Toko 1 (satu) lantai;
 3. Departemen store/Swalayan/PusatGrosir 2 (dua) lantai;
 4. Selaras Ruko;
 5. Selaras Toko;
 6. Selasar Departemen store/Swalayan/PusatGrosir;
 7. Pager keliling ± 64,5 M²;
 8. Lapangan parker dan jalan ± 5.153,56 M²;
 9. Pos jaga ± 4 M²;
 10. Selasar jaga ± 8 M²;
 11. MCK/kamar mandi ± 18 M²;
 12. Lampu taman HPL 125 watt 8 unit;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

13. Lampu taman HPL 250 watt 25 unit;
14. Mushola ± 30 M²;
15. Tempat wudhu ± 12 M²;
16. Taman lingkungan 1 LS;
17. Trotoar ± 147,5 M²;
18. Kansteen trotoar ± 238,5 M²;
19. Rambu lalu lintas 18 unit;
20. Instalasi listrik jalan dan taman 1 LS;
21. Saluran induk tutup plat beton 1.036 M;
22. Saluran anak (MD-40) tutupgrilbesi± 708,70 M;
23. Saluran drainase lapangan ± 58 M;
24. Pengadaan air bersih 1 LS;
25. Papan nama dan gapura 1 LS;
26. Selasar MCK danmushollaseluas ± 20 M²;
27. Titik kran hydrant 4 unit (tanpainstalasi) ;
28. Gerobak dan tong sampah 1 LS.

5.3.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2022 dengan nilai buku sebesar Rp1.027.533.238,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.794.543.808,00. Saldo per 31 Desember 2022 berasal dari Harga perolehan sebesar Rp9.689.088.168,00 dan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp8.661.554.930,00).

Aset Tak Berwujud tahun 2022 berupa Penambahan Aset Tak Berwujud TA. 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.4.4
Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Aset Tak Berwujud	So 31 Des 2021	Mutasi 2022		So 31 Des 2022
			Bertambah	Berkurang	
1. SOFTWARE					
1	DKBUD	2.403.853.980,00	0,00	0,00	2.403.853.980,00
2	DINAS KESEHATAN	1.182.958.388,00	45.232.500,00	0,00	1.228.190.888,00
3	DINSOSKB PP	51.165.000,00	0,00	0,00	51.165.000,00
4	DINAS TENAGA KERJA	170.887.000,00	0,00	0,00	170.887.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.925.000,00	0,00	0,00	34.925.000,00
6	DISDUKCATPIL	345.121.500,00	24.975.000,00	0,00	370.096.500,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	150.783.000,00	0,00	0,00	150.783.000,00
8	DISKOMINFO	2.040.951.500,00	0,00	0,00	2.040.951.500,00
9	DPMPSTP	267.857.000,00	0,00	0,00	267.857.000,00
10	DINSPEPUSARSIP	283.366.000,00	0,00	0,00	283.366.000,00
11	DINAS PERTANIAN	96.050.300,00	0,00	0,00	96.050.300,00
12	BAPPEDA	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
13	BAPPENDA	693.542.000,00	0,00	0,00	693.542.000,00
14	BPKAD	113.489.000,00	0,00	0,00	113.489.000,00
15	BKD	276.249.000,00	99.900.000,00	0,00	376.149.000,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	390.676.500,00	0,00	0,00	390.676.500,00
17	KECAMATAN PEMALANG	54.943.000,00	0,00	0,00	54.943.000,00
18	DISKOPERINDAG	189.065.500,00	0,00	0,00	189.065.500,00
19	DPU	437.525.000,00	0,00	0,00	437.525.000,00
20	DINPERMASDES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
21	DISPARPORA	97.700.000,00	0,00	0,00	97.700.000,00
Jumlah Software (1)		9.315.343.668,00	170.107.500,00	0,00	9.485.451.168,00
2. KAJIAN					
1	DPU	49.885.000,00	0,00	0,00	49.885.000,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	153.752.000,00	0,00	0,00	153.752.000,00
Jumlah Kajian (2)		203.637.000,00	0,00	0,00	203.637.000,00
Jumlah Total (1 + 2)		9.518.980.668,00	170.107.500,00	0,00	9.689.088.168,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp45.232.500,00 berasal dari penambahan berupa pengadaan software/aplikasi dari RSUD. Dr. M Ashari sebesar Rp36.907.500,00 berupa *Software* aplikasi informasi proses berkas faktur berasal dari belanja BLUD sebesar Rp18.078.750,00 dan aplikasi informasi arsip dan surat masuk keluar sebesar Rp18.828.750,00 berasal dari belanja BLUD; serta terdapat pada Puskesmas Bantarbolang sebesar Rp8.325.000,00 berupa *Software/aplikasi* Obat Logistik yang di gunakan untuk penerimaan dan pengeluaran obat distribusi obat ke sub unit yang berasal dari Belanja JKN;
- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Dinas Catatan Sipil tahun 2022 sebesar Rp24.975.000,00 berupa *Software* Aplikasi New Lakone berasal dari belanja modal aset tetap lainnya- Belanja modal aset tidak berwujud ;
- Penambahan Aset Tidak Berwujud di BKD sebesar Rp99.900.000,00 berasal dari belanja modal aset tetap lainnya- Belanja modal aset tidak berwujud Aplikasi Kepegawaian kenaikan pangkat dan pensiun pengembangan dari Simpeg .

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2022 adalah (Rp8.661.554.930,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.4.5

Amortisasi Aset Tak Berwujud
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Amortisasi Aset Tak Berwujud	So Amortisasi 31 Des 2021	Akumulasi Amortisasi 2022		So Amortisasi 31 Des 2022
			Bertambah	Berkurang	
1.	SOFTWARE				
1	DIKBUD	(2.214.869.514,00)	(114.681.746,00)	0,00	(2.329.551.260,00)
2	DINAS KESEHATAN	(837.961.535,00)	(171.457.751,00)	0,00	(1.009.419.286,00)
3	DINSOSKB PP	(51.165.000,00)	0,00	0,00	(51.165.000,00)
4	DINAS TENAGA KERJA	(168.832.542,00)	(2.054.458,00)	0,00	(170.887.000,00)
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(34.925.000,00)	0,00	0,00	(34.925.000,00)
6	DISDUKCATPIL	(316.245.406,00)	(10.420.688,00)	0,00	(326.666.094,00)
7	DINAS PERHUBUNGAN	(129.266.542,00)	(21.516.458,00)	0,00	(150.783.000,00)
8	DISKOMINFO	(1.677.141.626,00)	(238.946.125,00)	0,00	(1.916.087.751,00)
9	DPMPSTSP	(267.857.000,00)	0,00	0,00	(267.857.000,00)
10	DINSPEPUSARSIP	(209.488.917,00)	(45.586.458,00)	0,00	(255.075.375,00)
11	DINAS PERTANIAN	(90.727.352,00)	(5.322.948,00)	0,00	(96.050.300,00)
12	BAPPEDA	(4.235.000,00)	0,00	0,00	(4.235.000,00)
13	BAPPENDA	(471.599.291,00)	(86.587.500,00)	0,00	(558.186.791,00)
14	BPKAD	(113.489.000,00)	0,00	0,00	(113.489.000,00)
15	BKD	(240.203.375,00)	(14.439.750,00)	0,00	(254.643.125,00)
16	SEKRETARIAT DAERAH	(390.676.500,00)	0,00	0,00	(390.676.500,00)
17	KECAMATAN PEMALANG	(6.768.000,00)	(12.300.000,00)	0,00	(19.068.000,00)
18	DISKOPERINDAG	(102.531.823,00)	(39.766.375,00)	0,00	(142.298.198,00)
19	DPU	(292.604.853,00)	(103.674.813,00)	0,00	(396.279.666,00)
20	DINPERMASDES	(16.875.000,00)	(7.500.000,00)	0,00	(24.375.000,00)
21	DISPARPORA	(33.885.417,00)	(24.425.000,00)	0,00	(58.310.417,00)
	Jumlah Software (1)	(7.671.348.693,00)	(898.680.070,00)	0,00	(8.570.028.763,00)
2.	KAJIAN				
1	DPU	(49.885.000,00)	0,00	0,00	(49.885.000,00)
2	DINAS PERHUBUNGAN	(3.203.167,00)	(38.438.000,00)	0,00	(41.641.167,00)
	Jumlah Kajian (2)	(53.088.167,00)	(38.438.000,00)	0,00	(91.526.167,00)
	Jumlah Total (1 + 2)	(7.724.436.860,00)	(937.118.070,00)	0,00	(8.661.554.930,00)

5.3.1.4.4. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 dengan nilai buku sebesar Rp94.345.768.683,50 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 berasal dari Harga perolehan sebesar Rp116.385.169.378,50 dan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp22.039.400.695,00) dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Aset Lain-lain tahun 2022 berupa Penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain TA. 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.4.6
Aset lain-lain
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	SKPD	So 31 Des 2021	Mutasi 2022		So 31 Des 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	DINDIKBUD	465.457.564,00	0,00	0,00	465.457.564,00
2	DINKES	4.786.482.945,00	292.878.247,50	5.407.560,00	5.073.953.632,50
3	DPU TR	99.609.607.059,00	279.328.000,00	0,00	99.888.935.059,00
4	DISPERKIM	29.400.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00
5	SATPOL PP	531.417,00	0,00	0,00	531.417,00
6	DINSOS KBPP	15.447.000,00	0,00	0,00	15.447.000,00
7	DISNAKER	322.875.000,00	0,00	0,00	322.875.000,00
8	DLH	787.299.200,00	0,00	0,00	787.299.200,00
9	DISDUKCATPIL	154.673.000,00	0,00	0,00	154.673.000,00
10	DINPERMASDES	45.716.000,00	0,00	0,00	45.716.000,00
11	DISHUB	198.160.625,00	0,00	0,00	198.160.625,00
12	DISKOMINFO	208.453.000,00	0,00	0,00	208.453.000,00
13	DISKOPERINDAG	384.850.000,00	0,00	0,00	384.850.000,00
14	DPMTSP	19.795.500,00	0,00	0,00	19.795.500,00
15	DINPUSARDA	361.738.500,00	93.775.000,00	0,00	455.513.500,00
16	DISPERIK	20.266.500,00	0,00	0,00	20.266.500,00
17	DISPARPORA	1.523.840.870,00	0,00	0,00	1.523.840.870,00
18	DIPERTAN	64.330.000,00	0,00	0,00	64.330.000,00
19	BAPPEDA	16.100.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00
20	BAPENDA	0,00	11.874.500,00	0,00	11.874.500,00
21	BPKAD	263.142.744,00	4.188.306.813,00	0,00	4.451.449.557,00
22	BKD	692.704.000,00	0,00	0,00	692.704.000,00
23	INSPEKTORAT	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00
24	SETWAN	588.379.420,00	0,00	0,00	588.379.420,00
25	SETDA	297.989.336,00	28.188.159,00	0,00	326.177.495,00
26	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KESBANGPOLINMAS	17.922.500,00	0,00	0,00	17.922.500,00
28	KEC. MOGA	26.744.800,00	0,00	0,00	26.744.800,00
29	KEC. PULOSARI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
30	KEC. BELIK	48.327.662,00	0,00	0,00	48.327.662,00
31	KEC. WATUKUMPUL	50.535.000,00	0,00	0,00	50.535.000,00
32	KEC. BODEH	87.357.500,00	0,00	0,00	87.357.500,00
33	KEC. BANTARBOLANG	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	72.432.500,00	0,00	0,00	72.432.500,00
35	KEC. PEMALANG	41.875.000,00	0,00	0,00	41.875.000,00
36	KEC. TAMAN	57.206.577,00	0,00	0,00	57.206.577,00
37	KEC. PETARUKAN	40.150.000,00	0,00	0,00	40.150.000,00
38	KEC. AMPELGADING	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
39	KEC. COMAL	28.465.000,00	0,00	0,00	28.465.000,00
40	KEC. ULUJAMI	71.320.000,00	0,00	0,00	71.320.000,00
41	KEC. WARUNGPRING	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Jumlah		111.496.226.219,00	4.894.350.719,50	5.407.560,00	116.385.169.378,50

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp292.878.247,50 berasal dari Penambahan Aset Lain-lain berupa peralatan yang sudah rusak dari Puskesmas Kebandaran sebesar Rp8.875.000,00 berupa printer Epson L405 tahun 2018 sebesar Rp3.975.000,00, Printer Epson L360 tahun 2018 sebesar Rp2.500.000,00 dan printer Epson L3110 tahun 2020 sebesar Rp2.400.000,00, Puskesmas Belik sebesar Rp1.224.015,00 berupa alat kebidanan perolehan tahun 2029 sebesar Rp1.224.015,00; Puskesmas Cikadu sebesar Rp280.389.334,00 berasal dari Hematology Analyzer merk Boule Medical tahun 2018 sebesar Rp152.231.000,00, Fotometer merk Elitech microlab tahun 2018 sebesar Rp93.633.334,00, PC unit merk Asus tahun 2018 sebesar @Rp10.850.000 dua buah sebesar Rp31.375.000,00, Lap top merk dell tahun 2018 sebesar Rp9.675.000 dan printer merk Epson tahun 2018 sebesar Rp3.150.000,00; Puskesmas Banyumudal sebesar Rp2.305.000,00 berupa PC tahun 2019 seharga



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp2.305.000,00 dan obat yang sudah kadaluarsa tahun 2022 sebesar Rp84.898,50;

- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp5.407.560,00 berupa obat yang sudah kadaluarsa sudah dihapus;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di DPU TR tahun 2022 sebesar Rp279.328.000,00 berupa DED yang terdapat di DPU yang tidak akan digunakan/dibangun lagi jadi di reklas ke Aset lain-lain terdiri dari:

Tabel 5.3.1.4.7
Aset lain-lain pada DPU TR

NO	NOMINAL	KET
1	49.720.000	DED Review Kantor BKD Kabupaten Pemalang
2	49.898.000	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekda Kab. Pemalang
3	30.000.000	perencanaan teknis pemb. gedung BKD
4	49.880.000	Perencanaan Gedung Sasana Bhakti Praja Kab. Pemalang
5	49.850.000	Review Master Plan Sport Centre
6	49.980.000	Perencanaan Rehabilitasi/Renovasi Pasar Pagi 2015
JUMLAH	279.328.000	

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinperpusarda tahun 2022 sebesar Rp93.775.000,00 berupa 34 buah rak besi yang akan di hibahkan ke desa;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Bapenda tahun 2022 sebesar Rp11.874.500,00 berasal dari mutasi sepeda motor Nopol G 9862 A dengan harga Rp11.874.500,00;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BPKAD tahun 2022 sebesar Rp4.188.306.813,00 berupa mencatat TDF sebesar Rp4.188.306.813,00 pada BPKAD berdasarkan Surat DJPK Nomor S-45/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai Aset Lainnya;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Sekretariat Daerah tahun 2022 sebesar Rp28.188.159,00 berasal dari hilangnya 3 Notebook pada tahun 2022;

Tabel 5.3.1.4.8
Aset lain-lain pada Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Merk	Tahun Pembelian	Harga Perolehan (Rp)
1	Notebook	Asus A451LB	2014	8.000.000,-
2	Notebook	Asus A442UR	2018	9.889.159,-
3	Notebook	HP Notebook 14s-fq10005AU	2021	10.299.000,-
Total				28.188.159

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2022 adalah (Rp22.039.400.695,00). Akumulasi berkurang karena adanya penghapusan pada Aset Lain-lain dan penambahan karena adanya penghentian masa manfaat pada Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.1.4.9
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	SO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI 2022		SO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINDIKBUD	(123.465.164,00)	0,00	0,00	(123.465.164,00)
2	DINKES	(1.320.877.561,00)	(5.407.560,00)	(191.644.977,00)	(1.507.114.978,00)
3	DPU TR	(15.468.143.508,00)	0,00	0,00	(15.468.143.508,00)
4	DISPERKIM	(29.400.000,00)	0,00	0,00	(29.400.000,00)
5	SATPOL PP	(97.427,00)	0,00	0,00	(97.427,00)
6	DINSOS KBPP	(15.447.000,00)	0,00	0,00	(15.447.000,00)
7	DISNAKER	(313.875.000,00)	0,00	0,00	(313.875.000,00)
8	DLH	(623.074.388,00)	0,00	0,00	(623.074.388,00)
9	DISDUKCATPIL	(104.796.000,00)	0,00	0,00	(104.796.000,00)
10	DINPERMASDES	(45.361.400,00)	0,00	0,00	(45.361.400,00)
11	DISHUB	(196.320.325,00)	0,00	0,00	(196.320.325,00)
12	DISKOMINFO	(208.453.000,00)	0,00	0,00	(208.453.000,00)
13	DISKOPERINDAG	(380.700.000,00)	0,00	0,00	(380.700.000,00)
14	DPMTSP	(19.795.500,00)	0,00	0,00	(19.795.500,00)
15	DINPUSARDA	(295.543.500,00)	(93.775.000,00)		(389.318.500,00)
16	DISPERIK	(20.266.500,00)	0,00	0,00	(20.266.500,00)
17	DISPARPORA	(525.340.600,00)	0,00	0,00	(525.340.600,00)
18	DIPERTAN	(64.330.000,00)	0,00	0,00	(64.330.000,00)
19	BAPPEDA	(16.100.000,00)	0,00	0,00	(16.100.000,00)
20	BAPENDA	0,00	(11.874.500,00)	0,00	(11.874.500,00)
21	BPKAD	(184.350.000,00)	0,00	0,00	(184.350.000,00)
22	BKD	(282.871.000,00)	0,00	0,00	(282.871.000,00)
23	INSPEKTORAT	(52.500.000,00)	0,00	0,00	(52.500.000,00)
24	SETWAN	(578.566.911,00)	0,00	0,00	(578.566.911,00)
25	SETDA	(289.146.480,00)	(20.678.472,00)	0,00	(309.824.952,00)
26	BPBD	0,00	0,00	0,00	-
27	KESBANGPOLINMAS	(17.922.500,00)	0,00	0,00	(17.922.500,00)
28	KEC. MOGA	(25.404.340,00)	0,00	0,00	(25.404.340,00)
29	KEC. PULOSARI	(7.000.000,00)	0,00	0,00	(7.000.000,00)
30	KEC. BELIK	(46.807.078,00)	0,00	0,00	(46.807.078,00)
31	KEC. WATUKUMPUL	(50.400.000,00)	0,00	0,00	(50.400.000,00)
32	KEC. BODEH	(86.810.626,00)	0,00	0,00	(86.810.626,00)
33	KEC. BANTARBOLANG	(31.400.000,00)	0,00	0,00	(31.400.000,00)
34	KEC. RANDUDONGKAL	(70.429.337,00)	0,00	0,00	(70.429.337,00)
35	KEC. PEMALANG	(38.475.000,00)	0,00	0,00	(38.475.000,00)
36	KEC. TAMAN	(55.767.827,00)	0,00	0,00	(55.767.827,00)
37	KEC. PETARUKAN	(36.498.334,00)	0,00	0,00	(36.498.334,00)
38	KEC. AMPELGADING	(5.000.000,00)	0,00	0,00	(5.000.000,00)
39	KEC. COMAL	(26.065.000,00)	0,00	0,00	(26.065.000,00)
40	KEC. ULUJAMI	(69.284.000,00)	0,00	0,00	(69.284.000,00)
41	KEC. WARUNGPRING	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
		(21.726.835.306,00)	(131.735.532,00)	(191.644.977,00)	(22.039.400.695,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang PFK	48.477.327,00	130.000,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	4.113.758.163,94	3.895.517.288,63
4	Utang Belanja	37.549.535.869,00	57.259.498.583,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	490.569.893,00	0,00
6	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		42.202.341.252,94	61.155.145.871,63

Saldo-saldo akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.477.327,00 dan Utang PFK tahun 2021 sebesar Rp130.000,00. Utang PFK ini adalah terkait keterlambatan Penyetoran Pajak TA. 2022 dari Dana BOS. Adapun rincian Utang PFK adalah sebagai berikut:

RINCIAN	PPN	PPH 21	PPH 23	Total
UTANG PFK	41.859.979,00	2.134.733,00	4.482.615,00	48.477.327,00

5.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada tahun 2022 tidak ada.

5.3.2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 sebesar Rp4.113.758.163,94 mengalami kenaikan sebesar Rp218.240.875,31 atau 105,60% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp3.895.517.288,63. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 sebesar Rp4.113.758.163,94 dengan rincian sebagai berikut:

	SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Dinkes	35.455.753,43	45.660.821,92	10.205.068,49
2	Diskoperindag	481.152.477,11	563.079.964,71	81.927.487,60
3	BPKAD	1.094.518.974,57	930.004.914,00	(164.514.060,57)
4	Bapenda	2.502.630.958,83	2.356.771.588,00	(145.859.370,83)
	Jumlah	4.113.758.163,94	3.895.517.288,63	(218.240.875,31)

Adapun Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 dengan tahun 2021 terdapat selisih sebesar Rp218.240.875,31 dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 dengan tahun 2021 Dinkes terdapat selisih sebesar Rp10.205.068,49 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat kantor dan ATM Bank Jateng tahun 2022-2023 sebesar Rp7.094.246,58
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat kantin dan koperasi tahun 2022-2023 sebesar Rp8.739.726,03
 - Berkurang pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat ATM BNI tahun 2020 – 2025 sebesar Rp5.000.000,00.
 - Berkurang pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat ATM BRI tahun 2019 – 2024 sebesar Rp5.850.000,00.
 - Berkurang karena adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka karena adanya sewa tempat kantor dan ATM Bank Jateng tahun 2021 sebesar Rp6.449.315,07.
 - Berkurang pendapatan diterima dimuka karena sewa tempat kantin dan koperasi tahun 2021 sebesar Rp8.739.726,03.
2. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 dengan tahun 2021 Diskoperindag terdapat selisih sebesar Rp81.927.487,60 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka dari sewa kios Komplek pasar Paduraksa tahun 2022 sebesar Rp2.261.298,08.
 - Bertambah pendapatan diterima dimuka dari sewa GCC tahun 2022 sebesar Rp164.340.829,87.
 - Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kompleks Pasar Bantarbolang tahun 2022 sebesar Rp2.607.362,63.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa Pasar Beras Tahun 2017 sebesar Rp22.351.388,89.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa Pasar Beras Tahun 2020 sebesar Rp53.900.000,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kompleks Pasar Sayur dan buah tahun 2020 sebesar Rp4.323.200,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kios Sirandu tahun 2021 sebesar Rp1.035.616,47.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa kios GCC tahun 2020 sebesar Rp.37.784.534,25.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa tanah di kompleks Pasar Comal tahun 2020 sebesar Rp1.666.666,67.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa di Pasar Sayur Buah tahun 2021 sebesar Rp1.348.650,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa Tanah oleh Bank Pemalang tahun 2021 sebesar Rp17.934.333,33.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa di Kios GCC tahun 2021 sebesar Rp18.598.400,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa di Pasar Randudongkal tahun 2021 sebesar Rp71.934.306,57.



- Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa SRG tahun 2021 sebesar Rp11.794.520,55.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari sewa di Pasar Beras tahun 2021 sebesar Rp8.465.361,45
3. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 dengan tahun 2021 BPKAD terdapat selisih sebesar Rp164.514.060,57 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari sewa tanah dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp562.918.042,57.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2017 sebesar Rp14.375.000,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp77.699.600,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp2.235.923,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp133.304.723,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari dari sewa tanah dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp170.788.736,00.
4. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 dengan tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat selisih sebesar Rp145.859.370,83 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp527.917.749,83 dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa tanah eks bondo desa tahun 2022 sebesar Rp1.974.713.209,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2021 sebesar Rp367.921.924,00 dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa tanah eks bondo desa tahun 2021 sebesar Rp1.988.849.664,00.

5.3.2.1.4. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan beban-beban yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2022. Utang beban ini meliputi utang beban pegawai dan utang beban barang dan jasa. Saldo Utang Beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.549.535.869,00 turun sebesar Rp19.709.962.714,00 atau 34,42% dibandingkan dengan saldo Utang Beban tahun 2021 sebesar Rp57.259.498.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Utang Belanja Pegawai	22.006.322.467,00	33.054.137.164,00	(11.047.814.697,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa	15.241.628.776,00	23.903.776.793,00	(8.662.148.017,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.584.626,00	301.584.626,00	-
Jumlah	37.549.535.869,00	57.259.498.583,00	(19.709.962.714,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Utang Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp22.006.322.467,00 turun sebesar Rp11.047.814.697,00 dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar Rp33.054.137.164,00.

Adapun rincian Utang Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp22.006.322.467,00 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Utang Beban Pegawai 2022 (Rp)	Utang Beban Pegawai 2021 (Rp)
1	Dindikbud	2.461.258.510,00	1.785.227.198,00
2	Dinkes	11.028.070.467,00	22.617.879.704,00
3	DPU TR	520.046.116,00	542.561.680,00
4	Disperkim	203.194.267,00	189.150.835,00
5	Satpol PP	295.994.639,00	268.207.918,00
6	Dinsos KBPP	173.950.616,00	176.793.427,00
7	Disnaker	219.415.756,00	174.945.987,00
8	DLH	363.573.927,00	351.252.417,00
9	Disdukcapil	207.784.764,00	227.357.139,00
10	Dinpermasdes	190.156.856,00	200.921.928,00
11	Dishub	265.885.070,00	256.505.873,00
12	Diskominfo	190.524.656,00	190.418.385,00
13	Diskoperindag	555.918.967,00	543.569.597,00
14	DPMPPTSP	141.045.289,00	134.485.958,00
15	Dinpusarda	123.460.454,00	116.976.088,00
16	Disperik	159.748.708,00	171.410.286,00
17	Disparpora	245.398.774,00	270.444.606,00
18	Dispertan	461.936.945,00	540.420.423,00
19	Bappeda	226.450.328,00	264.046.531,00
20	Bapenda	276.413.142,00	249.591.049,00
21	BPKAD	208.422.256,00	261.568.096,00
22	BKD	269.502.612,00	267.514.236,00
23	Inspektorat	314.557.782,00	355.129.768,00
24	Sekretariat DPRD	188.743.810,00	148.177.682,00
25	Sekretariat Daerah	787.709.334,00	899.005.040,00
26	BPBD	163.630.079,00	143.032.655,00
27	Badan Kesbangpol	120.405.540,00	96.589.544,00
28	Kec. Moga	66.474.109,00	63.479.030,00
29	Kec. Pulosari	76.280.350,00	75.066.902,00
30	Kec. Belik	91.729.076,00	79.176.490,00
31	Kec. Watukumpul	71.466.272,00	66.955.216,00
32	Kec. Bodeh	85.172.676,00	89.174.826,00
33	Kec. Bantarbolang	77.006.436,00	71.976.582,00
34	Kec. Randudongkal	82.234.131,00	78.528.043,00
35	Kec. Pemalang	413.538.534,00	396.424.139,00
36	Kec. Taman	201.696.443,00	177.480.821,00
37	Kec. Petarukan	122.282.706,00	122.905.693,00
38	Kec. Ampelgading	75.907.896,00	93.987.931,00
39	Kec. Comal	121.986.812,00	123.707.203,00
40	Kec. Ulujami	83.936.396,00	93.929.074,00
41	Kec. Warungpring	73.410.966,00	78.161.164,00
Jumlah		22.006.322.467,00	33.054.137.164,00



- Utang Beban Barang dan Jasa merupakan utang beban telepon, air, listrik, internet, bahan obat-obatan, bahan kimia, perawatan kesehatan, dan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 yang belum dibayarkan. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp15.241.628.776,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Utang Beban Barang dan Jasa 2022 (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa 2021 (Rp)
1	Dindikbud	12.307.869,00	10.660.508,00
2	Dinkes	13.244.109.755,00	22.215.904.984,00
3	DPU TR	20.723.463,00	14.599.675,00
4	Disperkim	1.471.954.954,00	1.262.117.225,00
5	Satpol PP	3.495.785,00	2.686.051,00
6	Dinsos KBPP	9.930.218,00	16.186.242,00
7	Disnaker	12.050.348,00	11.581.338,00
8	DLH	10.032.011,00	10.553.097,00
9	Disdukcapil	20.360.793,00	17.075.322,00
10	Dinpermasdes	8.826.083,00	8.412.349,00
11	Dishub	18.856.836,00	17.372.038,00
12	Diskominfo	32.995.781,00	22.909.377,00
13	Diskoperindag	35.475.000,00	14.261.333,00
14	DPMPSTSP	10.411.046,00	8.342.448,00
15	Dinpusarda	7.156.780,00	7.930.834,00
16	Disperik	10.313.174,00	9.335.900,00
17	Disparpora	38.430.945,00	26.564.314,00
18	Dispertan	12.420.614,00	8.529.117,00
19	Bappeda	17.517.797,00	15.303.232,00
20	Bapenda	12.563.034,00	9.981.628,00
21	BPKAD	16.046.659,00	20.096.332,00
22	BKD	19.441.143,00	16.176.522,00
23	Inspektorat	14.535.356,00	8.248.503,00
24	Sekretariat DPRD	56.117.643,00	23.173.450,00
25	Sekretariat Daerah	64.752.724,00	79.442.503,00
26	BPBD	13.656.626,00	6.844.857,00
27	Badan Kesbangpol	4.026.217,00	1.911.977,00
28	Kec. Moga	1.544.000,00	1.815.264,00
29	Kec. Pulosari	2.410.705,00	2.235.171,00
30	Kec. Belik	1.557.164,00	1.425.440,00
31	Kec. Watukumpul	1.630.622,00	1.480.040,00
32	Kec. Bodeh	977.961,00	2.363.642,00
33	Kec. Bantarbolang	2.270.000,00	1.951.113,00
34	Kec. Randudongkal	2.819.547,00	1.278.784,00
35	Kec. Pemalang	9.480.962,00	8.203.273,00
36	Kec. Taman	6.763.075,00	5.202.438,00
37	Kec. Petarukan	3.955.945,00	3.673.642,00
38	Kec. Ampelgading	1.410.196,00	1.390.500,00
39	Kec. Comal	3.151.329,00	2.487.155,00
40	Kec. Ulujami	3.751.714,00	3.284.031,00
41	Kec. Warungpring	1.396.902,00	785.144,00
Jumlah		15.241.628.776,00	23.903.776.793,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- **Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp301.584.626,00 dan Rp301.584.626,00. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp301.584.626,00 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Dinas kesehatan karena adanya kelebihan volume pekerjaan yang belum dibayarkan.

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp490.569.893,00 terdiri dari:

- Bantuan Sosial yang belum tersalurkan pada Dinsos KBPP sebesar Rp22.200.000,00.
- Bantuan Sosial yang belum tersalurkan pada Diskoperindag sebesar Rp433.800.000,00.
- Rp34.569.893,00 merupakan setoran pengembalian Dana BOS dan BOP PAUD.

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
BOS SMP	2.404.893,00	Setoran dari SMP Veteran tanggal 1 November 2022
PAUD	32.165.000,00	Setoran BOP PAUD tanggal 30 Desember 2022

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1. Ekuitas

5.3.3.1.1. Ekuitas

Akun ini menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu jumlah aset dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki per tanggal neraca. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagaiberikut :

Ekuitas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Ekuitas	3.789.884.540.124,53	3.828.522.513.996,71



5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Kegiatan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatandan Beban – LO. Adapun Pendapatan–LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO. Kegiatan Non Operasional meliputi Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO dan Surplus dari KegiatanNon Operasional Lainnya–LO. Adapun Pendapatan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. PENDAPATAN–LO

Pendapatan–LO dalam Laporan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan LuarBiasa–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Pendapatan - LO		SALDO (Rp)	
		2022	2021
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	362.618.236.135,69	370.872.638.901,71
2	Pendapatan Transfer - LO	1.827.397.043.983,00	1.739.205.152.313,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	35.677.566.961	203.543.685.283,00
Jumlah		2.225.692.847.079,69	2.313.621.476.497,71

Realisasi Pendapatan–LO TA 2022 sebesar Rp2.225.692.847.079,69. Turun sebesar Rp87.928.629.418,02 atau 3,80% dari Realisasi Pendapatan–LO TA 2021 sebesar Rp2.313.621.476.497,71. Realisasi masing-masing akun Pendapatan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp362.618.236.135,69 turun sebesar Rp8.254.402.766,02 atau 2,23% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO TA 2021 Rp370.872.638.901,71. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		SALDO (Rp)	
		2022	2021
1	Pajak Daerah - LO	104.661.740.648,17	93.297.403.598,00
2	Retribusi Daerah - LO	32.332.497.074,00	28.532.794.183,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	23.007.651.678,00	22.500.844.418,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LO	202.616.346.735,52	226.541.596.702,71
Jumlah		362.618.236.135,69	370.872.638.901,71



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah– LO TA 2022 tersaji sebagai berikut :

5.4.1.1.1 Pajak Daerah–LO

Realisasi Pajak Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp104.661.740.648,17 naik sebesar Rp11.364.337.050,17 atau 12,18% dibandingkan dengan realisasi TA.2021 sebesar Rp93.297.403.598,00. Realisasi masing-masing akun Pajak Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak Daerah - LO		SALDO	
		2022	2021
1	Hotel - LO	516.615.000,00	517.637.200,00
2	Restoran - LO	1.577.773.586,00	1.216.489.204,00
3	Pajak Hiburan - LO	222.023.650,00	131.434.227,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard - LO	1.325.838.860,17	1.510.460.733,00
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	44.907.667.464,00	36.818.544.040,00
6	Pajak Parkir - LO	83.994.915,00	63.388.526,00
7	Pajak Air Tanah - LO	433.100.210,00	313.616.504,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	10.100.000,00	10.000.000,00
9	Pasir dan kerikil - LO	1.069.134.950,00	815.231.698,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan - LO	29.623.333.565,00	25.866.576.761,00
11	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	24.892.158.448,00	26.034.024.705,00
Jumlah		104.661.740.648,17	93.297.403.598,00

T

Terdapat selisih Realisasi Pajak–LO dengan Pajak–LRA TA 2022 sebesar Rp5.057.783.163,17 yaitu:

Jenis Pajak	2022		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Reklame	1.325.838.860,17	1.573.230.063,00	(247.391.202,83)
Air Tanah	433.100.210,00	431.634.405,00	1.465.805,00
Pajak Bumi dan Bangunan	29.623.333.565,00	24.319.625.004,00	5.303.708.561,00
	31.382.272.635,17	26.324.489.472,00	5.057.783.163,17

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Pajak Reklame terdapat selisih sebesar Rp247.391.202,83. Hal ini dikarenakan :
 - Bertambah sebesar Rp367.921.924,00 merupakan Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame yang masa pajaknya melampaui TA 2021.
 - Berkurang pendapatan diterima dimuka Pajak reklame TA 2022 527.917.749,83
 - Piutang Pajak Reklame berkurang sebesar Rp87.395.376,99.
- Pajak Air Tanah terdapat selisih lebih sebesar Rp1.465.805,00. Hal ini dikarenakan:
 - Bertambah sebesar Rp13.445.015,00 karena piutang pajak air tanah tahun 2022;



- Berkurang sebesar Rp11.979.210,00 adanya Pembayaran piutang tahun lalu.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat selisih sebesar Rp5.303.708.561,00. Hal ini dikarenakan :
- Bertambah sebesar Rp8.285.620.272,00 karena adanya piutang PBB tahun 2022;
 - Berkurang sebesar Rp2.981.911.711,00 karena adanya pelunasan piutang PBB tahun lalu.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah–LO

Realisasi Retribusi Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp32.332.497.074,00 naik sebesar Rp3.799.702.891,00 atau 13,32% dibandingkan dengan realisasi TA.2021 sebesar Rp28.532.794.183,00. Realisasi masing-masing akun Retribusi Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Retribusi Daerah-LO		Saldo	
		2022	2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	14.016.285.418,00	12.740.184.437,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	406.555.000,00	813.539.800,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	5.800.000,00	9.400.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	540.965.000,00	466.642.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor -LO	625.015.000,00	658.070.000,00
6	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	37.170.000,00	37.110.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	106.577.500,00	82.328.500,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	502.065.500,00	361.972.500,00
9	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan - LO	9.448.917.969,00	7.476.718.264,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	3.536.288.045,00	2.733.375.682,00
11	Retribusi Jasa Usaha Terminal - LO	305.714.000,00	260.173.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	57.904.000,00	58.768.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	1.519.075.000,00	812.055.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.212.174.142,00	2.004.154.000,00
15	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum -	11.990.500,00	18.303.000,00
Jumlah		32.332.497.074,00	28.532.794.183,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp23.007.651.678,00 naik sebesar Rp506.807.260,00 atau 2,25% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp22.500.844.418,00. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		Realisasi (Rp)	
		2022	2021
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO	2.820.088.578,00	3.733.032.070,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	20.187.563.100,00	18.767.812.348,00
Jumlah		23.007.651.678,00	22.500.844.418,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp202.616.346.735,52 turun sebesar Rp24.050.085.005,19 atau 10,62% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp226.541.596.702,71. Realisasi masing-masing akun Lain-lain PAD yang Sah-LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	146.977.249,00	1.044.223.498,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.227.653.584,00	2.950.306.546,00
3	Pendapatan Bunga - LO	6.022.248.624,00	1.186.575.335,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	-2.690.000,00	234.367.423,00
5	Pendapatan Denda Pajak- LO	95.364.387,00	13.593.734,00
6	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	228.000.000,00	295.123.540,00
7	Pendapatan dari Pengembalian - LO	174.650.594,00	187.455.186,00
8	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	4.541.659.648,03	2.198.217.080,82
9	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	161.822.976.011,49	148.712.130.307,89
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	493.096.602,00	0,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	27.866.410.036,00	56.882.998.604,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LO	0,00	2.208.000,00
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan -	0,00	12.834.397.448,00
		202.616.346.735,52	226.541.596.702,71

Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp8.432.521.784,52.

Penjelasan		2022		Selisih (Rp)
		Lain-lain PAD yang Sah - LRA (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah - LO (Rp)	
1	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	190.499.999,00	228.000.000,00	(37.500.001,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO	4.704.359.766,00	4.541.659.648,03	162.700.117,97
3	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	152.946.083.571,00	161.822.976.011,49	(8.876.892.440,49)
4	Pendapatan Bunga - LO	6.306.849.270,00	6.022.248.624,00	284.600.646,00
5	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	527.666.495,00	493.096.602,00	34.569.893,00
Jumlah		164.675.459.101,00	173.107.980.885,52	(8.432.521.784,52)

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO terdapat selisih sebesar Rp37.500.001,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- a) Bertambah Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Putus Kontrak (Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tasikrejo - Pamutih) sebesar Rp 123.000.000,00.
 - b) Berkurang karena adanya Piutang hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang jasa CV Escrow Anyar pek rehab SMPN 02 Ulujami sebesar Rp85.499.999,00.
2. Hasil dari Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO terdapat selisih sebesar Rp.162.700.117,97 Adapun rinciannya sebagai berikut:
- a) Pendapatan-LO atas Sewa Tanah di BPKAD sebesar Rp164.514.060,57 rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Bertambah sebesar Rp562.918.042,57 adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022
 - Berkurang sebesar Rp398.403.982,00 karena adanya pelunasan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya.
 - b) Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Disperkim selisihnya sebesar Rp4.250.000,00. Hal ini disebabkan karena:
 - Bertambah karena adanya piutang pendapatan sewa rusunawa sebesar Rp 84.285.000,00.
 - Berkurang karena adanya pelunasan piutang pendapatan sewa rusunawa tahun sebelumnya sebesar Rp88.535.000,00.
 - c) Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Disparpora selisihnya sebesar Rp78.000.000,00 karena adanya piutang Sewa tahun 2022 pada Disparpora.
 - d) Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Diskoperindag selisihnya sebesar (Rp69.927.487,60) rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Bertambah sebesar Rp181.209.490,58 karena adanya pengakuan Pendapatan-LO TA 2020 atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu.
 - Berkurang sebesar Rp251.136.978,18 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2021.
 - e) Pendapatan-LO atas Sewa Tanah Eks Bondo Desa di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar (Rp14.136.455,00) adalah sebagai berikut:
 - Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa tanah eks bondo desa tahun 2022 sebesar Rp1.974.713.209,00.
 - Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa tanah eks bondo desa tahun 2021 sebesar Rp1.988.849.664,00.
3. Pendapatan Jasa BLUD-LO terdapat selisih lebih sebesar Rp8.876.892.440,49. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Bertambah sebesar Rp 8.866.687.372,00 karena Piutang Sewa BLUD TA 2022.
 - Bertambah sebesar Rp5.850.000,00 karena Pendapatan-LO tahun 2022 atas Pendapatan Sewa Tempat ATM-BRI TA. 2019-2024.
 - Bertambah sebesar Rp5.000.000,00 karena Pendapatan-LO tahun 2022 atas Pendapatan Sewa Tempat ATM-BNI TA. 2020-2025.
 - Bertambah sebesar Rp6.449.315,07 karena Pendapatan-LO tahun 2022 atas Pendapatan Sewa Tempat Kantor dan ATM Bank Jateng TA. 2021.
 - Bertambah sebesar Rp8.739.726,03 karena Pendapatan-LO tahun 2022 atas Pendapatan Sewa Tempat Kantin dan Koperasi TA. 2021.
 - Berkurang sebesar Rp7.094.246,58 Mencatat Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Sewa Tempat ATM-Bank Jateng TA. 2022-2023
 - Berkurang sebesar Rp8.739.726,03 karena Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Sewa Tempat Kantin dan Koperasi TA. 2022-2023.
4. Pendapatan Bunga Deposito – LO sebesar Rp284.600.646,00. Hal ini disebabkan karena :
- Piutang Bunga Deposito tahun 2021 sebesar Rp285.616.438,00.
 - Bunga Remunerasi TDF sebesar Rp1.015.792,00 pada BPKAD berdasarkan Surat DJPK Nomor S-45/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023).
5. Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar Rp34.569.893,00. Hal ini karena adanya pengembalian dana BOS dari SMP Veteran dan BOP Paud pada tahun 2022 karena sudah tutup sebesar Rp34.569.893,00 yang belum di setorkan ke Kas Negara.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer–LO

Pendapatan Transfer–LO berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat–LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO dan Bantuan Keuangan–LO dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer - LO		SALDO	
		2022	2021
1	Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.623.298.869.632,00	1.550.905.064.553,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	4.656.546.000,00	27.895.120.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	186.952.961.351,00	159.531.967.760,00
4	Bantuan Keuangan - LO	12.488.667.000,00	873.000.000,00
Jumlah		1.827.397.043.983,00	1.739.205.152.313,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		SALDO (Rp)	
		2022	2021
1	Bagi Hasil Pajak - LO	39.074.880.610,00	41.725.338.327,00
2	Bagi hasil SDA - LO	4.448.204.766,00	4.295.241.912,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	1.105.903.867.035,00	1.107.792.827.000,00
4	Dana Alokasi Khusus - LO	473.871.917.221,00	397.091.657.314,00
Jumlah		1.623.298.869.632,00	1.550.905.064.553,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam DAU, DAK dengan realisasi TA 2022 Rp1.623.298.869.632,00 naik sebesar Rp72.393.805.079,00 atau 5% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Rp1.550.905.064.553,00.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO TA 2022 meliputi Dana Insentif Daerah dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.656.546.000,00 turun sebesar Rp23.238.574.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp27.895.120.000,00.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi–LO berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya serta Bantuan Keuangan, dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp186.952.961.351,00 naik sebesar Rp27.420.993.591,00 atau 17,19% dengan realisasi 2021 sebesar Rp159.531.967.760,00. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut :

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		SALDO (Rp)	
		2022	2021
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	44.188.272.747,00	37.491.968.055,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - LO	24.919.937.419,00	24.806.999.142,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) - LO	42.272.055.147,00	35.943.242.179,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	127.599.774,00	117.283.090,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	75.445.096.264,00	61.172.475.294,00
Jumlah		186.952.961.351,00	159.531.967.760,00

Terdapat selisih antara Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO dengan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA sebesar Rp3.328.962.346,00. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan sebesar Rp5.237.871.223,00 berupa penerimaan atas Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2021 yang diterima pada tanggal 22 November 2022 dan penambahan sebesar Rp1.908.908.877,00 berupa Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2022 berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/020.62 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pemberitahuan Kurang/(Lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Adapun selisih rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		SALDO (Rp)		Selisih
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	44.188.272.747,00	44.222.527.023,00	(34.254.276,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - LO	24.919.937.419,00	25.065.197.945,00	(145.260.526,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) -	42.272.055.147,00	45.421.002.446,00	(3.148.947.299,00)
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	127.599.774,00	128.100.019,00	(500.245,00)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	75.445.096.264,00	75.445.096.264,00	0,00
Jumlah		186.952.961.351,00	190.281.923.697,00	(3.328.962.346,00)

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan-LO

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi-LO TA 2022 sebesar Rp12.488.667.000,00 turun sebesar Rp11.615.667.000,00 atau 1.330,55% dari Realisasi TA 2021 sebesar Rp873.000.000,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah-LO, Pendapatan Dana Darurat-LO dan Pendapatan Lainnya-LO. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		SALDO	
		2022	2021
1	Pendapatan Hibah - LO	35.677.566.961,00	46.572.215.283,00
2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	156.971.470.000,00
Jumlah		35.677.566.961,00	203.543.685.283,00

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO TA 2022 dengan realisasi sebesar Rp35.677.566.961,00 turun sebesar Rp10.894.648.322,00 atau 23,39% dibandingkan realisasi TA 2021 dengan realisasi sebesar Rp46.572.215.283,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		SALDO	
		2022	2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	9.235.470.410,00	11.154.337.493,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	23.452.908.801,00	22.699.952.040,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	2.100.687.750,00	12.717.925.750,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	888.500.000,00	0,00
5	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	156.971.470.000,00
Jumlah		35.677.566.961,00	203.543.685.283,00



Adapun Pendapatan Hibah–LO TA.2022 sebesar Rp35.677.566.961,00. penjelasannya sebagai berikut:

1. Hibah dari Pemerintah Pusat yaitu Kemenkes RI sebesar Rp3.060.240.410,00 berupa Alat Kedokteran.
2. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.175.230.000,00.
3. Hibah dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah berupa bahan alat kontrasepsi dan alat non kontrasepsi sebesar Rp1.661.158.060,00.
4. Hibah dari Kelompok masyarakat (Paguyuban/pedagang pasar Ulujami) sebesar Rp146.711.250,00.
5. Hibah Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dari PT Multi Mitra (Temuan BPK RI) tahun 2021 di Pasar Randudongkal sebesar Rp1.953.976.500,00.
6. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa alat kesehatan sebesar Rp15.695.000,00.
7. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa obat sebesar Rp2.101.347.816,00.
8. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa persediaan obat-obatan lainnya/vaksin dropping pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.353.159.425,00.
9. Hibah dari Provinsi Jawa Tengah berupa bahan-bahan kimia bidang P2P pada Dinas Kesehatan sebesar Rp321.548.500,00.
10. Hibah kendaraan operasional dari BNI sebesar Rp599.500.000,00.
11. Hibah kendaraan operasional dari Bank Jateng sebesar Rp289.000.000,00.

**5.4.2. BEBAN**

Realisasi Beban Daerah tahun 2022 sebesar Rp2.244.816.930.452,59 bertambah sebesar Rp4.359.664.025,46 atau 0,20% dibandingkan dengan realisasi beban tahun 2021 sebesar Rp2.240.421.266.427,13. Beban Daerah tahun 2022 terdiri dari:

Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
	2022	2021		
1. Beban Pegawai	1.130.179.880.843,00	1.113.683.675.056,00	16.496.205.787,00	1,48
2. Beban Barang dan Jasa	742.192.125.096,47	675.714.397.828,51	66.477.727.267,96	9,84
3. Beban Hibah	42.462.917.950,00	106.745.455.145,00	(64.282.537.195,00)	(60,22)
4. Beban Bantuan Sosial	9.482.524.000,00	5.248.297.000,00	4.234.227.000,00	80,68
5. Beban Penyusutan dan Amortisasi	166.792.822.671,00	164.896.207.605,00	1.896.615.066,00	1,15
6. Beban Penyisihan Piutang	3.117.099.190,12	4.082.065.297,62	(964.966.107,50)	(23,64)
7. Beban Transfer	149.502.600.995,00	170.051.168.495,00	(20.548.567.500,00)	(12,08)
8. Beban Lain-Lain	1.086.959.707,00	0,00	1.086.959.707,00	100,00
Jumlah	2.244.816.930.452,59	2.240.421.266.427,13	4.395.664.025,46	0,20

Saldo Beban Daerah sebesar Rp2.244.816.930.452,59 merupakan gabungan saldo beban-beban sebagai berikut:

5.4.2.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.130.179.880.843,00 bertambah sebesar Rp16.496.205.787,00 atau 1,48% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.113.683.675.056,00. Beban Pegawai ini merupakan gabungan beban pegawai di 41 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Gaji dan Tunjangan ASN	672.953.802.015,00	660.108.425.492,00	12.845.376.523,00	1,95
2	Tambahan Penghasilan ASN	137.459.573.616,00	116.929.135.684,00	20.530.437.932,00	17,56
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	212.730.125.506,00	228.413.138.701,00	(15.683.013.195,00)	(6,87)
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.655.728.096,00	29.385.635.686,00	(1.729.907.590,00)	(5,89)
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.188.369.873,00	1.185.033.735,00	3.336.138,00	0,28
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	752.800.000,00	891.208.895,00	(138.408.895,00)	(15,53)
7	Pegawai BLUD	77.439.481.737,00	76.771.096.863,00	668.384.874,00	0,87
	Jumlah	1.130.179.880.843,00	1.113.683.675.056,00	16.496.205.787,00	1,48

Terdapat selisih kurang beban pegawai sebesar Rp11.047.814.697,00 dibandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar Rp1.141.227.695.540,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp22.006.322.467,00 terdiri dari:
 - Rp411.957.352,00 merupakan pengakuan beban iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2022 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2023;
 - Rp10.865.651.225,00 merupakan pengakuan beban tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2022 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2023;
 - Rp10.728.713.890,00 merupakan pengakuan beban pegawai BLUD tahun 2022 yang sampai 31 Desember 2022 belum diterima pegawai;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp33.054.137.164,00 terdiri dari:
 - Rp387.468.476,00 merupakan pembayaran utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2021 yang dibayarkan di bulan Januari 2022;



- Rp10.379.741.000,00 merupakan pembayaran utang belanja tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2021 yang dibayarkan di bulan Januari 2022;
- Rp22.286.927.688,00 merupakan pembayaran utang pegawai BLUD tahun 2021;

No	Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	672.929.313.139,00	411.957.352,00	387.468.476,00	672.953.802.015,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	136.973.663.391,00	10.865.651.225,00	10.379.741.000,00	137.459.573.616,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	212.730.125.506,00			212.730.125.506,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.655.728.096,00			27.655.728.096,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.188.369.873,00			1.188.369.873,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	752.800.000,00			752.800.000,00
7	Pegawai BOS	0,00			0,00
8	Pegawai BLUD	88.997.695.535,00	10.728.713.890,00	22.286.927.688,00	77.439.481.737,00
	Jumlah	1.141.227.695.540,00	22.006.322.467,00	33.054.137.164,00	1.130.179.880.843,00

5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp742.192.125.096,47 bertambah sebesar Rp66.477.727.267,96 atau 9,84% dibandingkan dengan realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp675.714.397.828,51. Beban Barang dan Jasa TA. 2022 dari seluruh OPD terdiri dari :

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Beban Persediaan	144.112.082.246,05	277.241.981.225,29	(133.129.898.979,24)	(48,02)
2	Beban Jasa	462.272.189.843,42	261.279.592.383,22	200.992.597.460,20	76,93
3	Beban Pemeliharaan	85.709.147.774,00	99.855.256.401,00	(14.146.108.627,00)	(14,17)
4	Beban Perjalanan Dinas	50.098.705.233,00	37.337.567.819,00	12.761.137.414,00	34,18
	Jumlah	742.192.125.096,47	675.714.397.828,51	66.477.727.267,96	9,84

5.4.2.2.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2022 sebesar Rp144.112.082.246,05 berkurang sebesar Rp133.129.898.979,24 atau 48,02% dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan TA 2021 sebesar Rp277.241.981.225,29. Beban Persediaan TA. 2022 dari seluruh OPD terdiri dari :

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Beban Bahan	15.853.823.265,59	24.973.422.367,41	(9.119.599.101,82)	(36,52)
2	Beban Suku Cadang	3.012.111.202,00	1.439.718.760,00	1.572.392.442,00	109,22
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	25.323.014.928,18	29.302.024.267,82	(3.979.009.339,64)	(13,58)
4	Beban Obat-obatan	52.069.315.333,28	14.363.587.617,06	37.705.727.716,22	262,51
5	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	19.143.948.525,00	1.366.198.700,00	17.777.749.825,00	1301,26
6	Beban Natura dan Pakan	340.048.862,00	411.606.633,00	(71.557.771,00)	(17,38)
7	Beban Makanan dan Minuman	26.291.548.521,00	28.882.510.246,00	(2.590.961.725,00)	(8,97)
8	Beban Pakaian	1.968.479.174,00	2.453.443.240,00	(484.964.066,00)	(19,77)
9	Beban Komponen	109.792.435,00	50.349.499,00	59.442.936,00	118,06
10	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	128.666.341.661,00	(128.666.341.661,00)	(100,00)
11	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	42.277.517.264,00	(42.277.517.264,00)	(100,00)
12	Beban Aset Extracomplable	0,00	3.055.260.970,00	(3.055.260.970,00)	(100,00)
	Jumlah	144.112.082.246,05	277.241.981.225,29	(133.129.898.979,24)	(48,02)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berkurangnya Beban Persediaan dibandingkan tahun lalu dikarenakan Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, serta Beban Aset Extracomptable pada tahun sebelumnya dicatat sebagai Beban Persediaan, sedangkan pada tahun 2022 dicatat sebagai Beban Jasa. Sedangkan Beban Aset Extracomptable pada tahun 2022 dicatat sebagai Beban Lain-lain.

Terdapat selisih lebih sebesar Rp58.714.499.583,05 antara Beban Persediaan dengan saldo realisasi Belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp85.397.582.663,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bahan	15.257.269.804,00	1.649.480.571,59	1.052.927.110,00	15.853.823.265,59
2	Suku Cadang	969.665.632,00	2.042.445.570,00	-	3.012.111.202,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	24.647.917.187,00	4.158.729.959,18	3.483.632.218,00	25.323.014.928,18
4	Obat-obatan	15.189.943.838,00	61.039.187.586,94	24.159.816.091,66	52.069.315.333,28
5	Barang untuk Dijual/Diserahkan	1.558.843.110,00	27.155.783.069,00	9.570.677.654,00	19.143.948.525,00
6	Natura dan Pakan	316.559.362,00	25.789.500,00	2.300.000,00	340.048.862,00
7	Makanan dan Minuman	25.379.112.121,00	912.436.400,00	-	26.291.548.521,00
8	Pakaian	1.968.479.174,00	-	-	1.968.479.174,00
9	Komponen	109.792.435,00	-	-	109.792.435,00
	Jumlah	85.397.582.663,00	96.983.852.656,71	38.269.353.073,66	144.112.082.246,05

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban persediaan pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Bahan selisih lebih sebesar Rp596.553.461,59 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.649.480.571,59 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan saldo persediaan : bahan kimia; bahan bakar minyak; isi tabung gas; dan bahan lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.012.481.371,59 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - beban persediaan bahan kimia yang berasal dari hibah dari pemprov Jateng sebesar Rp321.548.500,00;
 - beban persediaan bahan lainnya yang berasal dari Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebesar Rp11.450.700,00 pada Dinkes;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp304.000.000,00 berupa beban bahan kimia, beban bahan baku bangunan, dan beban bahan bakar minyak;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.052.927.110,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan : bahan kimia; bahan bakar minyak; isi tabung gas; dan bahan lainnya tahun 2022 sebesar Rp1.052.927.110,00 yang mengurangi beban persediaan;
- 2) Beban Suku Cadang selisih lebih sebesar Rp2.042.445.570,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp2.042.445.570,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan saldo persediaan alat kedokteran tahun 2021 sebesar Rp1.916.899.620,00 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - beban persediaan bahan alat kedokteran yang berasal dari Belanja Modal Alat Kesehatan sebesar Rp83.076.654,00 pada Dinkes;
 - beban persediaan bahan alat kedokteran yang berasal dari Belanja Modal Alat Kesehatan sebesar Rp42.469.296,00 pada Dinkes yang berasal dari BLUD;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor selisih lebih sebesar Rp86.547.877,18 karena:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp4.158.729.959,18 terdiri dari:
 - merupakan pengakuan beban bahan : alat tulis kantor; kertas dan cover, bahan cetak; benda pos; bahan komputer, alat kebersihan/perabot kantor; alat listrik, dan alat untuk kegiatan kantor lainnya tahun 2021 sebesar Rp3.243.073.986,18 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - beban persediaan bahan cetak yang berasal dari Belanja Modal Buku sebesar Rp58.347.669,00 pada Dindikbud yang berasal dari Dana BOS;
 - beban persediaan bahan komputer yang berasal dari Belanja Modal Peralatan Jaringan sebesar Rp2.855.936,00 pada Dinkes;
 - beban persediaan alat kebersihan/perabot kantor berupa kotak preparat dan emergency kit yang berasal dari Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp4.337.878,00 dan alat pembersih dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp1.230.000,00 pada Dinkes;
 - beban persediaan alat kebersihan/perabot kantor berupa alat kebersihan yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih sebesar Rp15.720.300,00 pada Setwan;
 - beban persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa bagan struktur, papan petunjuk, K3RS, dan lain-lain yang berasal dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp292.944.295,00 pada Dinkes yang berasal dari BLUD dan berupa perlengkapan kantor sebesar Rp530.202.195,00 pada Dindikbud yang sebagian besar berasal dari Dana BOS;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp10.017.700,00 berupa beban atk, bahan cetak, dan benda pos;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp3.483.632.218,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan : alat tulis kantor; kertas dan cover; bahan cetak; benda pos; bahan komputer, perabot kantor; alat listrik; dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya tahun 2022 sebesar Rp3.229.220.218,00 yang mengurangi beban persediaan;
 - kapitalisasi belanja bahan komputer menjadi aset (mesin e-ticketing) sebesar Rp254.412.000,00 pada DPMPTSP;

4) Beban Obat-obatan selisih lebih Rp36.879.371.495,28 karena :

- Penyesuaian tambah sebesar Rp61.039.187.586,94 terdiri dari ::
 - merupakan pengakuan beban obat-obatan sebesar Rp37.918.114.725,94 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - pengakuan beban obat-obatan tahun 2022 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp1.661.158.060,00 berupa Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi yang diterima oleh Dinsos KBPP;
 - pengakuan beban bahan obat-obatan tahun 2022 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp2.101.347.816,00 berupa Obat-obatan yang diterima oleh Dinkes;
 - pengakuan beban bahan obat-obatan lainnya tahun 2022 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp19.353.159.425,00 berupa Obat-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- obat-obatan Lainnya yang diterima oleh Dinkes;
- penghapusan persediaan obat-obatan kadaluwarsa sebesar Rp5.407.560,00 pada Dinkes;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp24.159.816.091,66 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan : obat-obatan dan obat-obatan lainnya tahun 2022 sebesar Rp24.156.343.218,00 yang mengurangi beban persediaan;
 - merupakan pengakuan persediaan kadaluwarsa sebesar Rp84.898,50 yang direklas ke Aset Lain-lain pada Dinkes;
 - koreksi kurang catat persediaan obat-obatan sebesar Rp2.605.169,00 berupa non alat kontrasepsi pada Dinsos KBPP;
 - koreksi beban persediaan atas persediaan obat pada RSUD sebesar Rp782.806,16 yang dikembalikan ke penyedia karena kejadian luar biasa;
- 5) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan selisih lebih sebesar Rp17.585.105.415,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp27.155.783.069,00 terdiri dari :
 - Penyerahan atas persediaan barang untuk diserahkan sebesar Rp26.911.100.219,00 pada Dinkes, DPU, dan Diskoperindag;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar 244.682.850,00 berupa beban barang untuk diserahkan;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp9.570.677.654,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan barang untuk dijual/diserahkan tahun 2022 sebesar Rp9.570.677.654,00 pada DPU dan Diskoperindag yang mengurangi beban persediaan;
- 6) Beban Natura dan Pakan selisih lebih Rp23.489.500,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp25.789.500,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan beban natura dan pakan sebesar Rp3.991.000,00 sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar 21.798.500,00 berupa beban natura;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp2.300.000,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan sebagai persediaan pakan tahun 2022 sebesar Rp2.300.000,00 pada Disperik yang mengurangi beban persediaan;
- 7) Beban Makanan dan Minuman selisih lebih Rp912.436.400,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp912.436.400,00 terdiri dari :
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp912.436.400,00 berupa beban makanan rapat dan aktivitas lapangan;

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan beban persediaan yang berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengakuan BTT untuk penanganan covid-19 pada LO diatribusikan sesuai dengan jenis belanja masing-masing, sehingga pada TA 2022 terdapat penambahan Beban Persediaan yang berasal dari BTT Penanganan Covid-19 sebesar Rp1.492.935.450,00 berupa : bahan kimia, bahan baku bangunan, bahan bakar minyak, alat kedokteran, ATK, bahan cetak, benda pos,



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

perabot kantor, barang untuk dijual/diserahkan, natura, makanan minuman rapat, dan makanan minuman aktivitas lapangan.

Beban persediaan sebesar Rp144.112.082.246,05 dibandingkan dengan belanja barang dan jasa LRA sebesar Rp85.397.582.663,00 dan perubahan saldo persediaan sebesar Rp32.457.405.350,71 maka terdapat selisih sebesar Rp26.257.094.232,34. Hal ini dikarenakan terdapat beban dan persediaan yang berasal dari:

Penambahan	33.406.349.305,00
Belanja Barang BLUD	7.393.864.441,00
Belanja Barang BOS	34.293.130,00
Belanja Modal	1.026.914.623,00
Kapitalisasi dari belanja Persediaan	-
Belanja Selain Persediaan	15.720.300,00
<i>Persediaan Perabotan Kantor dari Beban Pemeliharaan</i>	15.720.300,00
Belanja Hibah	23.437.213.801,00
Atribusi dari BTT	1.492.935.450,00
Penghapusan persediaan kadaluarsa	5.407.560,00
Pengurangan	7.149.255.072,66
Belanja Barang BLUD	6.849.775.068,00
Belanja Barang BOS	44.200.300,00
Belanja Modal	-
Kapitalisasi dari belanja Persediaan	254.412.000,00
Belanja Selain Persediaan	-
Hibah Persediaan	-
Atribusi dari BTT	-
Persediaan kadaluarsa	84.898,50
Persediaan dikembalikan	782.806,16
Jumlah Akhir	26.257.094.232,34

5.4.2.2.2. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2022 sebesar Rp462.272.189.843,42 bertambah sebesar Rp200.992.597.460,20 atau 76,93% dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa TA 2021 sebesar Rp261.279.592.383,22. Beban Jasa TA. 2022 dari seluruh OPD terdiri dari:

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Beban Jasa kantor	166.807.842.987,00	194.717.319.994,00	(27.909.477.007,00)	(14,33)
2	Beban luran Jaminan/Asuransi	31.238.289.141,72	30.862.679.787,22	375.609.354,50	1,22
3	Beban Sewa Tanah	158.261.262,00	428.705.159,00	(270.443.897,00)	(63,08)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.887.858.204,00	2.152.868.800,00	734.989.404,00	34,14
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	651.152.000,00	574.252.000,00	76.900.000,00	13,39
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	8.821.500,00	(8.821.500,00)	(100,00)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	30.637.000,00	(5.637.000,00)	(18,40)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.972.914.774,00	8.530.038.510,00	(2.557.123.736,00)	(29,98)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.457.523.555,00	2.476.109.233,00	981.414.322,00	39,64
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	191.535.000,00	(191.535.000,00)	(100,00)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	5.930.670.500,00	3.189.071.500,00	2.741.599.000,00	85,97
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	20.160.000,00	(20.160.000,00)	(100,00)
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	25.560.000,00	19.240.000,00	6.320.000,00	32,85
14	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.328.702.000,00	17.948.405.000,00	13.380.297.000,00	74,55
15	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.148.463.558,00	129.748.900,00	9.018.714.658,00	6950,90
16	Beban Barang dan Jasa BOS	138.774.335.736,00	0,00	138.774.335.736,00	100,00
17	Beban Barang dan Jasa BLUD	65.865.616.125,70	0,00	65.865.616.125,70	100,00
JUMLAH		462.272.189.843,42	261.279.592.383,22	200.992.597.460,20	76,93



Terdapat selisih kurang sebesar Rp8.852.701.465,58 antara Beban Jasa dengan saldo realisasi Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp471.124.891.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Jasa Kantor	174.772.582.795,00	4.123.572.942,00	12.088.312.750,00	166.807.842.987,00
2	Iuran Jaminan/Asuransi	31.285.839.733,00	18.556.237,10	66.106.828,38	31.238.289.141,72
3	Sewa Tanah	158.261.262,00			158.261.262,00
4	Sewa Peralatan dan Mesin	2.682.558.204,00	205.300.000,00	-	2.887.858.204,00
5	Sewa Gedung dan Bangunan	651.152.000,00			651.152.000,00
6	Sewa Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00			25.000.000,00
7	Jasa Konsultansi Konstruksi	5.794.759.774,00	178.155.000,00	-	5.972.914.774,00
8	Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.457.523.555,00			3.457.523.555,00
9	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	5.930.670.500,00			5.930.670.500,00
10	Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.560.000,00			25.560.000,00
11	Uang yang Dibenikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak	31.328.702.000,00			31.328.702.000,00
12	Jasa yang Dibenikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak	9.148.463.558,00			9.148.463.558,00
13	Barang dan Jasa BOS	138.764.428.566,00	44.200.300,00	34.293.130,00	138.774.335.736,00
14	Barang dan Jasa BLUD	67.099.389.362,00	18.115.637.119,00	19.349.410.355,30	65.865.616.125,70
	Jumlah	471.124.891.309,00	22.685.421.598,10	31.538.123.063,68	462.272.189.843,42

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban jasa pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Jasa Kantor selisih kurang sebesar Rp7.964.739.808,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp4.123.572.942,00 terdiri dari :
 - Pengakuan beban jasa tenaga kesehatan tahun 2022 sebesar Rp1.809.835.095,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar bulan Desember 2022 sebesar Rp2.166.653.647,00 yang belum dibayarkan;
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp147.084.200,00 berupa beban : honor petugas, honor tenaga kebersihan, tenaga penanganan sosial untuk pemakaman, honor jasa tenaga mekanik, jasa pencucian, dan pembayaran biaya listrik;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp12.088.312.750,00 terdiri dari :
 - merupakan pembayaran atas utang belanja jasa tenaga kesehatan tahun 2021 sebesar Rp10.172.081.917,00 yang mengurangi beban jasa tenaga kesehatan;
 - merupakan pembayaran atas utang belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp1.824.417.833,00 yang mengurangi beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar;
 - kapitalisasi menambah nilai Aset Tetap Jaringan Listrik yang berasal dari belanja tambah daya listrik sebesar Rp91.813.000,00 pada DPMPSTP;
- 2) Beban Iuran/Jaminan/Asuransi selisih kurang sebesar Rp47.550.591,28 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp18.556.237,10 merupakan pengakuan beban premi berupa asuransi kendaraan atas premi asuransi dibayar dimuka TA 2021;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp66.106.828,38 merupakan pengurangan beban premi asuransi tahun 2022 karena masih merupakan beban dibayar dimuka;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 3) Beban Sewa Peralatan dan Mesin selisih lebih sebesar Rp205.300.000,00 karena :
- Penyesuaian tambah sebesar Rp205.300.000,00 terdiri dari :
 - atribusi dari Beban Tidak Terduga dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp205.300.000,00 berupa beban sewa peralatan kantor dan kendaraan;
- 4) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi selisih lebih sebesar Rp178.155.000,00 karena :
- Penyesuaian tambah sebesar Rp178.155.000,00 terdiri dari :
 - Perencanaan Jembatan (5 dokumen) sebesar Rp178.155.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Jembatan pada DPU;
- 5) Beban Barang dan Jasa BOS selisih lebih sebesar Rp9.907.170,00 karena :
- Penyesuaian tambah sebesar Rp44.200.300,00 terdiri dari merupakan pengakuan beban bahan alat tulis kantor tahun 2022 sebesar Rp44.200.300,00 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOS sebagai beban persediaan karena sudah digunakan;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp34.293.130,00 merupakan pengakuan atas Persediaan ATK tahun 2022 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS;
- 6) Beban Barang dan Jasa BLUD selisih kurang sebesar Rp1.233.773.236,30 karena:
- Penyesuaian tambah sebesar Rp18.115.637.119,00 terdiri dari :
 - penggunaan persediaan bahan kimia tahun 2021 menjadi beban BLUD sebesar Rp512.919.074,00;
 - penggunaan persediaan alat tulis kantor tahun 2021 menjadi beban BLUD sebesar Rp317.222.000,00;
 - penggunaan persediaan barang cetakan tahun 2021 menjadi beban BLUD sebesar Rp197.954.000,00;
 - penggunaan persediaan perabot kantor/alat kebersihan tahun 2021 menjadi beban BLUD sebesar Rp242.436.200,00;
 - penggunaan persediaan bahan obat-obatan tahun 2021 menjadi beban BLUD sebesar Rp5.514.530.009,00;
 - penggunaan persediaan natura tahun 2021 menjadi beban BLUD sebesar Rp54.117.685,00;
 - penggunaan persediaan bahan lainnya tahun 2021 menjadi beban BLUD sebesar Rp10.596.100,00;
 - pengakuan beban BLUD untuk jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) tahun 2022 yang belum dibayarkan sebesar Rp190.166.350,00;
 - pengakuan beban BLUD untuk bahan obat-obatan tahun 2022 sebesar Rp8.563.954.214,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban BLUD untuk bahan kimia tahun 2022 sebesar Rp2.195.427.116,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban BLUD untuk jasa pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp44.021.958,00 yang belum dibayarkan;
 - pengakuan beban BLUD untuk jasa pengelolaan limbah tahun 2022 sebesar Rp32.036.157,00 yang belum dibayarkan;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- pengakuan beban BLUD untuk premi asuransi tahun 2022 sebesar Rp240.256.256,00;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp19.349.410.355,30 terdiri dari :
 - pengakuan persediaan bahan kimia tahun 2022 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp954.132.929,00;
 - pengakuan persediaan ATK tahun 2022 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp297.557.300,00;
 - pengakuan persediaan barang cetakan tahun 2022 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp228.831.500,00;
 - pengakuan persediaan perabot kantor/alat kebersihan tahun 2022 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp267.656.100,00;
 - pengakuan persediaan bahan obat-obatan tahun 2022 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp5.561.960.027,00;
 - pengakuan persediaan natura tahun 2022 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp83.726.585,00;
 - pengakuan Beban Dibayar Dimuka atas Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter tahun 2022 sebesar Rp47.546.854,30;
 - pembayaran utang belanja jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) bulan Desember 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp178.785.964,00;
 - pembayaran utang belanja bahan obat-obatan tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp7.884.426.300,00;
 - pembayaran utang belanja bahan kimia tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp3.656.447.457,00;
 - pembayaran utang belanja pengolahan limbah tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp38.579.807,00;
 - pembayaran utang premi asuransi tahun 2021 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp149.759.532,00;

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan Beban Jasa yang berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengakuan BTT untuk penanganan covid-19 pada LO diatribusikan sesuai dengan jenis belanja masing-masing, sehingga pada TA 2022 terdapat penambahan Beban Jasa yang berasal dari BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk kegiatan berupa operasional gugus tugas pada BPBD dengan nilai sebesar Rp352.384.200,00 berupa : jasa tenaga trantibum, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga penanganan sosial, jasa tenaga teknisi/mekanik, jasa pencucian, sewa kendaraan, sewa peralatan kantor, dan biaya listrik.

5.4.2.2.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp85.709.147.774,00 berkurang sebesar Rp14.146.108.627,00 atau 14,17% dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2021 sebesar Rp99.855.256.401,00. Beban Pemeliharaan TA. 2022 dari seluruh OPD terdiri dari:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Beban Pemeliharaan Tanah	149.095.000,00	472.557.074,00	(323.462.074,00)	(68,45)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.445.470.624,00	10.799.961.638,00	(354.491.014,00)	(3,28)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.888.926.529,00	16.979.180.718,00	(1.090.254.189,00)	(6,42)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.224.155.621,00	71.574.359.881,00	(12.350.204.260,00)	(17,26)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	29.197.090,00	(27.697.090,00)	(94,86)
JUMLAH		85.709.147.774,00	99.855.256.401,00	(14.146.108.627,00)	(14,17)

Terdapat selisih lebih sebesar Rp458.486.398,00 antara Beban Pemeliharaan dengan saldo realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp85.250.661.376,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Pemeliharaan Tanah	149.095.000,00	-	-	149.095.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.461.190.924,00	-	15.720.300,00	10.445.470.624,00
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.814.239.831,00	252.758.498,00	178.071.800,00	15.888.926.529,00
4	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.824.635.621,00	399.520.000,00	-	59.224.155.621,00
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
Jumlah		85.250.661.376,00	652.278.498,00	193.792.100,00	85.709.147.774,00

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban pemeliharaan pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin selisih kurang sebesar Rp15.720.300,00 karena :

- Penyesuaian kurang sebesar Rp15.720.300,00 terdiri dari:
 - reklasifikasi dari beban pemeliharaan alat pembersih menjadi persediaan perabot kantor (bahan pembersih) sebesar Rp15.720.300,00 pada Setwan;

2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan selisih lebih sebesar Rp74.686.698,00 karena:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp252.758.498,00 terdiri dari :
 - merupakan pemeliharaan stadion Mochtar sebesar Rp199.599.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Bangunan Olahraga pada DPU;
 - merupakan pemeliharaan/pavingisasi di SDN 03 Tegalsari sebesar Rp53.159.498,00 yang berasal dari Belanja Modal Bangunan Pendidikan pada Dindikbud;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp178.071.800,00 terdiri dari :
 - kapitalisasi dari pemeliharaan gedung kantor menjadi aset tetap mebel sebesar Rp23.584.800,00 pada Inspektorat;
 - kapitalisasi dari pemeliharaan gedung kantor menjadi aset tetap bangunan pameran UMKM sebesar Rp70.500.000,00 pada Kec. Petarukan;
 - kapitalisasi dari pemeliharaan gedung kantor menjadi aset tetap bangunan pos jaga sebesar Rp83.987.000,00 pada Dinkes;

3) Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi selisih lebih sebesar Rp399.520.000,00 karena:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp399.520.000,00 terdiri dari :
 - beban pemeliharaan jalan di kompleks pasar sebesar Rp399.520.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan pada Diskoperindag ;

**5.4.2.2.4. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas TA 2022 sebesar Rp50.098.705.233,00 bertambah sebesar Rp12.761.137.414,00 atau 34,18% dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2021 sebesar Rp37.337.567.819,00. Beban Perjalanan Dinas TA. 2022 dari seluruh OPD terdiri dari :

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri	50.058.705.233,00	37.337.567.819,00	12.721.137.414,00	34,07
2	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
	JUMLAH	50.098.705.233,00	37.337.567.819,00	12.761.137.414,00	34,18

Terdapat selisih lebih sebesar Rp2.670.000,00 antara Beban Perjalanan Dinas dengan saldo realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada LRA sebesar Rp50.096.035.233,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri	50.056.035.233,00	2.670.000,00		50.058.705.233,00
2	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	40.000.000,00			40.000.000,00
	Jumlah	50.096.035.233,00	2.670.000,00	-	50.098.705.233,00

Beban Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri selisih lebih sebesar Rp2.670.000,00 merupakan atribusi dari BTT dalam rangka penanganan covid-19 berupa monitoring pelaksanaan penanganan covid-19;

5.4.2.3. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp42.462.917.950,00 berkurang sebesar Rp64.282.537.195,00 atau 60,22% dibandingkan dengan realisasi beban hibah tahun 2021 sebesar Rp106.745.455.145,00. Beban hibah tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.284.949.846,00	774.916.231,00	7.510.033.615,00	969,14
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.260.338.854,00	105.036.623.914,00	(73.776.285.060,00)	(70,24)
3	Hibah Dana BOS	1.983.714.250,00	0,00	1.983.714.250,00	100,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00	933.915.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	42.462.917.950,00	106.745.455.145,00	(64.282.537.195,00)	(60,22)

Terdapat selisih lebih sebesar Rp3.837.662.250,00 antara Beban Hibah dengan saldo realisasi Belanja Hibah pada LRA sebesar Rp38.625.255.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.438.001.846,00	2.068.400.000,00	221.452.000,00	8.284.949.846,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.253.338.854,00	7.000.000,00	-	31.260.338.854,00
3	Hibah Dana BOS	-	1.983.714.250,00		1.983.714.250,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	933.915.000,00			933.915.000,00
	Jumlah	38.625.255.700,00	4.059.114.250,00	221.452.000,00	42.462.917.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban hibah pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah kepada Pemerintah Pusat selisih lebih sebesar Rp1.846.948.000,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp2.068.400.000,00 yaitu :
 - berupa pemotongan penyaluran DAU yang kembali lagi ke pemerintah pusat sebesar Rp2.068.400.000,00 berdasarkan KMK nomor 34/KM.7/2021;
 - penyesuaian kurang sebesar Rp221.452.000,00 yaitu :
 - berupa reklas beban Hibah pada DPU menjadi Bangunan Gudang di Kantor Kejari karena dibangun di atas tanah milik pemda;
- 2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia selisih lebih sebesar Rp7.000.000,00 karena:
 - penyesuaian tambah sebesar Rp7.000.000,00 yaitu :
 - hibah kepada desa sebesar Rp7.000.000,00 berupa meubelair;
- 3) Hibah Dana BOS selisih lebih sebesar Rp1.983.714.250,00 karena:
 - penyesuaian tambah sebesar Rp1.983.714.250,00 terdiri dari :
 - hibah kepada sekolah swasta (SD dan SMP) sebesar Rp1.250.638.496,00 berupa peralatan kantor dari Dana BOS TA. 2022;
 - hibah kepada sekolah swasta (SD dan SMP) sebesar Rp733.075.754,00 berupa buku dari Dana BOS TA. 2022.

5.4.2.4. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp9.482.524.000,00 bertambah sebesar Rp4.234.227.000,00 atau 80,68% dibandingkan dengan beban tahun 2021 sebesar Rp5.248.297.000,00. Beban tersebut merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yaitu:

No.	Uraian	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Bantuan Sosial kepada Individu	9.152.795.000,00	2.236.370.000,00	6.916.425.000,00	309,27
2	Bantuan Sosial kepada Keluarga	329.729.000,00	3.006.427.000,00	(2.676.698.000,00)	(89,03)
3	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	9.482.524.000,00	5.248.297.000,00	4.234.227.000,00	80,68

Beban Bantuan Sosial sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada LRA yaitu sebesar Rp9.482.524.000,00.

5.4.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Beban penyusutan dan amortisasi ini terjadi sejak bulan pertama perolehan dan pengakuan beban secara bulanan mengikuti sistem pencatatan barang milik daerah.

Saldo beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 sebesar Rp166.792.822.671,00 bertambah sebesar Rp1.896.616.066,00 atau 1,15% dari beban tahun 2021 sebesar Rp164.896.207.605,00. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.874.446.753,00	66.535.199.197,00	339.247.556,00	0,51
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.227.710.979,00	29.373.298.001,00	854.412.978,00	2,91
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	68.753.546.869,00	67.792.802.421,00	960.744.448,00	1,42
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	937.118.070,00	1.194.907.986,00	(257.789.916,00)	(21,57)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	166.792.822.671,00	164.896.207.605,00	1.896.615.066,00	1,15

Adapun rincian beban penyusutan per OPD adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jembatan & Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
1	Dindikbud	19.115.625.335,00	14.423.469.831,00	109.718.265,00	114.681.746,00
2	Dinkes	24.367.199.092,00	3.336.018.296,00	378.486.040,00	171.457.751,00
3	DPU & PR	970.479.595,00	346.923.153,00	61.242.411.302,00	103.674.813,00
4	Disperkim	525.578.564,00	829.949.125,00	3.641.871.529,00	
5	Satpol PP	558.647.412,00	14.634.984,00		
6	BPBD	712.549.194,00	26.529.480,00		
7	Dinsos-PPKBPPA	1.039.189.844,00	61.253.120,00	1.861.818,00	
8	Disnaker	433.709.552,00	152.395.202,00	4.940.707,00	2.054.458,00
9	DLH	1.686.442.711,00	100.219.058,00	423.506.363,00	
10	Disdukcapil	1.001.114.407,00	36.605.378,00	10.789.240,00	10.420.688,00
11	Dinpermasdes	382.774.573,00	32.078.133,00	1.283.475,00	7.500.000,00
12	Dishub	1.140.746.584,00	258.659.683,00	18.097.292,00	59.954.458,00
13	Diskominfo	1.585.708.068,00	94.914.022,00	5.972.950,00	238.946.125,00
14	Diskoperindag	907.318.920,00	4.620.160.683,00	210.618.969,00	39.766.375,00
15	DPMPTP	316.564.687,00	36.537.209,00	1.016.463,00	
16	Dinpusarda	574.191.103,00	19.796.120,00	959.577,00	45.586.458,00
17	Disperik	421.837.718,00	218.690.816,00	137.934.150,00	
18	Disparpora	780.869.875,00	1.522.528.965,00	831.810.048,00	24.425.000,00
19	Dispertan	747.480.298,00	450.926.141,00	49.112.004,00	5.322.948,00
20	Setda	2.806.981.412,00	440.916.880,00	27.136.763,00	
21	Setwan	1.657.270.708,00	2.321.234.604,00	6.144.445,00	
22	Bappeda	413.294.497,00	38.635.555,00	2.547.602,00	
23	BPKAD	1.357.263.431,00	149.634.781,00	7.722.625,00	
24	Bapenda	403.131.486,00	22.423.002,00	1.854.202,00	86.587.500,00
25	BKD	515.509.924,00	19.503.597,00	4.557.519,00	14.439.750,00
26	Inspektorat	321.657.292,00	18.217.260,00		
27	Kec. Moga	125.841.417,00	18.885.768,00	62.500,00	
28	Kec. Pulosari	90.560.476,00	34.350.092,00	187.501,00	
29	Kec. Belik	138.541.473,00	26.616.146,00	62.500,00	
30	Kec. Watukumpul	127.085.967,00	35.771.750,00	75.000,00	
31	Kec. Bodeh	132.976.507,00	14.183.856,00		
32	Kec. Bantarbolang	78.505.965,00	20.379.172,00	25.000,00	
33	Kec. Randudongkal	92.126.281,00	28.687.268,00	10.073.800,00	
34	Kec. Pemalang	325.740.218,00	164.274.457,00	1.061.174.872,00	12.300.000,00
35	Kec. Taman	215.754.137,00	44.623.978,00	302.643.945,00	
36	Kec. Petarukan	139.543.385,00	49.203.084,00	175.975.134,00	
37	Kec. Ampelgading	110.969.901,00	13.794.720,00	62.500,00	
38	Kec. Comal	118.069.545,00	125.910.358,00	82.704.936,00	
39	Kec. Ulujami	132.356.914,00	31.793.813,00		
40	Kec. Warungpring	108.310.571,00	26.381.439,00	75.000,00	
41	Bakesbangpol	194.927.714,00		70.833,00	
	Jumlah	66.874.446.753,00	30.227.710.979,00	68.753.546.869,00	937.118.070,00

**5.4.2.6. Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.117.099.190,12 berkurang sebesar Rp964.966.107,50 atau 23,64% dari beban tahun 2021 sebesar Rp4.082.065.297,62. Beban penyisihan piutang tahun 2022 terdiri dari:

No	Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	3.353.404.637,85	4.200.798.913,69	(847.394.275,84)	(20,17)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	40.307.655,00	20.272.445,00	20.035.210,00	98,83
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain	(276.613.102,73)	(139.006.061,07)	(137.607.041,66)	98,99
Jumlah		3.117.099.190,12	4.082.065.297,62	(964.966.107,50)	(23,64)

5.4.2.7. Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp149.502.600.995,00 berkurang sebesar Rp20.548.567.500,00 atau 12,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp170.051.168.495,00. Beban Transfer terdiri dari :

No.	Beban Transfer	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.150.485.995,00	8.258.226.196,00	892.259.799,00	10,80
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.352.073.000,00	3.403.664.299,00	(51.591.299,00)	(1,52)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	137.000.042.000,00	158.389.278.000,00	(21.389.236.000,00)	(13,50)
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional		149.502.600.995,00	170.051.168.495,00	(20.548.567.500,00)	(12,08)

Terdapat selisih kurang sebesar Rp320.209.861.900,00 antara Beban Transfer dengan saldo realisasi Tranfer pada LRA sebesar Rp469.712.462.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	9.150.485.995,00			9.150.485.995,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	3.352.073.000,00			3.352.073.000,00
3	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	457.209.903.900,00	0,00	320.209.861.900,00	137.000.042.000,00
Jumlah		469.712.462.895,00	0,00	320.209.861.900,00	149.502.600.995,00

Beban Tranfer Bantuan Keuangan ke Desa selisih kurang sebesar Rp320.209.861.900,00 karena transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa yang berasal dari APBN bukan merupakan kinerja operasional bagi pemerintah daerah.

5.4.2.8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain berupa Beban Barang Extracomptable, yaitu pencatatan atas pengadaan aset dari belanja modal yang nilainya dibawah batas kapitalisasi.

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2022 sebesar Rp1.086.959.707,00 bertambah sebesar Rp1.086.959.707,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00, dikarena pada tahun lalu dicatat pada Beban Persediaan. Beban Lain-lain terdiri dari :



No.	Beban Lain-lain	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Barang Extracomtable	1.086.959.707,00	0,00	1.086.959.707,00	100
	Jumlah	1.086.959.707,00	0,00	1.086.959.707,00	100

Terdapat selisih lebih sebesar Rp1.086.959.707,00 antara Beban Barang Extracomtable dengan saldo realisasi Belanja Barang Extracomtable pada LRA sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Barang Extracomtable	-	1.086.959.707,00		1.086.959.707,00
	Jumlah	-	1.086.959.707,00	0,00	1.086.959.707,00

Beban Barang Extracomtable selisih lebih sebesar Rp1.086.959.707,00 karena:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp1.086.959.707,00 merupakan pencatatan atas barang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp855.749.399,00 berupa peralatan kantor dan sekolah yang sebagian besar berasal dari Dana BOS;
 - Dinkes sebesar Rp67.283.182,00 berupa peralatan komputer dan alkes;
 - Satpol PP sebesar Rp3.006.000,00 berupa alat rumah tangga (home use);
 - Diskoperindag sebesar Rp10.480.000,00 berupa timbangan dan karpet;
 - Setda sebesar Rp127.501.126,00 berupa peralatan kantor, tas, alat musik, dll;
 - Setwan sebesar Rp2.440.000,00 berupa alat pendingin (kipas angin);
 - Kec. Petarukan sebesar Rp20.500.000,00 berupa kursi rapat.

5.4.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Kegiatan Non Operasional	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-Lo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya_LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	782.806,16	0,00	782.806,16	100,00
	Kegiatan Non Operasional	(782.806,16)	0,00	(782.806,16)	100,00

5.4.3.1. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA. 2022 sebesar Rp782.806,16 yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 naik sebesar Rp782.806,16 atau 100,00% dari tahun 2021 sebesar Rp0,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO dikarenakan terdapat persediaan obat pada RSUD yang dikembalikan ke penyedia karena ada kejadian luar biasa.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Beban Luar Biasa–LO. Saldo Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa adalah defisit Rp885.300.000,00.

5.4.4.1. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp885.300.000,00 bertambah sebesar Rp885.300.000,00 atau 100,00% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00.

No.	Pos Luar Biasa	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	%
		2022	2021		
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	885.300.000,00	0,00	885.300.000,00	100,00
	Kegiatan Non Operasional	(885.300.000,00)	0,00	(885.300.000,00)	100,00

Pada tahun 2022, di LRA terdapat Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.733.289.650,00, dengan demikian terdapat selisih antara LRA dengan LO sebesar Rp1.847.989.650,00, selisih tersebut berupa BTT yang digunakan untuk penanganan covid-19 sebesar Rp1.847.989.650,00.

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Luar Biasa	2.733.289.650,00		1.847.989.650,00	885.300.000,00
	Jumlah	2.733.289.650,00	0,00	1.847.989.650,00	885.300.000,00

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengakuan beban penanganan covid-19 pada LO tidak pada Beban Luar Biasa, namun diatribusikan ke masing-masing beban terkait, yaitu beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban hibah sebagaimana diungkapkan pada CALK ini.

Beban Luar Biasa dari Belanja Tidak Terduga untuk penanganan covid-19 diatribusikan ke dalam pos beban:

Beban Persediaan	1.492.935.450,00
Beban Bahan Kimia, Bahan Baku Bangunan, dan Bahan Bakar Minyak	304.000.000,00
Beban Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, dan Benda Pos	10.017.700,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	244.682.850,00
Beban Natura	21.798.500,00
Beban Makanan Rapat dan Makanan Aktivitas Lapangan	912.436.400,00
Beban Jasa	352.384.200,00
Jasa Kantor	147.084.200,00
Sewa Peralatan dan Mesin	205.300.000,00
Beban Perjalanan Dinas	2.670.000,00
Total	1.847.989.650,00

**5.5. LAPORAN ARUS KAS /PENJELASAN POS-POS ARUS KAS**

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2022 dan 2021 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	2022	2021
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	139.563.281.562,00	259.476.149.483,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-181.064.763.650,00	-186.205.098.209,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	48.347.327,00	130.000,00
5	Kenaikan / Penurunan Kas	-41.453.134.761,00	73.271.181.274,00
6	Saldo Awal Kas	197.195.543.709,00	123.924.362.435,00
7	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD dan Kas Lainnya	155.742.408.948,00	123.924.362.435,00
8	Saldo Akhir Kas di BUD	97.058.219.896,00	82.259.085.914,00
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	100.130.000,00
10	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.091.000,00
11	Kas BLUD	48.088.445.094,00	78.709.766.638,00
12	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	10.455.603.944,00	35.628.746.310,00
13	Kas BOS	91.662.687,00	492.723.847,00
14	Kas lainnya	504.477.327,00	0,00

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp139.563.281.562,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar yang terdiri dari :

Tabel 5.5.2
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi
Tahun 2022

NO	URAIAN	2022	2021
1	Arus Kas Masuk		
2	Penerimaan Pajak Daerah	99.603.957.485,00	88.731.761.139,00
3	Penerimaan Retribusi Daerah	32.332.497.074,00	28.569.342.183,00
4	Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan	23.007.651.678,00	22.500.844.418,00
5	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	193.982.003.456,00	224.547.731.552,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	34.494.325.916,00	40.467.024.318,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Day	4.448.861.466,00	4.260.156.619,00
8	Penerimaan Dana Abkasi Umum	1.103.835.467.035,00	1.107.792.827.000,00
9	Penerimaan Dana Abkasi Khusus	473.871.917.221,00	397.091.657.314,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	324.866.407.900,00	355.785.946.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	190.281.923.697,00	170.393.852.397,00
12	Bantuan Keuangan	12.488.667.000,00	873.000.000,00
13	Pendapatan Hibah	0,00	6.000.000.000,00
14	Pendapatan Lainnya	0,00	156.971.470.000,00
15	Jumlah Arus Kas Masuk (1 s/d 13)	2.493.213.679.928,00	2.603.985.612.940,00
16	Arus Kas Keluar		
17	Pembayaran Pegawai	1.141.227.695.540,00	1.093.751.149.412,00
18	Pembayaran Barang	691.869.170.581,00	661.157.063.587,00
19	Pembayaran Hibah	38.625.255.700,00	76.596.757.383,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	9.482.524.000,00	5.248.297.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga	2.733.289.650,00	9.821.362.300,00
22	Pembayaran Bagi hasil Pajak kepada K	12.502.558.995,00	8.258.226.196,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.403.664.299,00
24	Pembayaran bantuan keuangan	457.209.903.900,00	486.280.104.000,00
25	Jumlah Arus Kas Keluar (18 s	2.353.650.398.366,00	2.344.516.624.177,00
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	139.563.281.562,00	259.468.988.763,00

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp139.563.281.562,00 sudah termasuk perhitungan arus kas pendapatan selain transaksi yang melalui RKUD seperti pengelolaan BLUD pada RSUD dr. M. Ashari, Dana Kapitasi JKN pada puskesmas, Dana BOS untuk SD dan SMP.

Penyajian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas par 8, yang menyatakan bahwa definisi arus kas adalah arus masuk kas dan arus kas keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah sedangkan aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp181.064.763.650,00 sudah termasuk pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan pilkada sebesar Rp20.000.000.000,00 dan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp10.600.000.000,00

Adapun Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar sebagai berikut :



Tabel 5.5.3
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas aset daerah yang tidak dipisahkan	146.977.249,00	1.044.223.498,00
penjualan atas aset lainnya	-	-
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
penerimaan penjualan investasi non permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d 8)	146.977.249,00	1.044.223.498,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	-
Belanja Modal Tanah	2.204.454.900,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.592.301.185,00	63.839.003.719,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.451.201.077,00	53.414.838.586,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.641.737.125,00	49.290.559.472,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.292.770.608,00	13.115.960.930,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.429.276.004,00	388.959.000,00
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah - Investasi Permanen	10.600.000.000,00	7.200.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar (11 s/d 18)	181.211.740.899,00	187.249.321.707,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (9 - 19)	(181.064.763.650,00)	(186.205.098.209,00)

Sedangkan Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp181.211.740.899,00 merupakan pembentukan dana cadangan untuk pilkada, pembelian aset tetap dan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi permanen kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.4
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi
Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
2	Belanja Modal Tanah	2.204.454.900,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.592.301.185,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.451.201.077,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.641.737.125,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.292.770.608,00
7	Belanja Modal Aset Lainnya	2.429.276.004,00
8	Penyertaan modal pemerintah daerah	10.600.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	181.211.740.899,00

**5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 mencerminkan tidak adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.5.5

**Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan
Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	2021	2020
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
1	Arus Kas Masuk		
2	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/	0,00	0,00
3	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
4	Arus Kas Keluar		
5	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat	0,00	0,00
7	Jumlah Arus Kas Keluar (5 s/d 7)	0,00	0,00
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas	0,00	0,00

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Aktivitas Transitoris diantaranya adalah pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga yang berada di BUD maupun Bendahara SKPD, yaitu terdiri dari: IWP, PPh Ps 21, 22, 23, dan PPN dalam tahun 2021. Jumlah Arus Masuk Dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp150.839.239.190,00 sedangkan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp150.790.891.863,00 Sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp48.347.327,00 angka ini merupakan hutang pajak BOS SD yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp48.477.327,00 Arus kas aktivitas transitoris dapat digambarkan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.6

**Arus Kas Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	2022	2021
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
1	Arus Kas Masuk		
2	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	150.839.239.190,00	154.650.732.436,00
	Penerimaan Setoran Saldo Tahun lalu dari Bendahara Penerimaan		0,00
	Saldo Awal Kas BLUD dan JKN		0,00
	Saldo Awal Kas BOS		0,00
7	Penerimaan Kelebihan Salur Dana BOS		0,00
8	Jumlah Arus Kas Masuk	150.839.239.190,00	154.650.732.436,00
9	Arus Kas Keluar		
10	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	150.790.891.863,00	154.650.602.436,00
12	Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00
13	Setoran Kelebihan Salur Dana BOS		0,00
15	Koreksi Dana BOS		0,00
16	Jumlah Arus Kas Keluar (72 s/d 77)	150.790.891.863,00	154.650.602.436,00
17	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	48.347.327,00	130.000,00



5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pemalang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.789.884.540.124,53 berkurang sebesar Rp38.637.973.872,18 atau 1,01% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.828.522.513.996,71. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi penambahan atau pengurangan ekuitas pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Saldo Awal

Saldo Awal Ekuitas tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.828.522.513.996,71 dan Rp3.753.873.858.568,38 bertambah sebesar Rp74.648.655.428,33 atau 1,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo awal ekuitas diperoleh dari saldo akhir ekuitas laporan keuangan tahun sebelumnya.

5.6.2. Surplus/Defisit–LO

Surplus/Defisit–LO tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp(20.010.166.179,06) dan Rp73.200.210.070,58 berkurang sebesar Rp93.210.376.249,64 atau 127,34% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan defisit atas operasional entitas yang mengurangi nilai ekuitas.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(18.627.807.693,12) dan Rp1.448.445.357,75 berkurang sebesar Rp20.076.253.050,87 atau 1.386,06% dibanding tahun sebelumnya.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari :

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00; dan
- Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp(18.627.807.693,12);

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2022 terdiri dari :

- Koreksi Ekuitas–Piutang sebesar Rp(6.315.099.820,00) merupakan koreksi pencatatan atas saldo Piutang TA. 2021;
- Koreksi Ekuitas–Investasi sebesar Rp(14.506.187.538,12) merupakan koreksi pencatatan berupa koreksi atas penambahan dan pengurangan nilai investasi pada BUMD; dan
- Koreksi Ekuitas–Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp2.193.479.665,00 berupa koreksi atas saldo awal dan koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Koreksi Ekuitas-Piutang :

- Berkurangnya Ekuitas sebesar Rp6.315.099.820,00 karena koreksi pencatatan atas saldo Piutang TA. 2021 dari Rp6.701.944.572,00 berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 karena adanya penerimaan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp6.315.099.820,00 selama tahun 2021 yang sudah diterima di TA. 2021;

Koreksi Ekuitas-Investasi terdiri dari :

- Berkurangnya Ekuitas karena koreksi atas Pencatatan Nilai Investasi pada BUMD. Penyertaan Modal pada BUMD tahun 2022 sebesar Rp10.600.000.000,00 sedangkan penambahan ekuitas pada BUMD per 31 Desember 2022 sebesar Rp(3.906.187.538,12) sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp14.506.187.538,12.
 - SKPKD ekuitas berkurang sebesar Rp14.506.187.538,12, terdiri dari:
 - ❖ PDAM Tirta Mulia ekuitas berkurang sebesar Rp4.310.050.999,00;
 - ❖ PT. BKK Taman ekuitas berkurang sebesar Rp7.436.760.119,22;
 - ❖ PT. BPR Bank Pemalang ekuitas berkurang sebesar Rp2.773.639.766,98;
 - ❖ PT. Aneka Usaha ekuitas bertambah sebesar Rp185.427.312,00;
 - ❖ PT. LKM BKD ekuitas bertambah sebesar Rp171.163.964,92.

Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari:

- Bertambahnya Ekuitas sebesar Rp2.193.479.665,00 karena koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari:
 - Dindikbud ekuitas bertambah sebesar Rp2.191.245.082,00 karena:
 - ❖ Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp89.813.035,00;
 - ❖ Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.118.390.151,00;
 - ❖ Koreksi atas salah catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.958.104,00 atas koreksi Aset Tetap;
 - Kec. Comal ekuitas bertambah sebesar Rp2.147.917,00 karena koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin;
 - Bakesbangpol ekuitas bertambah sebesar Rp86.666,00 karena koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin;

No	SKPD	Koreksi Ekuitas Lainnya TA. 2022				Jumlah
		Koreksi Piutang	Koreksi Investasi	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Mutasi Aset antar SKPD	
1	Dindikbud			2.191.245.082,00	48.007.465,00	2.239.252.547,00
2	Dinkes					0,00
3	DPU TR				(117.565.902.815,00)	(117.565.902.815,00)
4	Disperkim					0,00
5	Satpol PP					0,00
6	BPPD					0,00
7	Dinsos KBPP				(10.631.238,00)	(10.631.238,00)
8	Disnaker				(59.122.663,00)	(59.122.663,00)
9	DLH					0,00
10	Disdukcapil					0,00
11	Dinpermasdes					0,00
12	Dishub					0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Koreksi Ekuitas Lainnya TA. 2022				Jumlah
		Koreksi Piutang	Koreksi Investasi	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Mutasi Aset antar SKPD	
13	Diskominfo				(41.651.923,00)	(41.651.923,00)
14	Diskoperindag				(2.569.266.700,00)	(2.569.266.700,00)
15	DPMPTSP				31.399.238,00	31.399.238,00
16	Dinpusarda				2.569.266.700,00	2.569.266.700,00
17	Disperik					0,00
18	Disparpora				137.881.867,00	137.881.867,00
19	Dipertan				137.881.867,00	137.881.867,00
20	Setda				546.497.500,00	546.497.500,00
21	Setwan				117.565.902.815,00	117.565.902.815,00
22	Bappeda					0,00
23	BPKAD	(6.315.099.820,00)			(555.639.970,00)	(6.870.739.790,00)
24	Bapenda				(510.332,00)	(510.332,00)
25	BKD					0,00
26	Inspektorat				41.651.923,00	41.651.923,00
27	Kec. Moga					0,00
28	Kec. Pulosari					0,00
29	Kec. Belik					0,00
30	Kec. Watukumpul					0,00
31	Kec. Bodeh					0,00
32	Kec. Bantarbolang					0,00
33	Kec. Randudongkal					0,00
34	Kec. Pemalang					0,00
35	Kec. Taman					0,00
36	Kec. Petarukan					0,00
37	Kec. Ampelgading					0,00
38	Kec. Comal			2.147.917,00		2.147.917,00
39	Kec. Ulujami					0,00
40	Kec. Warungpring					0,00
41	Bakesbangpol			86.666,00	(275.763.734,00)	(275.677.068,00)
	SKPKD		(14.506.187.538,12)			(14.506.187.538,12)
	Jumlah Total	(6.315.099.820,00)	(14.506.187.538,12)	2.193.479.665,00	-	(18.627.807.693,12)



BAB VI
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN COVID-19

6.1. Penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19

BPBD Kabupaten Pemalang mendapat tugas sebagai OPD Pengampu Belanja Tidak Terduga untuk penanganan covid-19 *berdasarkan* Keputusan Bupati Pemalang Nomor 954/20/Tahun 2022 tentang Penunjukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang Sebagai Pengampu Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Darurat Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

Tugas BPBD Kabupaten Pemalang sesuai Keputusan Bupati tersebut adalah :

1. Melaksanakan koordinasi pengelolaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana alam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Bupati Pemalang.

Pada Tahun Anggaran 2022, BPBD melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Kegiatan BTT untuk Penanganan Covid-19
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	Percepatan vaksinasi dan pengadaan logistik Kab. Pemalang Tahun 2022.	614.000.000,00	614.000.000,00	BPBD
2	Operasi yustisi Bulan Januari 2022.	42.000.000,00	21.000.000,00	SATPOL PP
3	Kegiatan operasi yustisi PPKM level 2 covid-19 bulan Februari 2022 Kab. Pemalang.	84.000.000,00	84.000.000,00	SATPOL PP



4	Kegiatan pembiayaan tempat Isoter Covid-29 di Gedung exs. DPRD Kab. Pemalang.	100.000.000,00	99.400.000,00	BPBD
5	Monitoring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 covid-19 di Kab. Pemalang.	31.000.000,00	30.800.000,00	SATPOL PP
6	Kegiatan pembiayaan posko dan pengadaan logistik penanganan Covid-19 Kabupaten Pemalang Tahun 2022.	411.000.000,00	411.000.000,00	BPBD
7	Kegiatan operasi yustisi PPKM level 3 covid-19 bulan Maret 2022 di Kab. Pemalang.	84.000.000,00	84.000.000,00	SATPOL PP
8	Kegiatan peningkatan penerapan prokes dalam rangka pengendalian penyebaran kasus Covid-19 di Kab. Pemalang.	30.150.000,00	30.150.000,00	SATPOL PP
9	Kegiatan operasi yustisi PPKM level 3 covid-19 bulan April 2022 di Kab. Pemalang.	84.000.000,00	84.000.000,00	SATPOL PP
10	Kegiatan peningkatan penerapan prokes dalam rangka pengendalian	29.970.000,00	29.970.000,00	SATPOL PP



	penyebaran kasus Covid-19 di Kab. Pemalang.			
11	Kegiatan pembiayaan posko-posko pengetatan arus mudik dan arus balik lebaran 1443 H Pencegahan Covid-19 dan Posko Induk Penanganan Covid-19 di Kab. Pemalang.	222.560.000,00	222.560.000,00	BPBD
12	Kegiatan Operasi Yustisi PPKM level 2 Bulan Mei 2022 di Kabupaten Pemalang Tahun 2022.	42.750.000,00	42.750.000,00	SATPOL PP
13	Rencana kebutuhan belanja kegiatan penanganan covid-19 di Kabupaten Pemalang.	29.560.000,00	29.560.000,00	BPBD
14	Kegiatan Posko penanganan Covid-19, Pembongkaran dan Perapihan Posko Covid-19 Pendopo di Kab. Pemalang.	11.450.000,00	11.450.000,00	BPBD
15	Kegiatan Posko penanganan Covid-19, Biaya pemakaman jenazah Covid-19 dan Biaya pembuatan posko pengendalian Covid-19 dalam rangka pengamanan Natal Tahun	194.608.500,00	194.608.500,00	BPBD



	2022 dan Tahun Baru 2023 di Kab. Pemalang.			
	TOTAL	2.011.048.500,00	1.989.248.500,00	

Total anggaran BTT penanganan Covid-19 sebesar Rp2.011.048.500,00 (dua milyar sebelas juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah dengan realisasi sebesar Rp1.989.248.500,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Anggaran tersebut sebesar Rp1.583.178.500,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dibelanjakan oleh BPBD sedangkan sebesar Rp427.870.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibelanjakan oleh SATPOL PP.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD yaitu pembiayaan posko covid, pembiayaan posko arus mudik dan balik lebaran serta tahun baru, termasuk juga pembiayaan pemakaman korban covid-19 selama tahun 2022. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh SATPOL PP meliputi kegiatan-kegiatan berupa operasi yustisi, mikro PPKM, serta peningkatan penerapan prokes dalam rangka pengendalian penyebaran kasus Covid-19.



BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

7.1. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pemalang berdomisili di Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundangan ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950.

7.1.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, terdapat rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.”*** Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan visi Kabupaten Pemalang tersebut, mengandung penjelasan sebagai berikut:

1. **Adil**; merupakan keadaan/ kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia, sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup. Politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. **Makmur**; merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya;
3. **Agamis**; merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.
4. **Ngangeni**; merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang aman, tenteram dan damai. Didukung modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung, sehingga siapapun merasa betah saat berada di Pemalang dan kangen ingin ke Pemalang saat berada di luar wilayah Pemalang.

7.1.2. Misi

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk mencapai visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu:



1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Untuk mengimplementasikan visi dan misinya, Pemerintah Kabupaten Pemalang menentukan langkah-langkah kebijakan pembangunan daerah yang bersifat lebih operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, Tabel 7.1 menjelaskan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	
Meningkatkan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari: a. ancaman politik; b. ancaman bencana; dan c. ancaman ketertiban dan ketentraman perlindungan masyarakat.	• Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah • Meningkatnya kualitas penanganan bencana
Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	
Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya Birokrasi Kapabel • Meningkatnya pelayanan publik yang prima
Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong	
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	• Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan



Tujuan	Sasaran
Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa	• Meningkatnya pelestarian budaya • Meningkatnya kualitas budaya literasi di masyarakat • Meningkatnya solidaritas keagamaan
Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran
Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan	
Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	• Meningkatnya kemandirian desa • Terwujudnya pengembangan Kota
Misi 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal	
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam upaya kemandirian ekonomi daerah	• Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal • Meningkatnya realisasi penanaman modal
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	• Meningkatnya cakupan universal akses • Meningkatnya konektivitas antar wilayah • Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air • Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang • Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan

7.1.3. Program Unggulan

Selain rumusan Misi beberapa program unggulan juga diharapkan dapat menjadi upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

- 1 Pengembangan Desa Wisata (DEWI), merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Pemalang telah melakukan evaluasi Desa Wisata yang telah ber SK, melakukan pendampingan Desa Wisata dengan peningkatan kapasitas



pelaku wisata melalui caverter, membuat paket wisata edukasi dan pengukuhan forum komunikasi Desa Wisata dan Pokdarwis Kabupaten Pemalang 2022-2026.

- 2 Pengembangan Desa Digital (DEDI), merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Pemalang dalam memenuhi pengembangan Desa Digital telah melakukan pemasangan infrastruktur telekomunikasi pada 27 titik blankspot (Desa Wisata)

- 3 Pengembangan Desa Sinergi (DESI), merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

Untuk pengembangan desa sinergi dilakukan dengan membentuk badan kerja sama antar desa (BUMDESMA). Sampai dengan saat ini, empat kawasan pedesaan telah terbentuk yaitu kawasan melati di Kecamatan Ulujami, kawasan agrobisnis dan kopi di Kecamatan Pulosari, kawasan nanas di Kecamatan Belik dan kawasan gedang di Kecamatan Bodeh. Pada Tahun 2022 Kabupaten Pemalang telah melakukan proses pembentukan satu kawasan baru berupa kawasan pertanian di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Petarukan.

- 4 Pengembangan Kota Industri (KOIN), merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Pemalang melaksanakan Analisis Kelayakan Finansial (NPV dan FIRR)/Analisis Kelayakan Kawasan Industri, penyusunan Sistem Informasi Industri Pemalang (SIIPEL) sebagai sebuah sistem yang memberikan informasi tentang industri di Kabupaten Pemalang, dan memfasilitasi merk bagi 23 Industri Kecil dan Menengah.

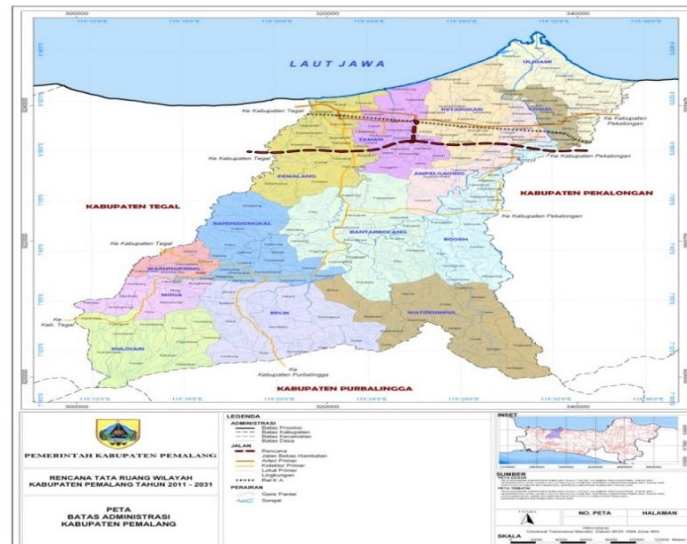
7.2. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur transportasi pantai utara (pantura) Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 6° 52' 30" dan 7° 20' 11" lintang selatan (LS) dan antara 109° 17' 30" - 109° 40' 30" bujur timur (BT). Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.



Gambar 7.1
Peta Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber : RTRW Kabupaten Pemalang 2018-2038

Kabupaten Pemalang berdasarkan wilayah administratif terdiri dari 14 kecamatan dan 11 kelurahan, serta 212 desa. Sedangkan jumlah dusun / lingkungan yang ada di seluruh desa dan kelurahan adalah 841 yang terdiri dari 6.470 RT dan 1.307 RW.

Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan topografi berada pada dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Dataran pantai adalah daerah dengan ketinggian 1-5 meter di atas permukaan laut. Dataran ini terdapat di beberapa bagian utara Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dataran rendah adalah daerah dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut dimana daerah ini juga terletak di kawasan utara. Daerah dataran tinggi adalah daerah dengan ketinggian 16-212 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian tengah dan selatan Kabupaten Pemalang. Sedangkan daerah pegunungan adalah daerah dengan ketinggian 213-925 meter di atas permukaan laut yang umumnya terletak di bagian selatan Kabupaten Pemalang.

Dari aspek geologis, jenis tanah di wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari tanah *alluvial*, *regosol* dan *latosol*. Tanah *alluvial* umumnya terletak di dataran rendah, sedangkan *regosol* adalah batu-batuan pasir dan intermedier yang terdapat di daerah perbukitan sampai pegunungan. Jenis yang terakhir adalah tanah *latasol* yang terdiri dari batu bekuan pasir dan banyak terdapat di daerah bukit sampai pegunungan. Pemanfaatan tanah di Kabupaten Pemalang sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

7.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kabupaten Pemalang yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan dan



proyeksi yang digunakan adalah berdasarkan sensus penduduk oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, mulai Tahun 1961 sampai dengan 2020.

Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Pemalang, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebesar 1.500.754 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 760.798 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 739.956 jiwa. Secara berurutan, Tabel 7.2 dan Gambar 7.2 menjelaskan jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2022.

Tabel 7.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan Tahun 2022

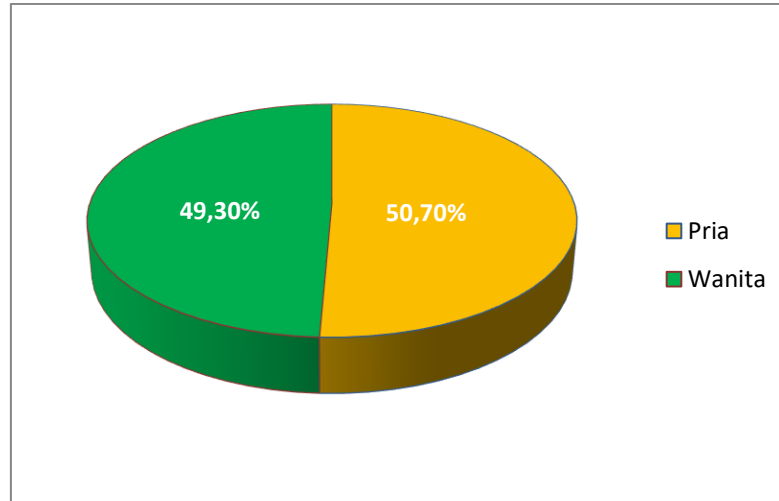
No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Kecamatan Ampelgading	38.037	37.958	75.995
2	Kecamatan Bantarbolang	44.444	43.152	87.596
3	Kecamatan Belik	61.759	59.151	120.910
4	Kecamatan Bodeh	32.074	31.285	63.359
5	Kecamatan Comal	47.972	47.159	95.131
6	Kecamatan Moga	37.745	36.608	74.353
7	Kecamatan Pemalang	103.533	100.991	204.524
8	Kecamatan Petarukan	87.619	85.478	173.097
9	Kecamatan Pulosari	31.705	30.955	62.660
10	Kecamatan Randudongkal	56.891	55.893	112.784
11	Kecamatan Taman	97.241	94.526	191.767
12	Kecamatan Ulujami	58.923	57.266	116.189
13	Kecamatan Watukumpul	40.069	37.725	77.794
14	Kecamatan Warungpring	22.786	21.809	44.595
	Jumlah	760.798	739.956	1.500.754

Sumber : BPS Kab. Pemalang Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 7.2 diatas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Pemalang menurut jenis kelamin hampir berimbang yaitu perempuan 739,956 penduduk dan laki-laki 760,798 penduduk. Secara ringkas, proporsi atau persentase penduduk perempuan dan laki-laki masing-masing adalah 49,30% dan 50,70% sebagaimana disajikan pada Gambar 7.2



Gambar 7.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



Tabel 7.3 dan Gambar 7.3 adalah representasi jumlah dan persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin dan per kelompok umur.

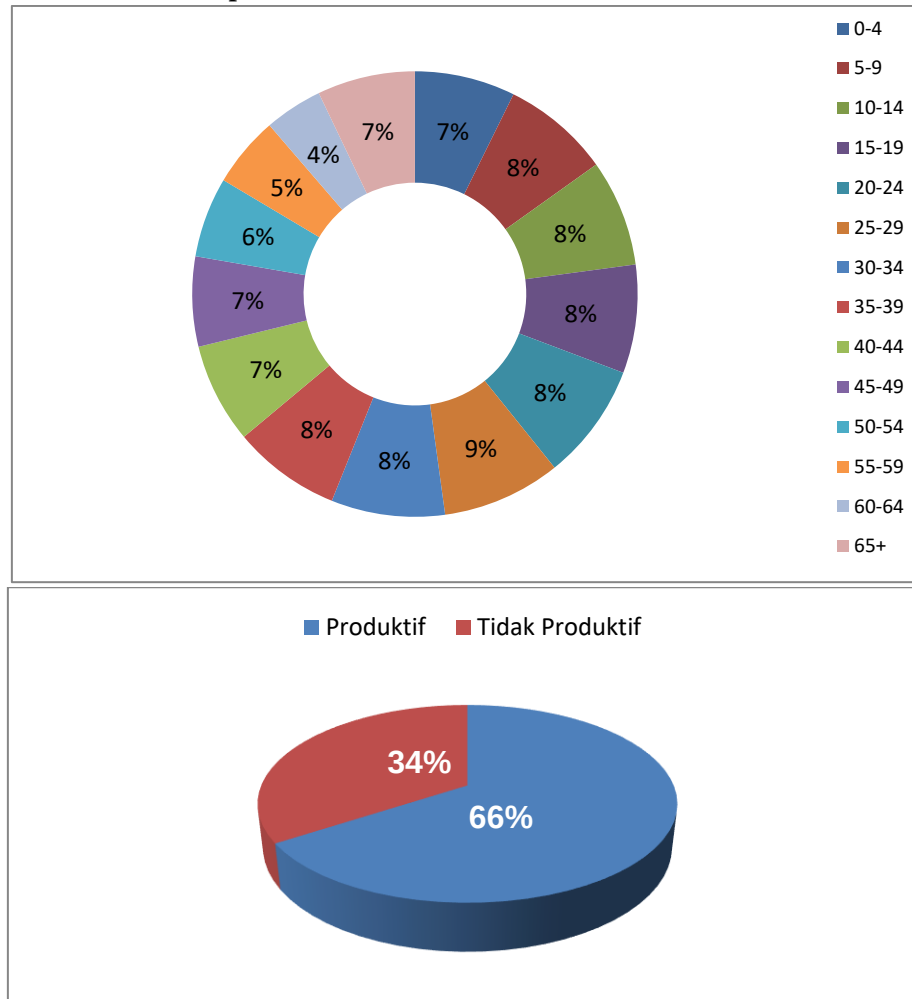
Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	0-4	56.220	53.319	109.539
2	5-9	60.207	57.312	117.519
3	10-14	59.658	56.599	116.257
4	15-19	61.150	56.962	118.112
5	20-24	65.857	61.216	127.073
6	25-29	66.881	62.435	129.316
7	30-34	64.617	59.267	123.884
8	35-39	60.412	57.259	117.671
9	40-44	55.290	53.809	109.099
10	45-49	48.393	49.489	97.882
11	50-54	42.887	44.482	87.369
12	55-59	37.484	39.645	77.129
13	60-64	30.580	32.727	63.307
14	65+	51.162	55.435	106.597
	Jumlah	760.798	739.956	1.500.754

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2022



Gambar 7.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang
Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif Tahun 2022



Data persentase pada Gambar 7.3 mengindikasikan bahwa Kabupaten Pemalang (Tahun 2022) mempunyai penduduk dengan usia produktif (15-60 tahun) yang cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa jumlah angkatan kerja untuk Kabupaten Pemalang juga cukup besar.

3. Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang menurut kecamatan dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 bahwa Kecamatan Bantarbolang memiliki proyeksi pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 1,555 % dan Kecamatan Comal memiliki proyeksi pertumbuhan yang paling rendah yaitu 0,436%. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 7.4 dibawah ini :



Tabel 7.4
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan
(Laki-laki dan Perempuan) dari 2021 ke 2022

Kecamatan	Dalam persentase (%)
	2021-2022
Moga	1,176
Warungpring	1,045
Pulosari	0,840
Belik	1,078
Watukumpul	1,371
Bodeh	1,137
Bantarbolang	1,555
Randudongkal	1,129
Pemalang	1,031
Taman	1,267
Petarukan	1,249
Ampelgading	0,987
Comal	0,436
Ulujami	1,102
Rata-rata	1,176

Sumber : BPS Kab. Pemalang Tahun 2022

Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebanyak 10.544 orang, yang terdiri dari:

CPNS	:	25 orang
PNS	:	8.835 orang
PPPK	:	1.684 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang (PNS dan CPNS) sebanyak 8860 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.113 orang sedangkan perempuan sebanyak 4.747 orang. Tabel 7.5 adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 4 kategori yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan, dan usia.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kategori
Tahun 2022

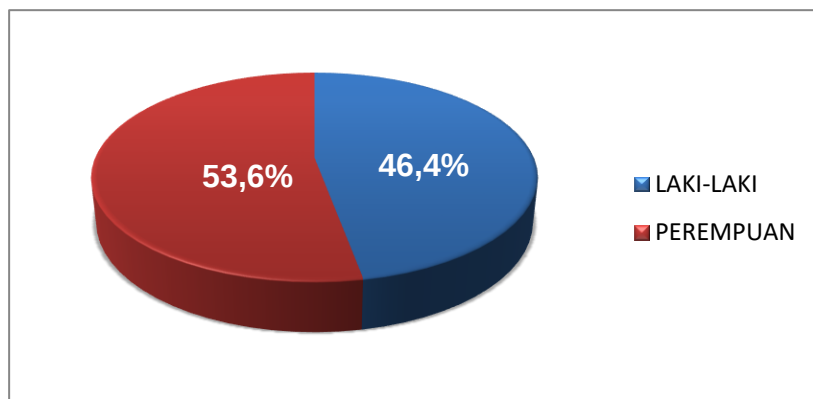
Kategori	Kelompok	Jumlah	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	4113 orang	
	PEREMPUAN	4747 orang	
Jumlah			8860 orang
GOLONGAN	I/b	-	
	I/c	2 orang	
	I/d	189 orang	
	II/a	98 orang	
	II/b	301 orang	
	II/c	314 orang	
	II/d	673 orang	
	III/a	1043 orang	
	III/b	1735 orang	
	III/c	1257 orang	
	III/d	1245 orang	
	IV/a	1599 orang	
	IV/b	356 orang	
	IV/c	46 orang	
	IV/d	2 orang	
	IV/e	-	
Jumlah			8860 orang
PENDIDIKAN	SD	126 orang	
	SMP	288 orang	
	SMA/SMK	1270 orang	
	D1	13 orang	
	D2	54 orang	
	D3	661 orang	
	D4	96 orang	
	S1	5788 orang	
	S2	560 orang	
	S3	4 orang	
Jumlah			8860 orang
USIA	<=25	49 orang	
	26-29	239 orang	
	30-34	401 orang	
	35-39	984 orang	
	40-44	1408 orang	
	45-49	1429 orang	
	>=50	4350 orang	
Jumlah			8860 orang

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Tahun 2022

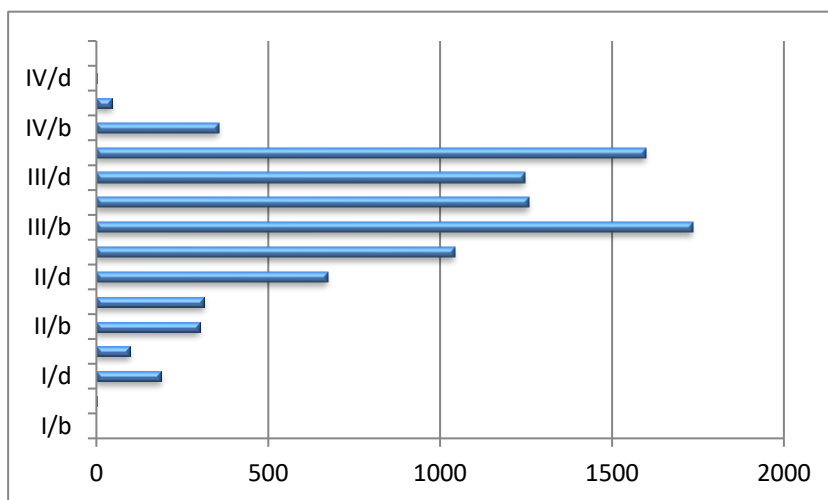


Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dapat dilihat juga dalam persentase seperti ditunjukkan grafik pada Gambar 7.3-7.6 dibawah ini :

Gambar 7.3
Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

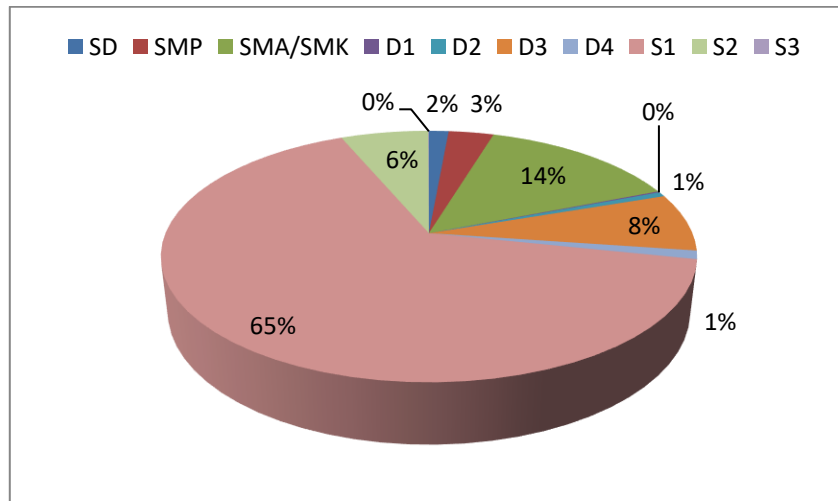


Gambar 7.4
Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan Tahun 2022

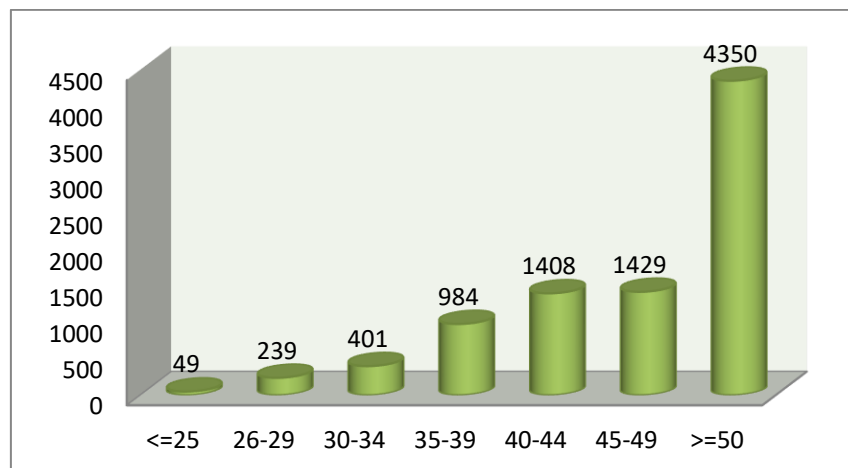




Gambar 7.5
Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022



Gambar 7.6
Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Usia Tahun 2022



berdasarkan Tabel 7.5 dan grafik pada Gambar 7.3-7.6 terdapat empat gambaran atau deskripsi komposisi PND di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sesuai kategori yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan dan usia. *Pertama* jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki, yaitu 4.747 pegawai perempuan dan 4.113 pegawai laki-laki. *Kedua* golongan pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang paling banyak adalah golongan III/B yaitu 1735 pegawai, dan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

paling sedikit golongan I/B, sedangkan IV/e yaitu 0 pegawai. *Ketiga* adalah kategori pendidikan. Berdasarkan kategori pendidikan, pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang didominasi oleh lulusan S1 dengan jumlah 5788 pegawai, dan yang paling sedikit merupakan lulusan S3 yaitu 4 pegawai. *Keempat* adalah pada kategori usia, pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang paling banyak berusia lebih dari sama dengan 50 Tahun yaitu 4350 pegawai, dan yang paling sedikit yaitu 49 pegawai berusia kurang dari sama dengan 25 Tahun.

Tabel 7.6 adalah jumlah PPPK berdasarkan 4 kategori yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan dan usia. Jumlah PPPK di Kabupaten Pemalang sebanyak 1.684 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 611 orang sedangkan perempuan sebanyak 1.073 orang.

Tabel 7.6
Jumlah Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Kategori Tahun 2022

Kategori	Kelompok	Jumlah	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	611 orang	
	PEREMPUAN	1073 orang	
Jumlah			1684 orang
GOLONGAN	Gol V (II/a)	22 orang	
	Gol VI (II/b)	1 orang	
	Gol VII (II/c)	123 orang	
	Gol VIII (II/d)	-	
	Gol IX (III/a)	1533 orang	
	Gol X (IIIb)	5 orang	
Jumlah			1684 orang
PENDIDIKAN	SD	-	
	SMP	-	
	SMA/SMK	22 orang	
	D1	-	
	D2	1 orang	
	D3	122 orang	
	D4	-	
	S1	1539 orang	
	S2	-	
	S3	-	
Jumlah			1684 orang
USIA	<=25	8 orang	
	26-29	126 orang	
	30-34	314 orang	
	35-39	590 orang	
	40-44	447 orang	
	45-49	121 orang	
	>=50	78 orang	
Jumlah			1684 orang

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Tahun 2022



7.4. DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang sebagai acuan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.



BAB VIII

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 akan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD.

Beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi bagi penyelesaian penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 ini dan mohon maaf atas kekurangan yang masih ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah kita membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Pemalang yang kita cintai.





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

LAMPIRAN
SALDO KAS DANA BOS SD NEGERI
TAHUN 2022

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
1	SD N 01 AMBOWETAN	Negeri	Kec. Ulujami	-
2	SD N 01 ASEMDOYONG	Negeri	Kec. Taman	7.200
3	SD N 01 BADAQ	Negeri	Kec. Belik	10.194
4	SD N 01 BANGLARANGAN	Negeri	Kec. Ampelgading	14.769
5	SD N 01 BANJARAN	Negeri	Kec. Taman	6.724
6	SD N 01 BANJARANYAR	Negeri	Kec. Randudongkal	-
7	SD N 01 BANJARDAWA	Negeri	Kec. Taman	-
8	SD N 01 BANJARMULYA	Negeri	Kec. Pemalang	831.943
9	SD N 01 BANJARSARI	Negeri	Kec. Bantarbolang	47.814
10	SD N 01 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
11	SD N 01 BANYUMUDAL	Negeri	Kec. Moga	-
12	SD N 01 BATURSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
13	SD N 01 BEJI	Negeri	Kec. Taman	6.000
14	SD N 01 BELIK	Negeri	Kec. Belik	-
15	SD N 01 BELUK	Negeri	Kec. Belik	1.201
16	SD N 01 BLENDUNG	Negeri	Kec. Ulujami	-
17	SD N 01 BODAS	Negeri	Kec. Watukumpul	-
18	SD N 01 BODEH	Negeri	Kec. Bodeh	390
19	SD N 01 BOJONGBATA	Negeri	Kec. Pemalang	25.010
20	SD N 01 BOJONGNANGKA	Negeri	Kec. Pemalang	351.510
21	SD N 01 BONGAS	Negeri	Kec. Watukumpul	201
22	SD N 01 BOTEKAN	Negeri	Kec. Ulujami	-
23	SD N 01 BULAKAN	Negeri	Kec. Belik	159.200
24	SD N 01 CANGAK	Negeri	Kec. Bodeh	-
25	SD N 01 CAWET	Negeri	Kec. Watukumpul	11.038
26	SD N 01 CIBELOK	Negeri	Kec. Taman	4.068
27	SD N 01 CIBIYUK	Negeri	Kec. Ampelgading	46.550
28	SD N 01 CIBUYUR	Negeri	Kec. Warungpring	15.075
29	SD N 01 CIKADU	Negeri	Kec. Watukumpul	-
30	SD N 01 CIKENDUNG	Negeri	Kec. Pulosari	-
31	SD N 01 CLEKATAKAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
32	SD N 01 DANASARI	Negeri	Kec. Pemalang	47.322

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
33	SD N 01 GAMBUHAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
34	SD N 01 GANDU	Negeri	Kec. Comal	6.000
35	SD N 01 GAPURA	Negeri	Kec. Watukumpul	-
36	SD N 01 GEDEG	Negeri	Kec. Comal	14.969
37	SD N 01 GEMBYANG	Negeri	Kec. Randudongkal	-
38	SD N 01 GENDOWANG	Negeri	Kec. Moga	-
39	SD N 01 GINTUNG	Negeri	Kec. Comal	500
40	SD N 01 GLANDANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	36.272
41	SD N 01 GOMBONG	Negeri	Kec. Belik	10.000
42	SD N 01 GONDANG	Negeri	Kec. Taman	7.007
43	SD N 01 GUNUNGJAYA	Negeri	Kec. Belik	30.000
44	SD N 01 GUNUNGSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
45	SD N 01 GUNUNGTIGA	Negeri	Kec. Belik	-
46	SD N 01 ISER	Negeri	Kec. Petarukan	-
47	SD N 01 JATINGARANG	Negeri	Kec. Bodeh	100.776
48	SD N 01 JATIREJO	Negeri	Kec. Ampelgading	2.286
49	SD N 01 JATIROYOM	Negeri	Kec. Bodeh	10.000
50	SD N 01 JEBED	Negeri	Kec. Taman	20.651
51	SD N 01 JOJOGAN	Negeri	Kec. Watukumpul	-
52	SD N 01 JRAKAH	Negeri	Kec. Taman	4.961
53	SD N 01 KABUNAN	Negeri	Kec. Taman	485
54	SD N 01 KALIGELANG	Negeri	Kec. Taman	-
55	SD N 01 KALIMAS	Negeri	Kec. Randudongkal	-
56	SD N 01 KALIPRAU	Negeri	Kec. Ulujami	-
57	SD N 01 KALIRANDU	Negeri	Kec. Petarukan	-
58	SD N 01 KALITORONG	Negeri	Kec. Randudongkal	-
59	SD N 01 KANDANG	Negeri	Kec. Comal	-
60	SD N 01 KARANGANYAR	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
61	SD N 01 KARANGBRAI	Negeri	Kec. Bodeh	-
62	SD N 01 KARANGMONCOL	Negeri	Kec. Randudongkal	77.044
63	SD N 01 KARANGSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
64	SD N 01 KARANGTALOK	Negeri	Kec. Ampelgading	15.960
65	SD N 01 KARANGTENGAH	Negeri	Kec. Ampelgading	28.690
66	SD N 01 KEBAGUSAN	Negeri	Kec. Ampelgading	36.933



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
67	SD N 01 KEMAJONGAN	Negeri	Kec. Comal	55.500
68	SD N 01 KEBON GEDE	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
69	SD N 01 KEBONDALAM	Negeri	Kec. Pemalang	65.000
70	SD N 01 KEDUNGBANJAR	Negeri	Kec. Taman	-
71	SD N 01 KEJAMBON	Negeri	Kec. Taman	109.023
72	SD N 01 KEJENE	Negeri	Kec. Randudongkal	-
73	SD N 01 KELANGDEPOK	Negeri	Kec. Bodeh	24.946
74	SD N 01 KEMUNING	Negeri	Kec. Ampelgading	3.935
75	SD N 01 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
76	SD N 01 KENDALSARI	Negeri	Kec. Petarukan	-
77	SD N 01 KERTOSARI	Negeri	Kec. Ulujami	-
78	SD N 01 KESESIREJO	Negeri	Kec. Bodeh	-
79	SD N 01 KETAPANG	Negeri	Kec. Ulujami	-
80	SD N 01 KLAREYAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
81	SD N 01 KLEGEN	Negeri	Kec. Comal	-
82	SD N 01 KRAMAT	Negeri	Kec. Pemalang	14.311
83	SD N 01 KREYO	Negeri	Kec. Randudongkal	-
84	SD N 01 KUTA	Negeri	Kec. Belik	-
85	SD N 01 KUTA BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	30.000
86	SD N 01 LAWANGREJO	Negeri	Kec. Pemalang	627.713
87	SD N 01 LIMBANGAN	Negeri	Kec. Ulujami	34.466
88	SD N 01 LODAYA	Negeri	Kec. Randudongkal	-
89	SD N 01 LONING	Negeri	Kec. Petarukan	-
90	SD N 01 LOSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	17.796
91	SD N 01 MAJAKERTA	Negeri	Kec. Watukumpul	186
92	SD N 01 MAJALANGU	Negeri	Kec. Watukumpul	45.192
93	SD N 01 MANDIRAJA	Negeri	Kec. Moga	-
94	SD N 01 MANGLI	Negeri	Kec. Randudongkal	-
95	SD N 01 MEDAYU	Negeri	Kec. Watukumpul	30
96	SD N 01 MEJAGONG	Negeri	Kec. Randudongkal	-
97	SD N 01 MENDELEM	Negeri	Kec. Belik	115.000
98	SD N 01 MENGORI	Negeri	Kec. Pemalang	12.540
99	SD N 01 MERENG	Negeri	Kec. Warungpring	13.253
100	SD N 01 MOGA	Negeri	Kec. Moga	-

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
101	SD N 01 MOJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
102	SD N 01 MULYOHARJO	Negeri	Kec. Pemalang	1.060.027
103	SD N 01 MUNCANG	Negeri	Kec. Bodeh	41.000
104	SD N 01 NYALEMBENG	Negeri	Kec. Pulosari	-
105	SD N 01 PADEK	Negeri	Kec. Ulujami	-
106	SD N 01 PADURAKSA	Negeri	Kec. Pemalang	117.435
107	SD N 01 PAGELARAN	Negeri	Kec. Watukumpul	191.511
108	SD N 01 PAGENTERAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
109	SD N 01 PAGERGUNUNG	Negeri	Kec. Ulujami	-
110	SD N 01 PAKEMBARAN	Negeri	Kec. Warungpring	16.375
111	SD N 01 PAMUTIH	Negeri	Kec. Ulujami	-
112	SD N 01 PANJUNAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
113	SD N 01 PASIR	Negeri	Kec. Bodeh	10.081
114	SD N 01 PAYUNG	Negeri	Kec. Bodeh	-
115	SD N 01 PECANGAKAN	Negeri	Kec. Comal	85.000
116	SD N 01 PEDAGUNG	Negeri	Kec. Bantarbolang	14.854
117	SD N 01 PEDURUNGAN	Negeri	Kec. Taman	31.584
118	SD N 01 PEGIRINGAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	15.000
119	SD N 01 PEGONGSORAN	Negeri	Kec. Pemalang	32.753
120	SD N 01 PEGUNDAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
121	SD N 01 PEGUYANGAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	150
122	SD N 01 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	130.500
123	SD N 01 PENAKIR	Negeri	Kec. Pulosari	-
124	SD N 01 PENDOWO	Negeri	Kec. Bodeh	29.888
125	SD N 01 PENER	Negeri	Kec. Taman	18.150
126	SD N 01 PENGGARIT	Negeri	Kec. Taman	43.217
127	SD N 01 PENUSUPAN	Negeri	Kec. Randudongkal	-
128	SD N 01 PESANTREN	Negeri	Kec. Ulujami	-
129	SD N 01 PESUCEN	Negeri	Kec. Petarukan	-
130	SD N 01 PETANJUNGAN	Negeri	Kec. Petarukan	22.829
131	SD N 01 PLAKARAN	Negeri	Kec. Moga	-
132	SD N 01 PULOSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
133	SD N 01 PURWOHARJO	Negeri	Kec. Comal	43.047
134	SD N 01 PURWOSARI	Negeri	Kec. Comal	9.000
135	SD N 01 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
136	SD N 01 REMBUL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
137	SD N 01 ROWOSARI	Negeri	Kec. Ulujami	18.492
138	SD N 01 SAMONG	Negeri	Kec. Ulujami	-
139	SD N 01 SARADAN	Negeri	Kec. Pemalang	140.955
140	SD N 01 SARWODADI	Negeri	Kec. Comal	10.850
141	SD N 01 SEMAYA	Negeri	Kec. Randudongkal	-
142	SD N 01 SEMINGKIR	Negeri	Kec. Randudongkal	-
143	SD N 01 SERANG	Negeri	Kec. Petarukan	-
144	SD N 01 SEWAKA	Negeri	Kec. Pemalang	41.800
145	SD N 01 SIDOKARE	Negeri	Kec. Ampelgading	83.720
146	SD N 01 SIDOREJO	Negeri	Kec. Comal	-
147	SD N 01 SIKASUR	Negeri	Kec. Belik	30.300
148	SD N 01 SIKAYU	Negeri	Kec. Comal	50.000
149	SD N 01 SIMA	Negeri	Kec. Moga	100.000
150	SD N 01 SIMPUR	Negeri	Kec. Belik	51.000
151	SD N 01 SIRANGKANG	Negeri	Kec. Petarukan	-
152	SD N 01 SIREMENG	Negeri	Kec. Pulosari	-
153	SD N 01 SITEMU	Negeri	Kec. Taman	1.959
154	SD N 01 SOKAWANGI	Negeri	Kec. Taman	7.300
155	SD N 01 SUKOREJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
156	SD N 01 SUMBERHARJO	Negeri	Kec. Pemalang	381.260
157	SD N 01 SUMURKIDANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
158	SD N 01 SUNGAPAN	Negeri	Kec. Pemalang	187.066
159	SD N 01 SURAJAYA	Negeri	Kec. Pemalang	10.837
160	SD N 01 SURU	Negeri	Kec. Bantarbolang	21.129
161	SD N 01 TAMAN	Negeri	Kec. Taman	-
162	SD N 01 TAMBAREJO	Negeri	Kec. Pemalang	36.441
163	SD N 01 TAMBI	Negeri	Kec. Watukumpul	109.250
164	SD N 01 TANAHBAYA	Negeri	Kec. Randudongkal	-
165	SD N 01 TANJUNGSARI	Negeri	Kec. Pemalang	349.941
166	SD N 01 TASIKREJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
167	SD N 01 TEGALMLATI	Negeri	Kec. Petarukan	-
168	SD N 01 TEGALSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	42.165
169	SD N 01 TEMUIRENG	Negeri	Kec. Petarukan	-
170	SD N 01 TLAGASANA	Negeri	Kec. Watukumpul	500

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
171	SD N 01 TUMBAL	Negeri	Kec. Comal	20.000
172	SD N 01 TUNDAGAN	Negeri	Kec. Watukumpul	712
173	SD N 01 UJUNGGEDE	Negeri	Kec. Ampelgading	15.324
174	SD N 01 WALANGSANGA	Negeri	Kec. Moga	-
175	SD N 01 WANAMULYA	Negeri	Kec. Pemalang	9.185
176	SD N 01 WANARATA	Negeri	Kec. Bantarbolang	384.512
177	SD N 01 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	136.023
178	SD N 01 WANGKELANG	Negeri	Kec. Moga	-
179	SD N 01 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	321.437
180	SD N 01 WATUKUMPUL	Negeri	Kec. Watukumpul	406.451
181	SD N 01 WIDODAREN	Negeri	Kec. Petarukan	-
182	SD N 01 WIDURI	Negeri	Kec. Pemalang	53.917
183	SD N 01 WISNU	Negeri	Kec. Watukumpul	-
184	SD N 01 WIYOROWETAN	Negeri	Kec. Ulujami	-
185	SD N 01 WONOGIRI	Negeri	Kec. Ampelgading	2.245
186	SD N 01 WONOKROMO	Negeri	Kec. Comal	10.000
187	SD N 02 AMBOWETAN	Negeri	Kec. Ulujami	-
188	SD N 02 AMPELGADING	Negeri	Kec. Ampelgading	-
189	SD N 02 ASEMDOYONG	Negeri	Kec. Taman	14.200
190	SD N 02 BADAQ	Negeri	Kec. Belik	-
191	SD N 02 BANGLARANGAN	Negeri	Kec. Ampelgading	30.000
192	SD N 02 BANJARAN	Negeri	Kec. Taman	6.508
193	SD N 02 BANJARANYAR	Negeri	Kec. Randudongkal	1.352.063
194	SD N 02 BANJARDAWA	Negeri	Kec. Taman	970.331
195	SD N 02 BANJARMULYA	Negeri	Kec. Pemalang	26.000
196	SD N 02 BANJARSARI	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
197	SD N 02 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
198	SD N 02 BANYUMUDAL	Negeri	Kec. Moga	20.000
199	SD N 02 BATURSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
200	SD N 02 BEJI	Negeri	Kec. Taman	58.000
201	SD N 02 BELIK	Negeri	Kec. Belik	-
202	SD N 02 BELUK	Negeri	Kec. Belik	-
203	SD N 02 BLENDUNG	Negeri	Kec. Ulujami	-
204	SD N 02 BLIMBING	Negeri	Kec. Ampelgading	34.720



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
205	SD N 02 BODAS	Negeri	Kec. Watukumpul	256
206	SD N 02 BOJONGBATA	Negeri	Kec. Pemalang	234.968
207	SD N 02 BOJONGNANGKA	Negeri	Kec. Pemalang	73.940
208	SD N 02 BONGAS	Negeri	Kec. Watukumpul	943
209	SD N 02 BOTEKAN	Negeri	Kec. Ulujami	264
210	SD N 02 BULU	Negeri	Kec. Petarukan	-
211	SD N 02 BUMIREJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
212	SD N 02 CANGAK	Negeri	Kec. Bodeh	60.000
213	SD N 02 CAWET	Negeri	Kec. Watukumpul	207.500
214	SD N 02 CIBIYUK	Negeri	Kec. Ampelgading	10.500
215	SD N 02 CIBUYUR	Negeri	Kec. Warungpring	22.786
216	SD N 02 CIKENDUNG	Negeri	Kec. Pulosari	-
217	SD N 02 CLEKATAKAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
218	SD N 02 DANASARI	Negeri	Kec. Pemalang	885.037
219	SD N 02 GAMBUIHAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
220	SD N 02 GANDU	Negeri	Kec. Comal	1.000
221	SD N 02 GAPURA	Negeri	Kec. Watukumpul	244
222	SD N 02 GEDEG	Negeri	Kec. Comal	10.000
223	SD N 02 GEMBYANG	Negeri	Kec. Randudongkal	-
224	SD N 02 GENDOWANG	Negeri	Kec. Moga	-
225	SD N 02 GLANDANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	25.200
226	SD N 02 GOMBONG	Negeri	Kec. Belik	-
227	SD N 02 GONDANG	Negeri	Kec. Taman	2.785
228	SD N 02 GUNUNGJAYA	Negeri	Kec. Belik	60.540
229	SD N 02 GUNUNGSARI	Negeri	Kec. Pulosari	300
230	SD N 02 GUNUNGTIGA	Negeri	Kec. Belik	-
231	SD N 02 ISER	Negeri	Kec. Petarukan	-
232	SD N 02 JATINGARANG	Negeri	Kec. Bodeh	-
233	SD N 02 JATIREJO	Negeri	Kec. Ampelgading	421.955
234	SD N 02 JATIROYOM	Negeri	Kec. Bodeh	-
235	SD N 02 JEBED	Negeri	Kec. Taman	126.130
236	SD N 02 JRAKAH	Negeri	Kec. Taman	3.360
237	SD N 02 KABUNAN	Negeri	Kec. Taman	15.281
238	SD N 02 KALIGELANG	Negeri	Kec. Taman	-
239	SD N 02 KALIMAS	Negeri	Kec. Randudongkal	-

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
240	SD N 02 KALIPRAU	Negeri	Kec. Ulujami	-
241	SD N 02 KALIRANDU	Negeri	Kec. Petarukan	-
242	SD N 02 KALITORONG	Negeri	Kec. Randudongkal	-
243	SD N 02 KANDANG	Negeri	Kec. Comal	-
244	SD N 02 KARANGANYAR	Negeri	Kec. Bantarbolang	2.327
245	SD N 02 KARANGASEM	Negeri	Kec. Petarukan	-
246	SD N 02 KARANGBRAI	Negeri	Kec. Bodeh	-
247	SD N 02 KARANGMONCOL	Negeri	Kec. Randudongkal	11.800
248	SD N 02 KARANGSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
249	SD N 02 KARANGTALOK	Negeri	Kec. Ampelgading	118.749
250	SD N 02 KARANGTENGGAH	Negeri	Kec. Ampelgading	10.332
251	SD N 02 KEBAGUSAN	Negeri	Kec. Ampelgading	-
252	SD N 02 KEBOJONGAN	Negeri	Kec. Comal	10.000
253	SD N 02 KEBON GEDE	Negeri	Kec. Bantarbolang	62.950
254	SD N 02 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	1.300.094
255	SD N 02 KEDUNGBANJAR	Negeri	Kec. Taman	2.344
256	SD N 02 KEJAMBON	Negeri	Kec. Taman	54.990
257	SD N 02 KEJENE	Negeri	Kec. Randudongkal	-
258	SD N 02 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
259	SD N 02 KENDALSARI	Negeri	Kec. Petarukan	1.757
260	SD N 02 KERTOSARI	Negeri	Kec. Ulujami	-
261	SD N 02 KESSESIREJO	Negeri	Kec. Bodeh	-
262	SD N 02 KETAPANG	Negeri	Kec. Ulujami	40.211
263	SD N 02 KLEGEN	Negeri	Kec. Comal	10.000
264	SD N 02 KRAMAT	Negeri	Kec. Pemalang	12.482
265	SD N 02 KREYO	Negeri	Kec. Randudongkal	-
266	SD N 02 KUTA	Negeri	Kec. Belik	11.000
267	SD N 02 KUTA BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	24.000
268	SD N 02 LAWANGREJO	Negeri	Kec. Pemalang	104.502
269	SD N 02 LIMBANGAN	Negeri	Kec. Ulujami	20.000
270	SD N 02 LODAYA	Negeri	Kec. Randudongkal	-
271	SD N 02 LONGKEYANG	Negeri	Kec. Bodeh	-
272	SD N 02 LONING	Negeri	Kec. Petarukan	-
273	SD N 02 LOSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	102.926



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
274	SD N 02 MAJAKERTA	Negeri	Kec. Watukumpul	5.174
275	SD N 02 MAJALANGU	Negeri	Kec. Watukumpul	338
276	SD N 02 MANDIRAJA	Negeri	Kec. Moga	518.900
277	SD N 02 MANGLI	Negeri	Kec. Randudongkal	-
278	SD N 02 MEDAYU	Negeri	Kec. Watukumpul	-
279	SD N 02 MENDELEM	Negeri	Kec. Belik	14.747
280	SD N 02 MENGORI	Negeri	Kec. Pemalang	65.000
281	SD N 02 MERENG	Negeri	Kec. Warungpring	108.065
282	SD N 02 MOGA	Negeri	Kec. Moga	-
283	SD N 02 MOJO	Negeri	Kec. Ulujami	10
284	SD N 02 MULYOHARJO	Negeri	Kec. Pemalang	21.182
285	SD N 02 MUNCANG	Negeri	Kec. Bodeh	58.014
286	SD N 02 NYALEMBENG	Negeri	Kec. Pulosari	-
287	SD N 02 PADEK	Negeri	Kec. Ulujami	-
288	SD N 02 PADURAKSA	Negeri	Kec. Pemalang	168.483
289	SD N 02 PAGELARAN	Negeri	Kec. Watukumpul	141
290	SD N 02 PAGERGUNUNG	Negeri	Kec. Ulujami	340.000
291	SD N 02 PAKEMBARAN	Negeri	Kec. Warungpring	82.614
292	SD N 02 PAMUTIH	Negeri	Kec. Ulujami	-
293	SD N 02 PANJUNAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
294	SD N 02 PASIR	Negeri	Kec. Bodeh	60.000
295	SD N 02 PAYUNG	Negeri	Kec. Bodeh	13.419
296	SD N 02 PECANGAKAN	Negeri	Kec. Comal	10.000
297	SD N 02 PEDAGUNG	Negeri	Kec. Bantarbolang	185.967
298	SD N 02 PEDURUNGAN	Negeri	Kec. Taman	14.564
299	SD N 02 PEGIRINGAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	14.796
300	SD N 02 PEGONGSORAN	Negeri	Kec. Pemalang	46.375
301	SD N 02 PEGUNDAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
302	SD N 02 PEGUYANGAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	10.854
303	SD N 02 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	71.475
304	SD N 02 PENAKIR	Negeri	Kec. Pulosari	-
305	SD N 02 PENER	Negeri	Kec. Taman	4.530
306	SD N 02 PENGGARIT	Negeri	Kec. Taman	4.983
307	SD N 02 PENUSUPAN	Negeri	Kec. Randudongkal	300
308	SD N 02 PESANTREN	Negeri	Kec. Ulujami	-

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
309	SD N 02 PESUCEN	Negeri	Kec. Petarukan	-
310	SD N 02 PETARUKAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
311	SD N 02 PLAKARAN	Negeri	Kec. Moga	-
312	SD N 02 PULOSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
313	SD N 02 PURWOHARJO	Negeri	Kec. Comal	45.000
314	SD N 02 PURWOSARI	Negeri	Kec. Comal	139.991
315	SD N 02 Randudongkal	Negeri	Kec. Randudongkal	-
316	SD N 02 REMBUL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
317	SD N 02 ROWOSARI	Negeri	Kec. Ulujami	-
318	SD N 02 SAMONG	Negeri	Kec. Ulujami	-
319	SD N 02 SARADAN	Negeri	Kec. Pemalang	41.363
320	SD N 02 SARWODADI	Negeri	Kec. Comal	-
321	SD N 02 SEMAYA	Negeri	Kec. Randudongkal	50.000
322	SD N 02 SEMINGKIR	Negeri	Kec. Randudongkal	-
323	SD N 02 SERANG	Negeri	Kec. Petarukan	-
324	SD N 02 SEWAKA	Negeri	Kec. Pemalang	16.283
325	SD N 02 SIDOKARE	Negeri	Kec. Ampelgading	10.247
326	SD N 02 SIDOREJO	Negeri	Kec. Comal	10.450
327	SD N 02 SIKASUR	Negeri	Kec. Belik	48.650
328	SD N 02 SIKAYU	Negeri	Kec. Comal	39.500
329	SD N 02 SIMA	Negeri	Kec. Moga	-
330	SD N 02 SIMPUR	Negeri	Kec. Belik	21.093
331	SD N 02 SIRANGKANG	Negeri	Kec. Petarukan	-
332	SD N 02 SITEMU	Negeri	Kec. Taman	2.321
333	SD N 02 SOKAWANGI	Negeri	Kec. Taman	-
334	SD N 02 SOKAWATI	Negeri	Kec. Ampelgading	48.280
335	SD N 02 SUKOREJO	Negeri	Kec. Ulujami	20.000
336	SD N 02 SUMBERHARJO	Negeri	Kec. Pemalang	314.969
337	SD N 02 SUMURKIDANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
338	SD N 02 SURAJAYA	Negeri	Kec. Pemalang	153
339	SD N 02 SURU	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
340	SD N 02 SUSUKAN	Negeri	Kec. Comal	10.000
341	SD N 02 TAMAN	Negeri	Kec. Taman	-
342	SD N 02 TAMBAKREJO	Negeri	Kec. Pemalang	174.666
343	SD N 02 TAMBI	Negeri	Kec. Watukumpul	123.200



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
344	SD N 02 TANAHBAYA	Negeri	Kec. Randudongkal	-
345	SD N 02 TANJUNGSARI	Negeri	Kec. Pemalang	23.171
346	SD N 02 TASIKREJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
347	SD N 02 TEGALMLATI	Negeri	Kec. Petarukan	-
348	SD N 02 TEGALSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	4.867
349	SD N 02 TEMUIRENG	Negeri	Kec. Petarukan	-
350	SD N 02 TLAGASANA	Negeri	Kec. Watukumpul	74.700
351	SD N 02 TUMBAL	Negeri	Kec. Comal	16.550
352	SD N 02 TUNDAGAN	Negeri	Kec. Watukumpul	2.632.138
353	SD N 02 UJUNGGEDE	Negeri	Kec. Ampelgading	46.048
354	SD N 02 WALANGSANGA	Negeri	Kec. Moga	-
355	SD N 02 WANAMULYA	Negeri	Kec. Pemalang	8.463
356	SD N 02 WANARATA	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
357	SD N 02 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	173.648
358	SD N 02 WANGKELANG	Negeri	Kec. Moga	-
359	SD N 02 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	78.442
360	SD N 02 WIDODAREN	Negeri	Kec. Petarukan	-
361	SD N 02 WIDURI	Negeri	Kec. Pemalang	300.418
362	SD N 02 WISNU	Negeri	Kec. Watukumpul	-
363	SD N 02 WIYOROWETAN	Negeri	Kec. Ulujami	-
364	SD N 02 WONOGIRI	Negeri	Kec. Ampelgading	3.344
365	SD N 02 WONOKROMO	Negeri	Kec. Comal	10.000
366	SD N 03 AMPELGADING	Negeri	Kec. Ampelgading	36.000
367	SD N 03 ASEMDOYONG	Negeri	Kec. Taman	-
368	SD N 03 BADAQ	Negeri	Kec. Belik	79.445
369	SD N 03 BANJARAN	Negeri	Kec. Taman	618
370	SD N 03 BANJARMULYA	Negeri	Kec. Pemalang	1.780.300
371	SD N 03 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
372	SD N 03 BANYUMUDAL	Negeri	Kec. Moga	23.722
373	SD N 03 BATURSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
374	SD N 03 BEJI	Negeri	Kec. Taman	13.900
375	SD N 03 BELIK	Negeri	Kec. Belik	-
376	SD N 03 BELUK	Negeri	Kec. Belik	1.269.954
377	SD N 03 BLENDUNG	Negeri	Kec. Ulujami	-

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
378	SD N 03 BODAS	Negeri	Kec. Watukumpul	6.500
379	SD N 03 BOJONGBATA	Negeri	Kec. Pemalang	30.712
380	SD N 03 BOJONGNANGKA	Negeri	Kec. Pemalang	102.204
381	SD N 03 BONGAS	Negeri	Kec. Watukumpul	-
382	SD N 03 BULAKAN	Negeri	Kec. Belik	21.080
383	SD N 03 BULU	Negeri	Kec. Petarukan	-
384	SD N 03 CIBELOK	Negeri	Kec. Taman	2.460
385	SD N 03 CIBUYUR	Negeri	Kec. Warungpring	50.000
386	SD N 03 CIKADU	Negeri	Kec. Watukumpul	847
387	SD N 03 CIKENDUNG	Negeri	Kec. Pulosari	969
388	SD N 03 CLEKATAKAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
389	SD N 03 DANASARI	Negeri	Kec. Pemalang	50.317
390	SD N 03 GAMBUHAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
391	SD N 03 GENDOWANG	Negeri	Kec. Moga	-
392	SD N 03 GOMBONG	Negeri	Kec. Belik	-
393	SD N 03 GUNUNGJAYA	Negeri	Kec. Belik	394.349
394	SD N 03 GUNUNGSARI	Negeri	Kec. Pulosari	-
395	SD N 03 JATINGARANG	Negeri	Kec. Bodeh	-
396	SD N 03 JATIREJO	Negeri	Kec. Ampelgading	794
397	SD N 03 JEBED	Negeri	Kec. Taman	47.300
398	SD N 03 JOJOGAN	Negeri	Kec. Watukumpul	47.115
399	SD N 03 JRAKAH	Negeri	Kec. Taman	5.436
400	SD N 03 KABUNAN	Negeri	Kec. Taman	53.000
401	SD N 03 KALIGELANG	Negeri	Kec. Taman	45.554
402	SD N 03 KALIPRAU	Negeri	Kec. Ulujami	-
403	SD N 03 KALIRANDU	Negeri	Kec. Petarukan	-
404	SD N 03 KALITORONG	Negeri	Kec. Randudongkal	-
405	SD N 03 KARANGANYAR	Negeri	Kec. Bantarbolang	200
406	SD N 03 KARANGASEM	Negeri	Kec. Petarukan	-
407	SD N 03 KARANGBRAI	Negeri	Kec. Bodeh	30.333
408	SD N 03 KARANGSARI	Negeri	Kec. Pulosari	1.716.339
409	SD N 03 KARANGTALOK	Negeri	Kec. Ampelgading	365
410	SD N 03 KEBAGUSAN	Negeri	Kec. Ampelgading	53.105
411	SD N 03 Kebojongan	Negeri	Kec. Comal	10.000



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
412	SD N 03 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	9.000
413	SD N 03 KEDUNGBANJAR	Negeri	Kec. Taman	2
414	SD N 03 KEJENE	Negeri	Kec. Randudongkal	10.949
415	SD N 03 KELANGDEPOK	Negeri	Kec. Bodeh	56.969
416	SD N 03 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
417	SD N 03 KENDALSARI	Negeri	Kec. Petarukan	938.652
418	SD N 03 KESESIREJO	Negeri	Kec. Bodeh	10.054
419	SD N 03 Ketapang	Negeri	Kec. Ulujami	-
420	SD N 03 KLAREYAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
421	SD N 03 KREYO	Negeri	Kec. Randudongkal	-
422	SD N 03 KUTA	Negeri	Kec. Belik	-
423	SD N 03 LIMBANGAN	Negeri	Kec. Ulujami	-
424	SD N 03 LONGKEYANG	Negeri	Kec. Bodeh	-
425	SD N 03 LOSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	12.510
426	SD N 03 Majakerta	Negeri	Kec. Watukumpul	1.535
427	SD N 03 MAJALANGU	Negeri	Kec. Watukumpul	90.499
428	SD N 03 MANDIRAJA	Negeri	Kec. Moga	-
429	SD N 03 MENDELEM	Negeri	Kec. Belik	2.749
430	SD N 03 MENGORI	Negeri	Kec. Pemalang	570
431	SD N 03 MERENG	Negeri	Kec. Warungpring	83.695
432	SD N 03 MOJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
433	SD N 03 MULYOHARJO	Negeri	Kec. Pemalang	61.432
434	SD N 03 MUNCANG	Negeri	Kec. Bodeh	62.751
435	SD N 03 PADURAKSA	Negeri	Kec. Pemalang	59.151
436	SD N 03 PAGERGUNUNG	Negeri	Kec. Ulujami	-
437	SD N 03 PAMUTIH	Negeri	Kec. Ulujami	40.898
438	SD N 03 PECANGAKAN	Negeri	Kec. Comal	75.601
439	SD N 03 PEDAGUNG	Negeri	Kec. Bantarbolang	52.915
440	SD N 03 PEDURUNGAN	Negeri	Kec. Taman	26.620
441	SD N 03 PEGIRINGAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	10.500
442	SD N 03 PEGONGSORAN	Negeri	Kec. Pemalang	172.457
443	SD N 03 PEGUNDAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
444	SD N 03 PENAKIR	Negeri	Kec. Pulosari	-
445	SD N 03 PENDOWO	Negeri	Kec. Bodeh	10.077
446	SD N 03 PENER	Negeri	Kec. Taman	-

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
447	SD N 03 PENGGARIT	Negeri	Kec. Taman	1.400
448	SD N 03 PESANTREN	Negeri	Kec. Ulujami	-
449	SD N 03 PESUCEN	Negeri	Kec. Petarukan	-
450	SD N 03 PETANJUNGAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
451	SD N 03 PETARUKAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
452	SD N 03 PLAKARAN	Negeri	Kec. Moga	-
453	SD N 03 PULOSARI	Negeri	Kec. Pulosari	592.510
454	SD N 03 PURWOHARJO	Negeri	Kec. Comal	48.477
455	SD N 03 PURWOSARI	Negeri	Kec. Comal	10.000
456	SD N 03 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
457	SD N 03 ROWOSARI	Negeri	Kec. Ulujami	-
458	SD N 03 SAMONG	Negeri	Kec. Ulujami	-
459	SD N 03 SARADAN	Negeri	Kec. Pemalang	2.515
460	SD N 03 SARWODADI	Negeri	Kec. Comal	25.000
461	SD N 03 SEMINGKIR	Negeri	Kec. Randudongkal	-
462	SD N 03 SERANG	Negeri	Kec. Petarukan	-
463	SD N 03 SEWAKA	Negeri	Kec. Pemalang	11.259
464	SD N 03 SIDOKARE	Negeri	Kec. Ampelgading	8.319
465	SD N 03 SIDOREJO	Negeri	Kec. Comal	83.600
466	SD N 03 SIKASUR	Negeri	Kec. Belik	-
467	SD N 03 SIMA	Negeri	Kec. Moga	30.000
468	SD N 03 SIMPUR	Negeri	Kec. Belik	10.508
469	SD N 03 SIREMENG	Negeri	Kec. Pulosari	-
470	SD N 03 SOKAWANGI	Negeri	Kec. Taman	45.000
471	SD N 03 SUKOREJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
472	SD N 03 SUNGAPAN	Negeri	Kec. Pemalang	90.529
473	SD N 03 SURAJAYA	Negeri	Kec. Pemalang	57.779
474	SD N 03 SURU	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
475	SD N 03 SUSUKAN	Negeri	Kec. Comal	144
476	SD N 03 TAMAN	Negeri	Kec. Taman	-
477	SD N 03 TANAHBAYA	Negeri	Kec. Randudongkal	-
478	SD N 03 TANJUNGSARI	Negeri	Kec. Pemalang	51.811
479	SD N 03 TASIKREJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
480	SD N 03 TEGALMLATI	Negeri	Kec. Petarukan	-
481	SD N 03 TEGALSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	10.000



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
482	SD N 03 TLAGASANA	Negeri	Kec. Watukumpul	25.926
483	SD N 03 TUNDAGAN	Negeri	Kec. Watukumpul	4.198
484	SD N 03 UJUNGGEDE	Negeri	Kec. Ampelgading	66.734
485	SD N 03 WALANGSANGA	Negeri	Kec. Moga	-
486	SD N 03 WANAMULYA	Negeri	Kec. Pemalang	12.639
487	SD N 03 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	152
488	SD N 03 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	711
489	SD N 03 WATUKUMPUL	Negeri	Kec. Watukumpul	10.700
490	SD N 03 WIDODAREN	Negeri	Kec. Petarukan	-
491	SD N 03 WIDURI	Negeri	Kec. Pemalang	249.500
492	SD N 03 WONOGIRI	Negeri	Kec. Ampelgading	362.257
493	SD N 04 ASEMDOYONG	Negeri	Kec. Taman	13.071
494	SD N 04 BADAK	Negeri	Kec. Belik	-
495	SD N 04 BANJARAN	Negeri	Kec. Taman	96.344
496	SD N 04 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	56.176
497	SD N 04 BANYUMUDAL	Negeri	Kec. Moga	-
498	SD N 04 BEJI	Negeri	Kec. Taman	24.000
499	SD N 04 BELIK	Negeri	Kec. Belik	11.475
500	SD N 04 BELUK	Negeri	Kec. Belik	8.605
501	SD N 04 BOJONGBATA	Negeri	Kec. Pemalang	21.707
502	SD N 04 BOJONGNANGKA	Negeri	Kec. Pemalang	71.847
503	SD N 04 BONGAS	Negeri	Kec. Watukumpul	311
504	SD N 04 BULAKAN	Negeri	Kec. Belik	2.900
505	SD N 04 BULU	Negeri	Kec. Petarukan	-
506	SD N 04 CIBELOK	Negeri	Kec. Taman	-
507	SD N 04 CIBUYUR	Negeri	Kec. Warungpring	59.905
508	SD N 04 CIKADU	Negeri	Kec. Watukumpul	-
509	SD N 04 CIKENDUNG	Negeri	Kec. Pulosari	-
510	SD N 04 GAMBUHAN	Negeri	Kec. Pulosari	-
511	SD N 04 GENDOWANG	Negeri	Kec. Moga	50.000
512	SD N 04 GOMBONG	Negeri	Kec. Belik	-
513	SD N 04 GUNUNGJAYA	Negeri	Kec. Belik	-
514	SD N 04 JATINGARANG	Negeri	Kec. Bodeh	-
515	SD N 04 JEBED	Negeri	Kec. Taman	234.942
516	SD N 04 JOJOGAN	Negeri	Kec. Watukumpul	3.396

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
517	SD N 04 JRAKAH	Negeri	Kec. Taman	3.324
518	SD N 04 KABUNAN	Negeri	Kec. Taman	9.000
519	SD N 04 KALIGELANG	Negeri	Kec. Taman	18.545
520	SD N 04 KALIRANDU	Negeri	Kec. Petarukan	-
521	SD N 04 KARANGBRAI	Negeri	Kec. Bodeh	65.570
522	SD N 04 KARANGMONCOL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
523	SD N 04 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	164.150
524	SD N 04 KEJENE	Negeri	Kec. Randudongkal	-
525	SD N 04 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
526	SD N 04 KENDALSARI	Negeri	Kec. Petarukan	-
527	SD N 04 KLAREYAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
528	SD N 04 KREYO	Negeri	Kec. Randudongkal	-
529	SD N 04 KUTA	Negeri	Kec. Belik	-
530	SD N 04 KUTA BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	5.000
531	SD N 04 LONING	Negeri	Kec. Petarukan	-
532	SD N 04 MAJAKERTA	Negeri	Kec. Watukumpul	21
533	SD N 04 MAJALANGU	Negeri	Kec. Watukumpul	-
534	SD N 04 MANDIRAJA	Negeri	Kec. Moga	-
535	SD N 04 MENDELEM	Negeri	Kec. Belik	150.500
536	SD N 04 MERENG	Negeri	Kec. Warungpring	34.594
537	SD N 04 MOJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
538	SD N 04 MULYOHARJO	Negeri	Kec. Pemalang	49.430
539	SD N 04 PADURAKSA	Negeri	Kec. Pemalang	22.462
540	SD N 04 PEDAGUNG	Negeri	Kec. Bantarbolang	292
541	SD N 04 PEDURUNGAN	Negeri	Kec. Taman	26.678
542	SD N 04 PEGIRINGAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
543	SD N 04 PEGUNDAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
544	SD N 04 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	99.001
545	SD N 04 PESANTREN	Negeri	Kec. Ulujami	-
546	SD N 04 PESUCEN	Negeri	Kec. Petarukan	-
547	SD N 04 PETANJUNGAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
548	SD N 04 PETARUKAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
549	SD N 04 PURWOSARI	Negeri	Kec. Comal	458.900
550	SD N 04 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	2.182.853



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
551	SD N 04 ROWOSARI	Negeri	Kec. Ulujami	-
552	SD N 04 SEMINGKIR	Negeri	Kec. Randudongkal	-
553	SD N 04 SERANG	Negeri	Kec. Petarukan	-
554	SD N 04 SEWAKA	Negeri	Kec. Pemalang	29.256
555	SD N 04 SIKASUR	Negeri	Kec. Belik	10.753
556	SD N 04 SIMPUR	Negeri	Kec. Belik	-
557	SD N 04 SIREMENG	Negeri	Kec. Pulosari	-
558	SD N 04 SOKAWANGI	Negeri	Kec. Taman	10.000
559	SD N 04 SUKOREJO	Negeri	Kec. Ulujami	-
560	SD N 04 SURAJAYA	Negeri	Kec. Pemalang	5.062
561	SD N 04 SUSUKAN	Negeri	Kec. Comal	-
562	SD N 04 TAMAN	Negeri	Kec. Taman	78.385
563	SD N 04 TAMBAKREJO	Negeri	Kec. Pemalang	257.466
564	SD N 04 TANJUNGSARI	Negeri	Kec. Pemalang	26.200
565	SD N 04 TEGALMLATI	Negeri	Kec. Petarukan	-
566	SD N 04 TEGALSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	16.800
567	SD N 04 TEMUIRENG	Negeri	Kec. Petarukan	-
568	SD N 04 TLAGASANA	Negeri	Kec. Watukumpul	901.816
569	SD N 04 TUNDAGAN	Negeri	Kec. Watukumpul	1.169
570	SD N 04 UJUNGGEDE	Negeri	Kec. Ampelgading	23.137
571	SD N 04 WALANGSANGA	Negeri	Kec. Moga	-
572	SD N 04 WANARATA	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
573	SD N 04 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	178.655
574	SD N 04 WATUKUMPUL	Negeri	Kec. Watukumpul	37.188
575	SD N 04 WONOKROMO	Negeri	Kec. Comal	10.000
576	SD N 05 ASEMDOYONG	Negeri	Kec. Taman	41.000
577	SD N 05 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	10.920
578	SD N 05 BANYUMUDAL	Negeri	Kec. Moga	-
579	SD N 05 BEJI	Negeri	Kec. Taman	533.550
580	SD N 05 BELIK	Negeri	Kec. Belik	307
581	SD N 05 BOJONGBATA	Negeri	Kec. Pemalang	103.173
582	SD N 05 BOJONGNANGKA	Negeri	Kec. Pemalang	70.211
583	SD N 05 CIBELOK	Negeri	Kec. Taman	12.031
584	SD N 05 CIBUYUR	Negeri	Kec. Warungpring	246.395
585	SD N 05 CIKADU	Negeri	Kec. Watukumpul	-

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
586	SD N 05 GOMBONG	Negeri	Kec. Belik	1.239.753
587	SD N 05 GUNUNGJAYA	Negeri	Kec. Belik	2.600.000
588	SD N 05 JEBED	Negeri	Kec. Taman	282.085
589	SD N 05 KABUNAN	Negeri	Kec. Taman	29.960
590	SD N 05 KARANGMONCOL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
591	SD N 05 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	27.237
592	SD N 05 KEJENE	Negeri	Kec. Randudongkal	-
593	SD N 05 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
594	SD N 05 KENDALSARI	Negeri	Kec. Petarukan	-
595	SD N 05 KLAREYAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
596	SD N 05 KUTA	Negeri	Kec. Belik	750.475
597	SD N 05 LONING	Negeri	Kec. Petarukan	-
598	SD N 05 MAJAKERTA	Negeri	Kec. Watukumpul	2.533
599	SD N 05 MENDELEM	Negeri	Kec. Belik	-
600	SD N 05 MERENG	Negeri	Kec. Warungpring	259
601	SD N 05 MOGA	Negeri	Kec. Moga	-
602	SD N 05 PAGERGUNUNG	Negeri	Kec. Ulujami	-
603	SD N 05 PEDAGUNG	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
604	SD N 05 PEDURUNGAN	Negeri	Kec. Taman	269.160
605	SD N 05 PEGIRINGAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	-
606	SD N 05 PEGUNDAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
607	SD N 05 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	34.981
608	SD N 05 PESANTREN	Negeri	Kec. Ulujami	-
609	SD N 05 PETARUKAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
610	SD N 05 PURWOHARJO	Negeri	Kec. Comal	4.330
611	SD N 05 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
612	SD N 05 SARWODADI	Negeri	Kec. Comal	-
613	SD N 05 SEMINGKIR	Negeri	Kec. Randudongkal	-
614	SD N 05 Sikasur	Negeri	Kec. Belik	93.508
615	SD N 05 SIMA	Negeri	Kec. Moga	-
616	SD N 05 TAMAN	Negeri	Kec. Taman	-
617	SD N 05 TEGALSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	60.420
618	SD N 05 TLAGASANA	Negeri	Kec. Watukumpul	-
619	SD N 05 WANARATA	Negeri	Kec. Bantarbolang	2.400
620	SD N 05 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	33.250



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
621	SD N 05 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	131.000
622	SD N 05 WIDODAREN	Negeri	Kec. Petarukan	-
623	SD N 06 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	10.000
624	SD N 06 BEJI	Negeri	Kec. Taman	2.000
625	SD N 06 BOJONGNANGKA	Negeri	Kec. Pemalang	480
626	SD N 06 GOMBONG	Negeri	Kec. Belik	346.523
627	SD N 06 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	105.750
628	SD N 06 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
629	SD N 06 KENDALSARI	Negeri	Kec. Petarukan	-
630	SD N 06 LONING	Negeri	Kec. Petarukan	-
631	SD N 06 MENDELEM	Negeri	Kec. Belik	-
632	SD N 06 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	15.338
633	SD N 06 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	100.129
634	SD N 06 PETARUKAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
635	SD N 06 PURWO HARJO	Negeri	Kec. Comal	-
636	SD N 06 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
637	SD N 06 SIKASUR	Negeri	Kec. Belik	29.710
638	SD N 06 SIMA	Negeri	Kec. Moga	150.000
639	SD N 06 TEGALSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	31.428
640	SD N 06 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	10.393
641	SD N 07 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	46.000
642	SD N 07 BANYUMUDAL	Negeri	Kec. Moga	-
643	SD N 07 JEBED	Negeri	Kec. Taman	-
644	SD N 07 KABUNAN	Negeri	Kec. Taman	500
645	SD N 07 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	161.098
646	SD N 07 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
647	SD N 07 KLAREYAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
648	SD N 07 MENDELEM	Negeri	Kec. Belik	-
649	SD N 07 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	31.265
650	SD N 07 PURWO HARJO	Negeri	Kec. Comal	-
651	SD N 07 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
652	SD N 07 SIMA	Negeri	Kec. Moga	-
653	SD N 07 TEGALSARI	Negeri	Kec. Ampelgading	77.780
654	SD N 07 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	68.530

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
655	SD N 07 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	1.611
656	SD N 08 BANTARBOLANG	Negeri	Kec. Bantarbolang	968.000
657	SD N 08 BANYUMUDAL	Negeri	Kec. Moga	-
658	SD N 08 LONING	Negeri	Kec. Petarukan	-
659	SD N 08 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	39.300
660	SD N 08 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	2.491.275
661	SD N 08 PURWO HARJO	Negeri	Kec. Comal	179.884
662	SD N 08 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
663	SD N 08 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	783.148
664	SD N 08 WARUNGPRING	Negeri	Kec. Warungpring	5.848
665	SD N 09 KABUNAN	Negeri	Kec. Taman	65.100
666	SD N 09 KENDALDOYONG	Negeri	Kec. Petarukan	-
667	SD N 09 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	2.211
668	SD N 09 PETARUKAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
669	SD N 09 PURWO HARJO	Negeri	Kec. Comal	-
670	SD N 09 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
671	SD N 09 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	100.000
672	SD N 10 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	41.467
673	SD N 10 PETARUKAN	Negeri	Kec. Petarukan	-
674	SD N 10 RANDUDONGKAL	Negeri	Kec. Randudongkal	-
675	SD N 10 WANAREJAN	Negeri	Kec. Taman	72.952
676	SD N 11 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	387
677	SD N 11 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	19.832
678	SD N 11 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	9.232
679	SD N 12 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	780.817
680	SD N 12 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	42.937
681	SD N 13 KEBONDALEM	Negeri	Kec. Pemalang	99.830
682	SD N 13 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	87.938
683	SD N 14 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	9.909
684	SD N 14 PELUTAN	Negeri	Kec. Pemalang	39.076
685	SD N 15 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	6.205
686	SD N 16 MULYO HARJO	Negeri	Kec. Pemalang	287.663
687	SD N AMBOKULON	Negeri	Kec. Comal	13.720
688	SD N BABAKAN	Negeri	Kec. Bodeh	374.125



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Sekolah	Status	Kecamatan	SALDO AKHIR
689	SD N DATAR	Negeri	Kec. Warungpring	2.108
690	SD N GONGSENG	Negeri	Kec. Randudongkal	-
691	SD N GUNUNGBATU	Negeri	Kec. Bodeh	110.100
692	SD N JRAGANAN	Negeri	Kec. Bodeh	-
693	SD N JURANGMANGU	Negeri	Kec. Pulosari	-
694	SD N KALISALEH	Negeri	Kec. Belik	-
695	SD N KARANGDAWA	Negeri	Kec. Warungpring	551.833
696	SD N KEBANDARAN	Negeri	Kec. Bodeh	34.219
697	SD N KEBANDUNGAN	Negeri	Kec. Bodeh	131.031
698	SD N KEBANGGAN	Negeri	Kec. Moga	-
699	SD N KECEPIT	Negeri	Kec. Randudongkal	-
700	SD N KWASEN	Negeri	Kec. Bodeh	154.995
701	SD N LENGGERONG	Negeri	Kec. Bantarbolang	552
702	SD N LOWA	Negeri	Kec. Comal	20.606
703	SD N PABUARAN	Negeri	Kec. Bantarbolang	89.200
704	SD N PARUNG GALIH	Negeri	Kec. Bodeh	-
705	SD N Pepedan	Negeri	Kec. Moga	10.000
706	SD N PURANA	Negeri	Kec. Bantarbolang	96.518
707	SD N SAMBENG	Negeri	Kec. Bantarbolang	51.032
708	SD N SARWODADI	Negeri	Kec. Bantarbolang	7.885
	TOTAL			51.541.433



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

LAMPIRAN
SALDO KAS DANA BOS SMP NEGERI
TAHUN 2022

NO	Sekolah	Status	SALDO
1	SMP N 1 TLAGASANA SATU ATAP	Negeri	800.000
2	SMP N 2 PULOSARI	Negeri	85.058
3	SMP N 3 PULOSARI	Negeri	-
4	SMP NEGERI 1 AMPELGADING	Negeri	300.000
5	SMP NEGERI 1 BANTARBOLANG	Negeri	2.911.998
6	SMP NEGERI 1 BELIK	Negeri	52.552
7	SMP NEGERI 1 BODEH	Negeri	-
8	SMP NEGERI 1 COMAL	Negeri	186.167
9	SMP NEGERI 1 MOGA	Negeri	145.431
10	SMP NEGERI 1 PEMALANG	Negeri	10.000
11	SMP NEGERI 1 PETARUKAN	Negeri	1.426.500
12	SMP NEGERI 1 PULOSARI	Negeri	-
13	SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL	Negeri	6.880.719
14	SMP NEGERI 1 TAMAN	Negeri	-
15	SMP NEGERI 1 ULUJAMI	Negeri	717.200
16	SMP NEGERI 1 WATUKUMPUL	Negeri	160.105
17	SMP NEGERI 2 AMPELGADING	Negeri	686.612
18	SMP NEGERI 2 BANTARBOLANG	Negeri	31.015
19	SMP NEGERI 2 BELIK	Negeri	317.437
20	SMP NEGERI 2 BODEH	Negeri	3.367.500
21	SMP NEGERI 2 COMAL	Negeri	159.368
22	SMP NEGERI 2 MOGA	Negeri	1.547.000
23	SMP NEGERI 2 PEMALANG	Negeri	-
24	SMP NEGERI 2 PETARUKAN	Negeri	82.432
25	SMP NEGERI 2 RANDUDONGKAL	Negeri	91.950
26	SMP NEGERI 2 TAMAN	Negeri	92.120
27	SMP NEGERI 2 ULUJAMI	Negeri	82.757
28	SMP NEGERI 2 WARUNGPRING	Negeri	779.697
29	SMP NEGERI 2 WATUKUMPUL	Negeri	51.926
30	SMP NEGERI 3 AMPELGADING	Negeri	865.921
31	SMP NEGERI 3 BANTARBOLANG	Negeri	96.176
32	SMP NEGERI 3 BELIK	Negeri	672.115
33	SMP NEGERI 3 BODEH	Negeri	53.050
34	SMP NEGERI 3 COMAL	Negeri	1.676.170
35	SMP NEGERI 3 MOGA	Negeri	1.960.930

NO	Sekolah	Status	SALDO
36	SMP NEGERI 3 PEMALANG	Negeri	16.180
37	SMP NEGERI 3 PETARUKAN	Negeri	1.474.885
38	SMP NEGERI 3 RANDUDONGKAL	Negeri	115.782
39	SMP NEGERI 3 TAMAN	Negeri	36
40	SMP NEGERI 3 ULUJAMI	Negeri	49.473
41	SMP NEGERI 3 WATUKUMPUL	Negeri	11.820
42	SMP NEGERI 4 AMPELGADING	Negeri	456.732
43	SMP NEGERI 4 BANTARBOLANG	Negeri	43.522
44	SMP NEGERI 4 BELIK	Negeri	70.000
45	SMP NEGERI 4 BODEH	Negeri	59.034
46	SMP NEGERI 4 COMAL	Negeri	178.265
47	SMP NEGERI 4 PEMALANG	Negeri	215
48	SMP NEGERI 4 PETARUKAN	Negeri	800
49	SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL	Negeri	-
50	SMP NEGERI 4 TAMAN	Negeri	2.150.488
51	SMP NEGERI 4 ULUJAMI	Negeri	10.219
52	SMP NEGERI 5 COMAL	Negeri	3.684.414
53	SMP NEGERI 5 PEMALANG	Negeri	10.591
54	SMP NEGERI 5 PETARUKAN	Negeri	2.546.142
55	SMP NEGERI 5 RANDUDONGKAL	Negeri	116.139
56	SMP NEGERI 5 TAMAN	Negeri	1.601.500
57	SMP NEGERI 5 ULUJAMI	Negeri	19.120
58	SMP NEGERI 6 PEMALANG	Negeri	150.272
59	SMP NEGERI 6 PETARUKAN	Negeri	442.000
60	SMP NEGERI 6 TAMAN	Negeri	2.316
61	SMP NEGERI 7 PEMALANG	Negeri	81.135
62	CALK	Negeri	204.014
63	SMP NEGERI GONGSENG SATU ATAP	Negeri	321.080
64	SMP NEGERI PABUARAN SATU ATAP	Negeri	11.700
65	SMP SATAP GUNUNGJAYA	Negeri	3.474
66	SMP SATAP PARUNGGAJIH	Negeri	-
	TOTAL		40.121.254